



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RANCANGAN AKHIR

RPJMD

2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	3
	1.4 Maksud dan Tujuan	7
	1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH	9
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	9
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	9
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	37
	2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	59
	2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	69
	2.2 Gambaran Keuangan Daerah	88
	2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	88
	2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	110
	2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	122
	2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	122
	2.3.2 Isu Strategis	134
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	182
	3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	182
	3.1.1 Visi	182
	3.1.2 Misi	183
	3.1.3 Tujuan dan Sasaran	184
	3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	191
	3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	191
	3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	239
	3.2.3 Keterkaitan Program Strategis Nasional dengan Dukungan Program Provinsi Kalimantan Timur	255
	3.2.4 Program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029	259
	3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	268
	3.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Zona Utara	270
	3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Zona Selatan	273
	3.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Zona Timur	275
	3.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Transisi IKN	279
	3.3.5 Distribusi Program Prioritas Per Kecamatan Berdasarkan Arah Kebijakan Kewilayahan	279

BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	284
	4.1 Program Perangkat Daerah	284
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	355
	4.2.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan	355
	4.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	357
	4.2.3 Indikator Kinerja Daerah	359
 BAB V	 PENUTUP	 382
	5.1. Pedoman Transisi	382
	5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD	383
	5.3. Kaidah Pelaksanaan	383

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Gambar 2.2	Peta Topografi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	13
Gambar 2.3	Peta Formasi Geologi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	14
Gambar 2.4	Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	15
Gambar 2.5	Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	17
Gambar 2.6	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	18
Gambar 2.7	Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045	19
Gambar 2.8	Peta Lahan Kritis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	20
Gambar 2.9	Peta Rencana Pola Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	22
Gambar 2.10	Desa Kategori Rawan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.11	Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	34
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	35
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020–2024	39
Gambar 2.14	Garis Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024	40
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020- 2024	40
Gambar 2.16	Persentase Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020–2024	41
Gambar 2.17	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020–2024	42
Gambar 2.18	PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (Dalam Juta Rupiah)	44
Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020-2024	45
Gambar 2.20	Indeks Gini di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020–2024	46

Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020 – 2024	47
Gambar 2.22	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 – 2024	49
Gambar 2.23	Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	49
Gambar 2.24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2023	53
Gambar 2.25	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020-2023	58
Gambar 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	61
Gambar 2.27	Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	69
Gambar 2.28	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	93
Gambar 2.29	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	94
Gambar 2.30	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	95
Gambar 2.31	Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	96
Gambar 2.32	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	99
Gambar 2.33	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	100
Gambar 2.34	Laju Pertumbuhan Ekonomi Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	123
Gambar 2.35	Tingkat Pengangguran Terbuka Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	128
Gambar 2.36	Tingkat Kemiskinan Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	129
Gambar 2.37	Indeks Gini Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	129
Gambar 2.38	Peta <i>Highlights</i> Indikasi Kebijakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	148
Gambar 3.1	Tema Pembangunan Per Tahun RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029	192
Gambar 3.2	Peta Zonasi Tematik Pembangunan Wilayah Kutai Kartanegara	269
Gambar 3.3	Proyeksi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Target Kontribusi Zona Utara	271
Gambar 3.4	Proyeksi PDRB Sektor Penyedia Akomodasi Mamin dan Target Kontribusi Zona Utara	271
Gambar 3.5	Dampak Ekonomi dari Ketenagakerjaan dan Kemiskinan	275
Gambar 3.6	Nilai Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Sebaran Program Prioritas Strategis dalam Pendekatan Wilayah	277

Gambar 3.7	Sebaran Program Strategis dalam Pendekatan Wilayah	283
Gambar 5.1	Alur Monitoring dan Evaluasi Pengendalian	385

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Area, Persentase Luas, dan Jumlah Pulau di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024	10
Tabel 2.2	Luas Area untuk Tiap Kelas Lereng di Kabupaten Kutai Kartanegara	12
Tabel 2.3	Luas Formasi Geologi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	14
Tabel 2.4	DAS dan Sub DAS yang Ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	15
Tabel 2.5	Cekungan Air Tanah yang Ada di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	16
Tabel 2.6	Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	19
Tabel 2.7	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	21
Tabel 2.8	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024	22
Tabel 2.9	Potensi Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	23
Tabel 2.10	Potensi PLTS terapung Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	23
Tabel 2.11	Potensi Tenaga Angin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	24
Tabel 2.12	Data Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.13	Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.14	Indikator Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 - 2024	32
Tabel 2.16	Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.17	Akses Sanitasi Layak dan Aman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	33
Tabel 2.18	Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	34
Tabel 2.19	Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.20	Indikator Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	36
Tabel 2.21	Kependudukan Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	36
Tabel 2.22	Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030	37

Tabel 2.23	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 – 2024	38
Tabel 2.24	Jumlah Penduduk Desil I dan Penduduk Miskin hasil verifikasi dan validasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	42
Tabel 2.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024	43
Tabel 2.26	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	46
Tabel 2.28	Komponen Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 2.29	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 – 2024	50
Tabel 2.30	Prevalensi Status Gizi Balita Stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	50
Tabel 2.31	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	51
Tabel 2.32	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	51
Tabel 2.33	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	52
Tabel 2.34	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	53
Tabel 2.35	Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi (%) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	54
Tabel 2.36	Pembangunan Perlindungan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	55
Tabel 2.37	Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2022 – 2023	55
Tabel 2.38	Dimensi Pengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2023	56
Tabel 2.39	Jumlah Kejadian Konflik yang Diselesaikan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	56
Tabel 2.40	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024	56
Tabel 2.41	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	57

Tabel 2.42	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	58
Tabel 2.43	Angka Ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	59
Tabel 2.44	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	60
Tabel 2.45	Return on Asset BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	60
Tabel 2.46	Kategori Penilaian Indeks Inovasi Daerah	61
Tabel 2.47	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	62
Tabel 2.48	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2020-2024 (%)	62
Tabel 2.49	Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	63
Tabel 2.50	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	64
Tabel 2.51	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024	64
Tabel 2.52	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	65
Tabel 2.53	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024	65
Tabel 2.54	Pembangunan Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	66
Tabel 2.55	Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	67
Tabel 2.56	Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	67
Tabel 2.57	Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	68
Tabel 2.58	Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi	69
Tabel 2.59	Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	70
Tabel 2.60	Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik	70
Tabel 2.61	Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024	71
Tabel 2.62	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	71
Tabel 2.63	Data LKE RB Kota Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	72
Tabel 2.64	Crime Rate Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	72
Tabel 2.65	Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	73

Tabel 2.66	Data Indeks Daya Saing Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	73
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	74
Tabel 2.68	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	85
Tabel 2.69	Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Rp Juta)	90
Tabel 2.70	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Rp Juta)	92
Tabel 2.71	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Rp Juta)	98
Tabel 2.72	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Rp Juta)	101
Tabel 2.73	Perkembangan Rincian SILPA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)	102
Tabel 2.74	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 - 2024	105
Tabel 2.75	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)	107
Tabel 2.76	Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Kapasitas Fiskal di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2024	109
Tabel 2.77	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021	109
Tabel 2.78	Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022	110
Tabel 2.79	Proyeksi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025 - 2030	112
Tabel 2.80	Proyeksi Kapasitas Rill Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)	120
Tabel 2.81	Permasalahan Tiap Bidang Urusan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025	131
Tabel 2.82	Highlight Intervensi Nasional untuk Kabupaten Kutai Kartanegara	143
Tabel 2.83	Capaian dan Target Indikator Makro Kabupaten Kutai Kartanegara	147
Tabel 2.84	Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara	176
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025 – 2030	185
Tabel 3.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029	189
Tabel 3.3	Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029	193
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029	198

Tabel 3.5	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	234
Tabel 3.6	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029	240
Tabel 3.7	Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional	255
Tabel 3.8	Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara	257
Tabel 3.9	Keterkaitan Program Unggulan KDH Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Prioritas RPJMD	259
Tabel 3.10	Keterkaitan 17 Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	262
Tabel 3.11	Pemetaan Arah Kebijakan Berdasarkan Zona	269
Tabel 3.12	Pemetaan Potensi Zona Utara	272
Tabel 3.13	Pemetaan Potensi Zona Selatan	275
Tabel 3.14	Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	277
Tabel 3.15	Pemetaan Potensi Zona Timur	278
Tabel 3.16	Distribusi Program Strategis Per Kecamatan	280
Tabel 4.1	Program, Target dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026-2030	285
Tabel 4.2.	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030	356
Tabel 4.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030	358
Tabel 4.4	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030	360

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunikan yang mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, serta kekayaan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang memiliki catatan sejarah yang panjang sebagai pusat Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai warisan sejarah yang mendalam. Salah satunya tercermin dalam tradisi adat dan budaya Erau, festival budaya yang telah menjadi daya tarik wisata internasional.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga kaya akan keanekaragaman suku, mulai dari Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, dan sebagainya, yang semuanya hidup berdampingan dengan harmonis, menciptakan mozaik budaya yang eksotis. Letak Kabupaten Kutai Kartanegara juga relatif dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sehingga menambah nilai strategis sebagai wilayah bersejarah, sekaligus menjadi tumpuan masa depan Indonesia.

Kabupaten Kutai Kartanegara terbukti memiliki potensi besar di berbagai sektor, baik sumber daya alam, pariwisata, maupun ekonomi kreatif. Potensi tambang batu bara, minyak, dan gas alam menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Di sisi lain, kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk kawasan konservasi sebagai “jantungnya Kalimantan” (*Heart of Borneo*), serta menawarkan begitu banyak daya tarik ekowisata yang menjanjikan.

Pertanian, perikanan, dan perkebunan juga menjadi sektor unggulan, dengan hasil utama berupa padi, ikan, dan kelapa sawit. Didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang, Kabupaten Kutai Kartanegara berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Timur. Kombinasi potensi alam, sejarah, dan lokasi strategis menjadikan kabupaten ini menjadi salah satu wilayah dengan prospek yang cerah di masa depan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan untuk menetapkan arah pembangunan, demi mencapai kondisi yang lebih baik. Sebagai elemen penting pembangunan, perencanaan memberikan arah yang jelas dalam perkembangan daerah, sekaligus berfungsi sebagai standar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan pembangunan akan sulit dicapai.

Perencanaan yang efektif harus berbasis pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, serta akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi serta potensi lokal, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Pada periode 2025-2029, pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi ini mendukung tema pembangunan sebagaimana tertuang dalam tahap pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, yaitu: *Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara*. Untuk mewujudkan dua cita-cita luhur itu, telah disusun misi strategis yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan ekonomi berbasis sektor non ekstraktif, tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan pendidikan berbasis karakter, serta pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Sinergi antara visi, tema, dan misi itu bertujuan untuk membangun fondasi pembangunan yang kokoh dan berkesinambungan. Hal ini untuk menjamin keselarasan dengan arah pembangunan regional dan nasional, sehingga Kutai Kartanegara mampu menjawab tantangan pembangunan masa kini, sekaligus mempersiapkan kesinambungan pembangunan untuk periode mendatang.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman utama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD akan menjadi landasan bagi OPD untuk merumuskan program, kegiatan, dan target kinerja yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

Dengan berlandaskan RPJMD sebagai acuan, maka diharapkan setiap OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara akan mampu berkontribusi dengan optimal dalam mencapai prioritas pembangunan, memastikan sinergi antar sektor, dan mendukung keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema transformasi yang diusung.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

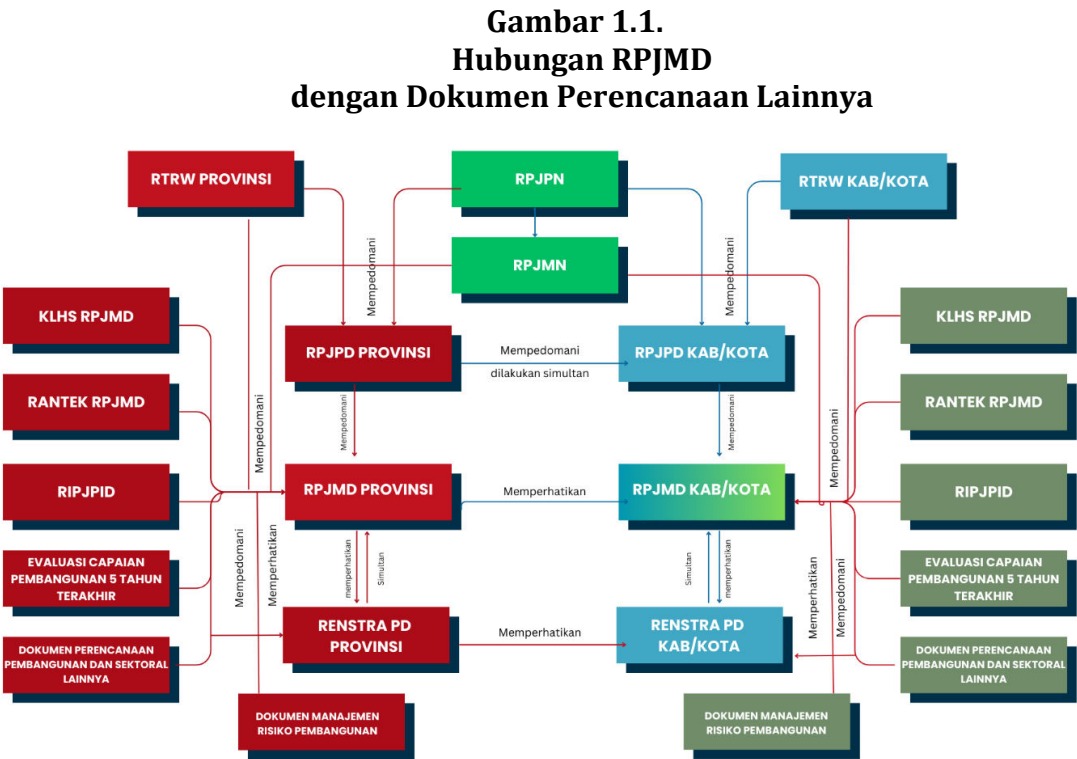
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856);
3. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 No. 194);
4. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029*; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029*; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 No. 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 7 Tahun 2023 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042* (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 No. 163);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 16 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045* (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lain, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dokumen-dokumen terkait tersebut adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Materi dasar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi, dan program Kepala Daerah. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sinergitas dan hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Sumber: Inmendagri No.2 Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain dapat dijabarkan sebagai berikut.

(1). Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam dokumen RPJMN, telah ditegaskan bahwa wilayah Kalimantan diarahkan menjadi "Superhub Ekonomi Nusantara". Dengan demikian, Kalimantan telah ditempatkan sebagai pusat kegiatan ekonomi strategis untuk mendukung pertumbuhan nasional.

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan di wilayah Kalimantan, Kabupaten Kutai Kartanegara telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas

kawasan *Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara*. Dalam mendukung arahan strategis nasional tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara berperan strategis yang diwujudkan melalui berbagai intervensi pembangunan prioritas.

Fokus utama diarahkan pada pengembangan klaster ekonomi yang didukung oleh infrastruktur berkualitas. Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, pengembangan konektivitas infrastruktur logistik, serta pembangunan pelabuhan laut, menjadi langkah awal untuk memperkuat mobilitas barang dan jasa. Pengembangan moda transportasi berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari strategi. Hal ini sejalan dengan upaya mendorong mobilitas yang ramah lingkungan dan efisien.

Di sektor pertanian, Kabupaten Kutai Kartanegara berfokus pada pengembangan kawasan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan regional. Rantai pasok industri juga diperkuat melalui jaminan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, guna mendukung industri padat karya dan hilirisasi, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Lebih jauh lagi, peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan inovasi berbasis riset menjadi perhatian utama untuk mendorong akselerasi pembangunan.

“Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur” dan “Kawasan Agroekowisata Perdesaan” dikembangkan dengan strategis untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, menciptakan peluang kerja, dan memperkuat basis ekonomi lokal. Dengan demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat berperan penting sebagai motor penggerak bagi pembangunan Kalimantan, sekaligus memperkuat posisinya dalam mendukung eksistensi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

(2). Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Hal ini muncul karena penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 telah mengacu pada arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dengan *mendorong pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan pariwisata, yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi.*

Keterpaduan ini bertujuan untuk menjamin keefektifan dan efisiensi pembangunan daerah. Dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, indikator kinerja, pendanaan, monitoring, evaluasi, dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

(3). Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan. RPJMD ini merupakan penjabaran dari periode pertama RPJPD yang memiliki prioritas pembangunan: *“Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara”*, dimana fokus pembangunan adalah pada aspek dan komponen yang memiliki dampak dan penentu keberhasilan pembangunan pada periode berikutnya.

Upaya memperkuat fondasi transformasi, dilakukan dengan cara menyasar aspek transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang ditopang oleh landasan transformasi berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Secara lebih konkret, berbagai program pemenuhan kebutuhan dasar (fasilitas pelayanan, infrastruktur dasar, sumber daya manusia yang berkualitas, perlindungan sosial, dan lain

sebagainya), harus menjadi prioritas.

Pada periode pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, berbagai terobosan inovatif mulai diimplementasikan, misalnya diversifikasi ekonomi nonekstraktif, implementasi *smart government*, sinkronisasi perencanaan pembangunan, dan sebagainya, sehingga akan dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan rencana pembangunan pada periode berikutnya.

(4). Hubungan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan strategis dengan dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042, terutama pada arah pembangunan wilayah dan pemanfaatan ruang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

RTRW berfungsi sebagai kerangka spasial jangka panjang, yang memberikan arahan lokasi dan distribusi kegiatan pembangunan. Sedangkan RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, yang menguraikan program dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD wajib mengacu pada struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pembangunan tidak hanya sebatas efektif secara sektoral, tetapi juga sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah.

Keselarasan antara RPJMD dan RTRW tercermin melalui pengintegrasian tujuan pembangunan daerah dengan kebijakan penataan ruang. Misalnya pengembangan sistem pusat kegiatan yang terintegrasi, penguatan infrastruktur wilayah, dan optimalisasi sektor unggulan seperti industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Dalam RPJMD, *prioritas pembangunan akan diarahkan untuk mendukung fungsi Kutai Kartanegara sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara*, sejalan dengan visi RTRW yang juga *menempatkan Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga yang tangguh dan berwawasan lingkungan*.

Program-program pembangunan yang dirancang dalam RPJMD juga harus memperhatikan zonasi ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, baik pada kawasan lindung maupun budidaya, untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

(5). Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan, serta indikasi program, kegiatan dan subkegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara.

(6). Hubungan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dilaksanakan melalui dokumen RKPD Tahun 2026-2030. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan setiap tahun dalam RKPD.

Perangkat Daerah menyusun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD,

RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

(7). Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tidak boleh mengesampingkan pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini karena KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa RPJMD Tahun 2025–2029 telah disusun secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Keselarasan RPJMD dengan KLHS ditunjukkan melalui integrasi isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam KLHS ke dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Selain itu, beberapa rekomendasi kebijakan, sasaran dan program KLHS dapat menjadi rujukan dan arahan kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RPJMD.

(8). Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID)

RPJMD memiliki keterkaitan strategis dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID) sebagai upaya mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan agenda penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RIPJ-PID memetakan arah dan tahapan pengembangan Iptek secara sistematis dalam jangka panjang, yang mencakup aspek kelembagaan, SDM, infrastruktur, dan ekosistem inovasi daerah. Dalam konteks ini, RPJMD berfungsi sebagai dokumen pelaksana jangka menengah yang menerjemahkan target-target RIPJ-PID ke dalam program dan kegiatan konkret yang dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah.

Sinkronisasi antara RPJMD dan RIPJ-PID sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Dengan mengintegrasikan RIPJ-PID ke dalam RPJMD, Pemerintah Daerah dapat memperkuat daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan sektor unggulan berbasis Iptek, meningkatkan akselerasi penyelesaian masalah strategis daerah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan di era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi.

(9). Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral

RPJMD memiliki hubungan fungsional dan substantif dengan dokumen perencanaan sektoral yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah, seperti Renstra OPD, sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dokumen perencanaan sektoral berfungsi untuk menerjemahkan visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD ke dalam strategi dan program spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi sektoral setiap perangkat daerah. Dengan demikian, keselarasan antara RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral menjadi krusial, agar implementasi pembangunan daerah berlangsung secara terkoordinasi, konsisten, dan terukur.

Hubungan tersebut juga menjamin bahwa alokasi sumber daya, indikator kinerja, dan target pembangunan di masing-masing sektor mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perencanaan sektoral yang berbasis pada RPJMD merupakan instrumen penting untuk memperkuat efektivitas tata kelola pembangunan, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, agar kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- (1). Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, juga sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029.
- (2). Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah, serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
- (3). Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 pada periode pertama tahun 2025-2029;
- (4). Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.
- (5). Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD di masing-masing perangkat daerah sampai dengan 2029, berdasarkan urusan dan kewenangan dalam tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (6). Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7). Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah.
- (8). Menetapkan indikator dan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun.
- (9). Mewujudkan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.
- (10). Memberikan fondasi yang kokoh bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Pada segmen ini disajikan tentang gambaran umum mengenai kondisi secara menyeluruh, yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum. Selain itu, bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah, permasalahan, dan isu strategis.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan pula tentang strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, serta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir berisi arahan transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, pedoman implementasi RPJMD 2025-2029 juga dijelaskan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

(1) Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu di antara sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peta Dasar Revisi RTRW Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042, luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 25.292,24 km² dan menempatkan Kutai Kartanegara sebagai kabupaten terluas ke-2 di Indonesia setelah Kutai Timur (31.051,71 km²).

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta di antara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan:

- Bagian Timur dengan Selat Makassar.
- Bagian Barat dengan Kabupaten Kutai Barat.
- Bagian Selatan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
- Bagian Utara dengan Kabupaten Malinau, Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Dengan adanya pemekaran wilayah dan terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara kini terdiri dari 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah: Muara Jawa, Sangasanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat belasan sungai yang tersebar di hampir semua kecamatan, dan merupakan prasarana angkutan utama di samping angkutan darat. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km.

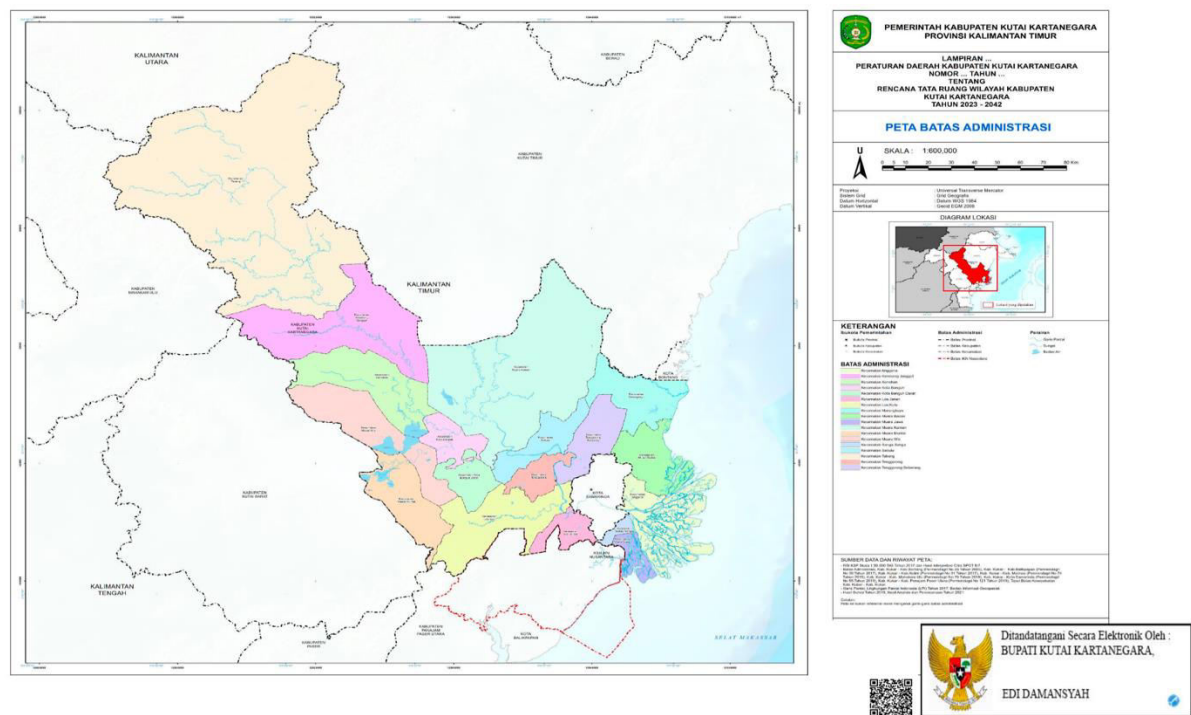
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, masing-masing zona Hulu, zona Tengah dan zona Pesisir dengan rincian sebagai berikut.

Zona Hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan, dan perairan sungai, dengan potensi ekonomi berupa pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, dan budi daya perairan sungai. Zona ini terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan: Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Muntai dan Muara Wis.

Zona Tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan, dan perairan sungai. Potensi ekonomi didominasi oleh pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa. Wilayah ini terdiri dari 6 (enam) kecamatan: Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan.

Zona Pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan, perairan laut, dan muara. Potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, wilayah ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan: Marangkayu, Muara Badak, Sangasanga, Anggana, dan Muara Jawa.

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042

Dari luas area Kutai Kartanegara sekitar 25.368,35 km², Kecamatan Tabang merupakan kecamatan terluas dibandingkan dengan kecamatan yang lain (8.111,61 km² atau 32,07 persen). Dari delapan belas kecamatan, Sangasanga merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (100,36 km² atau 0,40 persen). Kehadiran Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang *Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat*, maka secara resmi lahirlah Kecamatan Kota Bangun Darat. Di Kutai Kartanegara terdapat dua kecamatan yang di dalam wilayahnya terdapat pulau, yaitu Kecamatan Loa Kulu (Pulau Jembayan) dan Tenggarong (Pulau Kumala).

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Area, Persentase Luas,
dan Jumlah Pulau di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase thd Luas Kabupaten (%)	Jumlah Pulau
1	Anggana	Sungai Meriam	1.068,01	4,21	-
2	Kembang Janggut	Kembang Janggut	2.191,31	8,64	-
3	Kenohan	Kahala	1.316,30	5,19	-
4	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	441,74	1,74	-
5	Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	460,25	1,81	-
6	Loa Janan	Loa Janan Ulu	329,47	1,30	-
7	Loa Kulu	Loh Sumber	1.365,47	5,38	1
8	Marangkayu	Sebuntal	864,85	3,41	-
9	Muara Badak	Muara Badak Ulu	798,54	3,15	-
10	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	204,84	0,81	-
11	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	4.238,71	16,71	-
12	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	947,11	3,73	-
13	Muara Wis	Muara Wis	1.313,84	5,18	-
14	Sangasanga	Sangasanga Dalam	100,36	0,40	-

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase thd Luas Kabupaten (%)	Jumlah Pulau
15	Sebulu	Sebulu Ilir	600,19	2,37	-
16	Tabang	Sidomulyo	8.111,61	31,98	-
17	Tenggarong	Melayu	358,48	1,41	1
18	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	657,28	2,59	-
	Kutai Kartanegara	Tenggarong	25.368,35	100,00	2

Sumber: Peta Dasar Revisi RTRW 2023-2042 Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki belasan sungai besar yang tersebar di hampir semua kecamatan, yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga berperanan vital sebagai jalur transportasi utama, selain jaringan transportasi darat. Sungai Mahakam-sungai terpanjang di Kalimantan Timur-menjadi tulang punggung pergerakan orang dan barang, sekaligus sebagai urat nadi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di sepanjang alirannya.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa gugusan gunung dan pegunungan, yang terdapat di hampir semua kecamatan. Terdapat sekitar 10 gunung di kabupaten ini, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Lengkup (485 mdpl) yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Selain itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat 16 danau, dengan danau terluas adalah Danau Semayang (13.000 hektare).

Selain sumber daya alam, letak geografis kabupaten ini juga memiliki potensi strategis bagi perekonomian. Letaknya yang berada di tengah Provinsi Kalimantan Timur menjadikannya sebagai jalur penghubung utama antar kabupaten. Selain itu, wilayahnya juga mengelilingi Kota Samarinda, berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sangat berpengaruh pada tingkat akselerasi pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini.

(2) Topografi

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045, kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit, dengan kelerengan didominasi oleh kelas datar (0-8 persen) dengan luas mencapai 71,94 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

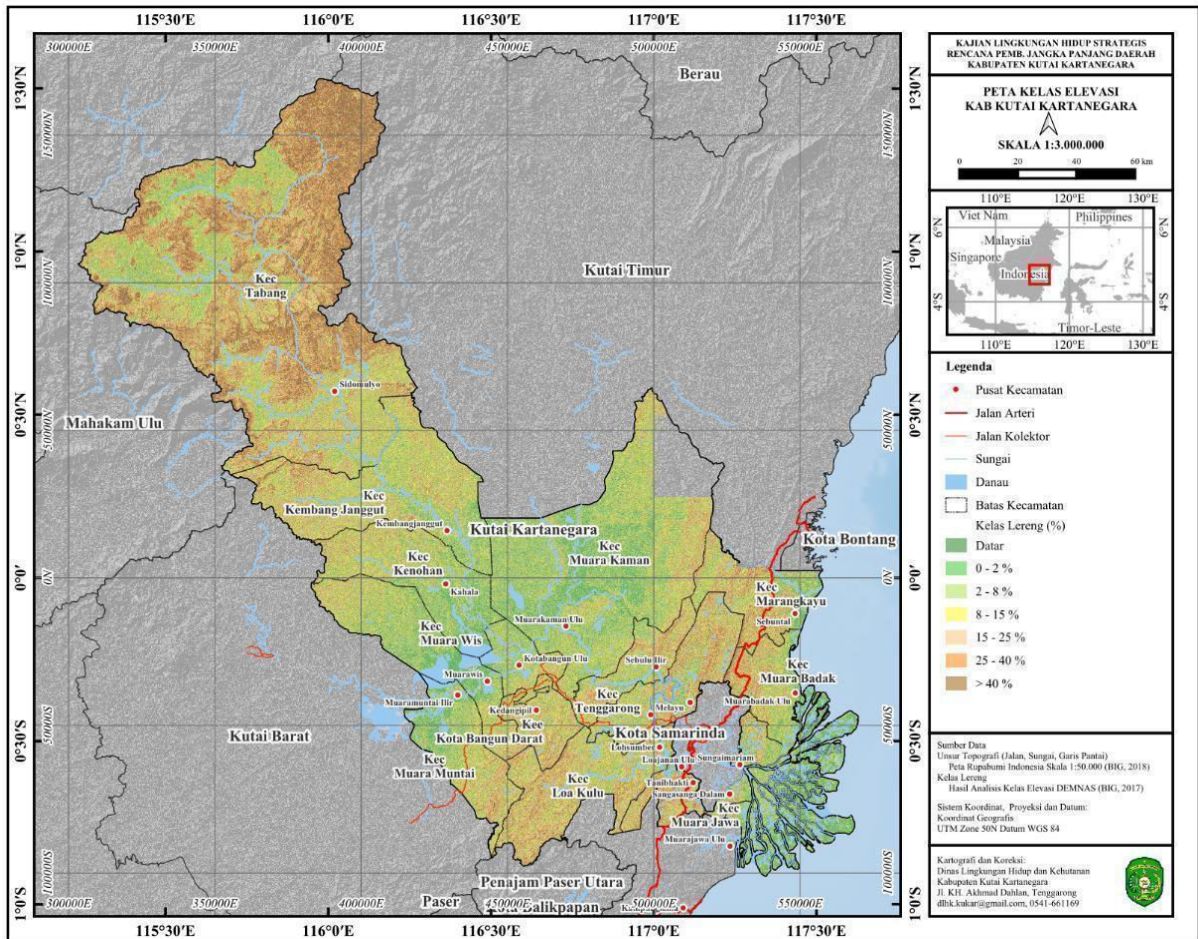
Daerah dengan kelas kemiringan datar terdapat di wilayah pantai dan DAS Sungai Mahakam. Di wilayah pedalaman dan perbatasan, pada umumnya juga merupakan wilayah kawasan pegunungan. Sementara itu, terdapat 0,10 persen atau seluas 2.637,64 hektare wilayah yang tidak memiliki data karena berbagai sebab, di antaranya tertutup awan pada saat satelit merekam citra di wilayah tersebut.

Tabel 2.2.
Luas Area untuk Tiap Kelas Lereng
di Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Luas Kelas Kelerengan (hektare)							Total (hektare)
		0-2 %	2-8 %	8-15 %	15-25 %	25-40 %	>40 %	No Data	
1	Anggana	104.889,49	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91	106.801,32
2	Kembang Janggut	189.325,81	19.084,84	8.498,01	2.077,58	0,00	0,00	68,61	219.130,52
3	Kenohan	128.555,94	2.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	131.629,81
4	Kota Bangun	43.936,51	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,71
5	Kota Bangun Darat	29.051,41	12.507,87	4.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.024,94
6	Loa Janan	31.813,71	1.079,89	20,79	0,00	0,00	0,00	19,19	32.946,96
7	Loa Kulu	82.738,30	27.262,24	26.225,82	206,88	0,00	0,00	25,61	136.546,90
8	Marangkayu	78.324,99	7.810,88	267,53	0,00	0,00	0,00	42,79	86.484,58
9	Muara Badak	72.601,40	1.117,73	32,41	0,00	0,00	0,00	99,12	79.853,94
10	Muara Jawa	20.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,41	20.484,22
11	Muara Kaman	417.299,62	6.226,63	5,48	0,00	0,00	0,00	54,45	423.870,60
12	Muara Muntai	77.306,37	6.740,42	10.539,60	44,41	0,00	0,00	45,90	94.711,27
13	Muara Wis	125.974,88	4.790,09	427,23	0,00	0,00	0,00	0,68	131.384,18
14	Sangasanga	9.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47	10.035,55
15	Sebulu	53.472,76	6.022,81	474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.019,35
16	Tabang	93.657,47	63.205,67	137.452,51	213.544,89	270.506,43	32.067,09	114,40	811.160,78
17	Tenggarong	35.747,51	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848,35
18	Tenggarong Seberang	57.289,20	8.230,28	155,55	0,00	0,00	0,00	2,45	65.728,13
	Kutai Kartanegara	1.652.357,72	167.251,41	188.530,29	215.873,76	270.506,43	32.067,09	2.637,64	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.2.
Peta Topografi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

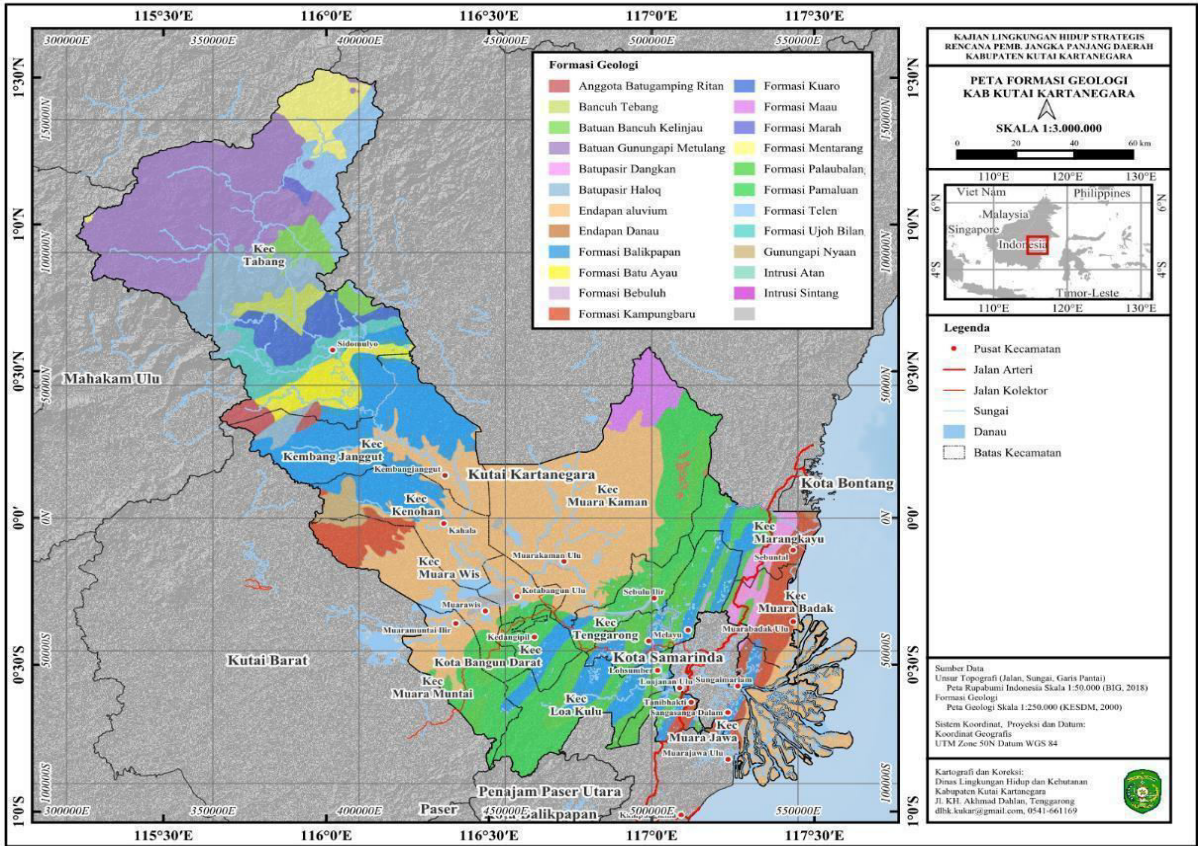
(3) Geologi

Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045, Formasi Geologi pembentuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi dengan formasi endapan aluvium seluas 644.389,23 hektare atau sekitar 25,48 persen dari luas wilayah total daerah ini. Endapan aluvium berwarna abu-abu gelap hingga hitam, terdiri atas lumpur organik, lempung, dan sedikit pasir halus, mengandung material organik dan akar tumbuh-tumbuhan. Endapan ini bersifat lepas, lembek, dan sangat lunak serta jenuh air. Sebagian besar formasi ini terdapat di Kecamatan Muara Kaman, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Wis, dan Kenohan.

Formasi lain yang juga mendominasi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah formasi Balikpapan (369.275,49 hektare) atau sekitar 14,60 persen dari luas wilayah total kabupaten ini. Formasi Balikpapan berumur *miosen* akhir bagian bawah, hingga *miosen* tengah bagian atas. Formasi ini terdiri dari siklus endapan laut dangkal, yang membentuk batuan sedimen klastik dan batuan sedimen biokimia.

Pada lingkungan pengendapan laut dangkal, saat persediaan sedimen di daratan diangkut menuju laut, maka perselingan pasir, lempung, dan lanau akan diendapkan. Endapan ini terkompaksi, diagenesa, sementasi, dan menjadi batuan sedimen klastik. Formasi ini banyak terdapat di kecamatan-kecamatan: Tabang, Kembang Janggut, Tenggarong, Loa Kulu, dan Kota Bangun Darat.

Gambar 2.3.
Peta Formasi Geologi
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.3.
Luas Formasi Geologi
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Formasi	Luas (hektare)	Formasi	Luas (hektare)
Anggota Batugamping Ritan	19.872,67	Formasi Kuaro	57.055,66
Bancuh Tebang	24.240,40	Formasi Maau	40.956,11
Batuan Bancuh Kelinjau	36.594,22	Formasi Marah	5.392,90
Batuan Gunungapi Metulang	315.697,51	Formasi Mentarang	58.699,68
Batupasir Dangkan	34.288,25	Formasi Palaubalang	178.325,79
Batupasir Haloq	103.657,83	Formasi Pamaluan	283.594,70
Endapan aluvium	644.389,23	Formasi Telen	59.195,70
Endapan Danau	5.196,56	Formasi Ujoh Bilang	54.713,19
Formasi Balikpapan	369.275,49	Gunungapi Nyaan	19.750,42
Formasi Batu Ayau	54.785,61	Intrusi Atan	846,98
Formasi Bebuluh	1.307,86	Intrusi Sintang	66,02
Formasi Kampungbaru	113.992,55	Jumlah Total	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

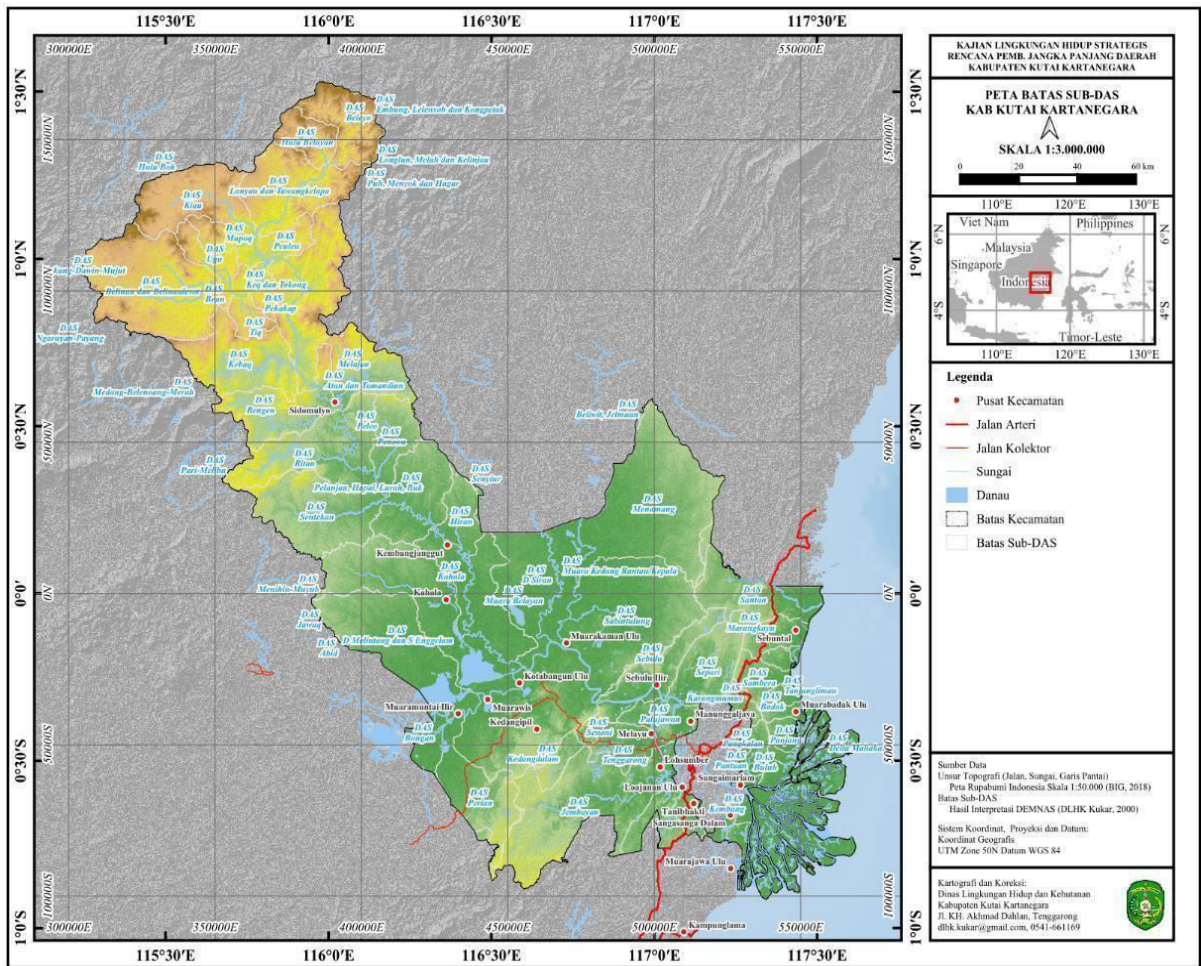
(4) Hidrologi

Kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa air permukaan maupun air tanah. Air permukaan terlihat sebagai aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS, mata air, dan cekungan air tanah (CAT). Sungai merupakan bagian penting dari DAS, sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan, terdapat 5 (lima) DAS di wilayah ini yang terbagi dalam 74 Sub-DAS, di mana 24 Sub-DAS di antaranya tidak termasuk dalam kelima DAS yang ada. Hal tersebut disebabkan karena Sub-DAS itu berada di perbatasan

wilayah, sehingga beberapa Sub-DAS masuk ke dalam DAS wilayah lain atau berada di garis pantai.

Gambar berikut menampilkan DAS dan Sub-DAS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel selanjutnya.

Gambar 2.4
Peta Jaringan Sungai
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.4
DAS dan Sub DAS
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

DAS dan Sub-DAS			DAS dan Sub-DAS		
Luas (hektare)			Luas (hektare)		
DAS Belayan			DAS Kelinjau-Telen		
1	Atan dan Tamanduiun	8.692,01	39	Beliwit, Jelmuang	1.003,44
2	Bean	3.683,08	40	Embung, Lelensoh dan Kongpetak	488,54
3	Belayo	46.989,30	41	Longlun, Melah dan Kelinjau	304,81
4	Belinau dan Belinau Lesot	125.472,43	42	Puh, Menyok dan Hagar	901,67
5	Bengen	48.946,23	43	Senyur	1.026,98
6	D Semayang dan S Lamin Telihan	120.825,19	Luas DAS Kelinjau-Telen		3.725,44
7	Hiran	26.550,05	DAS Mahakam		
8	Hulu Belayan	26.258,09	44	Bakung-Dawin-Mujut	330,13
9	Jumahang dan Melafang	44.453,88	45	Hulu Boh	92,42
10	Kahala	22.727,75	46	Karangmumus	9.302,56
11	Kebaq	73.365,93	47	Medang-Belenoang-Merah	239,49

DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)	DAS dan Sub-DAS		Luas (hektare)
12	Keq dan Tokong	8.096,98	48	Menihin-Muyub	1.322,60
13	Kiau	68.127,55	49	Ngaruyan-Payang	3,30
14	Lanyau dan Tawang Kelapa	31.090,04	50	Pari-Melibu	272,20
15	Lau dan Matelai	91.872,91	Luas DAS Mahakam		11.562,70
16	Melajan	48.780,62	Tidak Ada Data		
17	Muara Belayan	46.523,25	51	Badak	7.781,19
18	Mupoq	21.636,56	52	Buluh	6.402,37
19	Niruk, Tengkeran dan Tembutuk	18.981,09	53	Delta Mahakam	116.173,97
20	Pekakap	9.872,79	54	Haji Brahim	6.513,39
21	Pelanjau, Hapai, Lurah, Buk	42.673,96	55	Jembayan	133.740,87
22	Peleo	21.393,38	56	Kedang Dalam	13.358,76
23	Penoon	36.523,90	57	Kembang	4.299,32
24	Peuleu	17.848,58	58	Lacengek-Bosang	5.886,91
25	Ritan	66.291,18	59	Loa Haur	22.579,17
26	Sentekan	85.671,11	60	Mangkurawang	11.554,93
27	Tiq	13.715,75	61	Marangkayu	24.718,64
28	Ugu	17.854,62	62	Nilam	4.179,85
Luas DAS Belayan		1.194.918,21	63	Palujawan	15.023,07
DAS Bongan-Kedang Pahu			64	Pangkalan	11.216,10
29	Abid	148,60	65	Panjang	3.637,26
30	Bongan	24.326,25	66	Pantuan	4.376,74
31	D Melintang dan S Enggelam	104.067,81	67	Sambera	19.982,02
32	Jawaq	53,00	68	Sangasanga	5.736,23
33	Perian	52.725,06	69	Santan	54.148,09
34	Wis-Kedang Ipil	125.215,30	70	Sebulu	37.013,99
Luas DAS Bongan-Kedang Pahu		306.536,02	71	Senoni	15.053,76
DAS Kedang Rantau-Kedang Kepala			72	Separi	45.205,42
35	D Siran	63.861,87	73	Tanjung Limau	5.610,75
36	Menamang	156.285,58	74	Tenggarong	24.293,42
37	Muara Kedang Rantau/Kepala	32.896,41	75	Tidak Ada Data	21.251,38
38	Sabintulung	139.700,50	Luas DAS		619.737,60
Luas DAS Kedang Rantau-Kedang Kepala		392.744,36	Total Luas DAS		2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Sementara itu, terdapat 5 (lima) Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di 16 kecamatan. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah wilayah untuk cadangan penyimpanan air yang terletak di bawah tanah dalam waktu tertentu, yang memiliki batasan hidrogeologis sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dari 931.329,14 hektare luas CAT di Kutai Kartanegara, 64,57 persennya (601.333,16 hektar) merupakan CAT Sendawar, yang meliputi Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, dan Sebulu.

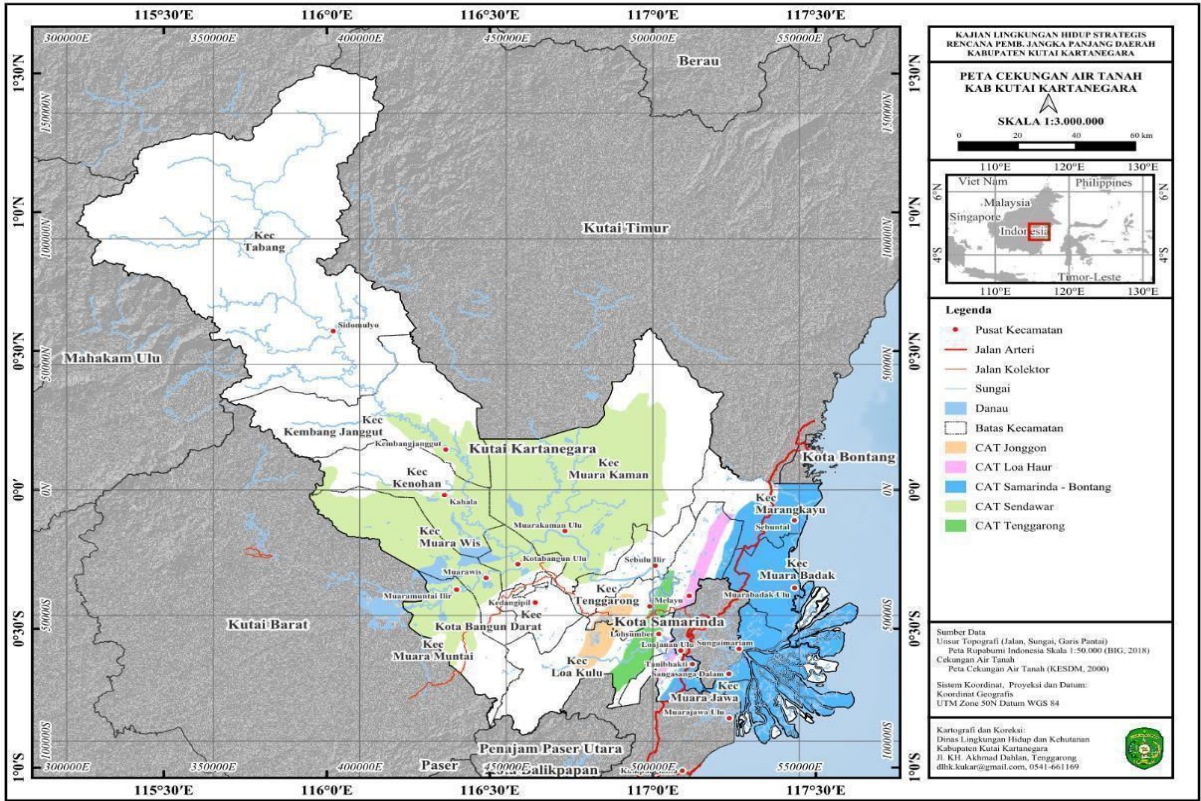
Tabel 2.5
Cekungan Air Tanah
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Kecamatan	Luas CAT (hektare)	Kecamatan	Luas CAT (hektare)
CAT Samarinda-Bontang		CAT Jonggon	
• Anggana	90.203,20	• Loa Kulu	16.017,38
• Loa Janan	11.943,13	• Tenggarong	10.998,23
• Marangkayu	46.682,55	Luas CAT Jonggon	
• Muara Badak	65.874,33	CAT Loa Haur	
• Muara Jawa	15.894,48	• Loa Janan	3.949,88
• Sangasanga	10.035,55	• Loa Kulu	459,17
• Tenggarong Seberang	7.817,67	• Marangkayu	469,33

Kecamatan	Luas CAT (hektare)	Kecamatan	Luas CAT (hektare)
Luas CAT Samarinda-Bontang	248.450,90	• Tenggarong Seberang	16.759,99
CAT Sendawar		Luas CAT Loa Haur	21.638,38
• Kembang Janggut	46.535,60	CAT Tenggarong	
• Kenohan	62.471,30	• Loa Janan	234,01
• Kota Bangun	34.785,01	• Loa Kulu	22.296,99
• Muara Kaman	292.731,34	• Sebulu	55,81
• Muara Muntai	51.104,71	• Tenggarong	4.461,68
• Muara Wis	108.381,35	• Tenggarong Seberang	5.842,61
• Sebulu	5.323,84	Luas CAT Tenggarong	32.891,10
Luas CAT Sendawar	601.333,16	Total Luas CAT	931.329,14

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



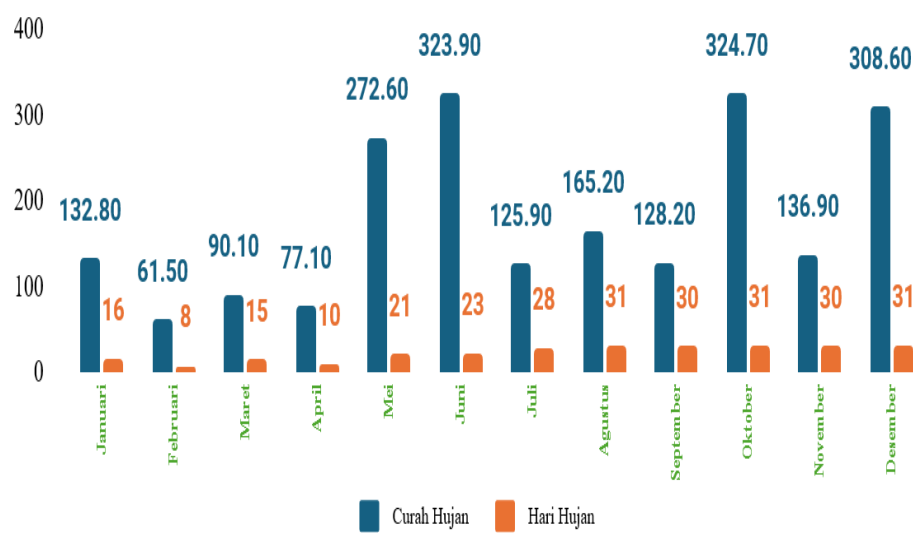
Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

CAT merupakan tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis. Peta CAT digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Tata Ruang Sumber Daya Air, termasuk di antaranya air tanah yang digunakan dalam berbagai kegiatan, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan, jasa, dan kegiatan pariwisata.

(5) Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis, memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan relatif tidak merata setiap bulan dalam setahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Oktober (324,7 mm) dengan jumlah hari hujan sebanyak 31 hari. Sedangkan hari hujan tertinggi berada pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 31 hari.

Gambar 2.6
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

(6) Penggunaan Lahan

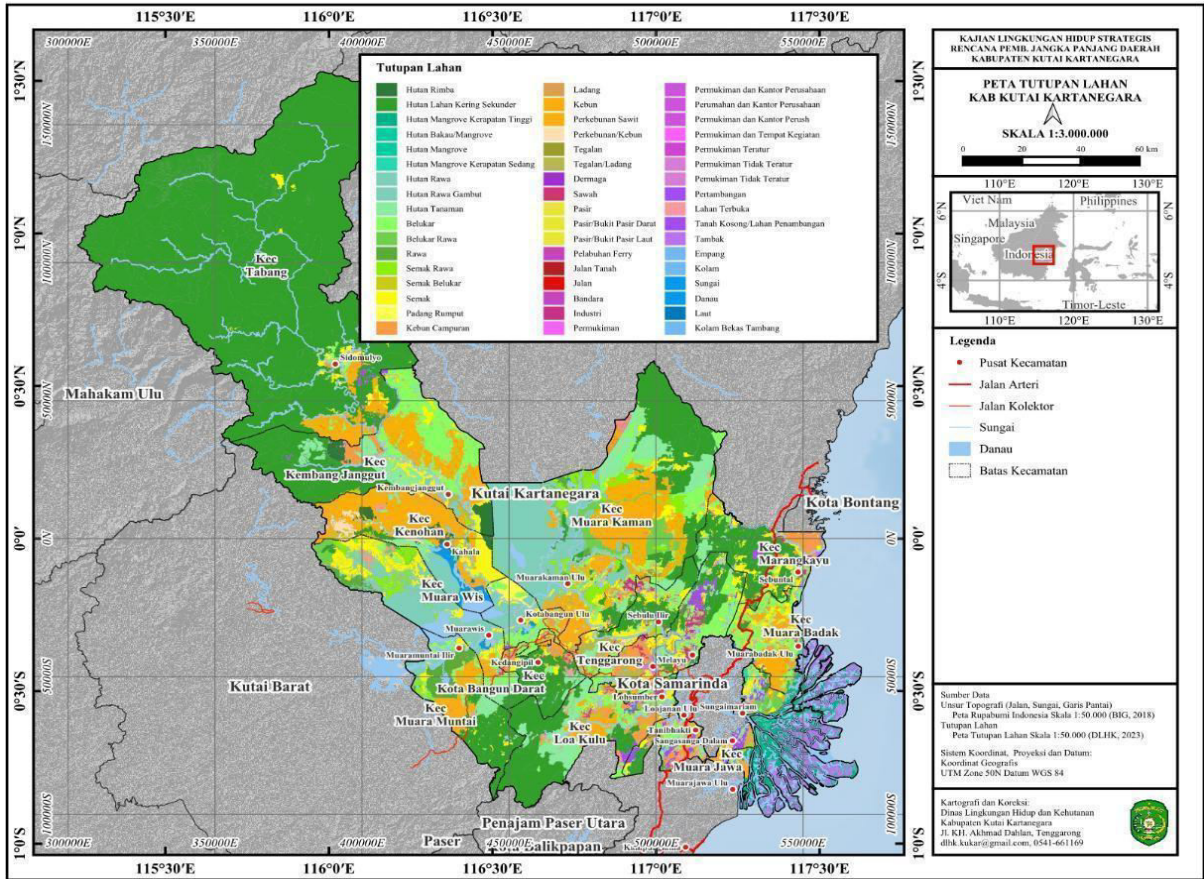
Tutupan lahan adalah salah satu indikator utama dalam menilai keberlangsungan fungsi ekologis suatu wilayah. Semakin luas kawasan yang tertutup oleh vegetasi yang sehat dan beragam, semakin besar pula kemampuannya dalam menjaga keseimbangan ekologis, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendukung siklus hidrologi secara berkelanjutan. Secara konseptual, tutupan lahan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penutup permukaan bumi baik alami maupun buatan yang tampak secara kasat mata dan dapat diidentifikasi melalui citra spasial maupun pengamatan langsung di lapangan (FAO, 1990).

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa tutupan lahan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh hutan lahan kering sekunder seluas 1.140.718,99 hektare (45,10 persen luas Kutai Kartanegara). Kecamatan terluas yang memiliki jenis tutupan lahan semacam ini adalah Kecamatan Tabang (767.134,35 hektare).

Sementara itu, tutupan lahan perkebunan kelapa sawit menempati urutan kedua sebagai bentuk penutup lahan dominan di Kutai Kartanegara. Komoditas ini telah berkembang pesat seiring dengan tren ekspansi agribisnis dan kebutuhan pasar global. Perkebunan sawit mengokupansi 10,79 persen dari luas wilayah (273.000,68 hektare). Tiga kecamatan yang menjadi pusat ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah Muara Kaman (87.900,97 hektare), Kenohan (62.802,36 hektare), dan Kembang Janggut (36.109,75 hektare).

Pola sebaran ini mencerminkan pergeseran karakteristik ekologi wilayah menjadi kawasan produksi komoditas unggulan, yang berdampak pada perubahan bentang alam secara signifikan. Secara detail, sebaran luasan tutupan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada peta dan tabel berikut ini.

Gambar 2.7
Peta Tutupan Lahan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.6
Luas Tutupan Lahan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

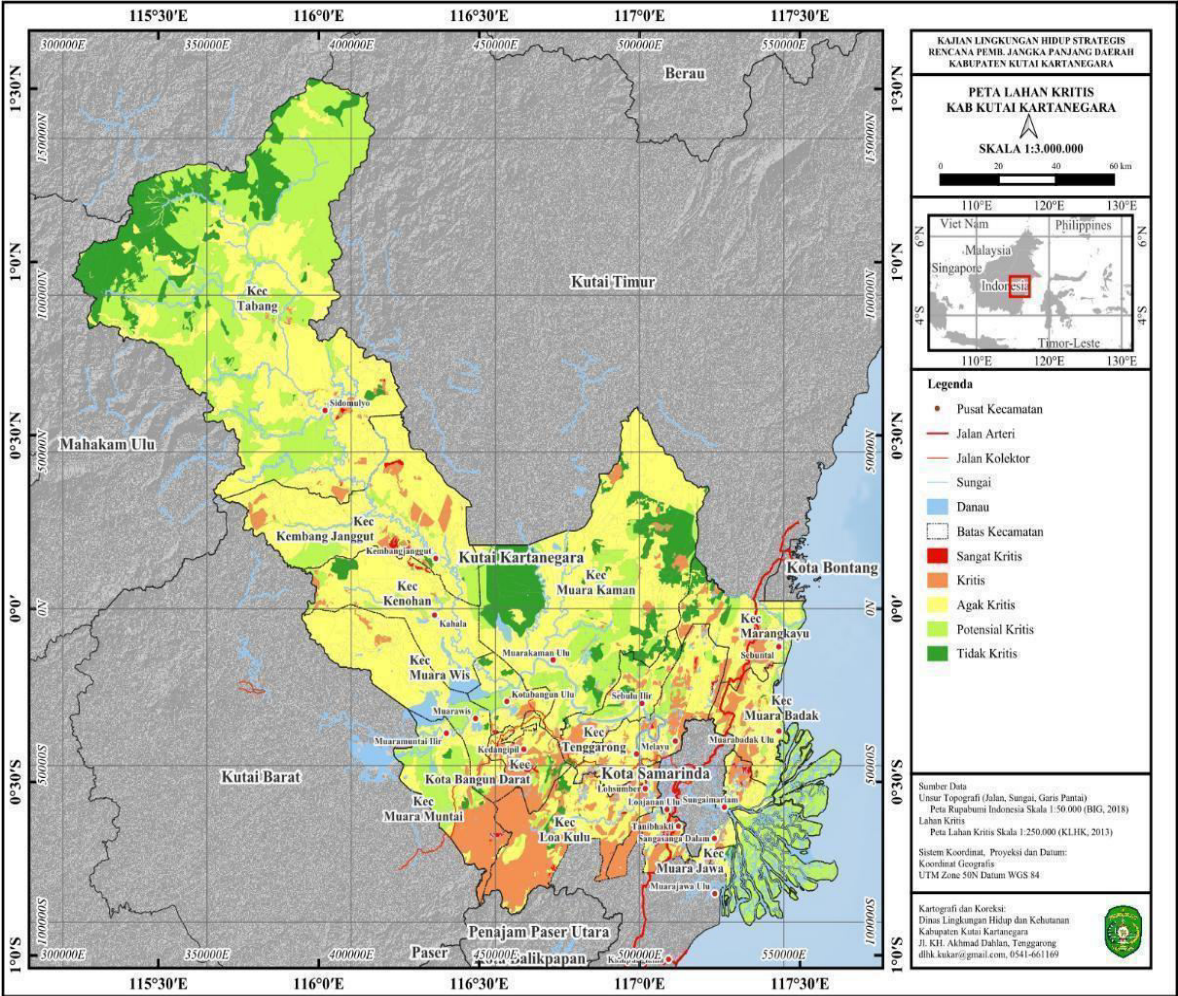
No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (hektare)	No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (hektare)
1	Bandara	83,58	24	Padang Rumpul	8.295,28
2	Belukar	211.574,75	25	Pasir	6,73
3	Belukar Rawa	33.351,53	26	Pasir/Bukit Pasir Darat	25,77
4	Danau	34.914,21	27	Pelabuhan Ferry	1,23
5	Dermaga	0,43	28	Pemukiman	297,81
6	Empang	28,48	29	Pemukiman dan Kantor Perusahaan	634,76
7	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.140.718,99	30	Pemukiman dan Tempat Kegiatan	1.691,34
8	Hutan Mangrove	0,04	31	Pemukiman Teratur	31,99
9	Hutan Mangrove Kerapatan Sedang	15.602,85	32	Pemukiman Tidak Teratur	9.525,47
10	Hutan Mangrove Kerapatan Tinggi	49.104,83	33	Perkebunan Sawit	273.000,68
11	Hutan Rawa	12.123,03	34	Perkebunan/Kebun	6.984,37
12	Hutan Rawa Gambut	173.131,26	35	Pertambangan	22.448,80
13	Hutan Rimba	17.508,80	36	Rawa	24.788,96
14	Hutan Tanaman	101.427,08	37	Sawah	15.077,74
15	Industri	1.025,00	38	Semak	149.293,14
16	Jalan	1.522,85	39	Semak Belukar	12.772,40
17	Jalan Tanah	118,58	40	Semak Rawa	37.925,12
18	Kebun	2.614,20	41	Sungai	16.819,52
			42	Tambak	57.081,45

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (hektare)	No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (hektare)
19	Kebun Campuran	51.700,28	43	Tanah Kosong/Lahan Penambangan	3,17
20	Kolam	941,89	44	Tegalan	2.746,70
21	Kolam Bekas Tambang	676,77	45	Tegalan/Ladang	21.721,82
22	Ladang	454,78		Total Luas	2.536.835,10
23	Lahan Terbuka	19.425,85			

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Sementara itu, 52,04 persen wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berstatus “agak kritis” (1.316.168,42 hektare). Lahan “kritis” terindikasi seluas 10,69 persen (270.417,13 hektare) dan lahan berstatus “sangat kritis” seluas 0,36 persen (9.107,10 hektare). Lahan berstatus “kritis” terluas terletak di Kecamatan Loa Kulu (74.451,29 hektare) dan lahan berstatus “sangat kritis” terluas terletak di Kecamatan Kembang Janggut (1.855,35 hektare) dan Anggana (1.019,94 hektare).

Gambar 2.8
Peta Lahan Kritis
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

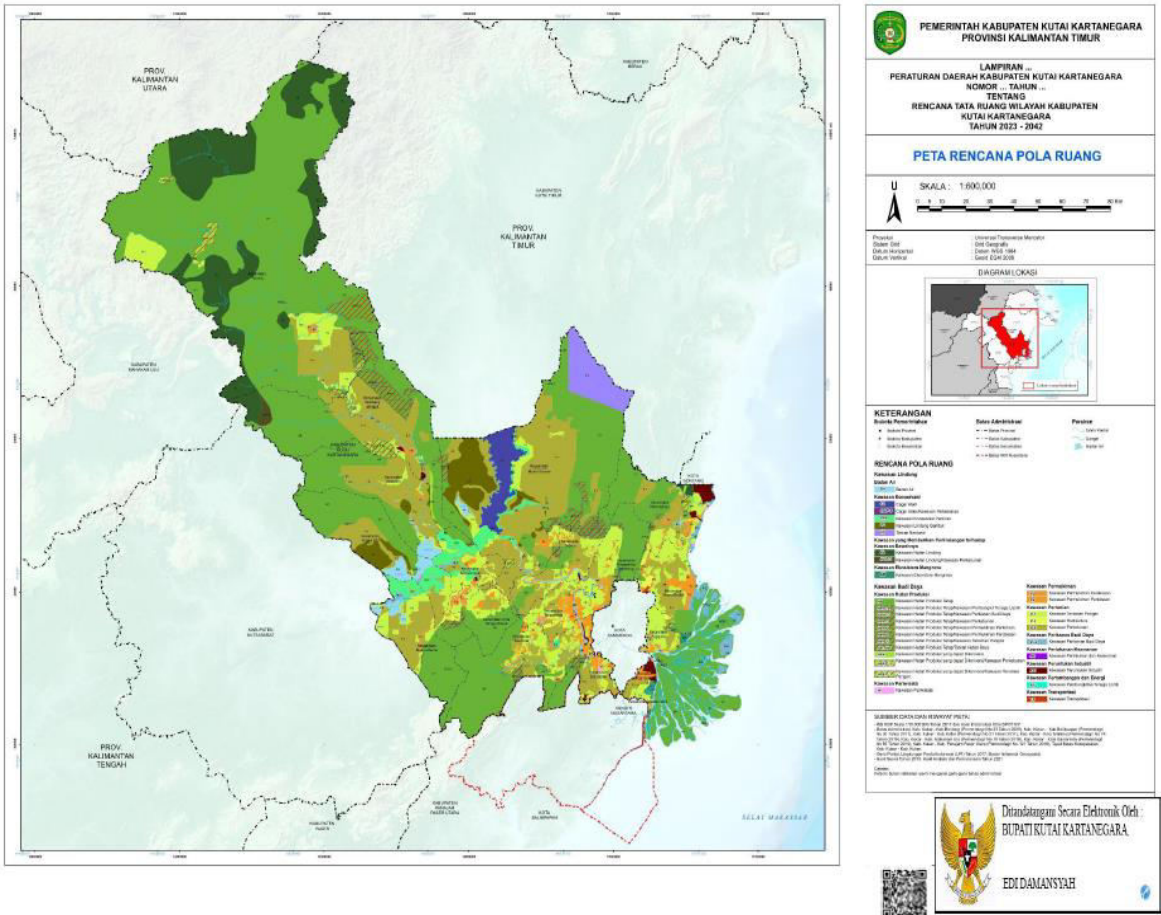
Tabel 2.7
Luas Lahan Kritis
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Kecamatan	Luas Lahan (hektare)					
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Anggana	3.872,87	77.097,39	18.704,03	5.893,06	1.019,94	106.801,32
Kembang Janggut	2.459,79	23.542,18	174.820,61	16.376,92	1.855,35	219.130,52
Kenohan	10.449,65	9.181,79	108.529,40	2.741,45	646,56	131.629,81
Kota Bangun	4.798,04	7.613,40	28.993,14	2.433,61	202,66	44.173,71
Kota Bangun Darat	2.522,64	3.507,88	18.589,98	20.492,26	876,97	46.024,94
Loa Janan	301,42	8,39	10.711,13	20.968,10	944,54	32.946,96
Loa Kulu	4.913,58	2.724,90	53.422,54	74.451,29	946,55	136.546,90
Marangkayu	9.477,99	10.356,32	49.273,62	16.700,18	638,08	86.484,58
Muara Badak	785,16	16.762,63	41.390,88	14.854,73	57,26	79.853,94
Muara Jawa	2.232,76	13.431,48	4.195,77	842,82		20.484,22
Muara Kaman	98.623,15	68.797,33	246.875,27	9.290,44		423.870,60
Muara Muntai	4.136,14	34.959,41	23.595,33	31.390,28	595,53	94.711,27
Muara Wis	9.542,51	9.840,97	102.251,42	9.495,82	62,16	131.384,18
Sangasanga	322,45	0,51	7.845,88	1.969,57		10.035,55
Sebulu	7.026,41	11.600,10	29.791,43	11.552,54		60.019,35
Tabang	100.843,33	370.916,59	330.776,18	7.559,85	452,51	811.160,78
Tenggarong	1.079,85	117,63	28.336,40	6.190,63	95,56	35.848,35
Tenggarong Seberang	1.567,52	8.117,55	38.065,40	17.213,57	713,44	65.728,13
Total	264.955,27	668.576,42	1.316.168,42	270.417,13	9.107,10	2.536.835,10

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Selanjutnya, berdasarkan peta pola ruang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 686.997,79 Ha (27,16%) diikuti dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 541.993,17 Ha (21,43%), Perkebunan seluas 341.752,54 Ha (13,51%) dan Kawasan Tanaman Pangan seluas 307.348,17 Ha (12,15%). Jenis penggunaan lahan lain yang mendominasi adalah Kawasan Hutan Lindung seluas 205.942,28 (8,14%). Sisanya terbagi ke dalam berbagai jenis penggunaan lahan lainnya yang berorientasi sebagai lingkungan terbangun perkotaan dan kawasan konservasi. Rincian luas masing-masing kelas penggunaan lahan disajikan pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.9
Peta Rencana Pola Ruang
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.8
Luas Penggunaan Lahan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (hektare)	Luas (%)	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (hektare)	Luas (%)
Badan Air	43.553,57	1,72	Perkebunan	341.752,54	13,51
Danau	4.061,81	0,16	Perkebunan Rakyat	15.682,14	0,62
Cagar Alam	32.045,96	1,27	Permukiman Perdesaan	17.567,54	0,69
Ekosistem Mangrove	3.031,57	0,12	Permukiman Perkotaan	50.052,24	1,98
Hortikultura	8.650,67	0,34	Peruntukan Industri	5.847,99	0,23
Hutan Lindung	205.942,28	8,14	Sekitar Danau atau Waduk	3.787,11	0,15
Hutan Produksi Terbatas	541.993,17	21,43	Suaka Alam	0,00	0,00
Hutan Produksi Tetap	686.997,79	27,16	Tanaman Pangan	307.348,17	12,15
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	27.397,19	1,08	Sempadan Pantai	1.974,21	0,08
Imbuhan Air Tanah	32.169,45	1,27	Sempadan Sungai	23.337,13	0,92
Lindung Gambut	69.330,35	2,74	Suaka Margasatwa	1.039,97	0,04
Pariwisata	421,23	0,02	Taman Hutan Raya	46331,56	1,83
Pelestarian Alam	8,63	0,00	Taman Nasional	40602,13	1,61
Perikanan Budi Daya	18.297,92	0,72	Total Luas	2.536.835,10	100,00

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kutai Kartanegara memiliki potensi tenaga surya yang cukup tinggi, yaitu seluas 954,31 km² dengan rata-rata 661,35 watt/m² dan rata-rata 4,3 kwh/m². Potensi total ini senilai dengan 39,13 *Global Warming Potential (GWP)*, angka ini merupakan pencapaian tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.9
Potensi Tenaga Surya
Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Luas (km ²)	Rata-rata watt/m ²	Rata-rata kwh/m ²	Potensi GWP
1	Berau	286.61	689.92	4.48	11.75
2	Kota Balikpapan	111.49	691.54	4.49	4.57
3	Kota Bontang	30.73	708.33	4.60	1.26
4	Kota Samarinda	140.08	628.72	4.09	5.74
5	Kutai Barat	247.63	667.35	4.34	10.15
6	Kutai Timur	351.07	681.95	4.43	14.39
7	Kutai Kartanegara	954.31	661.35	4.30	39.13
8	Mahakam Ulu	73.70	668.40	4.34	3.02
9	Paser	198.78	663.22	4.31	8.15
10	Penajam Paser Utara	189.73	670.90	4.36	7.78
	Kalimantan Timur	2,584.12	672.42	4.37	105.95

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Potensi PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 14 kecamatan dengan besaran potensi besar di Kecamatan Kota Bangun (10.674,70 hektare) dengan potensi 533.73 MW. Potensi total PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai 1.125,19 MW, merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.10
Potensi PLTS Terapung
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Kecamatan	Luas (hektare)	Potensi (MW)	Klasifikasi
1	Konahan	579.46	28.97	Kecil
2	Kota Bangun	10674.70	533.73	Besar
3	Kota Bangun	28.42	1.42	Kecil
4	Loa Janan	23.00	1.15	Kecil
5	Loa Kulu	97.10	4.86	Kecil
6	Marangkayu	40.02	2.00	Kecil
7	Muara Kaman	1207.40	60.37	Sedang
8	Muara Muntai	848.81	42.44	Kecil
9	Muara Wis	8506.95	425.35	Sedang
10	Muara Wis	33.38	1.67	Kecil
11	Samboja	167.18	8.36	Kecil
12	Sangasanga	78.89	3.94	Kecil
13	Tenggarong Seberang	142.42	7.12	Kecil
14	Tenggarong	75.99	3.80	Kecil
	Kutai Kartanegara	22503.72	1125.19	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Potensi tenaga angin di Kutai Kartanegara juga yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar kecepatan angin 2.676,05 dengan luasan 424,73 km².

Tabel 2.11
Potensi Tenaga Angin
Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Kecepatan angin (pada ketinggian 50 m)	Luas (km2)
1	Berau	1.257,43	246,10
2	Kota Balikpapan	296,07	60,59
3	Kota Bontang	263,51	19,48
4	Kutai Barat	773,44	195,37
5	Kutai Timur	1.595,18	233,60
6	Kutai Kartanegara	2.676,05	424,73
7	Paser	1.461,49	298,24
8	Penajam Paser Utara	419,23	63,78
	KALIMANTAN TIMUR	8.742,40	1.541,91

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung tercapainya konsep *net zero emission*. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang tepat dan terukur dalam pemanfaatan potensi SDA ini.

Potensi SDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi pilar utama perekonomian daerah dapat dilihat dari eksistensi sektor pertanian beserta subsektor tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, serta sektor perikanan. Lahan pertanian yang luas memungkinkan bagi upaya pengembangan komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura, yang akan menopang ketahanan pangan lokal maupun regional. Dalam lima tahun terakhir, data produktivitas sektor pertanian tampak mengalami fluktuasi. Produktivitas pertanian tertinggi terjadi pada 2023 (471,4 ton per hektare).

Di bidang perkebunan, Kutai Kartanegara juga kaya dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, yang berkontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi serta peluang yang besar bagi hilirisasi. Demikian juga sektor peternakan berkembang pesat dengan populasi sapi, ayam, dan kambing yang mampu mendukung kebutuhan protein hewani masyarakat, sekaligus membuka peluang industri olahan hasil ternak.

Selain itu, Kutai Kartanegara juga dikenal memiliki potensi perikanan darat dan budi daya perairan, khususnya ikan air tawar (gabus dan patin). Hal ini antara lain karena keberadaan Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga subsektor perikanan menunjukkan potensi ekonomi yang terus meningkat.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai produksi subsektor perikanan pada 2020 yang hanya sebesar Rp6.648.846.000.000, kemudian melonjak menjadi Rp12.621.931.397.000 pada 2024. Potensi yang besar ini, jika dikelola dengan benar dan berkelanjutan, dapat menjadi basis utama bagi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah.

Tabel 2.12
Data Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sektor Pertanian						
Produktivitas Pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	439,99	460,95	402,24	471,4	459,42
Luas areal panen	Ha	33.698,00	28.686,00	29.608,00	28.054,00	26.873,00
Total Produksi Pertanian	Ton	120.237	110.159	112.008	122.778	110.844
Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura						

Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura	Persen	9,50	10,49	-25,22	-20,94	27,30
Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	0,46	5,34	-19,81	-12,54	1,10
Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	283.170,63	298.289,44	239.187,52	209.204,70	211.506,51
Subsektor Peternakan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Peternakan	Persen	4,47	5,14	-18,76	90,12	13,41
Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Peternakan	Persen	4,96	7,77	-9,61	73,04	13,33
Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	14.993.990	16.158.897	14.606.183	25.275.214	28.644.064
Subsektor Perkebunan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Perkebunan	Persen	1,48	3,52	1,95	10,88	5,54
Total Nilai Produksi	Juta Rupiah	3.255.714	3.370.337	3.436.170	3.810.122	4.021.353
Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	3,31	2,96	1,87	11,41	5,97
Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	2.892.651,33	2.978.217,41	3.033.948,48	3.380.077,55	3.581.861,51
Produktivitas Komoditas Kelapa Sawit	Ton/Ha	15,75	18,58	15,24	15,91	14,86
Luas Areal Tanam Kelapa Sawit	Ha	218.722,00	220.325,00	226.845,00	230.169,00	258.047,28
Luas Areal Tanam Kelapa Sawit TM	Ha	182.637,15	159.436,34	197.969,40	211.339,46	239.685,55
Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	2.876.599	2.961.595	3.016.673	3.363.058	3.561.863
Sektor Perikanan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Sektor Perikanan	Persen	0,00	6,48	1,54	43,65	22,23
Total nilai Produksi sektor Perikanan	Juta Rupiah	6.648.846	7.079.474	7.188.498	10.326.514	12.621.931
Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	6,48	2,56	1,37	34,07	15,17
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	202.277,3	207.461,1	210.308,0	281.950,6	324.727,8

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, 2025

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) mencakup evaluasi kondisi ekoregion, tutupan lahan, serta daya dukung dan daya tampung. DDDT diukur melalui nilai jasa lingkungan hidup, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin besar kapasitasnya.

Untuk memperoleh nilai jasa lingkungan hidup, digunakan dua metode penaksiran: *landscape based proxy* dan *landscape/land used based proxy*. Dua metode tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan DDDT-LH.

Jasa lingkungan hidup terbagi menjadi 4 (empat) kategori: penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), budaya (*cultural*), dan pendukung (*supporting*). Penilaian DDDT-LH jasa lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup 20 jenis. Uraian berikut ini menjelaskan dengan lengkap mengenai kondisi dan fungsi jasa lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diambil dari laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. *Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air*

Ketersediaan air di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa mayoritas lahan atau seluas 1.680.921,36 hektare (66,26 persen), tergolong dalam kategori penyediaan air yang “rendah”. Hal ini diikuti dengan lahan dengan penyediaan air “sangat rendah” seluas 494.327,75 hektare (19,49 persen); “sedang” mencapai 319.220,33 hektare (12,58 persen), “tinggi” hanya 26.144,32 hektare (1,03 persen); “sangat tinggi” sangat terbatas, hanya 16.221,34 hektare (0,64 persen).

2. *Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan*

Kondisi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemampuan wilayah untuk menyediakan lahan subur bagi kegiatan pertanian sangat bervariasi. Berdasarkan data KLHS, lahan dengan kategori penyediaan pangan “sangat tinggi” mencakup areal seluas 136.740,35 hektare (5,39 persen) dari luas wilayah total seluas 2.536.835,10 hektare. Lahan dengan kategori penyediaan pangan “tinggi” mencakup 133.843,13 hektare (5,28 persen), sementara lahan dengan kategori “sedang” mendominasi dengan luas areal mencapai 1.596.877,50 hektare (62,95 persen). Selanjutnya, lahan dengan kategori “rendah” mencakup 300.936,39 hektare (11,86 persen), dan kategori “sangat rendah” mencakup 368.437,71 hektare (14,52 persen).

3. *Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat*

Jasa lingkungan hidup penyedia serat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didominasi oleh kategori “tinggi”, dengan wilayah seluas 1.161.174,40 hektare (45,77 persen). Rincian kategori lainnya meliputi: “sangat tinggi” seluas 6.774,56 hektare (0,27 persen), “sedang” seluas 440.265,57 hektare (17,35 persen), “rendah” seluas 561.537,56 hektare (22,14 persen), dan “sangat rendah” seluas 367.083,00 hektare (14,47 persen).

4. *Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik*

Jasa lingkungan hidup penyedia sumber daya genetik di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki distribusi yang bervariasi. Kategori “tinggi” mendominasi dengan luas 990.892,59 hektare (39,06 persen), diikuti oleh kategori “sedang” seluas 539.026,17 hektare (21,25 persen), dan “sangat tinggi” seluas 506.201,00 hektare (19,95 persen). Kategori “rendah” dan “sangat rendah” masing-masing mencakup 262.728,66 hektare (10,36 persen), dan 238.019,79 hektare (9,38 persen).

5. *Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara*

Jasa ini terfokus pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi manusia. Kebutuhan oksigen tidak hanya ditinjau secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sebagian besar wilayah berada dalam kategori “sangat tinggi” dengan luasan mencapai 902.326,86 hektare (35,57 persen). Kategori “tinggi” mencakup 559.662,29 hektare (22,06 persen), “sedang” seluas 436.639,39 hektare (17,21 persen), “rendah” seluas 512.418,93 hektare (19,19 persen), dan “sangat rendah” seluas 125.788,63 hektare (5,96 persen).

6. *Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim*

Luas kawasan hutan sangat mempengaruhi jasa lingkungan hidup dalam mengatur iklim. Hutan berperan dalam menghasilkan karbondioksida dan oksigen, yang dapat membantu menjaga temperatur tetap sejuk. Dalam skala lokal, kondisi vegetasi dapat mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya, sedangkan pada skala ekoregional, kondisi tersebut dapat mempengaruhi pengaturan iklim secara global.

Jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara mayoritas termasuk dalam kategori “tinggi” dengan areal seluas 1.554.727,73 hektare (61,29 persen). Kategori lainnya adalah “sangat tinggi” dengan luas 176.649,87 hektare (6,96 persen), “sedang” dengan luas 163.771,15 hektare (6,46 persen), “rendah” dengan luas 623.579,13 hektare (24,58 persen), dan “sangat rendah” dengan 18.107,23 hektare (0,71 persen).

7. *Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Banjir*

Jasa lingkungan hidup dalam pencegahan banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk kategori “sangat tinggi” mencakup luasan terbesar yaitu 962.072,45 hektare (37,92 persen). Kategori “tinggi” seluas 800.143,66 hektare (31,54 persen), “sedang” 412.632,90 hektare (16,27 persen), “rendah” 352.181,97 hektare (13,88 persen), dan kategori “sangat rendah” 9.804,11 hektare (0,39 persen).

Kawasan hutan yang luas mampu mengendalikan aliran udara permukaan dengan mengurangi laju aliran udara dan meningkatkan evapotranspirasi. Sebaliknya, tanah aluvial yang telah menjadi permukiman memiliki potensi pencegahan banjir yang “sangat rendah”. Permukaan tanah yang telah diperkeras di permukiman menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai atau menggenang, sehingga meningkatkan potensi banjir akibat kenaikan aliran sungai dalam waktu singkat. Jumlah vegetasi yang dapat menahan air hujan juga berkurang drastis karena digantikan oleh bangunan dan permukiman.

8. *Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Tanah Longsor*

Tanah longsor umumnya terjadi di wilayah dengan banyak lereng yang curam, dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, meskipun juga dapat terjadi di tanah datar dengan kemungkinan lebih kecil. Proses ini sering terjadi karena terganggunya keseimbangan, membuat tanah menjadi labil dan mudah bergeser akibat adanya air yang masuk ke dalam lapisan tanah dan berperan sebagai area gelincir.

Jika air masuk ke dalam area gelincir pada lapisan tanah, maka pembatas antara tanah bagian atas dan bawah menjadi goyah dan memudahkan pergeseran. Risiko ini meningkat jika terdapat bangunan di atas tanah yang sudah goyah, menambah beban pada tanah.

Jasa lingkungan hidup dalam pencegahan tanah longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kategori “sangat tinggi” mendominasi dengan luas 895.633,03 hektare (35,31 persen). Kategori “tinggi” mencakup 623.135,40 hektare (24,56 persen), “sedang” seluas 282.355,29 hektare (11,13 persen), “rendah” 547.602,72 hektare (21,59 persen), dan “sangat rendah” seluas 188.108,66 hektare (7,42 persen).

9. *Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan*

Insiden kebakaran hutan dan lahan sering menjadi ancaman signifikan di wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada periode musim kemarau, kondisi hutan dan lahan sangat rentan terhadap risiko kebakaran. Oleh karena itu, pembukaan lahan selama musim kemarau harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan penggunaan metode pembakaran telah dilarang dengan tegas.

Kondisi jasa lingkungan hidup pencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa lahan dalam kategori “sangat tinggi” mencakup 133.540,47 hektare (5,26 persen). Sementara itu, kategori “tinggi” mencakup lahan seluas 1.115.455,08 hektare (43,98 persen), dan “sedang” mendominasi dengan 1.287.839,54 hektare (50,77 persen). Tidak ada lahan yang masuk dalam kategori “rendah” dan “sangat rendah”.

10. *Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air*

Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur air berada di daerah yang tidak bervegetasi, kemampuan tumbuhan untuk menyimpan air menjadi tidak ada, sehingga air hujan

lebih banyak mengalir sebagai aliran air permukaan. Vegetasi penutup tanah memainkan peran penting dalam siklus air di permukaan bumi, dan kemampuan suatu ekoregion sebagai pengatur air sangat bervariasi.

Jasa lingkungan hidup pengatur air di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh lahan dengan kategori "tinggi", yang mencakup 1.101.726,90 hektare (43,43 persen). Kategori "sedang" mencakup 409.841,27 hektare (16,16 persen), "rendah" mencakup 715.982,18 hektare (28,22 persen), dan "sangat rendah" mencakup 267.309,33 hektare (10,54 persen). Kategori "sangat tinggi" hanya mencakup 41.975,42 hektare (1,65 persen).

11. *Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah*

Jasa lingkungan hidup dalam hal pemurnian air dan pengolahan limbah di menunjukkan variasi kemampuan lahan dalam mendukung proses *self-purification*. Tanah dan batuan alami berperan sebagai penyaring alami yang membantu memurnikan air.

Lahan dengan kapasitas pemurnian air "sangat tinggi" mendominasi, mencakup 776.752,53 hektare (30,62 persen). Kategori "tinggi" mencakup 739.544,47 hektare (29,15 persen), sementara "sedang" meliputi 215.591,43 hektare (8,50 persen). Kategori "rendah" dan "sangat rendah" masing-masing mencakup 366.339,44 hektare (14,44 persen) dan 438.607,24 hektare (17,29 persen).

12. *Jasa Lingkungan Hidup Penyerbukan Alami*

Jasa lingkungan hidup dalam pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan. Penyerbukan alami, sangat penting bagi reproduksi tumbuhan berbunga, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan keberadaan spesies penyerbuk. Kategori "tinggi" mendominasi dengan luas 1.115.151,83 hektare (43,96 persen), diikuti "sedang" 425.592,86 hektare (16,78 persen), "rendah" 502.750,72 hektare (19,82 persen), dan "sangat rendah" 484.295,25 hektare (19,09 persen). Potensi lahan dalam kategori "sangat tinggi" hanya mencakup 9.044,43 hektare (0,36 persen).

13. *Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama*

Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya untuk mengatur makhluk-makhluk atau organisme yang dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi.

Jasa Lingkungan Hidup dalam pengendalian hama dan penyakit bervariasi dari kategori "sedang" hingga "sangat rendah". Tidak ada lahan dalam kategori "sangat tinggi". Kategori "sedang" mencakup 840.243,32 hektare (33,12 persen), "tinggi" 513.208,67 hektare (20,23 persen), "rendah" 714.139,64 hektare (28,15 persen), dan "sangat rendah" 469.243,46 hektare (18,50 persen).

14. *Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Habitat dan Kehati*

Jasa lingkungan hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati (kehati) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan.

Berdasarkan luas total wilayah penyedia jasa, kategori "sangat tinggi" mencakup area seluas 764.022,85 hektare (30,12 persen), seluas 602.476,87 hektare (23,75 persen) berada dalam kategori "tinggi", dan 437.698,11 hektare (17,25 persen) berada dalam kategori "sedang". Sementara itu, kategori "rendah" mencakup 490.609,13 hektare (19,34 persen), dan kategori "sangat rendah" mencakup 242.028,14 hektare (9,54 persen).

15. *Jasa Lingkungan Hidup Pembentukan dan Regenerasi Tanah*

Jasa lingkungan hidup untuk pembentukan dan regenerasi tanah menunjukkan distribusi yang beragam. Kategori "sangat tinggi" mencakup luas sebesar

835.846,75 hektare (32,95 persen), "tinggi" 771.956,15 hektare (30,43 persen), "sedang" 525.194,06 hektare (20,70 persen), "rendah" 249.616,64 hektare (9,84 persen), dan "sangat rendah" 154.221,50 hektare (6,08 persen).

16. *Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer*

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, potensi biomassa sebagai jasa lingkungan hidup pendukung produksi primer beragam. Kategori "sangat tinggi" mencakup 227.815,55 hektare (8,98 persen), "tinggi" 994.541,12 hektare (39,20 persen), "sedang" 782.722,36 hektare (30,85 persen), "rendah" 365.348,12 hektare (14,40 persen), dan "sangat rendah" 166.407,95 hektare (6,56 persen). Mayoritas potensi produksi primer ada pada kategori "tinggi" (39,20 persen) dan "sedang" (30,85 persen).

17. *Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara*

Jasa lingkungan hidup siklus hara didominasi oleh kategori "sedang", yaitu seluas 1.033.631,02 hektare (40,75 persen), diikuti kategori "tinggi" dengan luas 506.657,19 hektare (19,97 persen), dan "rendah" 630.624,67 hektare (24,86 persen). Kategori "sangat rendah" seluas 365.922,22 hektare (14,42 persen).

18. *Jasa Lingkungan Hidup Kultural Estetika*

Jasa lingkungan hidup kultural rekreasi, jasa lingkungan kultural estetika terlihat bahwa luas area yang termasuk dalam kategori "sangat tinggi" adalah 52.557,87 hektare (2,07 persen). Area yang masuk dalam kategori "tinggi" mencapai 332.304,54 hektare (13,10 persen). Kategori "sedang" mendominasi dengan luas 1.848.155,65 hektare (72,85 persen), sedangkan kategori "rendah" meliputi 12.855,03 hektare (0,51 persen). Kategori "sangat rendah" seluas 290.961,01 hektare (11,47 persen). Mayoritas potensi jasa lingkungan hidup kultural estetika di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kategori "sedang" (72,85 persen) dari total luas areal.

19. *Jasa Lingkungan Hidup Kultural Rekreasi*

Jasa lingkungan hidup kultural rekreasi didominasi oleh kategori "sedang" 1.790.208,47 hektare (70,57 persen). Luas area yang termasuk dalam kategori "sangat tinggi" seluas 48.681,02 hektare (1,92 persen), kategori "tinggi" mencapai 139.941,27 hektare (5,52 persen), kategori "rendah" meliputi 267.042,88 hektare (10,53 persen), dan kategori "sangat rendah" memiliki luas 290.961,01 hektare (11,47 persen).

20. *Jasa Lingkungan Hidup Warisan Budaya dan Identitas*

Luas jasa lingkungan hidup warisan budaya dan identitas menunjukkan bahwa luas area dengan kategori "tinggi" adalah 1.075.568,48 hektare (42,40 persen), kategori "sedang" 975.921,38 hektare (38,47 persen), "rendah" seluas 158.606,84 hektare (6,25 persen), dan "sangat rendah" seluas 320.619,88 hektare (12,64 persen).

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir aneka macam air limbah, baik limbah perusahaan maupun dari limbah domestik.

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih di antaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, sumur pompa, mata air terlindung, dan sumur terlindung.

Dengan melihat sumber air minum ini, maka akan dapat digambarkan tingkat kesehatan rumah tangga atau masyarakat suatu daerah. Sesuai data KLHS, jumlah rumah

tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.13
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	87,90	70,85	89,32	82,18	80,20
2	Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	117.198	121.926	131.920	161.911	156.924
3	Jumlah Total Rumah Tangga	185.433	185.433	172.099	197.028	185.433
4	Penduduk Berakses Air Minum	468.792	487.704	527.680	647.645	627.696
5	Jumlah Penduduk	729.382	733.626	738.189	788.113	789.767
6	Rasio (%)	64,27	66,48	71,48	82,18	79,48

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman / PDAM, 2025

Ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memadai hal ini terlihat dari tabel indikator pangan.

Tabel 2.14
Indikator Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	128,82	128,72	118,00	118,46	102,95
2	Produksi Beras (Ton)	64.530,52	60.750,49	61.090,11	66.952,24	61.978,93
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (persen)	11,14	14,41	18,52	10,59	9,72
4	Indeks Ketahanan Pangan	84,28	84,73	84,44	85,53	87,16

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025; BPS, 2025

Ketersediaan pangan utama menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu sebesar 128,82 persen (2020), dan terus turun menjadi 118,00 persen (2022). Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu 118,46 persen dan pada tahun 2024 turun kembali menjadi sebesar 102,95 persen.

Produksi beras juga mengalami fluktuasi selama periode ini. Produksi beras mencapai 64.530,52 ton (2020) menurun menjadi 60.750,49 ton (2021) dan kembali meningkat menjadi 66.952,24 ton (2023), namun kembali menurun menjadi 61.978,93 ton (2024).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami peningkatan dari 11,14 persen (2020), menjadi 14,41 persen (2021). Angka ini melonjak signifikan menjadi 18,52 persen (2022), namun kemudian turun menjadi 10,59 persen (2023), dan terus menurun menjadi 9,72 persen (2024).

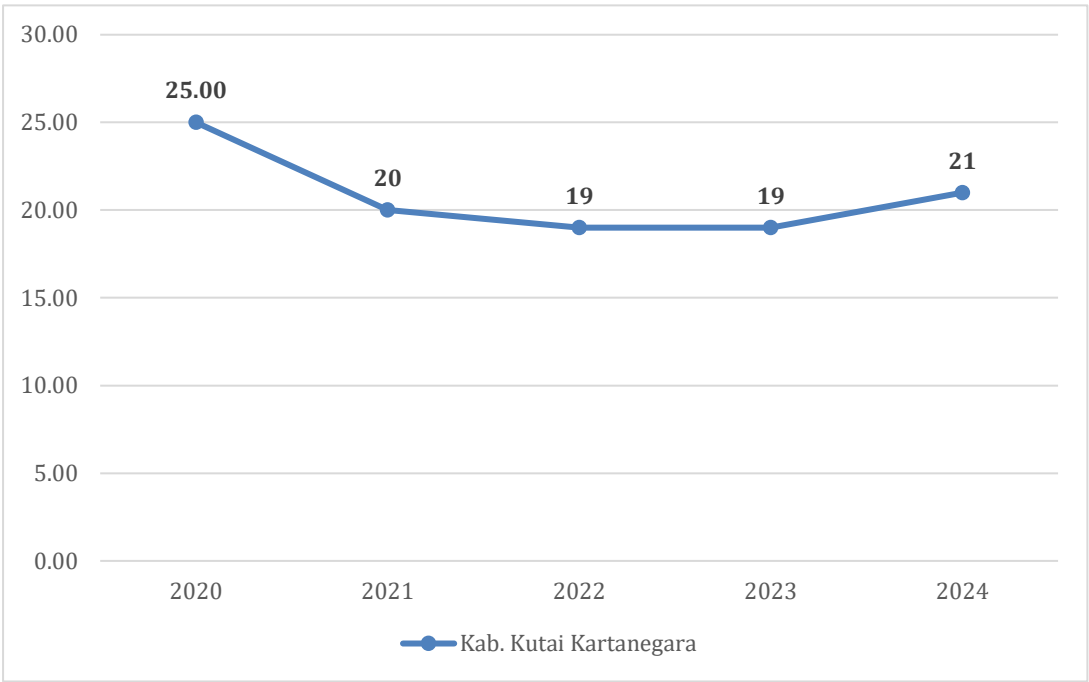
Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dan produksi beras di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi dengan beberapa penurunan dan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan sempat mengalami peningkatan cukup tajam, namun berhasil ditekan kembali pada 2024.

Meskipun data yang ditampilkan menunjukkan kondisi yang semakin bagus, namun masih ditemukan beberapa desa yang masuk dalam kategori “rawan pangan”. Kriteria desa tersebut antara lain kesulitan dalam ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan

pangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan aman bagi seluruh warganya.

Jika ditinjau pada 2020 sampai dengan 2023, tampak jumlah desa rawan pangan yang semakin menurun. Namun pada 2024 jumlahnya kembali meningkat menjadi 21 desa yang masuk dalam kategori rawan pangan.

Gambar 2.10
Desa Kategori Rawan Pangan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengukur kualitas lingkungan hidup, yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan. Pada 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengelompokkan predikat IKLH dalam 5 (lima) kategori: “sangat baik” (IKLH>80), “baik” (80>IKLH>70), “cukup baik” (70>IKLH>60), “kurang baik” (60>IKLH>50), dan “sangat kurang baik” (50>IKLH>40).

Menurut data DLHK, Kabupaten Kutai Kartanegara meraih predikat "cukup baik" dan "baik" dalam lima tahun terakhir. Tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan IKLH dari 2020 sampai dengan 2024. IKA menurun tajam dari 2020 dan stabil pada tingkat lebih rendah hingga 2023, dan pada 2024 kembali meningkat yang juga menunjukkan peningkatan kualitas air. IKU menurun pada 2020, tetapi meningkat dan stabil tinggi dari 2021 hingga 2023, menunjukkan adanya pemulihan kualitas udara. IKTL terus meningkat dari 2020 hingga 2024, menandakan perbaikan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2020	52,73	85,94	64,50	68,76
2021	52,98	91,69	70,89	71,58
2022	53,08	89,31	71,42	71,77
2023	50,53	91,53	74,62	72,41
2024	52,05	92,73	75,17	73,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Data dalam tabel di atas menunjukkan adanya penurunan kualitas yang signifikan di semua indeks lingkungan hidup pada 2020, kemungkinan besar sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun, mulai 2021 hingga 2023, terdapat perbaikan pada berbagai aspek kualitas lingkungan, terutama kualitas udara dan tutupan lahan.

Menurut data DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa faktor yang menyebabkan perubahan kualitas air antara lain peningkatan beban pencemaran di sungai dari tahun ke tahun, baik yang disebabkan oleh masyarakat maupun aktivitas industri. Sementara itu, kemampuan daya tampung dan dukung lingkungan relatif terbatas. Oleh karena itu, kualitas air perlu diperbaiki secara luas untuk mendukung penyediaan air yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil pengujian kualitas udara juga menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada dalam kategori "baik", meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lalu lintas, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan-bahan penghasil emisi yang tidak ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas udara.

Lingkungan hidup merujuk pada entitas spasial yang mencakup berbagai komponen, energi, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang saling mempengaruhi kondisi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seiring dengan pelaksanaan proyek strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana pembangunan memerlukan pemanfaatan sumber daya alam yang meningkat, terdapat risiko seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kondisi tersebut dapat mengancam daya dukung, kapasitas tahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik sangat penting bagi keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan.

Setiap tahun, pengelolaan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang positif, dengan kondisi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Pengelolaan persampahan, penanganan sampah juga mengalami perkembangan positif. Volume sampah yang tercatat pada 2024 sebanyak 135.200.790 m³ telah tertangani sebesar 57,94 persen. Kinerja penanganan sampah itu harus menjadi perhatian serius, mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel 2.16
Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Jumlah Timbunan Sampah (ton/tahun)	Persentase Penanganan Sampah (%)	Persentase Sampah Terkelola (%)
2020	75.858,97	22,45	30,15
2021	80.426,11	59,14	65,46
2022	111.390,03	69,91	85,07
2023	116.442,07	70,14	88,18
2024	135.200,79	57,94	73,62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LPPD, 2024

Lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat juga dari kelayakan serta keamanan akses atas sanitasi bagi hunian yang ditempati oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman, mengalami peningkatan sejak 2020 sampai dengan 2024.

Pada 2020, indikator tersebut sebesar 68,37 dan terus meningkat menjadi 89,10 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses sanitasi yang layak dan aman mengalami peningkatan. Diharapkan kondisi ini dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Tabel 2.17
Akses Sanitasi Layak dan Aman
Kabupaten Kutai Kartanegara , 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	68,37	69,80	76,14	83,48	89,10

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman, 2025

2.1.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menurut BNPB, salah satu indeks makro yang digunakan untuk mengukur kerentanan bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri dari tujuh parameter yang mencakup tujuh prioritas dan 71 indikator kebencanaan. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut.

- 1). Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
- 2). Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
- 3). Pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan logistik.
- 4). Penanganan tematik kawasan rawan bencana.
- 5). Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
- 6). Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- 7). Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, pada 2021 hingga 2024 nilai IKD Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan. Nilai ini terdiri dari penilaian terhadap masing- masing prioritas sebagaimana tercantum di atas. IKD pada 2021 sebesar 0,49 dan sempat mengalami penurunan pada 2022 menjadi 0,46. Kemudian membaik pada 2023 dan 2024, yaitu meningkat menjadi 0,52.

Tabel 2.18
Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

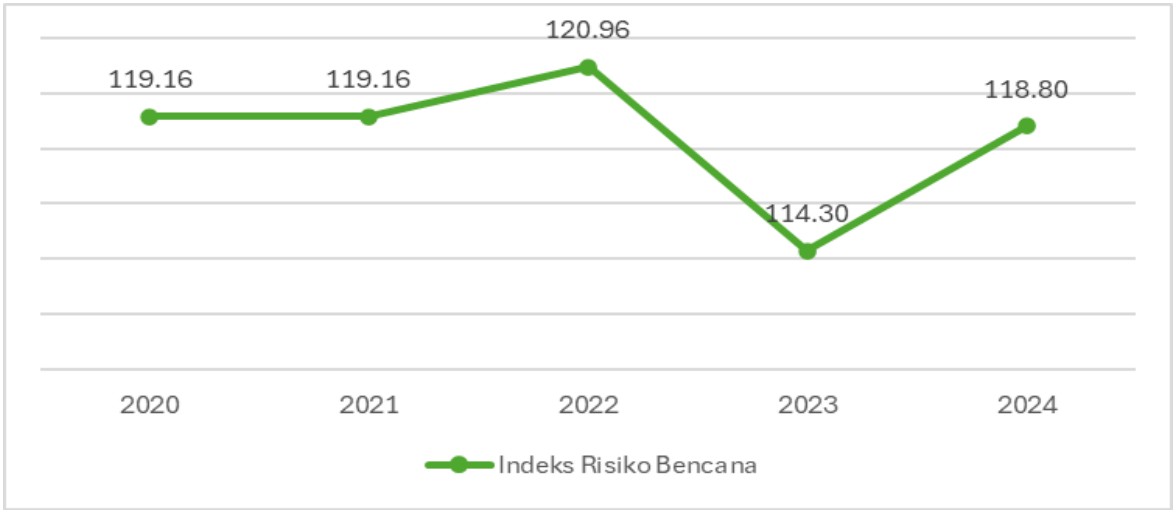
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	n.a	0,49	0,46	0,52	0,52

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Indeks lain yang digunakan untuk menilai kerentanan bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Berdasarkan dokumen DDDT-LH, rumus dasar IRB adalah *hazard x vulnerability capacity*. Bahaya (*hazard*) adalah ukuran peringkat bahaya berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan lainnya. Kerentanan (*vulnerability*) diukur berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kapasitas dinilai dari pendekatan tingkat ketahanan daerah yang serupa dengan IKD.

Berdasarkan data BNPB pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 sebagaimana gambar di bawah, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki skor 118,8 yang masuk kategori kerawanan bencana “sedang”. Aplikasi *Inarisk* BNPB menunjukkan IRB Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun, ini adalah indikasi baik yang menunjukkan penurunan risiko bencana setiap tahun.

Gambar 2.11
Indeks Risiko Bencana
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

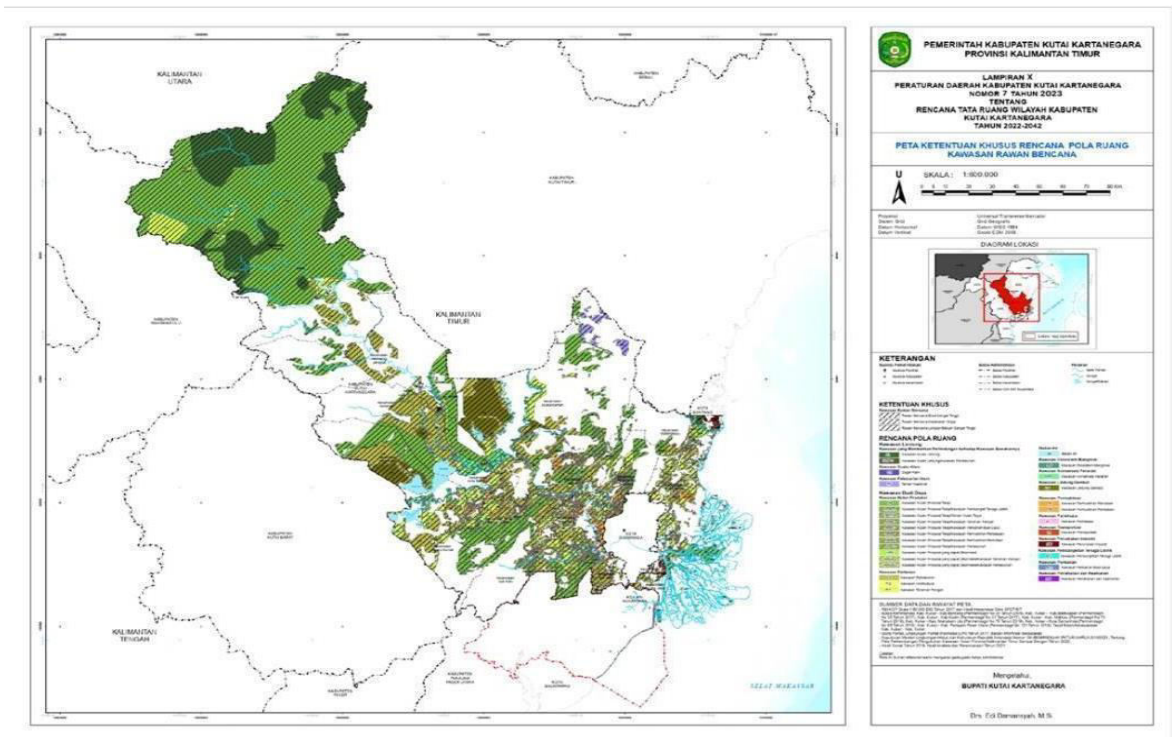


Sumber: Inarisk BNPB, 2024

BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengidentifikasi 12 jenis ancaman bencana antara lain banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, epidemi atau wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, serta kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042, terdapat beberapa kawasan yang masuk dalam kategori rawan bencana sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Kutai Kartanegara, 2023-2045

Kebencanaan juga berkaitan dengan perubahan iklim yang saat ini dapat dilihat dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penurunan emisi GRK merupakan indikator utama dalam pembangunan rendah karbon yang menggambarkan menurunnya kadar emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia selama periode tertentu, dibandingkan dengan kondisi dasar (*baseline*).

Dalam lima tahun terakhir, penurunan emisi GRK tertinggi terjadi pada 2024 dengan nilai penurunan 15.460.869,70 Ton CO₂-eq. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan energi bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, rehabilitasi hutan, atau transportasi rendah emisi.

Tabel 2.19
Penurunan Emisi GRK
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Realisasi Penurunan Emisi (Ton CO ₂ -eq)
2020	11.442.089,00
2021	11.680.591,00
2022	11.474.356,00
2023	10.948.259,00
2024	15.460.869,70

Sumber: DHLK Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2.1.1.7. Demografi

Pada 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 806.964 jiwa. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan 2020 yang hanya sebesar 734.485 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan itu juga dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, yang juga meningkat dari 27,34 per km² pada 2020 menjadi 30,03 per km² pada 2024. Demikian, pada indikator *sex ratio* pun terjadi peningkatan dari 108,81 pada 2020 menjadi 108,94 pada 2024.

Tabel 2.20
Indikator Kependudukan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Sex Ratio Penduduk	Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin	
					Laki-Laki	Perempuan
2020	734.485	n.a	27,34	108,81	382.783	351.785
2021	753.862	2,64	28,06	108,56	392.404	361.458
2022	778.096	3,21	28,96	108,64	405.154	372.942
2023	788.113	1,29	29,33	108,84	410.731	377.382
2024	806.964	2,39	30,03	108,94	420.744	386.220

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021-2025

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejumlah komunitas masyarakat adat yang hidup dan berkembang dalam tatanan sosial dan tradisinya. Berbagai komunitas masyarakat adat seperti masyarakat Dayak dan Kutai, tetap mempertahankan tradisi, hukum adat, serta praktik sosial budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Hal tersebut tercermin dalam beragam ritual keagamaan, kesenian tradisional, hingga pengelolaan sumber daya alam yang mereka lakukan secara arif dan berkelanjutan. Kecamatan yang paling banyak dihuni oleh subsuku komunitas adalah Kecamatan Tabang (7 subsuku komunitas) dengan populasi terbanyak adalah subsuku Kutai Adat Lawas Sumping Layang (1.506 jiwa).

Tabel 2.21
Kependudukan Masyarakat Adat
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kecamatan	Subsuku Komunitas	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK
		Laki- Laki	Perempuan		
Loa Kulu	Kenyah Lepoq Jalan	270	230	500	150
Muara Badak	Desa Adat Sungai Bawang	341	315	656	202
Sebulu	Kenyah Lempo Bem Lekaq Kidau	254	210	464	134
Tabang	Kayan Umaq Lasan	282	225	507	167
	Punan Lisum Suleq Tiq	170	485	315	89
	Punan Lisum Muara Salung	77	74	151	47
	Punan Lisum Muara Kebaq	150	120	270	90
	Punan Lisum Muara Belinau)	118	94	212	61
	Punan Bekatan	140	146	286	n.a.
	Kutai Adat Lawas Sumping Layang	816	690	1.506	816

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu berdasarkan tren demografis pada saat ini. Proyeksi

penduduk juga merupakan inisiatif untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penyusunan kebijakan, khususnya dalam perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Jumlah penduduk pada 2025 (845.610 jiwa) diproyeksikan akan meningkat menjadi 1.031.830 jiwa pada 2029. Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun tentu akan meningkatkan densitas penduduk, di mana pada 2029 diperkirakan densitas penduduk akan mencapai 38 jiwa per km².

Pada 2025-2029, Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada jendela bonus demografi, di mana rasio ketergantungan selama lima tahun itu berada di bawah 50. Hal tersebut mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia nonproduktif berada di bawah 50 persen dari jumlah penduduk usia produktif.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus diantisipasi, sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM agar mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Bonus demografi dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, kurangnya lapangan kerja yang dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, tingginya jumlah penduduk usia produktif yang tidak diimbangi dengan naiknya kualitas SDM, dapat pula mengakibatkan tingkat ekonomi masyarakat mengalami stagnasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel 2.22
Proyeksi Penduduk
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2030

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jml. Penduduk (jiwa)	845.620	897.920	946.490	991.180	1.031.830	1.068.530
Laki-laki	438.020	464.320	488.690	511.050	531.300	549.530
Perempuan	407.600	433.600	457.800	480.140	500.530	519.000
Kepadatan Penduduk*	31	33	35	37	38	40
Rasio Ketergantungan	40,92	39,74	39,01	38,63	38,51	38,54
Kel. Umur (ribu jiwa):						
0–14	200.190	206.580	213.370	220.380	227.450	234.050
15–64	600.060	642.580	680.890	714.990	744.940	771.260
65+	45.370	48.760	52.230	55.810	59.440	63.220

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025 (data diolah)

*= kepadatan penduduk masih melihat luas sebelum IKN

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

(1). Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi dan menyediakan berbagai barang dan jasa bagi penduduknya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Dengan kata lain, suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi (positif) jika nilai PDRB-nya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2020, laju pertumbuhan Kutai Kartanegara ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 4,21 persen akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, mulai memulih pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara kembali tumbuh positif sebesar 2,68 persen. Pada 2022, kembali meningkat

menjadi 3,7 persen. Meski telah tumbuh positif, capaian tersebut masih belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19. Baru pada 2023, laju pertumbuhan telah meningkat menjadi 5,13 persen, hingga pada 2024 menjadi 5,62 persen.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 – 2024

	Kategori/ Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,54	1,11	1,91	2,91	2,94
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,83	2,60	3,00	4,20	4,58
C	Industri Pengolahan	-3,54	0,69	2,92	2,11	18,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,34	1,49	4,80	17,17	27,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,50	4,95	12,50	11,25	7,28
F	Konstruksi	-4,01	5,80	11,28	15,45	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,72	3,82	5,29	7,66	9,61
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,17	3,40	11,07	11,24	8,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,48	2,27	7,58	13,30	16,53
J	Informasi dan Komunikasi	8,94	8,76	6,98	7,74	8,31
K	Jasa Keuangan	2,05	3,49	8,19	5,75	5,44
L	Real Estate	0,39	-1,83	2,42	12,44	6,28
M, N	Jasa Perusahaan	-3,72	1,30	5,63	12,39	9,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,79	2,05	6,46	6,79	17,68
P	Jasa Pendidikan	0,86	3,05	4,54	5,15	6,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,73	11,69	4,81	6,80	6,83
RSTU	Jasa Lainnya	-1,81	3,25	7,16	9,33	11,97
	Pertumbuhan Ekonomi	-4,21	2,68	3,70	5,13	5,62
	Pertumbuhan Ekonomi non Ekstraktif	-0,30	2,87	5,32	7,21	7,88

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (diolah), 2020-2024

Ditinjau dari lapangan usaha, pandemi Covid-19 telah menyebabkan setengah dari sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kontraksi. Sektor pertambangan dan penggalian, yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan, mengalami kontraksi hingga minus 5,83 persen. Namun demikian, masih ada pertumbuhan positif di tiga sektor: pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ketiga sektor tersebut justru berkembang pesat selama pandemi Covid-19 sebagai akibat dari kebijakan *work from home*, *study from home*, dan berbagai pembatasan kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah.

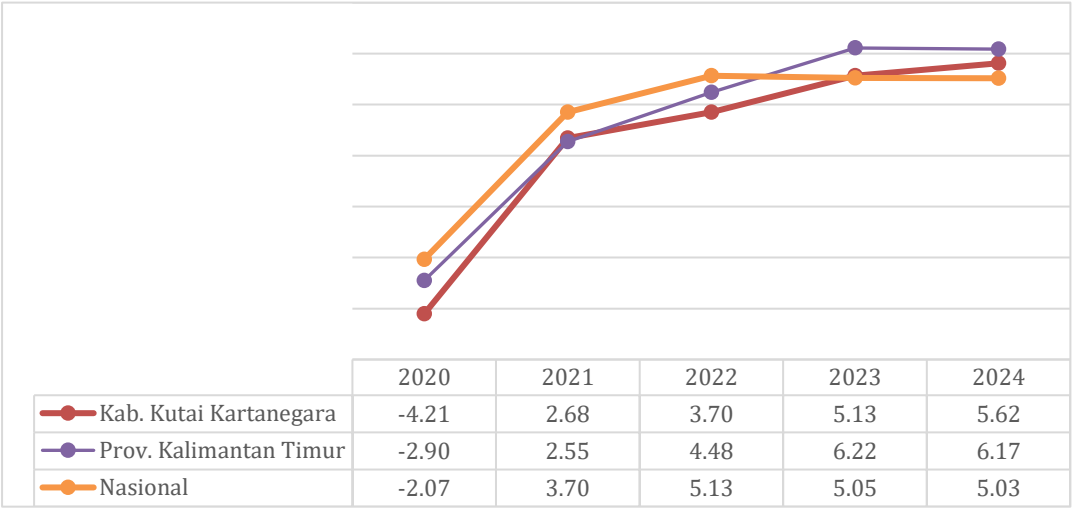
Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi non ekstraktif di Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan tren positif. Hal tersebut mencerminkan mulai berkurangnya ketergantungan terhadap sektor-sektor perekonomian berbasis sumber daya alam. Pada 2020, sektor non ekstraktif masih tertekan dengan kontraksi minus 0,30 persen sebagai akibat dari dampak pandemi. Namun demikian, pada 2021 perekonomian mulai beranjak pulih dengan pertumbuhan positif 2,87 persen, dan terus menguat menjadi 5,32 persen pada 2022.

Tren pertumbuhan tersebut terus berlanjut dengan pencapaian 7,21 persen pada 2023, hingga mencapai 7,88 persen pada 2024. Pertumbuhan yang stabil dan meningkat tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi di Kutai Kartanegara melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, serta industri pengolahan mulai menampilkan hasil yang signifikan dalam menopang kinerja ekonomi daerah secara lebih berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara memang pernah lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur pada 2021. Pada tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara mencapai 2,68 persen, sedangkan capaian Provinsi Kalimantan Timur sedikit di bawahnya (2,55 persen).

Sama halnya ketika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara masih cenderung di bawah rata-rata nasional. Pada 2024 misalnya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara berada sedikit lebih tinggi daripada nasional, walaupun angkanya masih tetap lebih rendah daripada capaian Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

(2). Tingkat Kemiskinan

Seseorang dikategorikan “miskin” jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemiskinan akan terus meluas seiring dengan melebarnya kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci kesejahteraan yang diukur berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pengukuran angka kemiskinan dilakukan dengan menetapkan standar kebutuhan minimum (makanan dan nonmakanan) yang harus dipenuhi seseorang agar mampu hidup layak. Standar kebutuhan minimum ini disebut dengan “garis kemiskinan”.

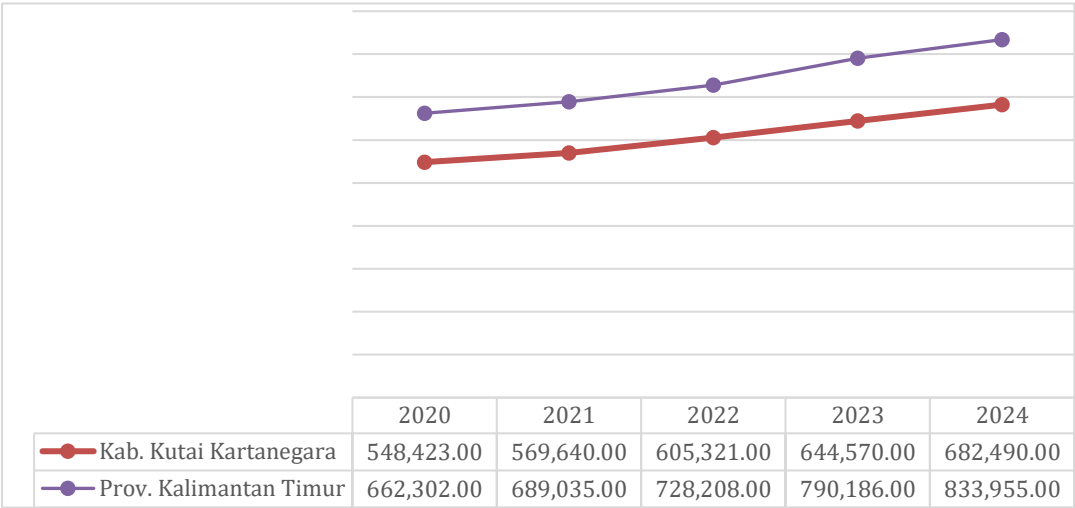
Penetapan garis kemiskinan lazimnya didasarkan pada berbagai variabel ekonomi dan sosial, sehingga angkanya sering berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Gambar di bawah ini menunjukkan garis kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang setiap tahun mengalami peningkatan dengan intensitas yang stabil.

Pada 2020, nilainya sebesar Rp548.423, sedangkan pada 2024 nilainya sudah lebih tinggi (Rp682.490). Garis kemiskinan juga terus mengalami kenaikan, salah satunya disebabkan karena laju inflasi yang menyebabkan harga barang terus meningkat, sehingga garis kemiskinan pun juga mengalami kenaikan. Tren tersebut sejalan dengan garis kemiskinan di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam lima tahun terakhir, garis kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan sebesar 24,45 persen, sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur naik sebesar 25,92 persen. Persentase kenaikan yang lebih rendah di Kabupaten Kutai

Kartanegara itu menunjukkan bahwa kebutuhan standar di Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dengan intensitas yang lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.

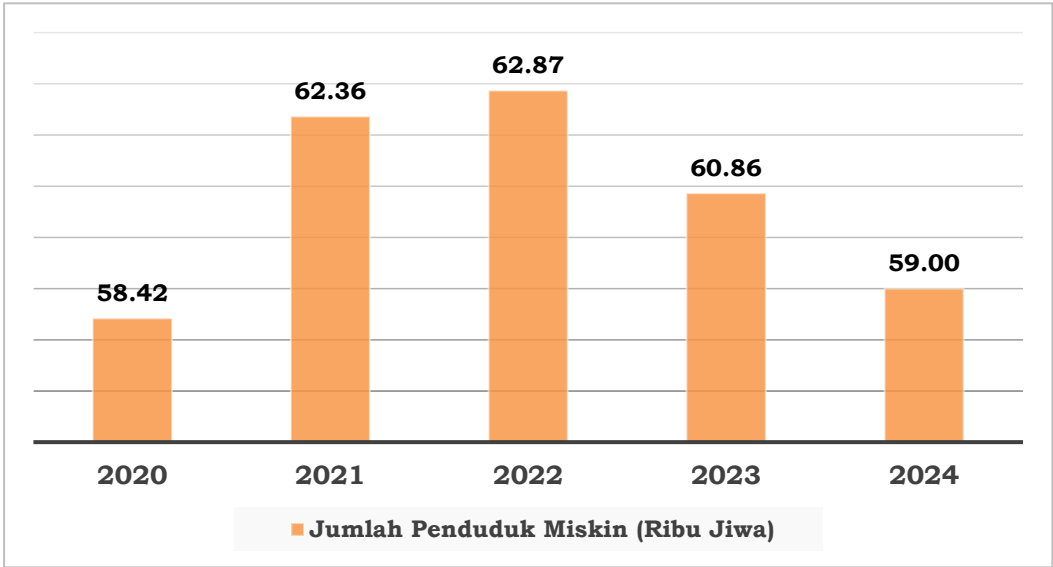
Gambar 2.14
Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2020–2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren naik selama pandemi Covid-19, sampai dengan 2022 angkanya mencapai 62.870 jiwa. Penanganan dan pemulihan pandemi menjadi kunci atas penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan hingga menjadi 59.000 jiwa pada 2024.

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Perkembangan persentase penduduk miskin dari 2020 hingga 2021 di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan, dengan angka tertinggi terjadi pada 2021 (7,99 persen). Kenaikan ini ditengarai karena pandemi Covid-19 yang telah menurunkan aktivitas ekonomi, yang berujung pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pada tahun berikutnya, kemiskinan menunjukkan tren menurun, yaitu sebesar 7,96 (2022); 7,61 (2023); hingga pada 2024 penurunannya menjadi 7,28 persen.

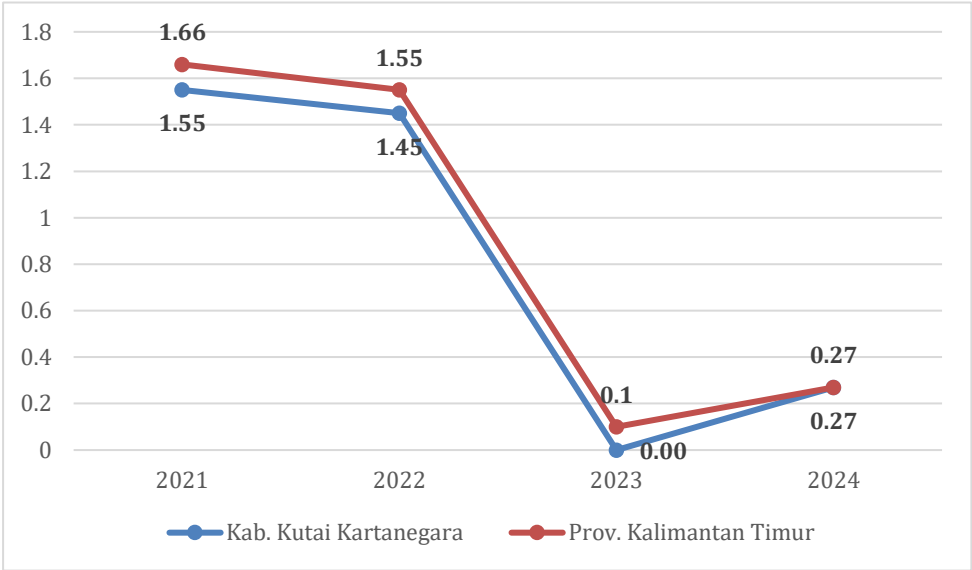
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi kemiskinan yang paling parah, yaitu ketika seseorang atau rumah tangga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak. Kebutuhan hidup minimum tersebut mencakup pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

Dalam konteks kebijakan nasional, Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 tentang *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem* serta RPJMN Tahun 2020–2024 telah menetapkan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu fokus utama penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Batasan yang digunakan adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita kurang dari atau sama dengan Rp10.739 per hari (harga konstan 2022). Kemiskinan ekstrem Kabupaten Kutai Kartanegara selama empat tahun terakhir mengalami tren menurun yang cukup signifikan.

Pada 2020, kemiskinan ekstrem mencapai angka 0, yang menunjukkan program penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil. Namun demikian, pada 2024 angka tersebut kembali meningkat menjadi 0,27 persen, di mana angka tersebut sama dengan angka capaian Provinsi Kalimantan Timur. Kenaikan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 itu menandakan bahwa masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan capaian angka nol kemiskinan ekstrem.

Gambar 2.16
Persentase Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020–2024



Sumber: BPS, 2025

Data penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Kutai Kartanegara per kecamatan digunakan untuk berbagai tujuan perencanaan, evaluasi, dan intervensi kebijakan, baik di level kabupaten maupun kecamatan.

Jumlah penduduk Desil-I merujuk pada jumlah penduduk yang masuk dalam 10 persen kelompok rumah tangga dengan pengeluaran terendah di suatu wilayah. Setelah memasuki tahap verifikasi dan validasi, jumlah penduduk miskin Desil-I tercatat sebanyak 5.888 jiwa, dengan kecamatan terbanyak adalah Anggana (588 jiwa).

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Desil I dan Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Desil-I	Jumlah Penduduk Miskin*
1	Tenggarong	731	322
2	Tenggarong Seberang	728	339
3	Loa Kulu	1.188	399
4	Loa Janan	1.125	336
5	Muara Badak	622	309
6	Marangkayu	576	340
7	Muara Jawa	562	252
8	Sebulu	1.143	363
9	Muara Kaman	1.626	682
10	Kota Bangun	368	195
11	Muara Muntai	633	342
12	Kenohan	646	203
13	Kembang Janggut	450	108
14	Tabang	516	258
15	Muara Wis	270	167
16	Sangasanga	161	77
17	Anggana	1.242	588
18	Kota Bangun Darat	289	124
	TOTAL	12.876	5.404

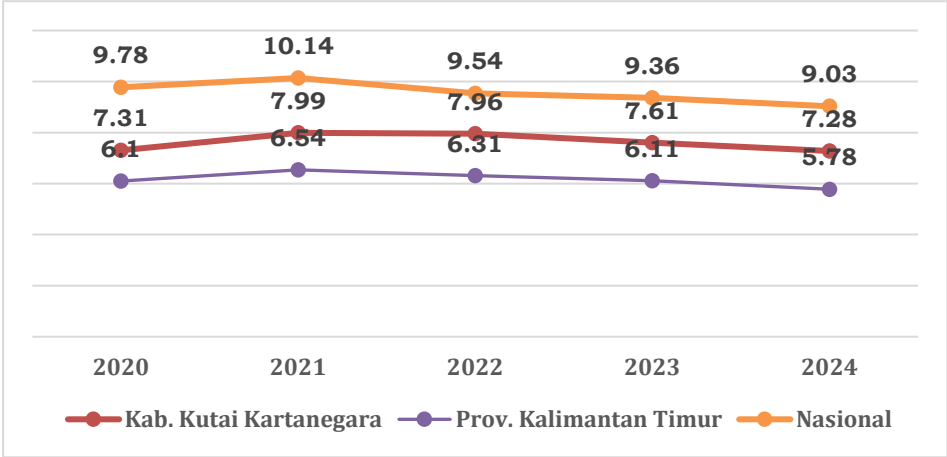
Sumber : Hasil Verifikasi dan Validasi Data P3KE

* hasil verifikasi dan validasi

Apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, angka kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara memang lebih tinggi, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional.

Laju penurunan angka kemiskinan setelah pandemi Covid-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak sebesar capaian Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Namun demikian, penurunan ini dipandang positif karena sudah mendekati capaian angka kemiskinan sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia, 2020–2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur jarak rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan. Secara sederhana, P1 memberikan gambaran tentang seberapa jauh pendapatan atau konsumsi orang miskin berada di bawah garis kemiskinan. Indeks ini membantu menunjukkan tidak hanya pada jumlah orang miskin, tetapi juga seberapa besar intensitas kemiskinannya. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan bahwa kedalaman rata-rata kemiskinan semakin menjauh dari garis kemiskinan, yang berarti tingkat kemiskinan mereka yang lebih dalam.

Pada 2020, nilai P1 Kabupaten Kutai Kartanegara menurun hingga 0,91, kemudian meningkat menjadi 1,22 (2021), dan kemudian turun kembali hingga mencapai 0,65 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, pada periode 2020- 2021 di Provinsi Kalimantan Timur dan nasional justru menunjukkan terjadi tren kenaikan P1, meskipun kemudian diikuti penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

Nilai P1 Provinsi Kalimantan Timur pada 2022-2024 lebih rendah daripada Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menunjukkan adanya *recovery* yang lebih cepat di tingkat kabupaten. Baik P1 Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Provinsi Kalimantan Timur masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan P1 nasional.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur ketimpangan di antara orang miskin dengan mempertimbangkan seberapa jauh jaraknya dari garis kemiskinan, serta distribusi pendapatan di antara mereka. P2 memberi bobot lebih pada kelompok “yang sangat jauh dari garis kemiskinan” dan membantu memahami keparahan kemiskinan dengan mencerminkan disparitas di antara orang-orang miskin. Nilai P2 yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar di antara orang-orang miskin.

P2 Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren serupa dengan P1. Kenaikan pada 2021 menunjukkan semakin besar ketimpangan yang terjadi antarpenduduk miskin selama pandemi Covid-19. Pada 2022 hingga 2024 nilainya menurun menjadi 0,10. Penurunan itu menunjukkan tingkat ketimpangan antarpenduduk miskin yang semakin rendah. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, penurunan P2 di provinsi lebih cepat dalam tiga tahun terakhir. Secara umum P2 nasional juga lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024

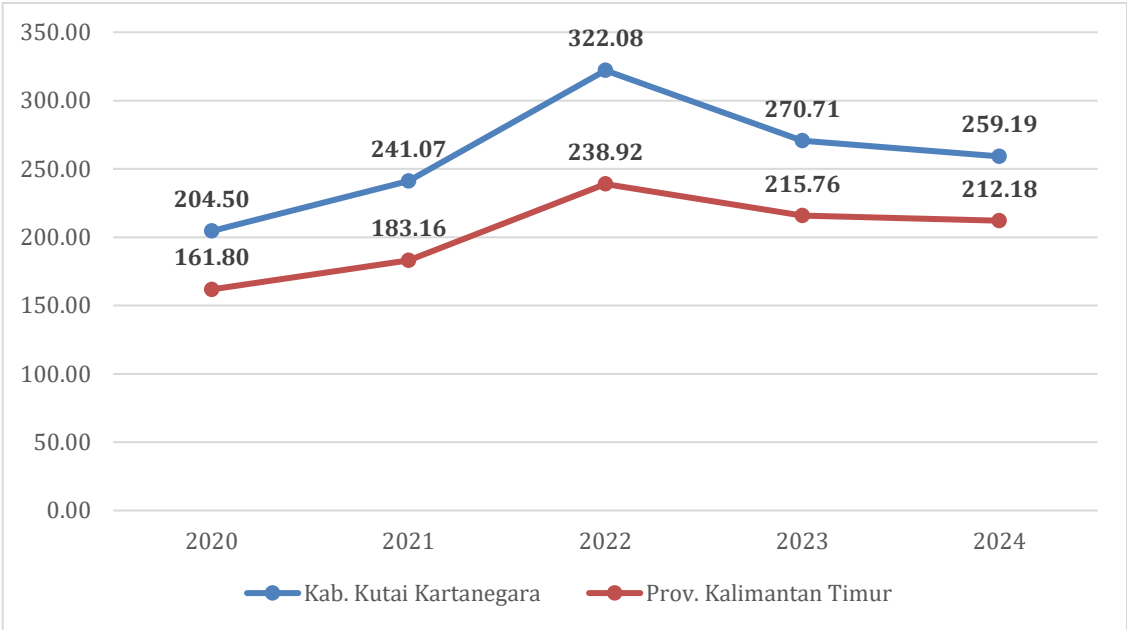
Tahun	Kutai Kartanegara		Kalimantan Timur		Nasional	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
2020	0,91	0,16	1,02	0,24	1,61	0,38
2021	1,22	0,37	1,22	0,34	1,71	0,42
2022	1,18	0,26	0,99	0,23	1,59	0,39
2023	0,93	0,17	0,77	0,14	1,53	0,38
2024	0,65	0,10	0,80	0,15	1,46	0,35

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

(3). PDRB Per Kapita

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, PDRB per kapita menjadi salah satu instrumen penting dalam memotret kinerja ekonomi daerah, serta merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk memahami posisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara dalam konteks yang lebih luas, data PDRB per kapita dianalisis secara komparatif dengan capaian nilai Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.18
PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara
dan Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024
(dalam Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

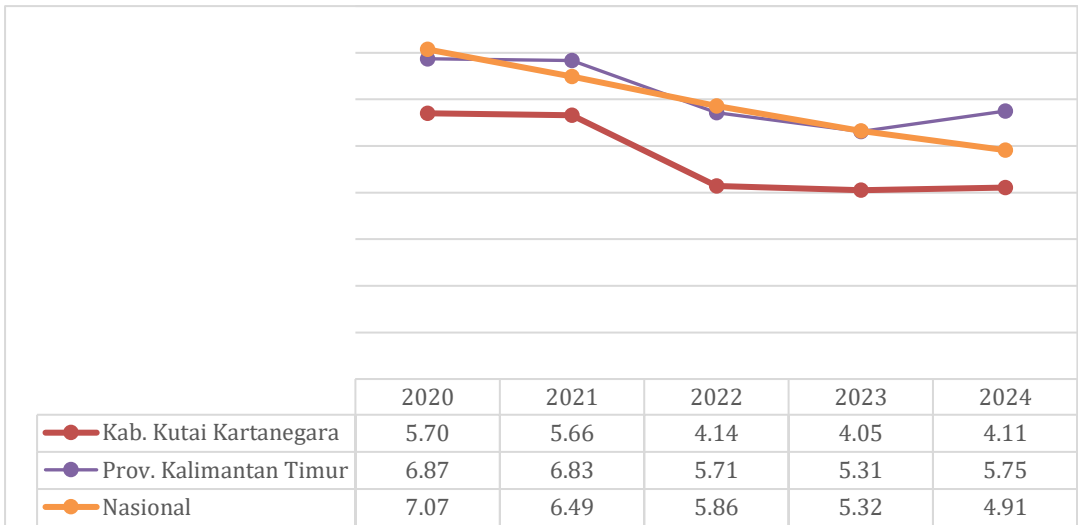
Gambar di atas menunjukkan bahwa pada periode 2020-2024 PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur, yaitu antara Rp204,50 juta sampai dengan Rp322,08 juta. Sementara itu, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kisaran Rp161,80 juta sampai dengan Rp238,92 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi PDRB per kapita, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur.

(4). Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan rasio antara jumlah pengangguran dengan keseluruhan angkatan kerja. Nilai TPT menunjukkan seberapa banyak tenaga kerja yang belum memanfaatkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran mencakup mereka yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum memulai bekerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2020-2024 menunjukkan tren menurun. Penurunan yang terjadi selama periode 2020-2021 tampak tidak begitu signifikan. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada 2022. Nilai TPT menurun menjadi 4,14 persen, di mana sebelumnya yang masih berada di angka 5,66 persen. Angka tersebut terus menurun hingga 2024 (4,11 persen). Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, nilai TPT Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024 selalu lebih rendah. Tren penurunan ini konsisten dengan yang terjadi di level Provinsi Kalimantan Timur dan nasional.

Gambar 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan nasional, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Realisasi TPT Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya penyerapan sektor pertambangan terhadap tenaga kerja lokal, ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, serta keterbatasan modal dan keterampilan angkatan kerja.

Pandemi Covid-19 sempat meningkatkan pengangguran akibat terhambatnya aktivitas usaha, namun kondisi mulai membaik seiring dengan pemulihan ekonomi, masuknya investasi, dan program penciptaan lapangan kerja. Peningkatan keterampilan serta adaptasi tenaga kerja terhadap kebutuhan pasar turut menekan angka pengangguran, sehingga TPT Kutai Kartanegara berada di bawah rata-rata provinsi maupun nasional.

Tingkat pengangguran di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan penduduk. Pada 2024, angka pengangguran relatif tinggi terjadi di kelompok lulusan SMA/SMK, meskipun jumlah mereka besar, lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi belum sebanding dengan jumlah pencari kerja. Penganggur dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 12.274 orang. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan seluruh jenjang usia kerja.

Tabel 2.26
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Tingkat Pendidikan				Total Pengangguran
	<= SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	
2020	4.865	9.918	4.667	1.047	20.497
2021	4.865	9.918	4.667	1.047	20.497
2022	4.656	2.397	7.418	959	15.430
2023	443	2.160	10.389	2.059	15.051
2024	840	1.022	12.274	1.989	16.125

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2025

Ditinjau dari jenis kelamin, tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Jumlah laki-laki mendominasi angkatan kerja, sehingga secara absolut jumlah pengangguran laki-laki cenderung lebih besar. Namun demikian, ternyata perempuan lebih rentan menghadapi pengangguran karena keterbatasan akses, peran ganda dalam rumah tangga, serta diskriminasi di pasar kerja. Pada 2024, dari 16.105 penganggur di Kutai Kartanegara, 16,91 persen (9.983 orang) berjenis kelamin laki-laki.

Tabel. 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Jenis Kelamin		Pengangguran Total
	Laki-laki	Perempuan	
2020	12.685	7.812	20.497
2021	12.685	7.812	20.497
2022	6.907	8.523	15.430
2023	9.328	5.723	15.051
2024	9.983	6.142	16.125

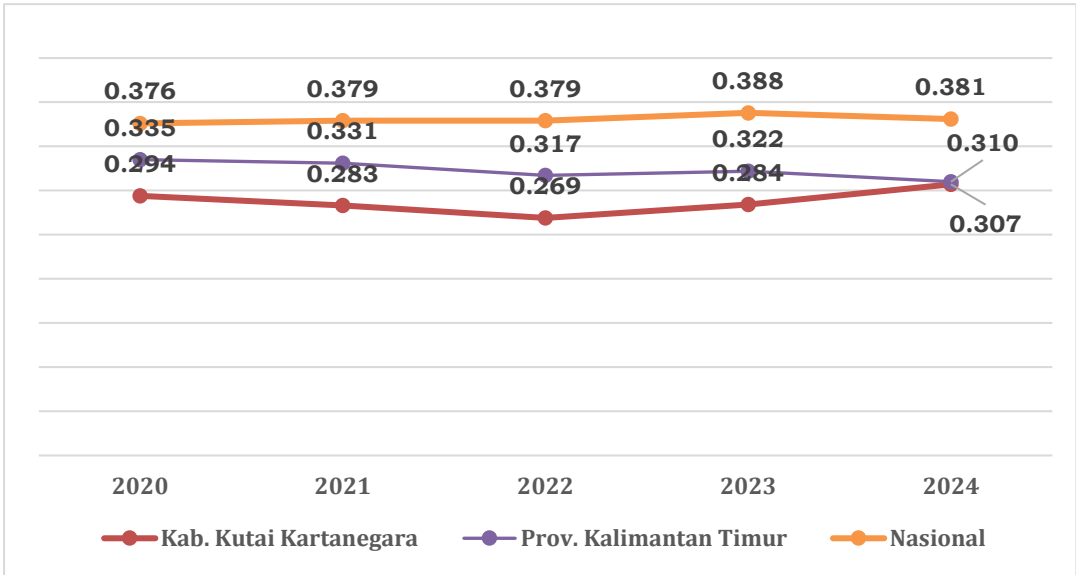
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, 2025

(5). Indeks Gini

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu disertai dengan pemerataan. Fokus hanya pada pertumbuhan dapat menyebabkan dua masalah utama: ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Nilai pada Indeks Gini terletak di antara angka 0 dan 1. Semakin mendekati 1, maka ketimpangan di wilayah tersebut semakin besar.

Gambar 2.20
Indeks Gini di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun terakhir terlihat fluktuatif. Pada 2020, Indeks Gini sebesar 0,294 dan dalam lima tahun terakhir mencapai nilai tertinggi sebesar 0,307 (2024). Indeks Gini ini kemudian menunjukkan penurunan

pada periode 2021- 2022 masing-masing sebesar 0,283 dan 0,269, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 0,284 (2023).

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia, Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara tampak lebih rendah. Perbedaan ini menjadi cermin dari ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata, yang mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan di antara kelompok masyarakat.

Ketidaksetaraan ekonomi dapat memburuk jika kelompok berpendapatan rendah terus mengalami pertumbuhan yang lambat, sementara kelompok berpendapatan tinggi tetap tumbuh dengan pesat. Jika masalah ini dibiarkan tanpa adanya penanganan yang memadai, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan politik yang merugikan.

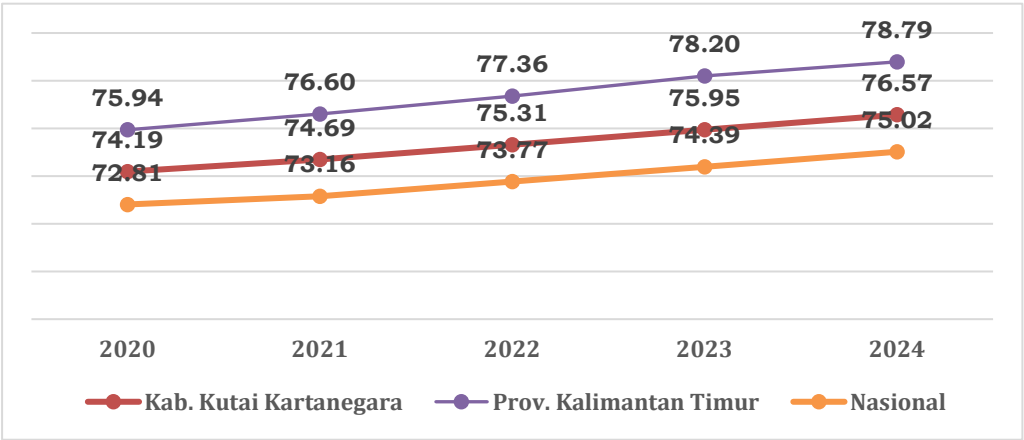
Kesenjangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah, serta tingkat kemiskinan, menjadi dua masalah serius yang lazim terjadi di negara-negara berkembang. Walaupun isu pemerataan selalu muncul di setiap tahap pembangunan, sangat penting untuk mengendalikan dampaknya agar tidak meluas. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan di suatu daerah perlu untuk selalu dipantau supaya pengambil kebijakan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menekan ketimpangan.

(6). Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam tiga dimensi utama: kesehatan (dengan mempertimbangkan harapan hidup), pendidikan (dengan mempertimbangkan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah), dan standar hidup (dengan mempertimbangkan pendapatan riil per kapita).

IPM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia suatu daerah, yang menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing ekonomi dan sosial daerah tersebut. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik kualitas hidup dan kemampuan SDM untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan.

Gambar 2.21
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

IPM Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan pada 2020 sampai dengan 2024. Nilai IPM terendah terjadi pada 2020 (74,19) sebagai dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, peningkatan terjadi dengan cukup stabil dari tahun ke tahun hingga mencapai nilai tertinggi pada 2024 (76,57).

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, nilai IPM Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif tertinggal, walaupun menunjukkan tren yang sama. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara masih selalu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Jika ditinjau dari pertumbuhannya, nilai IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tampak tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada 2024, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 0,82, sementara Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 0,75.

Tabel 2.28
Komponen Indeks Pembangunan Manusia
berdasarkan Jenis Kelamin

Komponen IPM	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah	tahun	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
Laki-Laki	tahun	9,57	9,58	9,59	9,61	9,62
Perempuan	tahun	8,63	8,64	8,81	8,82	8,81
Harapan Lama Sekolah	tahun	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
Laki-Laki	tahun	13,53	13,54	13,57	13,58	13,59
Perempuan	tahun	13,65	13,66	13,67	13,96	13,97
Ank. Harapan Hdp	tahun	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33
Laki-Laki	tahun	70,39	70,67	70,69	70,78	70,96
Perempuan	tahun	74,36	74,50	74,51	74,81	75,01
Pengeluaran/kapita	ribu rupiah	10.720	11.048	11.677	12.323	12.957
Laki-Laki	ribu rupiah	17.553	18.079	19.097	19.821	20.518
Perempuan	ribu rupiah	4.477	4.625	4.900	5.133	5.410
IPM	indeks	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57
Laki-Laki	indeks	79,04	79,47	80,03	80,44	80,87
Perempuan	indeks	62,36	62,88	63,86	64,87	65,67

Sumber: BPS Pusat, 2020-2024

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

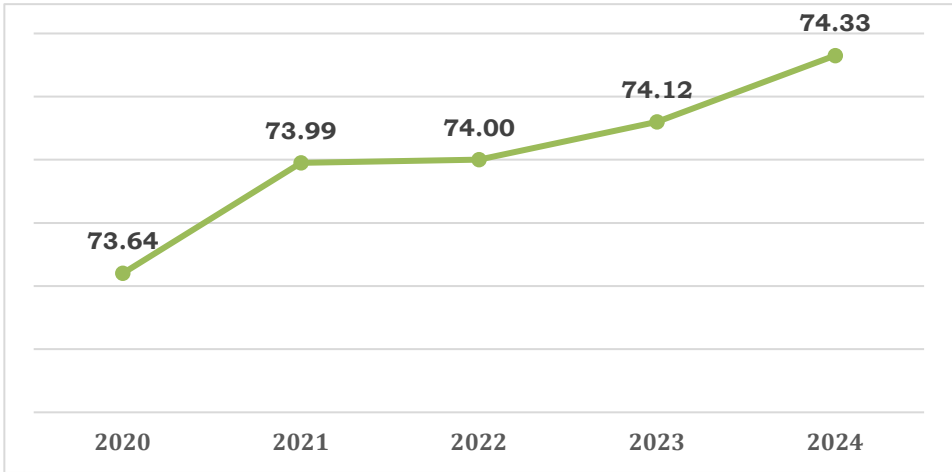
(1). Angka Harapan Hidup (AHH)

Kesehatan merupakan variabel utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Derajat kesehatan yang baik seseorang akan mampu bekerja dengan optimal hingga menghasilkan output yang berkualitas.

Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat terdapat beberapa indikator yang dapat merepresentasikan. Misalnya, Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang kesehatan, di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan durasi (tahun) hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak dilahirkan.

Berdasarkan hasil *long form* SP2020 Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 2024 Angka Harapan Hidup mencapai 74,33 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada 2024 akan mempunyai harapan hidup hingga usia 74-75 tahun ke depan.

Gambar 2.22
Angka Harapan Hidup
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 - 2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

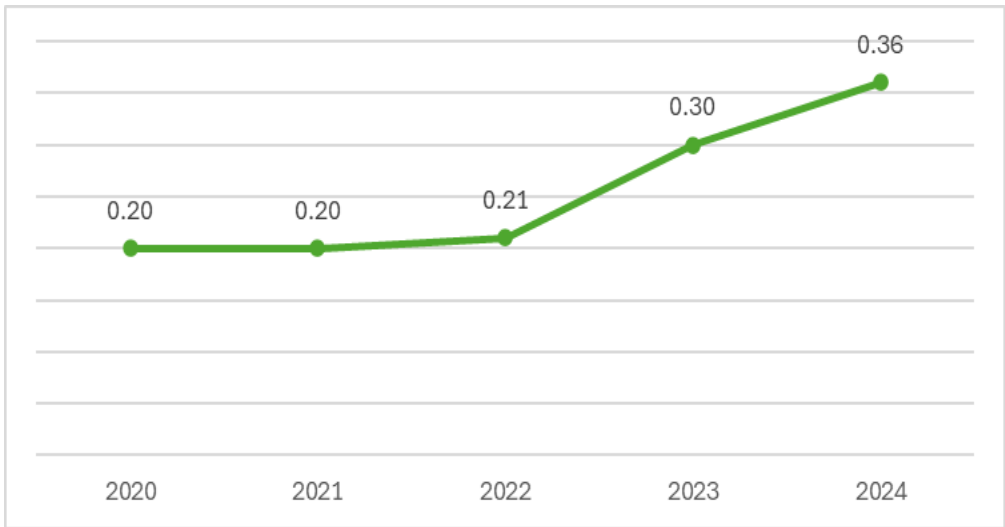
(2). Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup variabel kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Indikator tersebut meliputi: keluarga yang mengikuti program KB; ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan; bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; bayi yang mendapatkan ASI eksklusif; balita yang mendapatkan pemantauan pertumbuhan; penderita TB paru yang mendapatkan pengobatan sesuai standar; penderita hipertensi yang melakukan pengobatan secara teratur; penderita gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; anggota keluarga yang tidak merokok; keluarga yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); keluarga yang memiliki akses ke sarana air bersih; dan keluarga yang memiliki akses atau menggunakan jamban sehat.

Nilai IKS di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren meningkat pada periode 2020-2024. Pada 2020, nilai IKS sebesar 0,20 dan naik menjadi 0,36 (2024) atau meningkat sebesar 0,16 poin.

Gambar 2.23
Indeks Keluarga Sehat
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

(3). Angka Kematian Ibu

Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024 menunjukkan variasi yang signifikan, terutama dalam tren kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2020, jumlah kematian ibu sebanyak 30 kasus dari 12.862 kelahiran hidup, jumlah kasus tersebut mengakibatkan AKI meningkat tajam menjadi 233,25. Pada 2021, angka kematian ibu meningkat lagi menjadi 38 kasus dari 12.526 kelahiran hidup dan menyebabkan AKI mencapai puncaknya (303,37). Tentu saja, angka tersebut sangat mengkhawatirkan.

Namun demikian, pada 2022, telah terjadi penurunan jumlah kematian ibu menjadi 24 kasus dari 12.825 kelahiran hidup, sehingga AKI menurun dengan signifikan menjadi 187,13. Tren positif ini berlanjut hingga 2023, di mana jumlah kematian ibu lebih rendah lagi (12 kasus) dari 12.458 kelahiran hidup dan menghasilkan AKI sebesar 96,32. Penurunan drastis AKI pada 2023 menunjukkan perbaikan yang baik dalam hal kesehatan ibu dan layanan kesehatan di daerah tersebut.

Tabel 2.29
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Jumlah Kematian Ibu (kasus)	Jumlah Kelahiran Hidup (kasus)	AKI
2020	30	12.862	233,25
2021	38	12.526	303,37
2022	24	12.825	187,13
2023	12	12.458	96,32
2024	13	11.675	111,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

(4). Prevalensi Status Gizi Balita Stunting

Data prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan. berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada 2021 prevalensi *stunting* tercatat sebesar 26,40 persen. Angka ini sedikit meningkat pada 2022 menjadi 27,10 persen dan terus menunjukkan peningkatan masalah *stunting* di wilayah tersebut.

Namun demikian, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI), pada 2023 prevalensi *stunting* mengalami penurunan drastis menjadi 17,60 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan atas status gizi balita di Kabupaten Kutai Kartanegara selama setahun terakhir. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain mencakup peningkatan intervensi kesehatan dan gizi, program pemerintah yang efektif, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai pentingnya gizi anak.

Tabel 2.30
Prevalensi Status Gizi Balita Stunting
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021–2024

Tahun	Persentase (%)
2021	17,08
2022	17,64
2023	16,39
2024	14,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

(5). Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Selama lima tahun terakhir, cakupan penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang fluktuatif. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis pada 2020 tercatat sebesar 637 kasus. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan. Pada 2021 ditemukan 713 kasus, pada 2022 sebanyak 1.018 kasus, pada 2023 sebanyak 1.196 kasus dan pada 2024 mencapai 1.329 kasus.

Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam pengendalian dan penemuan kasus tuberkulosis di Kutai Kartanegara, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan kesehatan, program pencegahan, dan efektivitas sistem deteksi dini. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi tahunan yang signifikan, peningkatan penemuan kasus tuberkulosis pada 2024 memberikan harapan dalam upaya pengendalian penyakit ini. Untuk itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan, pengobatan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan perawatan untuk mencapai tujuan eliminasi tuberkulosis di masa depan.

Tabel 2.31
Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Perkiraan penemuan Kasus	Penemuan Kasus	Cakupan penemuan
2020	995	637	64,02
2021	1.045	713	68,23
2022	1.076	1.018	94,61
2023	1.642	1.196	72,84
2024	2.135	1.329	62,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

(6). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Selama lima tahun terakhir, data Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan pencapaian yang stabil. Pada periode 2020-2024, target dan realisasi cakupan JKN tampak mengalami fluktuasi, namun cenderung memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan.

Pada 2021, tercatat realisasi cakupan yang melebihi target (100,52 persen). Hal ini menunjukkan efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan akses kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan perlunya terus-menerus memperbaiki strategi untuk mencapai target secara konsisten dan meningkatkan aksesibilitas, serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.32
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2020	705.170	696.468	98,77
2021	765.280	769.281	100,52
2022	778.100	771.890	99,20
2023	782.630	797.719	101,93
2024	806.964	819.063	101,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Secara keseluruhan, pencapaian cakupan JKN di Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik. Evaluasi terus-menerus terhadap faktor-faktor seperti: efisiensi administrasi, ketersediaan fasilitas kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam program JKN, menjadi kunci dalam menjamin kelangsungan dan keberhasilan program ini di masa depan.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

(1). Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Isu tentang pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Secara umum, kedua indikator tersebut tampak ada peningkatan setiap tahun, di mana angka HLS pada 2024 meningkat hingga 0,6 persen. Namun demikian, intensitas kenaikan HLS sebelum 2024 tampak cukup rendah setiap tahun. Pada 2020, angka HLS mencapai 13,59 tahun, kemudian naik menjadi 13,65 tahun (2024).

Pencapaian RLS juga mengalami peningkatan. Pada 2020 angkanya mencapai 9,22 persen, kemudian meningkat menjadi 9,27 tahun (2024). Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama 9,27 tahun (lulus SMP).

Tabel 2.33
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2020-2024

(2). Angka Literasi/Numerasi

Data tentang persentase satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021-2024 menunjukkan tren menarik, terutama dalam *item* literasi membaca dan numerasi.

Untuk literasi membaca, baik di tingkat SD maupun SMP, terdapat peningkatan setiap tahun. Di tingkat SD, proporsinya meningkat dari 56,61 persen (2021) menjadi 65,35 persen (2022), dan mencapai 70,98 persen (2024). Tren serupa terlihat di tingkat SMP, dengan persentase kenaikan dari 60,57 persen (2021), menjadi 72,48 persen (2022), dan meningkat lagi menjadi 81,45 persen (2024).

Untuk *item* numerasi, terjadi peningkatan proporsi satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum. Di tingkat SD, persentase ini meningkat dari 31,47 persen (2021) menjadi 50,32 persen (2022), dan terus meningkat menjadi 63,42 persen (2024). Di tingkat SMP, terjadi peningkatan dari 42,79 persen (2021) menjadi 47,60 persen (2022), namun kemudian meningkat secara signifikan mencapai 75,82 persen (2024).

Peningkatan dalam literasi membaca menunjukkan keberhasilan upaya pendidikan dalam meningkatkan kemampuan membaca di sekolah-sekolah. Secara keseluruhan, data tersebut mencerminkan kemajuan positif dalam kompetensi literasi dan numerasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perhatian khusus diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif tersebut, terutama dalam bidang numerasi. Secara rinci, angka-angka pencapaian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Persentase Satuan Pendidikan
yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2024

Item	2021	2022	2023	2024
i) Literasi Membaca				
- SD	56,61	65,35	70,68	70,98
- SMP	60,57	72,48	77,34	81,45
ii) Numerasi				
- SD	31,47	50,32	58,85	63,42
- SMP	42,79	47,60	72,79	75,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, 2024

(3). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

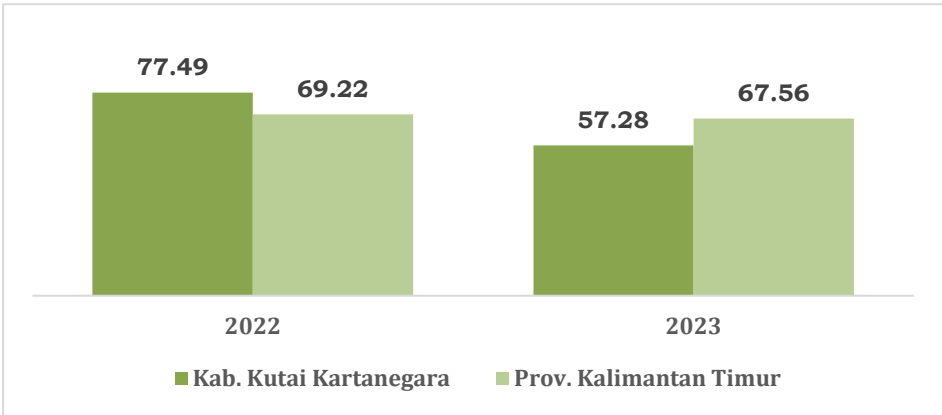
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator strategis dalam mengukur kualitas SDM dari sisi kapasitas literasi. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi, kemampuan membaca dan memahami informasi, serta keterlibatan dalam aktivitas literasi, baik di tingkat individu maupun komunitas.

IPLM dikategorikan ke dalam lima tingkatan, yaitu: "sangat rendah" (9,9–29,9), "rendah" (30–49,9), "sedang" (50–79,9), "tinggi" (80–89,9), dan "sangat tinggi" (90–100). Semakin tinggi skor indeks, maka semakin baik kualitas literasi masyarakat di suatu daerah.

Pada 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatatkan nilai IPLM sebesar 77,49. Capaian tersebut menempatkan kabupaten ini pada kategori "sedang", namun berada di ambang batas menuju kategori "tinggi". Capaian tersebut mencerminkan adanya upaya yang keras dalam membangun budaya literasi, baik melalui penyediaan fasilitas perpustakaan, kegiatan literasi komunitas, maupun integrasi program literasi di sektor pendidikan formal dan nonformal.

Namun demikian, pada 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam capaian IPLM Kutai Kartanegara (menjadi 57,28). Meski tetap berada dalam kategori "sedang", penurunan ini menjadi sinyal peringatan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lain untuk kembali mengevaluasi strategi pembangunan literasi. Penurunan skor ini dapat mencerminkan berbagai dinamika, seperti menurunnya akses terhadap layanan perpustakaan.

Gambar 2.24
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Provinsi Kalimantan Timur, 2022 – 2023



Sumber: Bappenas Republik Indonesia, 2024

(4). Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi

Data dalam tabel di bawah menunjukkan tren penurunan proporsi penduduk berpendidikan SD atau lebih rendah selama periode 2020-2023. Pada 2020, sebanyak 36,03 persen penduduk masih berada di kategori ini. Namun demikian, pada 2024 angkanya menurun menjadi 30,77 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses atau partisipasi dalam pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, proporsi penduduk berpendidikan SMP atau sederajat masih mengalami fluktuasi. Naik dari 22,48 persen (2020) kemudian menurun menjadi 20,63 persen (2024).

Sementara itu, proporsi penduduk berpendidikan SMA/SMK atau sederajat cenderung meningkat, dari 33,06 persen (2020) menjadi 38,07 persen (2024). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Selain itu, ada peningkatan kecil yang konsisten dalam proporsi penduduk dengan pendidikan diploma dan universitas. Pada 2020, proporsi penduduk berpendidikan Diploma I/II/III sebesar 1,75 persen, dan proporsi berpendidikan universitas atau D-IV sebesar 6,68 persen. Angka proporsi penduduk berpendidikan Perguruan Tinggi meningkat menjadi 10,54 persen (2024). Hal ini mencerminkan kemajuan dalam tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan lebih lanjut.

Tabel 2.35
Proporsi Penduduk
Berusia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/ke bawah	36,03	36,05	35,06	30,42	30,77
SMP/Sederajat	22,48	21,93	19,79	22,42	20,63
SMA/SMK/Sederajat	33,06	33,50	37,78	36,94	38,07
Diploma I/II/III	1,75	1,86	1,14	2,10	10,54
Universitas/D IV	6,68	6,66	6,22	8,11	
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh, berdaya saing, dan inklusif. Dalam konteks pembangunan daerah, sistem perlindungan sosial yang adaptif bukan hanya berfungsi sebagai jaring pengaman (*safety net*) pada saat masyarakat menghadapi krisis sosial maupun ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesetaraan kesempatan dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjamin bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan akibat kemiskinan, disabilitas, bencana, atau tekanan ekonomi lainnya.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlindungan sosial diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, serta layanan sosial yang responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Upaya ini mencakup tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berdaya. Dengan demikian, perlindungan sosial yang adaptif akan menjadi pondasi penting dalam memperkuat daya lenting masyarakat terhadap guncangan, sekaligus menjadi katalisator pembangunan manusia yang berkeadilan di daerah.

Hal tersebut juga selaras dengan agenda nasional dalam membangun sumber daya manusia unggul dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pembangunan perlindungan sosial yang baik ditunjukkan dengan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 100 persen dari tahun 2020-2024.

Indikator lainnya yang dapat menunjukkan pembangunan perlindungan sosial antara lain melalui Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti, yang mencapai 100 persen pada 2024. Serta peningkatan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada 2020 dari 70,37 persen menjadi 97,68 persen (2024).

Tabel 2.36
Pembangunan Perlindungan Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	100,00	91,31	97,63	100,00	100,00
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	70,37	90,02	97,04	98,72	97,68

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kutai Kartanegara, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

(1). Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberi gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan. Indeks ini mencakup tujuh dimensi: pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan *gender*.

Pada 2022, nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional, yaitu sebesar 49,08. Nilai ini mengalami peningkatan pada 2024 (74,2). Tabel di bawah menyajikan nilai untuk masing-masing dimensi pada IPK Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.37
Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2022 – 2024

Wilayah	2022	2023	2024
Kabupaten Kutai Kartanegara	49,08	53,23	57,42
Provinsi Kalimantan Timur	54,81	57,56	57,56*
Nasional	55,13	57,13	57,13*

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di bawah, nilai indeks untuk masing-masing indikator periode 2022-2024 secara umum menunjukkan peningkatan. Namun, nilai indeks pada indikator pendidikan justru mengalami penurunan dari 74,25 (2022) menjadi 73,66 (2024). Nilai indeks tertinggi terjadi pada 2024 pada indikator ketahanan sosial budaya (82,29), sedangkan nilai indeks terendah terjadi pada indikator budaya literasi dengan (38,80).

Tabel 2.38
Dimensi Pengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022-2024

Indikator	Nilai Indeks		
	2022	2023	2024
Ekonomi Budaya	21,00	34,00	39,00
Pendidikan	74,25	72,23	73,66
Ketahanan Sosial Budaya	73,28	75,96	82,29
Warisan Budaya	58,92	67,43	69,74
Ekspresi Budaya	32,70	34,96	45,08
Budaya Literasi	36,60	39,00	38,80
Gender	46,84	49,00	53,38

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Tabel 2.39
Jumlah Kejadian Konflik yang Diselesaikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah konflik yang diselesaikan	28	31	26	14	14

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

(1). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) adalah ukuran kualitas keluarga yang mencerminkan ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. *iBangga* menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam meningkatkan kualitas keluarga. Berdasarkan *iBangga* wilayah dapat diklasifikasikan menjadi tiga status: tangguh, berkembang, dan rentan.

Nilai *iBangga* berkisar antara 0-100, kategori “rentan” nilainya di bawah 40, “berkembang” antara 40-70, dan “tangguh” jika nilainya di atas 70. Tabel berikut merupakan nilai *iBangga* Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan nasional.

Tabel 2.40
Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*)
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur
dan Nasional, 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kutai Kartanegara	n.a	54,90	58,60	63,34	66,96
Prov. Kalimantan Timur	n.a	54,91	56,72	64,54	65,50
Nasional	n.a	54,01	56,07	61,43	62,40

Sumber: BKKBN, 2024

Pada 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai *iBangga* lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Timur yaitu 54,90 (Kutai Kartanegara) dan 54,91 (Kalimantan Timur). Nilai *iBangga* di Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat hingga mencapai 66,96 (2024), yang lebih tinggi dibandingkan angka provinsi maupun angka nasional.

Berdasarkan klasifikasi *iBangga*, dapat disimpulkan bahwa kondisi pembangunan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk kategori “berkembang” selama periode 2021-2024.

(2). Pembangunan Gender

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan terus meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 sebesar 81,20, meningkat 2,3 poin dibanding 2020 (78,90). Sedangkan pada IPG yang melihat sejauh mana perempuan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, terlihat dari capaian saat ini, yang sudah mulai mengalami peningkatan dibanding dengan capaian 2020.

Meskipun masih perlu upaya meningkatkan jumlah perempuan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun pada 2024 pencapaian IPG mencapai 72,29, dengan capaian yang masih di bawah angka nasional (77,62).

Tabel 2.41
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	78,90	79,12	79,80	80,64	81,20
Indeks Pemberdayaan Gender	61,43	62,76	63,40	63,55	72,29
Indeks Ketimpangan Gender	0,556	0,511	0,540	0,490	0,491

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2021-2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan gender yang disebabkan oleh ketimpangan gender. Indikator ini dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia: reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Selama periode 2020-2024, secara umum ketimpangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Pada 2020, capaian IKG mencapai 0,556 dan menurun hingga 2024 menjadi 0,431. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara telah semakin mengecil.

(3). Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren meningkat selama periode 2020-2024. Pada 2020, nilai IPA mencapai 60,00 dan terus mengalami perbaikan bertahap menjadi 60,09 (2021), 60,86 (2022), 61,79 (2023), hingga mencapai 62,09 (2024). Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Peningkatan nilai IPA mencerminkan semakin kuatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam melindungi hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan intervensi yang

lebih terfokus, termasuk penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Meskipun peningkatannya bersifat gradual, capaian tersebut memperlihatkan bahwa sistem perlindungan anak mulai bergerak ke arah yang lebih responsif dan inklusif. Dibutuhkan penguatan kolaborasi antarsektor serta pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak, agar akselerasi capaian IPA dapat lebih signifikan. Hal tersebut penting untuk mendorong terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh dan menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang ramah anak dan berkelanjutan.

Tabel 2.42
Indeks Perlindungan Anak
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60,00	60,09	60,86	61,79	62,09

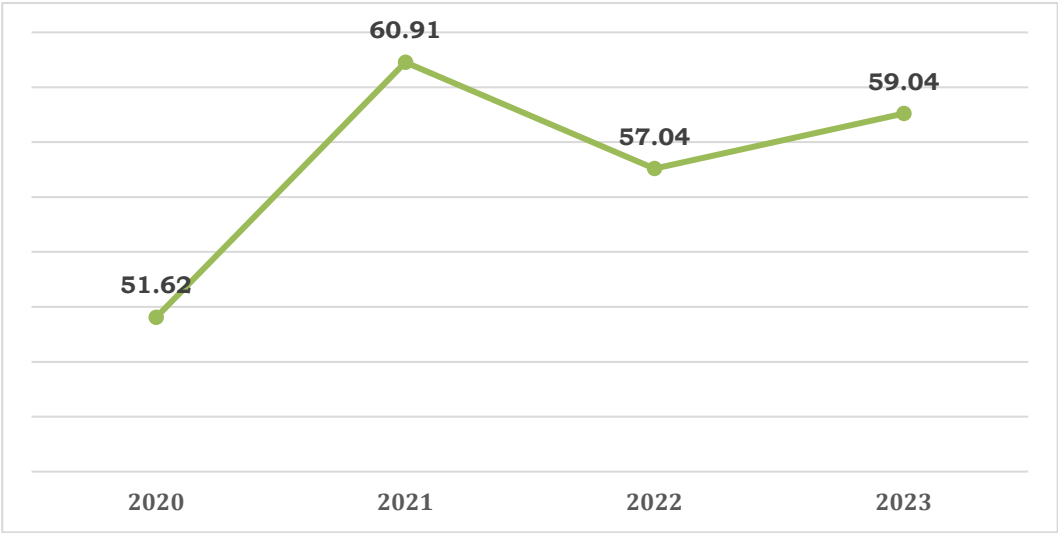
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

(4). Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu alat ukur penting untuk menilai perkembangan dan kualitas hidup pemuda dalam berbagai aspek pembangunan. IPP memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sejumlah aspek, seperti pendidikan formal dan informal, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi sosial dan inklusivitas, beserta kesetaraan mempengaruhi kondisi pemuda.

IPP Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2020-2023 mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Penyebab fluktuasi karena nilai komponen Partisipasi dan Kepemimpinan ikut berfluktuasi. Nilai IPP tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 60,91.

Gambar 2.25
Indeks Pembangunan Pemuda
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2023



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

(1). Angka Ketergantungan

Berdasarkan data 2020- 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah, angka ketergantungan di Kutai Kartanegara menunjukkan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,91 persen per tahun. Pada 2020, angka ketergantungan sebesar 46,35, kemudian terus menurun yaitu 45,65 (2021), 44,83 (2022), 44,10 (2023), hingga mencapai 42,73 (2024). Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan penurunan angka ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.43
Angka Ketergantungan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Angka Ketergantungan	
	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
2020	46,35	44,33
2021	45,65	41,72
2022	44,83	43,20
2023	44,10	43,14
2024	42,73	41,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah), 2020-2024

Jika melihat tren angka ketergantungan di Kalimantan Timur, polanya tidak jauh berbeda dengan Kutai Kartanegara, namun penurunannya lebih lambat dengan rata-rata penurunan sebesar 0,39 persen per tahun. Penurunan angka ketergantungan ini memberikan sinyal positif, di mana jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk nonproduktif, sehingga berpotensi untuk meraih bonus demografi. Namun demikian, untuk memastikan bahwa potensi bonus demografi dapat dioptimalkan, maka diperlukan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pemanfaatan Iptek dan inovasi tidak hanya menjaga stabilitas produktivitas di berbagai sektor ekonomi, tetapi juga mempercepat transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif. Dalam jangka panjang, integrasi teknologi dan inovasi akan mampu meningkatkan efisiensi produksi, serta mendorong diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dan pendapatan daerah. Perkembangan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan lahan yang luas dan berkualitas, tenaga kerja yang tersedia, cara hidup penduduk dalam pertanian, transfer teknologi, dan pengembangan teknologi lainnya.

Tidak dapat dimungkiri, sektor industri adalah motor penggerak perekonomian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor penting untuk meningkatkan perekonomian. Rasio PDRB industri pengolahan mengalami penurunan pada periode 2020-2022, di mana pada 2020 capaian sebesar 4,49 persen menurun menjadi 4,24 persen (2021), dan menurun lagi pada 2022 (3,47 persen). Rasio PDRB industri pengolahan berhasil membaik pada 2023, meningkat menjadi 4,16 persen, dan mencapai puncaknya pada 2024 (5,04 persen).

Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatat kontribusi pembangunan perekonomian yang meningkat, walaupun masih di bawah rasio PDRB industri pengolahan. Capaian rasio PDRB sektor tersebut sebesar 0,34 persen (2020), dan meningkat hingga mencapai 0,37 persen (2024).

Peningkatan itu mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam sektor penyediaan akomodasi (hotel dan penginapan) serta makan minum, yang dapat berkaitan dengan meningkatnya kunjungan, konsumsi lokal, serta inovasi pelayanan di bidang pariwisata dan kuliner.

Tabel 2.44.
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Lapangan Usaha	Rasio PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan	4,49	4,24	3,47	4,16	5,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,29	0,23	0,32	0,37

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Return on Assets (ROA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan aset total yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui tingkat ROA, maka perusahaan dapat mengetahui tingkat produktivitasnya jika dibandingkan dengan perusahaan lain, sehingga dapat dimanfaatkan untuk rencana strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Berikut ini merupakan data ROA BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2020-2023. Pada periode 2020-2023, ROA BUMD menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Pada 2020, BUMD mencatat ROA negatif sebesar -1,77 persen, kemudian mengalami penurunan tajam pada 2021 dengan ROA negatif sebesar -11,92 persen. Hal ini menunjukkan adanya kerugian signifikan dan masalah inefisiensi dalam penggunaan aset. Pada 2023 ROA BUMD berhasil meningkat menjadi 12,76 persen.

Tabel 2.45
***Return on Asset* BUMD**
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tahun	Laba Bersih (Rp)	Aset Total (Rp)	ROA (%)
2020	-9.712.365.395	548.084.298.154	-1,77
2021	-57.264.404.103	480.466.173.402	-11,92
2022	51.839.994.612	567.901.723.358	9,13
2023	78.685.315.262	616.447.112.823	12,76
2024	69,921,075,763	618,802,509,942	11,00

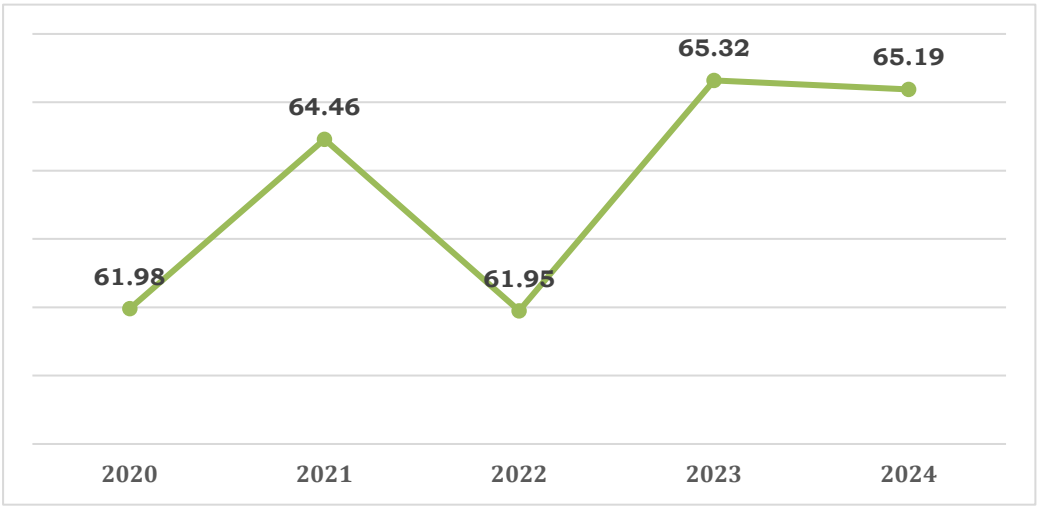
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan untuk mengidentifikasi penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam aktivitas produktif. Menurut BPS, TPAK dikategorikan menjadi tiga kelompok: "tinggi" (TPAK ≥ 70), "sedang" (50 < TPAK < 70), dan "rendah" (TPAK ≤ 50).

Gambar di bawah menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024. TPAK mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, termasuk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, TPAK pada 2020 mencapai 61,98 persen akibat pandemi Covid-19, kemudian pulih dan meningkat kembali hingga pada

2023 yang mencapai angka 65,32 persen. Namun pada 2024 sedikit menurun menjadi 65,19 persen.

Gambar 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah alat untuk mengukur tingkat inovasi dan kemajuan di suatu wilayah seperti provinsi, atau kabupaten/kota. Tujuan perhitungan dari indeks ini adalah untuk menilai sejauh mana daerah tersebut berhasil dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik.

Indeks tersebut dapat membantu pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami dan mendorong inovasi pembangunan daerah. Capaian IID dapat dibedakan dalam empat kategori sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Kategori Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Range Nilai	Kategori
0	Tidak Dapat Dinilai
0,01 - 34,99	Kurang Inovatif
35,00 - 60,00	Inovatif
60,01 - 100,00	Sangat Inovatif

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri

Menurut SK Menteri Dalam Negeri RI, IID Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang positif. Pada periode 2021-2024, IID Kutai Kartanegara masuk dalam kategori "Inovatif". IID tersebut terus meningkat dengan rincian: 2021 (41,38 -- "inovatif"), 2022 (55,83 -- "Inovatif"), 2023 (58,69 -- "Inovatif"), dan 2024 (58,59 -- "Inovatif").

Tabel 2.47
Indeks Inovasi Daerah (IID)
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2024

Uraian	Indeks Inovasi Daerah			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kutai Kartanegara	41,38	55,83	58,69	58,59
Kategori	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2024

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif menggambarkan besaran partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan nilai tambah. Data realisasi menunjukkan peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif yang signifikan, dari 870 orang (2021) kemudian naik menjadi 1.501 orang (2022), pada 2023 naik lagi menjadi 2.531 orang dan pada 2024 menjadi 4.385 orang. Hal tersebut menunjukkan mulai terbangunnya ekosistem ekonomi kreatif yang lebih terstruktur yang didorong oleh dukungan kebijakan, program pelatihan, serta akses pasar yang membaik.

Sementara itu, Rasio Kewirausahaan merupakan indikator yang mengukur proporsi jumlah wirausahawan terhadap jumlah penduduk produktif. Meskipun pada periode 2020–2021 datanya belum tersedia, namun rasionya tercatat sebesar 10,38 (2022), kemudian sedikit meningkat pada 2023 (10,45), dan mengalami peningkatan menjadi 14,62 (2024). Tren peningkatan dari 2022 sampai dengan 2024 mengindikasikan adanya pertumbuhan kewirausahaan secara riil, yang sangat penting untuk memperkuat ekonomi lokal dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Kutai Kartanegara terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap berkelanjutan. Capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan terlihat dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kondisi sektor ekonomi pertanian dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, di mana pada 2020 pertumbuhan ekonomi mencapai 0,54 persen, kemudian meningkat menjadi 1,11 persen (2021). Terjadi peningkatan kembali menjadi 1,91 persen (2022), dan terus meningkat menjadi 2,91 persen (2023).

Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai puncaknya sebesar 2,94 persen (2024). Dari sisi kontribusi pertanian terhadap perekonomian, distribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami fluktuasi. Pada 2020 (14,91 persen) menurun menjadi 13,49 persen (2021), kemudian menurun drastis pada 2022 (10,72 persen), dan berhasil mengalami pemulihan pada 2023 (13,12 persen) dan 14,48 persen (2024).

Tabel 2.48
Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	14,91	13,49	10,72	13,12	14,48
2	LPE PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	0,54	1,11	1,91	2,91	2,94

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Perwujudan transformasi digital suatu daerah antara lain dapat ditinjau dari pencapaian ekonomi sektor informasi dan komunikasi. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pertumbuhan ekonomi sektor tersebut cukup baik dan secara umum berada di atas pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian pertumbuhan ekonomi kategori informasi dan komunikasi pada 2024 sebesar 8,31 persen, dengan struktur ekonomi sebesar 0,87 persen.

Tabel 2.49
Capaian Perekonomian Sektor Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	8,94	8,76	6,98	7,74	8,31
Distribusi PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi (%)	0,86	0,79	0,63	0,79	0,87

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah mendorong peningkatan produktivitas perekonomian yang berdaya saing, serta memperkuat keterlibatan dalam rantai pasok global. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, arah pembangunan ini tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB menurut pengeluaran.

Kontribusi PMTB dalam struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tetap menjadi salah satu penopang utama pembangunan, meskipun mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Pada 2020, kontribusi PMTB tercatat sebesar 38,41 persen, meningkat menjadi 44,83 persen pada 2024. Dari sisi pertumbuhan, PMTB mengalami peningkatan signifikan (8,16 persen) pada 2021 jika dibandingkan dengan 2020 (0,80 persen), mengalami penurunan bahkan mencapai angka 4,12 persen pada 2024. Ini menunjukkan adanya penurunan investasi dan pembangunan fisik pascapandemi.

Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi, namun cenderung membaik. Pada 2020, kontribusinya sebesar 45,12 persen, menurun tajam menjadi 38,00 persen pada 2024. Terjadi fluktuasi juga pada pertumbuhan net ekspor barang dan jasa, pada 2020 sebesar 6,73 persen kemudian menurun tajam pada 2021 menjadi 0,16 persen, kembali meningkat menjadi 6,23 persen pada 2024.

Tabel 2.50
Pembentukan Modal Tetap Bruto
dan Net Ekspor Barang dan Jasa
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,80	8,16	7,75	10,53	4,12
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	6,73	0,16	1,29	0,19	6,23
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,41	36,29	30,48	41,52	44,83
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	45,12	49,60	58,28	43,17	38,00

Sumber: BPS Kab. Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Perkembangan investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup baik. Kabupaten Kutai Kartanegara kini semakin menarik perhatian investor berkat posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kemudahan iklim usaha yang ditawarkan.

Dalam lima tahun terakhir, nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) meningkat, angka realisasi terakhir (2024) sebesar Rp16,41 triliun. Selain itu, realisasi investasi sektor ekonomi nonekstraktif, yang menjadi basis perekonomian, yang menjadi sektor unggulan juga meningkat, dengan realisasi terakhir (2024) sebesar Rp5,39 triliun.

Tabel 2.51
Capaian Investasi
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	1,69	36,22	90,63	51,38	10,85
Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	1,69	36,22	90,63	51,38	10,85
Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (juta rupiah)	3.704.869	5.131.879	9.782.835	14.809.258.	16.415.888
Pertumbuhan realisasi investasi sektor ekonomi non ekstraktif	- 36,63	- 59,08	467,87	55,16	39,34
Realisasi investasi sektor ekonomi non ekstraktif (juta rupiah)	1.073.438	439.297	2.494.655	3.870.777	5.393.734
Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu	88,73	90,04	91,35	91,96	91,96

Sumber: DPMPSTSP Kab. Kutai Kartanegara, 2025

Data rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2023 menunjukkan fluktuasi yang dalam. Pada 2020, rasio ini meningkat tajam menjadi 0,07 persen. Pada 2021, rasio turun menjadi 0,06 persen meskipun penerimaan Pajak Daerah meningkat, karena PDRB juga mengalami peningkatan signifikan.

Pada 2022, rasio masih sama seperti tahun sebelumnya (0,06 persen) meskipun PDRB meningkat tajam, karena peningkatan penerimaan Pajak Daerah tidak cukup besar untuk mempertahankan rasio yang lebih tinggi. Pada 2023, rasio sedikit naik menjadi 0,07 persen dan pada 2024 rasio juga meningkat menjadi 0,08 bersamaan dengan peningkatan pada penerimaan Pajak Daerah dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk PDRB pada 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan variasi dalam kontribusi pajak terhadap ekonomi daerah, yang dapat disebabkan oleh perubahan kebijakan pajak, efisiensi pemungutan pajak, dan perubahan dalam basis ekonomi daerah. Rasio yang

lebih tinggi menunjukkan peningkatan kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB, yang bisa mencerminkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik atau peningkatan dalam kepatuhan pajak.

Tabel 2.52
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (juta rupiah)	PDRB (juta rupiah)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2020	110.440	149.043.577,93	0,07
2021	114.970	177.416.584,16	0,06
2022	142.750	240.392.589,80	0,06
2023	133.990	204.876.164,54	0,07
2024	165.807	204.700.140,77	0,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur mampu memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien.

Secara umum, nilai IKLI komposit pada 2024 mengalami penurunan dari 79,15 menjadi 76,24. Terjadi penurunan nilai pada setiap sektor 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi antara lain karena subkomponen penyusun IKLI seperti kontribusi penyerapan tenaga kerja lokal yang masih minim, sehingga untuk meningkatkan nilai IKLI dibutuhkan perencanaan penggunaan tenaga kerja lokal sebagai SDM yang dapat digunakan secara optimal.

Tabel 2.53
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023–2024

No	Sektor dan Sub-Sektor Pelayanan	Unsur IKLI					Nilai IKLI	2024
		U1	U2	U3	U4	U5	2023	
1	Pendidikan						92,78	-
	PAUD	18,28	17,97	18,16	18,35	18,35	91,10	-
	SD	18,98	18,76	18,90	19,04	19,06	94,74	-
	SLTP	18,81	18,76	18,84	18,99	18,91	94,32	-
	SLTA	18,12	18,12	18,25	18,29	18,20	90,97	-
2	Kesehatan						83,43	-
	Posyandu	18,35	18,14	18,42	18,57	18,56	92,04	-
	Pustu	16,94	16,85	16,71	16,73	16,82	84,05	-
	Puskesmas	18,39	18,36	18,32	18,30	18,22	91,58	-
	Klinik	14,67	14,59	14,60	14,61	14,46	72,93	-
	Rumah Sakit	15,26	15,35	15,31	15,40	15,26	76,56	-
3	Pekerjaan Umum						70,14	-
	Jalan Desa	15,74	14,80	15,25	15,44	15,38	76,61	-
	Jalan Usahatan	12,81	12,50	12,63	12,76	12,84	63,54	-
	Jalan ke Kecamatan	17,36	16,94	17,15	17,30	17,31	86,07	-
	Jalan ke Kabupaten	17,27	16,64	16,83	17,19	17,06	84,99	-
	Jembatan	16,17	15,95	16,12	16,18	16,21	80,62	-
	Embung	9,37	9,27	9,33	9,35	9,29	46,62	-
	Irigasi	10,74	10,44	10,48	10,49	10,40	52,54	-

No	Sektor dan Sub-Sektor Pelayanan	Unsur IKLI					Nilai IKLI	2024
		U1	U2	U3	U4	U5	2023	
4	Perumahan dan Permukiman						83,02	-
	Air Bersih	17,97	17,71	17,84	17,87	17,93	89,33	-
	Drainase	11,97	11,73	11,85	11,93	11,96	59,44	-
	Persampahan	14,73	14,58	14,64	14,66	14,51	73,12	-
	Listrik	20,12	20,06	20,03	20,07	20,10	100,00	-
	Telekomunikasi	18,63	18,42	18,51	18,62	18,63	92,81	-
5	Sektor Pendukung						66,13	-
	Pasar	16,06	15,72	16,01	16,12	16,34	80,25	-
	Pariwisata	14,45	14,40	14,41	14,43	14,48	72,17	-
	Bumdes	13,02	12,99	12,91	12,82	12,73	64,47	-
	Koperasi	9,71	9,53	9,52	9,60	9,29	47,63	-
6	Sektor Infrastruktur Transportasi	-	-	-	-	-	-	-
	IKLI Komposit						79,15	76,24

Sumber : Dokumen IKLI Kutai Kartanegara, 2023

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebuah Indeks Komposit yang terdiri dari tiga komponen: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM dikembangkan berdasarkan konsep bahwa untuk mencapai desa yang maju dan mandiri, diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang saling melengkapi dan memperkuat potensi serta kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa.

IDM di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada 2020, nilai IDM sebesar 0,6840 kemudian pada 2024 nilainya menjadi 0,7969. Jumlah desa yang menyandang predikat mandiri meningkat pesat dalam lima tahun terakhir.

Pada 2024, tercatat sudah 87 dari 193 desa (45,07 persen) berstatus desa mandiri. Sisanya adalah 43,00 persen berstatus maju, dan 11,91 persen berstatus berkembang. Peningkatan ini juga terjadi pada predikat desa maju, sehingga saat ini proporsi desa maju dan desa mandiri telah mencapai 88,08 persen. Jika tren peningkatannya bertahan untuk tahun-tahun berikutnya, ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya hampir seluruh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berstatus maju atau mandiri.

Tabel 2.54
Pembangunan Desa
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Mandiri	12	24	46	76	87
Jumlah Desa Maju	47	64	73	69	83
Jumlah Desa Berkembang	113	98	74	48	23
Jumlah Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah Desa	193	193	193	193	193
Persentase Desa Mandiri	6,22	12,44	23,83	39,38	45,07
Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri	30,57	45,60	61,66	75,13	88,08
Nilai IDM	0,6840	0,6846	0,7465	0,7759	0,7969
Status IDM	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju

Sumber: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2024

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi berdasarkan statusnya: jalan kabupaten sepanjang 2.193,02 km (2020), jalan provinsi sepanjang 246,19 km

berdasarkan Pergub No. 622 tahun 2018, dan jalan nasional sepanjang 335,95 km berdasarkan Kep.Men PUPR 290/2015.

Dalam tiga tahun terakhir, proporsi jalan dalam kondisi “mantap” mengalami fluktuasi. Pada 2021, proporsinya mencapai 57,52 persen (1.261,44 km). Kemudian pada 2023 meningkat menjadi 65,50 persen (2.193 km). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2024 proporsi jalan dalam kondisi “mantap” menurun menjadi 63,20 persen (2.196,94 km). Hal ini mencerminkan pentingnya infrastruktur dasar untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemantapan jalan mengalami fluktuasi. Pada 2020- 2021, terjadi penurunan, yang kemudian diikuti dengan kenaikan kembali pada periode 2022-2023. Serta kembali menurun pada 2024.

Tabel 2.55
Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian Indikator Jalan	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (%)	63,39	57,52	61,49	65,50	63,20
Jumlah Panjang Jalan Kewenangan Kab/Kota dalam Kondisi Mantap (kilometer)	1.390,34	1.261,44	1.348,54	2.193,00	2.196,94

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2024

Status jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten (2.196,94 km), Jalan Provinsi (246,19 km), dan Jalan Nasional (335,95 km). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun. Artinya, dengan panjang jalan tetap, jumlah kendaraan semakin bertambah, maka kepadatan lalu-lintas semakin bertambah.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada periode 2023-2024 sebesar 1,82 persen, sehingga rasionya menjadi sebesar 0,00382.

Tabel 2.56
Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94
2	Jumlah Kendaraan	513.935	522.913	713.369	586.007	575.368
3	Rasio	0,00427	0,00420	0,00308	0,00375	0,00382

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kebutuhan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari Sungai Mahakam. Proporsi rumah tangga yang menggunakan air bersih dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah.

Sumber air bersih di antaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga atau masyarakat suatu daerah.

Menurut data terbaru (2025), jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah rumah tangga total di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel 2.57
Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	87,90	70,85	89,328	82,18	80,20
Jumlah Total Rumah Tangga Berakses Air Minum	117.198	121.926	131.920	161.911	156.924
Jumlah Rumah Tangga Total	185.433	185.433	172.099	197.028	185.433
Penduduk Berakses Air Minum	468.792	487.704	527.680	647.645	627.696
Jumlah Penduduk	729.382	733.626	738.189	788.113	789.767
Rasio (%)	64,27	66,48	71,48	82,18	79,48

Sumber: Dinas Perumahan & Pemukiman / PDAM, 2025

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Secara umum kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB komponen pengeluaran yang dihitung berdasarkan nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Data PDRB dapat menggambarkan pola konsumsi rumah tangga, peran pemerintah dalam mendukung pembangunan, tingkat investasi daerah serta daya saing perdagangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari distribusi proporsi PDRB menurut komponen pengeluaran yang menunjukkan proporsi masing-masing komponen pengeluaran terhadap PDRB total.

Laju inflasi menjadi ukuran untuk menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), tarikan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.

Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.

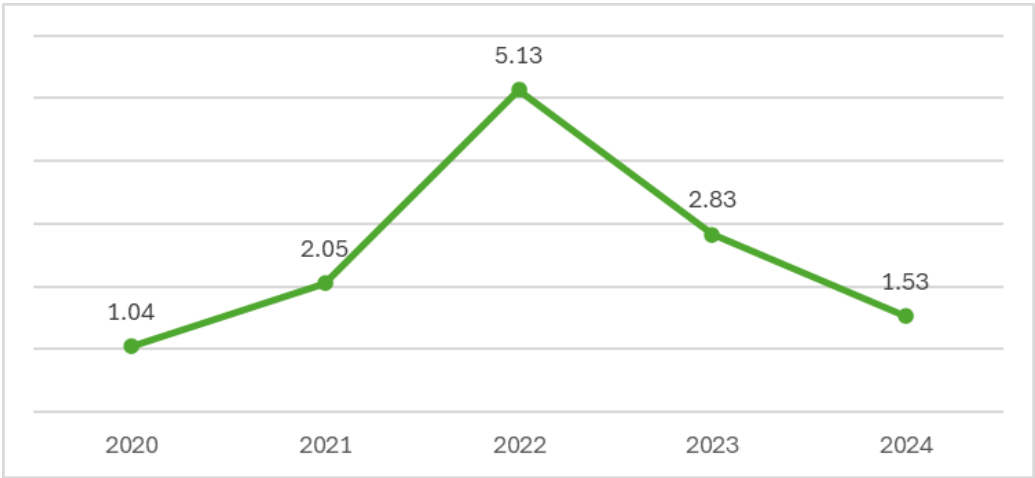
Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) yang lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dilakukan perhitungan indikator *proxy* inflasi, indikator yang biasa digunakan adalah Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2020-2022 cenderung naik, IPH pada 2020 sebesar 1,04 persen. Pada 2021 dan 2022 terus naik menjadi 2,05 persen dan 5,13 persen.

Pada 2023 kembali turun menjadi 2,83 persen dan terus menurun hingga 1,53 persen pada 2024. Selama empat tahun, kondisi IPH di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik. Jika dilihat kondisi per tahun, maka IPH cenderung

meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Gambar 2.27
Indeks Perkembangan Harga
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: Diskominfo dan BPS, 2020-2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Reformasi birokrasi adalah usaha untuk memperbarui dan mengubah secara mendasar atas sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur. Seiring perkembangannya, reformasi birokrasi menjadi standar bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menilai tata kelola organisasi secara umum.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Indeks ini juga mencerminkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi tersebut, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, bebas dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan pemerintahan, serta semakin bersih dari KKN dan berkualitas pelayanan publiknya. Penilaian IRB dapat dibedakan dalam tujuh kategori berikut.

Tabel 2.58
Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Range Nilai	Kategori	Keterangan
> 90 - 100	AA	Istimewa
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	C	Cukup Memadai
> 30 - 50	C-	Kurang
> 0 - 30	D	Sangat Kurang

Sumber: Kemenpan RB

Perkembangan IRB di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung tidak mengalami banyak peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak 2020 sampai dengan 2023, selalu masuk

dalam kategori nilai B (Baik). Tabel berikut menunjukkan perkembangan IRB di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data tersebut menggambarkan bahwa tingkat reformasi birokrasi berkembang dengan cukup baik. Namun, untuk tata kelola pemerintahan secara umum, IRB tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih baik. Skor IRB dapat ditingkatkan seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum.

Tabel 2.59
Indeks Reformasi Birokrasi
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi	Keterangan
2020	61,09	B (Baik)
2021	60,95	B (Baik)
2022	62,74	B (Baik)
2023	60,12	B (Baik)
2024	71,51	BB (Sangat Baik)

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator untuk menilai kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia, berdasarkan pada berbagai aspek seperti Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Indikator-indikator dalam indeks ini disusun dengan menggabungkan enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas) dengan enam aspek penilaian kinerja instansi.

Hasil akhir dari IPP dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kondisi pelayanan publik di berbagai instansi. Nilai akhir ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan pelayanan, dengan menunjukkan aspek-aspek yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki. Capaian IPP dapat dibedakan dalam sembilan kategori sebagai berikut.

Tabel 2.60
Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Keterangan
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Sumber: Kemenpan RB

Menurut data Kemenpan RB, IPP Nasional menunjukkan peningkatan selama periode 2020-2022. Nilainya menunjukkan tren yang meningkat dengan keterangan B (Baik). Tren peningkatan ini berlanjut hingga 2022 dengan nilai akhir 3,87. Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, sejak 2020, rata-rata capaian IPP berada pada kategori B- (Baik Dengan Catatan) dan B (Baik), dengan rentang nilai antara 3,25 hingga 4,00. Data

tersebut menunjukkan perkembangan IPP di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan IPP yang sangat positif dibandingkan dengan tingkat nasional maupun provinsi. Rata-rata capaian IPP Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun selalu di atas IPP nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2020, capaian IPP Kutai Kartanegara cukup fluktuatif, namun cenderung membaik, dengan nilai 4,09 (A-, Sangat Baik) pada 2020, meningkat menjadi 4,59 (A, Pelayanan Prima) pada 2021, dan 4,56 (A, Pelayanan Prima) pada 2022. Namun, ada sedikit penurunan pada 2023 dengan nilai 4,24 (A-, Sangat Baik) menjadi 4,35 (A-, Sangat Baik) pada 2024.

Tabel 2.61
Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
dan Nasional, 2020–2024

Tahun	Kabupaten Kutai Kartanegara
2020	4,09
2021	4,59
2022	4,56
2023	4,24
2024	4,35

Sumber: Kemenpan RB, 2024

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa tingkat pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkembang dengan sangat baik. Nilai IPP yang selalu berada di kategori A (Pelayanan Prima) dan A- (Sangat Baik) mencerminkan kinerja yang optimal dalam aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Penilaian baik buruknya kinerja atas pengelolaan keuangan daerah bisa terlihat melalui penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi sebuah hal yang sangat penting agar uang negara dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembangunan.

BPK biasa melakukan penilaian dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP adalah opini audit yang dikeluarkan oleh BPK terkait dengan pengelolaan keuangan suatu lembaga pemerintah yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dikelola secara akuntabel.

Tabel 2.62
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020–2024

Opini BPK	
Tahun	Predikat
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP
2024	WTP

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2026

Selama lima tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Terhitung sejak 2020, Kutai Kartanegara telah mendapatkan opini WTP dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya hingga 2024. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah semakin baik. Artinya, dalam pengelolaan keuangan telah memenuhi

standar akuntansi pemerintahan melalui pengaturan pendapatan yang teratur, pengelolaan belanja yang tertib, serta pengelolaan aset daerah yang disiplin.

Kualitas pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat juga melalui beberapa indikator. Berdasarkan LKE-RB Kutai Kartanegara pada 2024, tingkat maturitas SPIP sebesar 3,37, nilai SAKIP sebesar 65,93, indeks reformasi hukum sebesar 87,86, indeks sistem merit sebesar 222, indeks SPBE sebesar 3,09, serta survei penilaian integritas sebesar 67,14.

Tabel 2.63
Data LKE-RB
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	65,6	66,35	67,4	67,86	65,93
2	Indeks Pemdi/ SPBE	2,97	2,48	1,94	2,54	3,09
3	Indeks Reformasi Hukum	n.a	n.a	n.a	66,65	87,86
4	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	n.a	215	222
5	Survei Penilaian Integritas	n.a	72,06	67,22	67,69	67,14

Sumber: LKE RB, 2020-2024

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode satu tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya.

Data angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan risiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), tren angka *crime rate* Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada 2022 angka *crime rate* sebesar 56 dan pada 2023 mengalami peningkatan sebesar 82, kemudian kembali menurun menjadi 33 pada 2024. Berikut perkembangan *crime rate* Kutai Kartanegara 2020-2024.

Tabel 2.64
Crime Rate
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	734.485	753.862	765.284	788.113	789.767
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	460	n.a	430	646	728
Crime Rate/100.000 Penduduk	72	126	71	70	106
Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, 2024

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Untuk melihat tingkat daya saing daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, digunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Indeks ini merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks ini, mengadopsi kerangka konseptual yang sama

dengan Global Competitiveness Index (GCI) dari World Economic Forum. IDSD terdiri dari 4 (empat) komponen pembentuk yaitu, lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem investasi yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar. Adapun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

Tabel 2.65
Skor Indeks Daya Saing Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Nilai Indeks	2022	2023	2024
Pilar Institusi	4,29	4,21	4,43
Pilar Infrastruktur	2,70	2,56	3,87
Pilar Adopsi TIK	2,82	3,85	3,90
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	4,10	3,61	4,51
Pilar Kesehatan	4,08	4,05	3,98
Pilar Keterampilan	3,30	3,81	4,15
Pilar Pasar Produk	0,64	0,59	1,93
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,03	3,78	3,29
Pilar Sistem Keuangan	2,60	1,11	1,58
Pilar Ukuran Pasar	5,00	5,00	5,00
Pilar Dinamisme Bisnis	5,00	2,94	3,81
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,87	1,55	1,75
Indeks Daya Saing Daerah	3,20	3,09	3,52

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Tabel 2.66
Data Indeks Daya Saing Daerah
se-Provinsi Kalimantan Timur, 2020-2024

Nama Daerah	2022	2023	2024
Provinsi Kalimantan Timur	3,27	3,3	3,37
Paser	2,87	2,86	3,31
Kutai Barat	-	2,75	3,44
Kutai Kartanegara	3,20	3,09	3,52
Kutai Timur	3,02	2,78	3,17
Berau	-	2,92	3,47
Penajam Paser Utara	2,76	2,99	3,33
Mahakam Ulu	-	2,37	2,83
Kota Balikpapan	3,71	3,6	4,07
Kota Samarinda	3,6	3,79	4,15
Kota Bontang	3,13	3,19	3,58

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
a. Pendidikan								
1	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	79.30	77.99	62.80	62.79	74.34	
2	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	8.14	8.19	8.24	18.1	42.81	
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	NA	NA	NA	NA	60.51	
4	Persentase jamban dalam kondisi baik	%	80.57	85.57	87.47	89.57	90.57	
5	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	52.18	57.18	62.18	67.18	72.18	
b. Kesehatan								
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	233.25	303.37	187.13	96.32	111.35	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	14.33	17.08	17.64	16.39	14.63	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	95.17	84.42	91.96	91.36	93.75	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	103.71	92.40	94.53	95.46	90.19	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	105.46	94.08	97.24	93.13	98.22	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	48.21	59.14	84.39	87.66	95.16	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97.89	100.00	100.00	99.01	97.94	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	56.20	12.62	91.94	94.24	91.88	

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	34.15	67.62	90.59	100.00	87.83	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	22.20	34.63	100.00	100.00	100.00	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	82.42	31.16	100.00	100.00	100.00	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	84.20	85.66	100.84	100.00	100.00	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	51.25	83.96	138.38	100.00	100.00	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	94.36	88.13	108.98	100.00	100.00	
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	NA	14.10	43.06	64.09	70.11	
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	NA	45.81	61.49	65.50	63.20	target 2028 sama dengan tahun 2027 karena di tahun tersebut tidak terdapat pembangunan/perbaikan jalan, tahun tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan Sebulu
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	69.90	71.48	77.37	82.18	80.20	IKK tidak tertera di draft renstra
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	%	68.37	69.80	76.14	83.48	0.304	Perubahan target dari 83.48 menjadi 0.304 dikarenakan perubahan kriteria dari sanitasi layak dan aman menjadi sanitasi aman

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	N/A	0.23	0.00	16.29	17.24	
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	N/A	0.00	0.00	2.77	2.77	Realisasi 2020-2022 tidak ada kegiatan abrasi Tahun 2027-2030 target stagnan akibat tidak ada penganggaran Daerah yang tidak memiliki wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD o/1 untuk status Reviu APIP OK
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	N/A	100.00	98.64	100.00	100.00	
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Sesuai dengan RENSTRA
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100.00	100.00	100.00	45.87	77.42	Baru ditambahkan sesuai RENSTRA Tahun 2026 terdapat SK kumuh baru (Loa Duri, Loa Kulu Kota, Muara Badak Ilir, Anggana Desa Sungai Meriam) Penanganan kawasan kumuh 2025 diharapkan 100% selesai di 2026
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0.00	0.19	4.01	10.69	43.59	sesuai RENSTRA
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	16.03	sesuai RENSTRA Intervensi perumahan yang dimaksud pada perhitungan adalah jumlah permukiman

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	NA	22.03	34.69	75.00	61.67	Perda ada 44, pada tahun 2024 tidak mencapai target (dibawah 44)
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	26.07	3.06	100.00	49.22	100.00	2023 menurun karena sasaran layanan kesiapsiagaan lebih banyak, terbatasnya kapasitas pengelola teknis kegiatan, perlengkapan kesiapsiagaan masyarakat masih kurang
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	NA	NA	NA	91.00	87.72	
f. Sosial								
1	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	NA	91.31	97.63	100.00	100.00	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
a. Tenaga Kerja								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100.00	17.85	41.18	44.44	100.00	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	28.17	92.73	83.47	36.03	52.44	
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak								

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
c. Pangan								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	128.82	128.72	118.00	118.46	200.00	Menyesuaikan dengan target Perbadan 15/ 2023
d. Pertanian								
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	5.86	6.30	6.66	7.60	7.87	
e. Lingkungan Hidup								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	68.76	71.58	71.77	72.41	73.59	Target IKLH Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia telah di tentukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	80.50	54.23	37.98	40.37	45.37	Rumus Perhitungan Baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan baru sebelumnya Jumlah Perusahaan Yang Tidak Taat dibagi Jumlah Pengawasan Langsung sedangkan Perhitungan yang baru : Jumlah Perusahaan yang Taat dibagi Jumlah Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
3	Jumlah sampah yang tertangani	%	22.45	59.14	69.91	70.14	54.63	Rumus Perhitungan Baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan baru (perhitungan menggunakan IKPS melalui sistem informasi pengelolaan sampah nasional SIPSN yang baru)
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	NA	94.80	95.64	98.79	99.68	

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	NA	44.40	42.93	55.58	68.39	
3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	NA	2.00	2.00	2.00	2.00	
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	NA	NA	NA	NA	7.39	
5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100.00	99.00	100.00	100.00	
6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	91.54	94.65	100.00	70.46	
7	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	100.00	100.00	100.00	100.00	
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	18.88	3.63	0	0	0	Tidak ada desa tertinggal sejak 2022 di Kutai Kartanegara
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	6.22	12.44	23.83	39.38	45.08	
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0.00	0.00	0.00	83.33	33.33	
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2.24	2.53	2.39	2.13	2.24	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	76.41	74.62	61.13	66.91	71.70	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14.55	14.72	24.97	12.79	7.93	
i. Perhubungan								
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0.511	0.623	0.070	0.378	1	Laporan terakhir DISHUB (Tw3 2025) utk IKK menggunakan satuan RASIO
2	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Perusahaan	0	0	0	1	1	
j. Komunikasi dan Informatika								

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	100.00	96.61	100.00	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	NA	NA	NA	NA	
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	100.00	100.00	96.61	100.00	
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	-3.11	88.88	-17.75	74.58	108.28	2023 proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual sehingga cakupannya kecil tahun 2024 sudah menggunakan online data system sehingga dapat meningkatkan pengumpulan data secara signifikan
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	17.20	65.83	72.62	73.62	74.21	
l. Penanaman Modal								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1.69	36.22	90.63	51.38	-29.18	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	NA	NA	139.49	109.17	105.84	Tahun 2020 dan 2021 belum ada target dari provinsi
m. Kepemudaan dan Olahraga								
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0.00	0.16	0.18	0.30	0.31	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	0	0	0	3.70	4.07	Pon dilaksanakan 4 tahun sekali pada tahun 2024, 2023 Popnas dan Peparpenas
n. Statistik								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	0.00	0.00	0.00	1.84	2.31	

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
o. Persandian								
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	0.00	0.00	39.22	54.88	62.17	
p. Kebudayaan								
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	NA	11.11	11.11	25.00	17.89	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	NA	NA	NA	4.83	6.95	
q. Perpustakaan								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	0.00	38.05	52.55	62.52	68.17	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0.00	0.00	20.15	59.99	62.52	
r. Kearsipan								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	0.00	75.00	75.00	75.00	83.05	
3. Urusan Pilihan								
a. Kelautan dan Perikanan								
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	202.27 7,3	207.52 1,2	210.47 30	281.95 0,6	323,17 8	
2	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/Kap /Th	NA	NA	NA	NA	67.13	Baru ada di tahun 2024, penetapan target berdasarkan arahan provinsi
b. Pariwisata								
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0.059	0.005	0.006	0.408	0.356	Tahun 2020, tidak ada data karena Covid,
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	- 87.494	- 91.741	1273.9 13	142.08 9	148.56 2	Peningkatan jumlah wisata asing mengalami penurunan tahun 2020-2021 akibat covid, dan mulai mengalami peningkatan signifikan ditahun berikutnya. dari tahun 2024 ke 2025 terjadi peningkatan namun tidak signifikan

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	0.115	0.110	0.830	0.479	
c. Pertanian								
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-13.89	-7.78	-2.13	3.92	-5.86	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	24.33	19.93	-34.93	-33.69	16.41	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	12.09	4.56	0.07	17.08	14.00	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	60.00	52.50	46.67	47.78	50.00	
d. Kehutanan								
e. Energi dan Sumber Daya Mineral								
f. Perdagangan								
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	NA	71.80	95.80	51.40	62.68	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	19.11	18.51	23.30	34.40	41.99	
g. Perindustrian								
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	NA	NA	NA	NA	

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Nilai	NA	90	90	60	65	
3	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	%	NA	1.43	7.17	2.38	1.00	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	NA	0.44	0.21	14.67	0.97	
h. Transmigrasi								
4. Urusan Pemerintahan Umum								
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	3.23	4.28	4.61	5.71	6.84	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	2.05	2.37	2.90	3.99	5.22	
5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
a. Perencanaan								
1	Kesesuaian antara RKP dengan APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
b. Keuangan								
1	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	%	26.52	42.16	30.82	20.84	19.50	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18.85	15.92	7.63	9.49	6.20	
3	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	%	NA	57.65	51.99	57.90	61.53	
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	NA	28.77	27.76	33.98	52.89	

No	IKK	Satuan	Realisasi					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	33.40	34.03	36.63	49.77	49.77	Presentase Pegawai Pendidikan diambil dari penilaian pengakuan gelar yang dilaksanakan Bidang Mutasi Dan Promosi
d. Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	NA	NA	NA	58.62	63.79	
e. Fungsi Pengawasan								
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	0	2.986	3.043	3.202	3.371	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	0	0	3.000	3.000	3.000	
3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	0	2.910	3.019	3.175	3.400	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	71.41	86.67	87.32	89.22	90.11	
f. Fungsi Pengadaan								
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	NA	40.00	40.00	40.00	40.00	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	NA	27.60	22.70	26.61	26.90	
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	NA	18.75	18.10	18.13	9.67	
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	48.15	28.13	24.00	34.78	58.06	
h. Pelayanan Publik								
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	NA	98.59 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	82.84 Zona: Hijau Kategori: B Opini: Kualitas Tinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	

2.1.4.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar setiap warga negara untuk hidup layak, sehat, aman, dan berpendidikan. Melalui perwujudan SPM, Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak lagi sekadar menyediakan layanan, tetapi menjamin mutu dan pemerataan layanan dasar. Hal ini adalah transformasi besar dari orientasi birokrasi administratif menuju birokrasi yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat paling mendasar. Tabel berikut menunjukkan capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024.

Tabel 2.68
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
Bidang Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	SD = 100,99 SMP = 100,02	SD = 100,10 SMP = 100,01	97,55	92,58	100
2	Pendidikan Kesenjangan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	48,13	56,12	66,74	80,37	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	93,83	93,21	78,72	68,33	99,87
Bidang Kesehatan							
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	95,17	84,42	91,96	91,79	87,06
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	103,71	92,40	94,53	95,92	85,54
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	105,46	94,08	97,24	93,59	88,55
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	48,21	59,14	84,39	86,12	85,82
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	97,89	100,00	100,00	99,15	96,20
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	56,20	13,28	91,94	95,32	93,77
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	56,20	67,40	90,59	91,54	93,10
8	Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang	22,20	38,86	100,00	100	96,13

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
	Penderita Hipertensi	menerima layanan kesehatan					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	82,42	34,22	100,00	100	94,85
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	84,20	85,66	100,00	100	97,78
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	51,25	82,48	100,00	100	95,64
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	94,36	87,79	100,00	100	96,19
Bidang Pekerjaan Umum							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok- pokok air minum sehari-hari	100,00	70,85	76,68	80,32	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100,00	75,02	2,79	60,78	100
Bidang Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	100	98,57	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	10,64	100	100	100
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0	0	100	100	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	57,70	0,17	3,70	78,21	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	26,07	3,06	100	49,22	100

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	79,37	100,00	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	35,55	100,00	81,66	95,16	100
Bidang Sosial							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	91,80	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	84,91	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100,00	143,13	51	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100,00	116,00	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban Bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100,00	141,33	100	100	100

Sumber : LPPD, 2020-2024

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah merupakan salah satu aspek strategis yang sangat menentukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak hanya berperan sebagai instrumen pendukung, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Apabila sistem pemerintahan daerah diibaratkan sebagai suatu organisme, maka keuangan daerah berfungsi layaknya jantung yang memompa sumber daya ke seluruh sektor strategis, untuk memastikan keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efisien, dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD.

Gambaran umum keuangan daerah ini disajikan sebagai dasar untuk memahami kapasitas fiskal daerah, tantangan pembiayaan, serta ruang fiskal yang tersedia dalam kurun waktu lima tahun ke depan, untuk memastikan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan Pemerintah Daerah adalah instrumen kunci dari kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara *revenue dan expenditure*. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah, serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Gambaran kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan pertumbuhan dan proporsi komponen APBD berupa: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama periode tersebut, kemudian pertumbuhan dan rasio neraca daerah, serta pendekatan rasio keuangan daerah yang sering digunakan dalam analisis keuangan daerah, seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, dan tax ratio.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Gambaran kinerja keuangan daerah secara komprehensif dapat diukur melalui dinamika pertumbuhan serta struktur proporsional dari komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan selama periode tertentu. Selain itu, kinerja fiskal daerah juga dapat ditelaah lebih mendalam melalui analisis pertumbuhan aset dan kewajiban dalam neraca daerah, serta evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih tajam, berbagai pendekatan berbasis rasio keuangan sering digunakan, seperti rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi, serta rasio ketergantungan terhadap transfer pusat.

Tidak kalah penting, dua indikator kunci yang menjadi fokus dalam evaluasi keberlanjutan fiskal daerah adalah kapasitas fiskal dan ruang fiskal. Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan riil Pemerintah Daerah dalam menghimpun pendapatan dari sumber-sumber yang sah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara ruang fiskal menunjukkan fleksibilitas keuangan yang dimiliki untuk membiayai program prioritas di luar belanja wajib dan mengikat. Kombinasi antara pertumbuhan komponen APBD dan indikator-indikator rasional tersebut menjadi dasar penting dalam menilai ketahanan fiskal, kemandirian daerah, dan kualitas tata kelola keuangan publik secara menyeluruh.

Tabel dibawah menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2020-2024. Tren realisasi pendapatan daerah memperlihatkan pola yang bervariasi. Pada 2020, realisasi pendapatan total mencapai Rp4,45 triliun. Pendapatan sedikit menurun pada 2021 menjadi Rp4,44 triliun. Namun demikian kondisi berbalik

drastis pada 2022, di mana realisasi pendapatan daerah menunjukkan peningkatan signifikan menjadi Rp7,44 triliun. Tren positif ini terus berlanjut hingga 2023, di mana realisasi pendapatan kembali meningkat mencapai Rp7,78 triliun, dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan Rp12,58 triliun. Peningkatan drastis pada 2022-2024 ini didorong oleh pemulihan ekonomi dan peningkatan signifikan pada Pendapatan Transfer.

Secara spesifik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dari Rp450,59 miliar pada 2020 menjadi Rp787,60 miliar pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam menghimpun sumber daya mandiri. Pendapatan Transfer menjadi komponen paling dinamis, menurun dari Rp3,88 triliun pada 2020 menjadi Rp3,61 triliun pada 2021, lalu melonjak signifikan hingga Rp11,71 triliun pada 2024.

Fluktuasi Pendapatan Transfer ini menegaskan kerentanan terhadap kebijakan transfer Pemerintah Pusat atau kondisi ekonomi makro, khususnya pada komoditas ekstraktif di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan penurunan tajam dari Rp120,17 miliar pada 2020 menjadi hanya Rp12,52 miliar pada 2023 sebelum sedikit meningkat kembali ke Rp80.93 miliar pada 2024.

Tabel 2.69
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	4.456.587,09	4.443.234,73	7.443.525,13	7.787.223,82	12.586.549,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.599,69	707.307,16	567.757,28	651.136,41	787.600,56
PENDAPATAN TRANSFER	3.885.815,45	3.615.376,63	6.764.448,48	7.123.560,92	11.718.016,36
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	120.171,95	120.550,95	111.319,37	12.526,49	80.932,96
BELANJA	4.944.693,38	4.714.130,50	5.475.960,55	10.191.449,27	12.692.749,95
BELANJA OPERASI	3.249.757,09	3.283.287,43	3.672.269,13	5.796.771,04	6.274.425,81
BELANJA MODAL	1.131.607,58	1.026.367,43	1.171.734,72	3.513.607,65	5.298.641,63
BELANJA TAK TERDUGA	164.040,82	84.714,81	10.717,07	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	399.287,88	319.760,82	621.239,62	881.070,58	1.119.682,51
SURPLUS / (DEFISIT)	-488.106,29	-270.895,76	1.967.564,58	-2.404.225,45	-106.200,08
PEMBIAYAAN	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.645.755,99	1.137.661,95	842.321,88	2.806.073,50	295.973,79
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000,00	24.400,00	3.750,00	105.874,00	24.045,32
PEMBIAYAAN NETTO	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.137.649,70	842.366,18	2.806.136,46	295.974.053,39	165.728.382,21

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Selain pendapatan, realisasi belanja daerah juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan substansial. Realisasi belanja total meningkat dari Rp4,94 triliun pada 2020 menjadi Rp12,69 triliun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik.

Dari aspek realisasi pembiayaan, indikator Pembiayaan Netto menunjukkan pola yang fluktuatif namun secara umum mengalami peningkatan signifikan. Setelah mencapai Rp1,62 triliun pada 2020, menurun menjadi Rp838,57 miliar pada 2022, lalu melonjak drastis hingga Rp2,70 triliun pada 2023, sebelum kembali turun menjadi Rp271,92 miliar pada 2024. Peningkatan ini utamanya didukung oleh Penerimaan Pembiayaan, yang didominasi oleh SiLPA dari tahun sebelumnya.

Aspek krusial dalam analisis APBD adalah pola perimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, yang menentukan kondisi surplus atau defisit anggaran. Selama periode 2020-2024, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan pola yang bergantian antara defisit dan surplus.

Pada 2020, APBD mencatat defisit anggaran sebesar Rp488,10 miliar. Defisit ini berlanjut pada 2021 dengan nilai Rp270,89 miliar. Defisit di dua tahun tersebut sejalan dengan realisasi pendapatan yang relatif rendah dibandingkan belanja. Gambaran positifnya, pada 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil membalikkan keadaan dengan mencatat surplus anggaran yang signifikan sebesar Rp1,96 triliun. Surplus ini merupakan indikasi kuat dari pemulihan pendapatan yang drastis pada tersebut.

Namun demikian, pada 2023, terjadi lagi defisit anggaran yang sangat besar, mencapai Rp2,40 triliun. Defisit ini, meskipun pendapatan juga meningkat, kemungkinan besar disebabkan karena lonjakan realisasi belanja yang jauh lebih tinggi pada tersebut. Pada 2024, defisit berkurang drastis menjadi Rp106,20 miliar.

Pola surplus dan defisit yang silih berganti ini menyoroti perlunya perencanaan anggaran yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan fiskal, serta manajemen belanja yang efektif untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan angka yang fluktuatif namun tetap positif, yaitu dari Rp1,13 triliun pada 2020 menjadi Rp165,92 miliar pada 2024, dengan puncak mencapai Rp2,80 triliun pada 2022. SiLPA ini berfungsi sebagai *buffer* bagi keuangan daerah, yang dapat digunakan untuk menutupi defisit atau mendanai program prioritas pada berikutnya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, maka kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 2.70
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	4.456.587,09	4.443.234,73	7.443.525,13	7.787.223,82	12.586.549,87	29,64
PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.599,69	707.307,16	567.757,28	651.136,41	787.600,56	14,98
Pendapatan Pajak Daerah	110.441,52	114.967,28	142.751,50	141.989,02	165.870,57	10,70
Pendapatan Retribusi Daerah	4.106,22	4.008,70	5.332,18	6.282,21	5.879,73	9,39
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.244,43	19.768,62	21.232,14	63.147,80	88.368,26	48,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	317.807,53	568.562,55	398.441,46	439.717,38	527.481,99	13,50
PENDAPATAN TRANSFER	3.885.815,45	3.615.376,63	6.764.448,48	7.123.560,92	11.718.016,36	31,78
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	3.547.936,25	3.215.256,83	6.153.698,02	6.258.065,05	11.071.161,84	32,91
Dana Perimbangan	3.522.602,10	3.174.738,84	5.976.853,75	6.038.157,86	10.841.265,77	32,45
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	952.892,10	2.375.059,17	5.193.110,97	5.100.817,92	9.840.984,24	79,27
Dana Alokasi Umum	440.463,49	443.413,04	443.970,39	493.817,23	608.978,15	8,44
Dana Alokasi Khusus	359.715,72	356.266,62	339.772,38	443.522,71	391.303,38	2,13
Dana Insentif Daerah	25.334,16	40.517,99	0,00	27.486,72	34.790,32	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	176.844,27	192.420,47	195.105,76	0,00
TRANSFER ANTAR DAERAH	337.879,20	400.119,80	610.750,46	865.495,88	646.854,51	17,63
Pendapatan Bagi Hasil	240.421,70	318.277,30	568.635,58	827.375,88	588.414,51	0,00
Bantuan Keuangan	97.457,50	81.842,50	42.114,88	38.120,00	58.440,00	-12,00
Bantuan Keuangan dari Pemda Prov	97.457,50	81.842,50	42.114,88	38.120,00	58.440,00	-12,00
Bantuan Keuangan dari Pemda Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	120.171,95	120.550,95	111.319,37	12.526,49	80.932,96	-9,41
Pendapatan Hibah	120.171,95	4.626,00	3.033,00	3.567,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	115.924,95	108.286,37	8.959,49	80.932,96	-8,59

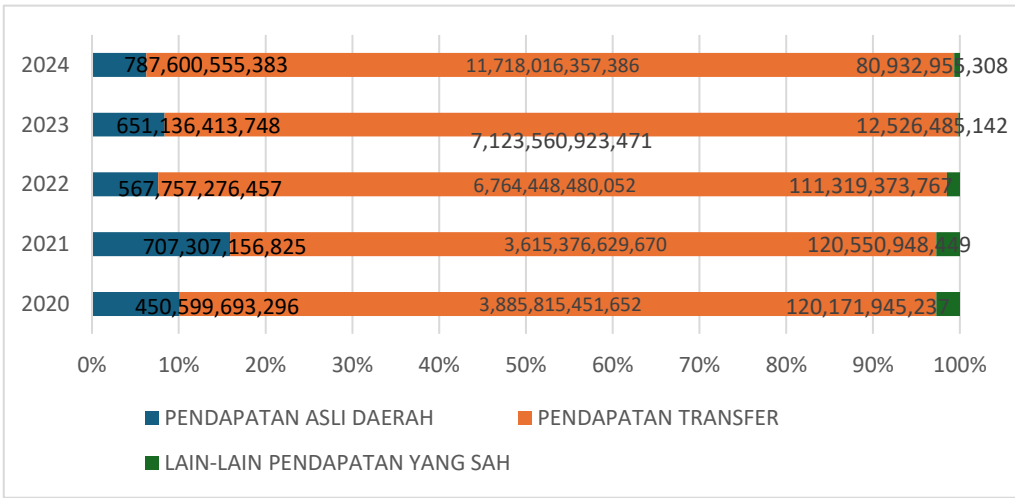
Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Berdasarkan data realisasi dan target pendapatan, terlihat bahwa selama periode 2020-2024, pendapatan total daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren meningkat yang signifikan setelah sempat stabil di awal periode. Pada 2020, realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp4,45 triliun dan sedikit menurun menjadi Rp4,44 triliun pada 2021. Namun demikian, pendapatan melonjak tajam pada 2022 hingga mencapai Rp7,44 triliun, atau meningkat sebesar 67,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan realisasi sebesar Rp7,78 triliun. Untuk 2024, pendapatan meningkat drastis hingga mencapai Rp12,58 triliun. Dari sisi distribusi, struktur pendapatan daerah masih sangat didominasi oleh Pendapatan Transfer. Secara keseluruhan, sumber pendapatan terbesar masih berasal dari Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang pada 2024 mencapai Rp9,84 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih ditopang oleh dana dari sektor ekstraktif yang menjadi basis perekonomian daerah, sekaligus membuatnya rentan terhadap dinamika harga komoditas global.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai indikator kemandirian fiskal, menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Setelah mencapai Rp450,59 miliar pada 2020, PAD melonjak menjadi Rp707,30 miliar pada 2021, yang didorong oleh kenaikan signifikan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah. Namun demikian, capaiannya sempat turun menjadi Rp567,75 miliar pada 2022, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi Rp651,136 miliar pada 2023. Peningkatan pada 2023 terutama didorong oleh lonjakan Lain-lain PAD Yang Sah dari Rp317,80 miliar menjadi Rp527,48 miliar. Selama periode realisasi (2020-2024), komponen Lain-lain PAD yang Sah tetap menjadi sumber penerimaan dominan dengan kontribusi rata-rata 73 persen terhadap total PAD.

Gambar 2.28
Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, upaya peningkatan PAD melalui potensi pajak dan retribusi perlu terus dioptimalkan, salah satunya melalui digitalisasi untuk efisiensi dan efektivitas. Selain itu, inovasi pada sumber penerimaan seperti optimalisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui kinerja BUMD dan penyertaan modal menjadi strategi penting, mengingat potensinya yang terus meningkat. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan dominasi Pendapatan Transfer sebagai komponen terbesar selama periode 2020–2024. Pada 2020, Pendapatan Transfer menyumbang 87,19 persen dari pendapatan total, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10,11 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 2,70 persen. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan kontribusi Pendapatan Transfer menjadi 81,37 persen, sementara PAD meningkat menjadi 15,92 persen dan Lain-Lain Pendapatan tetap di sekitar 2,71 persen.

Namun demikian pada 2022 ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer kembali naik signifikan hingga mencapai 90,88 persen, dengan PAD turun menjadi 7,63 persen dan

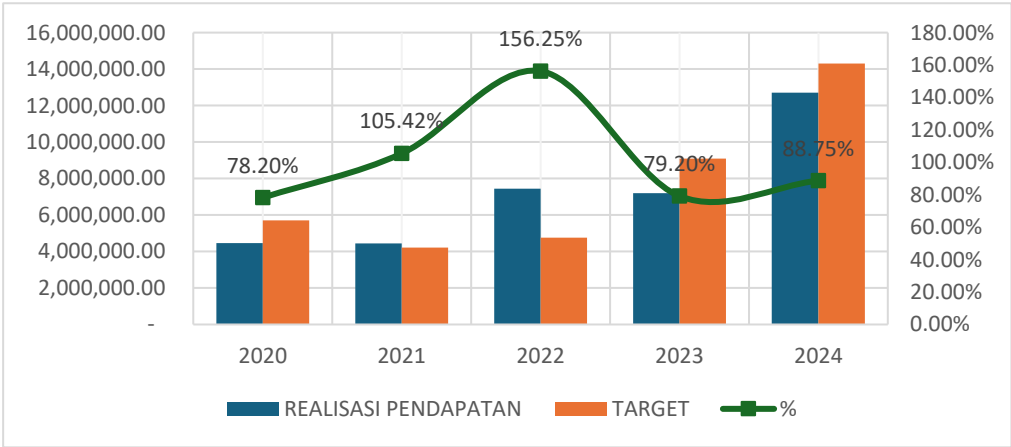
Lain-Lain Pendapatan 1,50 persen. Kondisi ini berlanjut pada 2023, ketika Pendapatan Transfer mencapai 91,48 persen, sementara PAD hanya 8,36 persen dan Lain-Lain Pendapatan menurun drastis menjadi 0,16 persen. Puncaknya terjadi pada 2024, di mana Pendapatan Transfer mencapai 93,10 persen, sedangkan PAD dan Lain-Lain Pendapatan masing-masing hanya menyumbang 6,26 persen dan 0,64 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketergantungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi, sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD mencapai puncaknya pada 2021 dengan 15,92 persen, kemudian menurun tajam menjadi 7,63 persen pada 2022, sedikit naik ke 8,36 persen pada 2023, namun kembali turun hingga 6,26 persen pada 2024. Penurunan ini berjalan beriringan dengan peningkatan proporsi Pendapatan Transfer, yang cenderung mengisi kekosongan saat kontribusi PAD menurun. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, dari 2,70 persen pada 2020 menjadi hanya 0,64 persen pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi sumber pendapatan non-PAD lainnya juga semakin mengecil. Kondisi ini menegaskan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Upaya diversifikasi sumber PAD, peningkatan efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta optimalisasi potensi pendapatan lainnya menjadi langkah krusial untuk mendorong kemandirian fiskal yang lebih berkelanjutan.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode 2020-2024, realisasi target pendapatan daerah fluktuatif. Pada 2021 dan 2022 capaian realisasi pendapatan terhadap anggaran telah mencapai di atas 100 persen. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada 2022 yang mencapai 156,25 persen. Pada 2020, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 78,20 persen

Gambar 2.29
Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



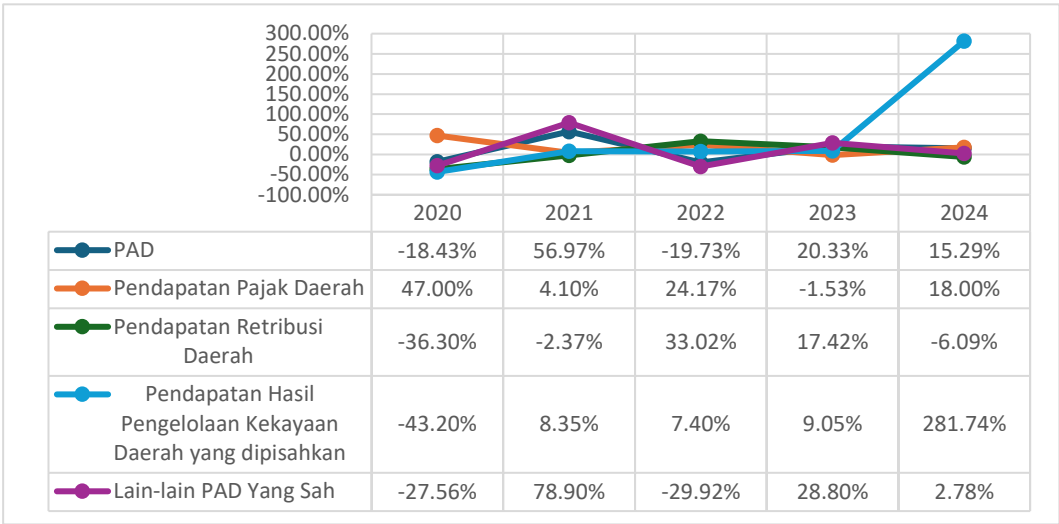
Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan dari kemandirian finansial suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sumber utama PAD umumnya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri pula suatu daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada

dana transfer dari Pemerintah Pusat atau pinjaman, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberlanjutan dan akselerasi pembangunan daerah.

Gambar 2.30
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber:LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Berdasarkan grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024, terlihat dinamika yang bervariasi antar komponen. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada 2020, PAD mengalami kontraksi sebesar -18,43 persen, kemudian meningkat signifikan pada 2021 dengan pertumbuhan 56,97 persen.

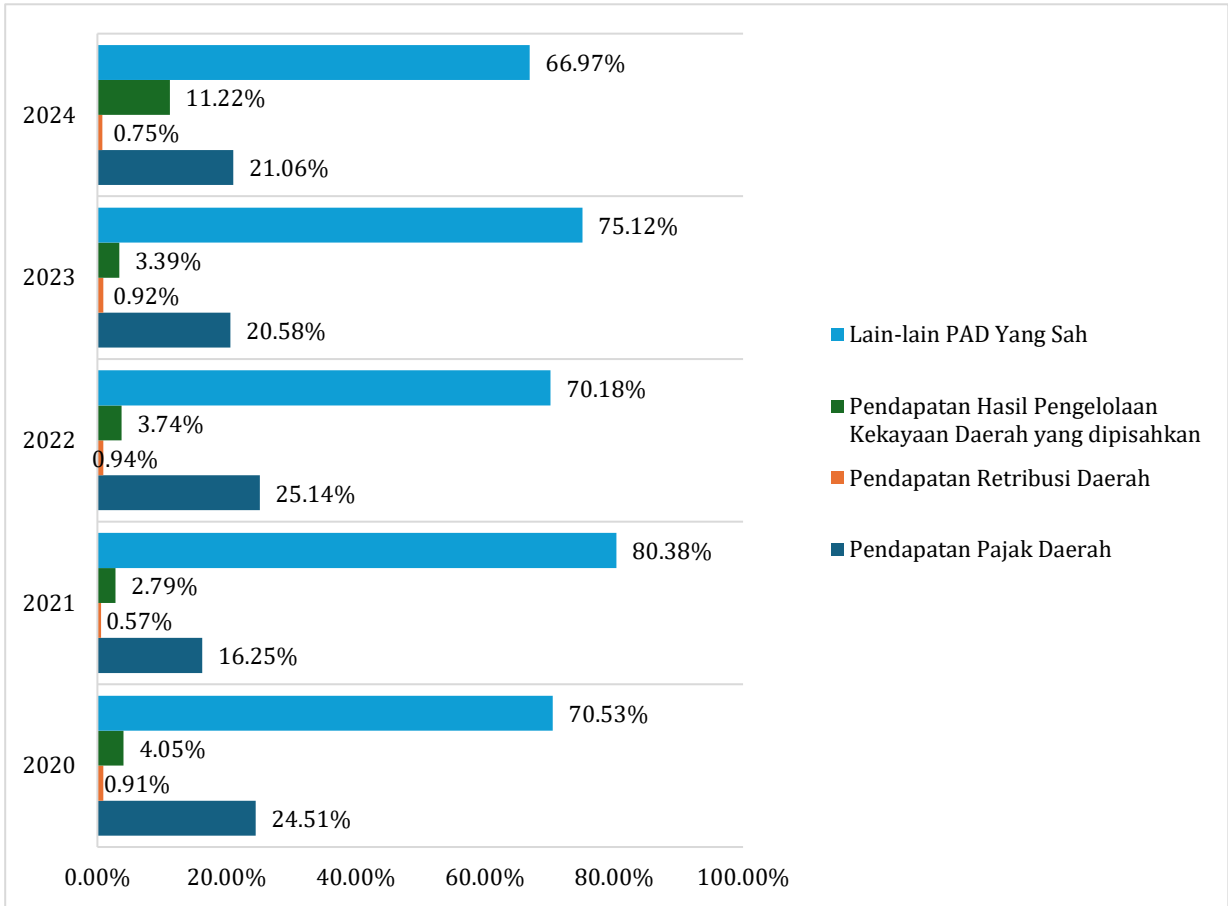
Penurunan kembali terjadi pada 2022 sebesar -19,73 persen, sebelum akhirnya menunjukkan tren positif pada 2023 dan 2024 dengan pertumbuhan masing-masing 20,33 persen dan 15,29 persen. Pergerakan ini sebagian besar dipengaruhi oleh volatilitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Secara rinci Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan yang paling ekstrem. Setelah terjadi kontraksi -43,20 persen pada 2020, komponen ini meningkat drastis hingga 281,74 persen pada 2024, menjadi pendorong utama pertumbuhan PAD pada tersebut.

Sementara itu, Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih stabil dibandingkan komponen lainnya, dengan pertumbuhan positif di sebagian besar tahun, kecuali penurunan kecil pada 2023 sebesar -1,53 persen.

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif di sebagian besar periode, khususnya pada 2020 sebesar -36,30 persen dan 2024 sebesar -6,09 persen, yang menandakan tantangan dalam pengelolaannya. Komponen Lain-lain PAD yang Sah juga menunjukkan pola fluktuatif, dengan pertumbuhan positif signifikan pada 2021 sebesar 78,90 persen dan 2023 sebesar 28,80 persen , namun juga mengalami kontraksi pada 2020 dan 2022.

Gambar 2.31
Struktur Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Gambar di atas yang menunjukkan Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024. Di sana terlihat jelas bahwa Lain-lain PAD Yang Sah merupakan komponen penyumbang terbesar dan paling dominan dalam struktur PAD sepanjang periode tersebut.

Pada 2020, kontribusi Lain-lain PAD Yang Sah mencapai 70,53 persen, dan mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 80,38 persen, proporsinya jauh di atas komponen PAD lainnya. Proporsi ini sedikit berfluktuasi namun tetap mendominasi, dengan 70,18 persen pada 2022, 75,12 persen pada 2023, dan 66,97 persen pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan asli daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berasal dari pajak atau retribusi daerah secara langsung, melainkan dari kategori lain-lain PAD yang sah khususnya dari pendapatan BLUD.

Sementara itu, Pendapatan Pajak Daerah menempati posisi kedua sebagai penyumbang terbesar PAD, namun dengan kontribusi yang jauh lebih kecil dibandingkan Lain-lain PAD Yang Sah. Kontribusi Pajak Daerah berfluktuasi dari 24,51 persen pada 2020, turun menjadi 16,23 persen pada 2021, kemudian meningkat kembali ke 25,14 persen pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 20,58 persen pada 2023 dan 21,06 persen pada 2024.

Adapun Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki kontribusi yang sangat minim, bahkan cenderung di bawah satu persen dalam beberapa tahun. Pendapatan Retribusi Daerah hanya berkisar antara 0,57 persen hingga 0,94 persen sepanjang periode.

Demikian pula, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga menunjukkan persentase yang sangat kecil hingga 2023, berkisar antara 2,79 persen hingga 4,05 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 11,22 persen pada 2024. Dominasi Lain-

lain PAD Yang Sah dan rendahnya kontribusi retribusi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah perlu menjadi perhatian dalam upaya diversifikasi dan peningkatan kualitas sumber PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2020 tercatat sebesar Rp4,94 triliun, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai Rp12,69 triliun pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 26,58 persen per tahun. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

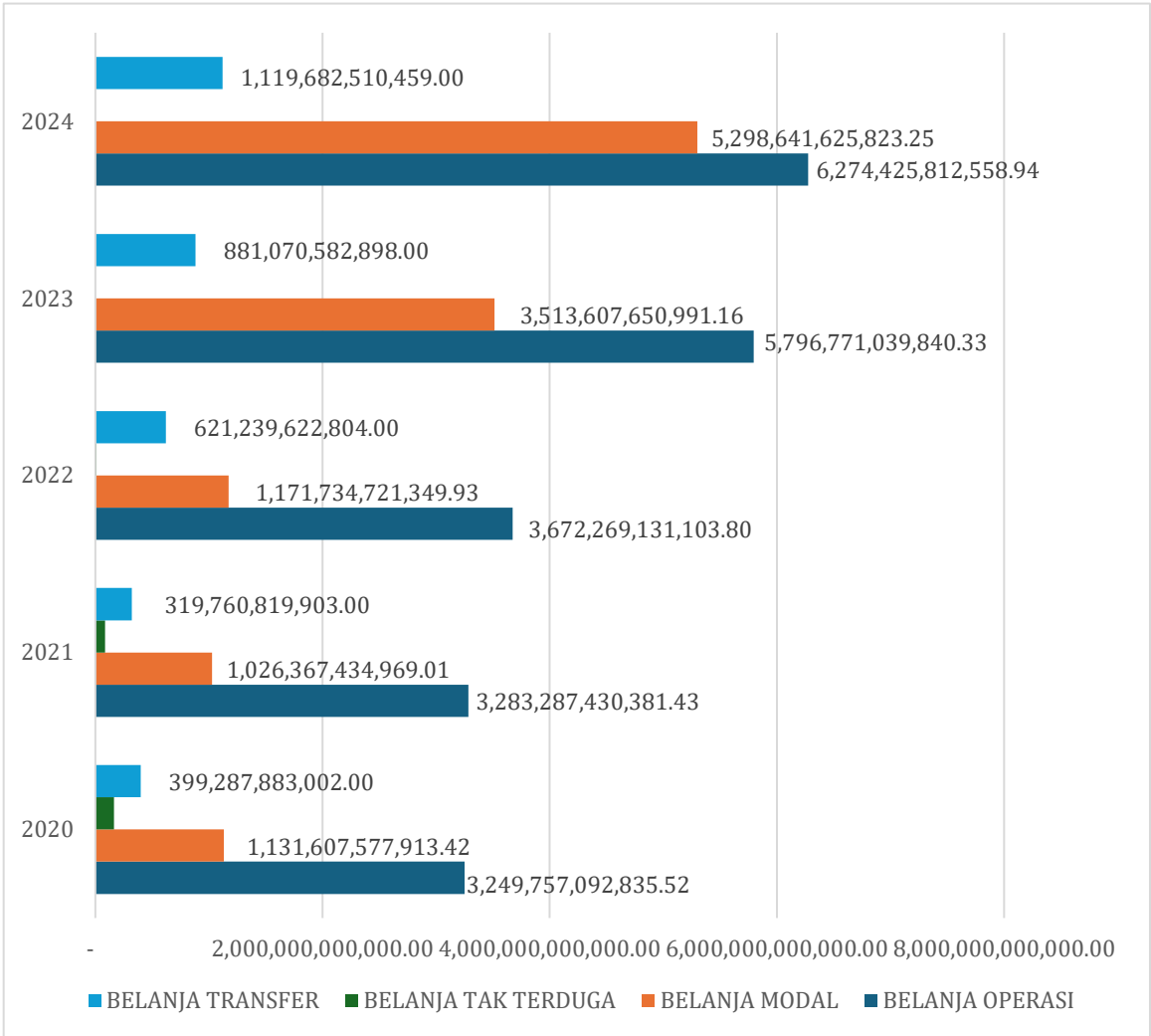
Tabel 2.71
Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
BELANJA	4.944.693,38	4.714.130,50	5.475.960,55	10.191.449,27	12.692.749,95	26,58
BELANJA OPERASI	3.249.757,09	3.283.287,43	3.672.269,13	5.796.771,04	6.274.425,81	17,88
Belanja Pegawai	1.551.917,26	1.666.499,77	1.660.706,85	1.684.249,24	2.031.277,59	6,96
Belanja Barang dan Jasa	1.548.467,84	1.557.300,92	1.904.457,46	3.795.753,56	3.971.759,72	26,55
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	146.632,39	58.453,25	90.036,58	275.810,46	246.099,47	13,82
Belanja Bantuan Sosial	2.739,60	1.033,50	16.974,05	40.893,38	25.188,00	74,13
Belanja keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	1.131.607,58	1.026.367,43	1.171.734,72	3.513.607,65	5.298.641,63	47,10
Belanja Tanah	27.094,42	15.358,49	22.828,25	48.525,31	62.606,65	23,29
Belanja Peralatan dan Mesin	233.494,52	234.889,07	273.027,32	1.186.122,19	1.286.285,84	53,20
Belanja Bangunan dan Gedung	213.248,60	221.986,62	187.440,89	884.289,33	1.646.496,07	66,69
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	623.480,05	548.105,07	672.563,91	1.351.028,78	2.281.781,60	38,31
Belanja Aset Tetap Lainnya	34.290,00	6.028,19	15.874,35	42.977,98	5.811,54	-35,84
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	664,05	15.659,93	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	164.040,82	84.714,81	10.717,07	0,00	0,00	-100,00
Belanja Tak Terduga	164.040,82	84.714,81	10.717,07	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	399.287,88	319.760,82	621.239,62	881.070,58	1.119.682,51	29,41
Belanja Transfer Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,28	
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	16.754,28	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	399.287,88	319.760,82	621.239,62	881.070,58	1.102.928,23	28,92
Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	0,00	9.600,00	621.239,62	0,00	0,00	
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	397.984,99	310.160,82	0,00	881.070,58	1.102.928,23	29,02
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	-488.106,29	-270.895,76	1.967.564,58	-2.404.225,45	-106.200,08	-31,70

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Peningkatan tersebut didominasi oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi secara konsisten menjadi komponen terbesar dalam belanja total, meskipun proporsinya terhadap belanja total mengalami fluktuasi. Kenaikan terbesar dalam Belanja Operasi terlihat pada Belanja Barang dan Jasa, yang meningkat dari Rp1,54 triliun pada 2020 menjadi Rp3,97 triliun pada 2024. Sementara itu, Belanja Pegawai juga menunjukkan peningkatan substansial, mencapai Rp2,03 triliun pada 2024 dengan kenaikan rata-rata 6,84 persen. Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama pada 2023 dan 2024. Dari Rp1,13 triliun pada 2020, Belanja Modal melonjak menjadi Rp5,29 triliun pada 2024. Peningkatan signifikan pada Belanja Modal ini mencerminkan fokus Pemerintah Daerah pada investasi infrastruktur dan aset jangka panjang, yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik di masa depan yang bisa mengindikasikan semakin baiknya perencanaan anggaran atau minimnya kejadian tak terduga yang memerlukan alokasi dana khusus.

Gambar 2.32
Struktur Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Gambar di atas menunjukkan Struktur Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020–2024, terlihat bahwa Belanja Operasi selalu menjadi komponen terbesar dalam belanja total daerah. Pada 2020, Belanja Operasi mendominasi dengan proporsi 65,72 persen, dan meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2021 sebesar 69,65 persen. Namun, proporsi Belanja Operasi mulai menurun pada-tahun berikutnya, yakni 67,06 persen pada 2022, turun signifikan menjadi 56,88 persen pada 2023, dan semakin berkurang hingga 49,43 persen pada 2024. Meski demikian, Belanja Operasi tetap menjadi alokasi pengeluaran terbesar.

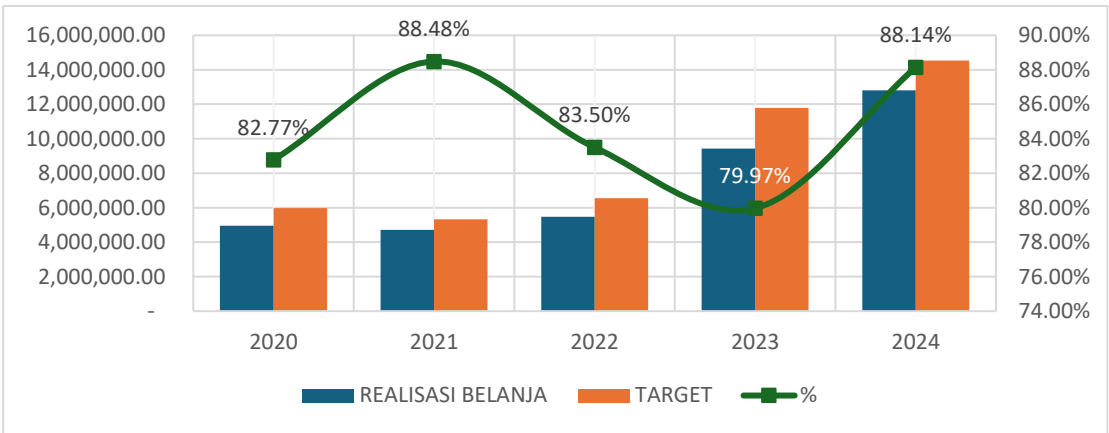
Sebaliknya, Belanja Modal menunjukkan tren peningkatan dalam struktur belanja daerah. Dari 22,89 persen pada 2020, proporsinya sempat turun menjadi 21,77 persen pada 2021, namun kembali meningkat menjadi 21,40 persen pada 2022. Kenaikan substansial terjadi pada 2023 dengan proporsi 34,48 persen, dan mencapai puncaknya di 41,75 persen pada 2024. Peningkatan Belanja Modal ini mencerminkan pergeseran prioritas anggaran menuju investasi jangka panjang, khususnya pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset modal, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik.

Sementara itu, Belanja Transfer menunjukkan fluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada 2022 sebesar 11,34 persen, lalu berada pada kisaran 8–9 persen pada tahun lainnya. Sementara itu, Belanja Tak Terduga semakin kecil peranannya, dari 3,32 persen pada 2020 hingga tidak lagi muncul dalam realisasi tahun 2023 dan 2024.

Target dan Realisasi Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD secara umum belum terpenuhi 100 persen. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang kurang dari 100 persen selama periode. Selama periode 2020-2024 capaian realisasi berkisar pada 82,77 persen - 88,48 persen dari anggaran. Realisasi belanja daerah tertinggi pada 2021 sebesar 88,48 persen.

Gambar 2.33
Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024



Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024, diolah

Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada anggaran yang berjalan maupun pada-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang berjalan maupun pada-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal

(investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencarian dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami fluktuasi. Peningkatan tertinggi penyertaan modal daerah pada 2024 dengan nilai Rp24,045 miliar.

Tabel 2.72
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	%
PEMBIAYAAN	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46	-36,05
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.645.755,99	1.137.661,95	842.321,88	2.806.073,50	295.973,79	-34,88
Penggunaan SiLPA	1.645.755,99	1.137.661,95	842.321,88	2.806.073,50	295.973,79	-34,88
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penerimaan Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000,00	24.400,00	3.750,00	105.874,00	24.045,32	4,71
Pembayaran cicilan pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Penyertaan modal daerah	20.000,00	24.400,00	3.750,00	105.874,00	24.045,32	
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pengeluaran Pembiayaan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO	1.625.755,99	1.113.261,95	838.571,88	2.700.199,50	271.928,46	-36,05
SILPA Tahun Berkenaan	1.137.649,70	842.366,18	2.806.136,46	295.974,05	165.728,38	-38,22

Sumber:LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Tabel 2.73
Perkembangan Rincian SILPA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020		2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	1.645.755,99	100%	1.137.649,70	100%	842.366,18	100%	2.806.136,46	100%	295.974,05	100%	165.936,42	100%
Pelampauan Penerimaan PAD	-		89.471,89	8%	334.609,92	40%	61.655,74	2%	-		5.870,57	4%
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan				0%			1.554.710,36	55%				
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			21.552,25	2%	115.160,95	14%	107.569,37	4%	2.488,75	1%		
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	1.645.755,99	100%	1.026.625,56	90%	392.595,31	47%	1.082.200,99	39%	293.485,30	99%	160.065,85	96%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-			
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-			

Sumber:BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek) dan ekuitas (ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi) suatu Pemerintah Daerah.

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat, nilai aset Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2020-2024 relatif mengalami pertumbuhan sebesar 9,47 persen per tahun, dari Rp17,52 triliun (2020) menjadi Rp25,16 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam lima tahun terakhir adalah aset lancar (-30,76 persen), dan investasi jangka panjang (9,11 persen), aset tetap (11,14 persen). Aset lainnya yang mengalami peningkatan nilai dengan rata-rata sebesar 30,70 persen.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah.

Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek mengalami tren menurun cukup signifikan sebesar (-7,85 persen) per tahun dari Rp637,5 miliar (2020) menjadi Rp459,73 miliar (2024). Jika ditinjau lebih dalam, maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang belanja yang trennya juga relatif meningkat dari Rp61,29 miliar (2021) menjadi Rp458,97 miliar (2024).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki Pemerintah Daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara agregat mengalami sedikit perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,81 persen per tahun. Pada 2020, ekuitas tercatat sebesar Rp16,885 triliun, menurun menjadi Rp24,55 triliun pada 2024.

Nilai ekuitas dapat berdampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek baru, atau mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang cermat menjadi penting untuk memitigasi risiko penurunan ekuitas. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk

menekan penurunan nilai ekuitas yaitu mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mengelola operasional dengan efisien untuk mencegah penurunan pendapatan atau peningkatan biaya. Secara keseluruhan, Neraca Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET	17.522.696.016.692,50	16.717.859.590.430,90	19.140.842.870.852,80	23.224.165.464.618,10	25.168.341.085.266,30	9,47
Aset Lancar	1.706.751.203.408,48	1.251.626.335.344,57	3.121.141.709.030,80	535.626.624.203,81	392.206.638.241,10	(30,76)
Investasi Permanen	725.971.224.603,07	688.604.488.989,78	857.538.077.444,13	1.013.224.271.858,78	1,037,269,596,632,78	9,33
Investasi Jangka Panjang	745.271.661.175,07	707.925.027.316,78	876.720.265.492,13	1.032.352.289.883,78	1,056,242,578,826,78	9,11
Aset Tetap	14.548.663.379.759,70	14.244.683.014.330,60	14.342.267.371.718,00	17.141.453.256.661,30	22,196,483,872,624,40	11,14
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Aset Lainnya	522.009.772.349,18	513.625.213.438,86	800.713.524.611,89	4.514.733.293.869,21	1.523.407.995.573,95	30,70
PROPERTI INVESTASI						
KEWAJIBAN	637.591.018.666,63	251.525.594.372,98	214.056.444.156,66	551.376.524.420,86	459.730.824.477,88	(7,85)
Kewajiban Jangka Pendek	637.591.018.666,63	251.525.594.372,98	214.056.444.156,66	551.376.524.420,86	459.730.824.477,88	(7,85)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
EKUITAS	16.885.104.998.025,80	16.466.333.996.057,90	18.926.786.426.696,10	22.672.788.940.197,20	24.554.795.854.420,20	9,81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	17.522.696.016.692,50	16.717.859.590.430,90	19.140.842.870.852,80	23.224.165.464.618,10	25.014.526.678.898,10	9,31

Sumber: BPKAD, diolah 2025

Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran, yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah setelah dikeluarkannya pendapatan-pendapatan yang sudah tertentu penggunaannya dan dipenuhinya belanja yang bersifat wajib.

Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji pegawai, dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya). Semakin besar ruang fiskal daerah, maka semakin besar dana yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah termasuk untuk penyertaan modal pada BUMD. Secara teknis perhitungan ruang fiskal dapat menggunakan formula berikut.

<i>Ruang Fiskal</i>	=	<i>(Total Pendapatan + SiLPA) – Pendapatan Mengikat – Belanja Wajib Daerah</i>
<i>Pendapatan Mengikat</i>	=	<i>DAK + Pendapatan Hibah + Dana Insentif Daerah + Dana Desa</i>
<i>Belanja Mengikat</i>	=	<i>Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil + Belanja Adum + Alokasi Dana Desa</i>
<i>Belanja Wajib</i>	=	<i>Belanja Urusan Pendidikan (20%) + Belanja Urusan Kesehatan (10%) + Belanja Infrastruktur</i>

Efektivitas penggunaan anggaran berpengaruh juga pada terciptanya ruang fiskal untuk memberi ruang dalam pembangunan daerah bersangkutan. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD memegang peranan sangat penting.

Stephen S. Heller (*IMF Policy Discussion Paper*, 2005) mengemukakan bahwa ruang fiskal dapat didefinisikan sebagai ketersediaan ruang yang cukup pada anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tertentu, dalam rangka mencapai suatu tujuan, tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah.

Tabel 2.75
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (Juta Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN	6.102.343,08	5.580.896,68	8.285.847,01	10.004.307,03	12.998.121,7
PENDAPATAN MENGIKAT	393.840,90	426.323,99	662.847,27	471.009,42	736.796,89
DAK	364.050,00	381.180,00	482.970,00	443.522,71	506.900,82
Hibah	4.456,75	4.626,00	3.033,00	-	-
Dana Insentif Daerah	25.334,16	40.517,99	-	27.486,72	34.790,32
Dana Desa	-	-	176.844,27	-	195.105,75
BELANJA MENGIKAT	2.164.652,19	2.223.389,33	2.568.591,66	3.167.369,61	3.716.676,67
Belanja Pegawai	1.578.675,13	1.666.499,77	1.660.597,65	1.674.450,61	2.031.277,59
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
Belanja Adum (5%*belanja)	267.199,06	251.694,57	304.860,01	553.625,99	640.402,85
Alokasi Dana Desa (10% DAU + DBH)	318.778,00	305.195,00	603.134,00	939.293,00	1.044.996,24
BELANJA WAJIB	1.096.677,42	1.017.963,13	1.296.624,69	2.449.381,03	3.385.278,34
Belanja Pendidikan 20%*(belanja-gaji)	673.203,65	609.526,15	763.072,58	1.550.617,81	2.155.355,87
Belanja Kesehatan 10%*(belanja-gaji)	336.601,82	304.763,07	381.536,29	775.308,91	1.077.677,94
Belanja Infrastruktur (25%*DAU)	86.871,95	103.673,91	152.015,82	123.454,31	152.244,54
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	3.655.170,52	3.667.676,45	4.528.063,62	6.087.760,06	7.838.751,9
RUANG FISKAL	2.447.172,56	1.913.220,23	3.757.783,40	3.916.546,97	5.159.368,80
%	40,10%	34,28%	45,35%	39,15%	39,69%

Sumber: LRA Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2024 (diolah)

Tabel di atas menyajikan Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020-2024 yang menggambarkan selisih antara total pendapatan dan belanja mengikat, serta belanja wajib.

Secara umum, Ruang Fiskal menunjukkan tren meningkat dengan nominal yang signifikan, dari Rp2,45 triliun pada 2020 menjadi Rp5,16 triliun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemampuan daerah untuk memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar, untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang tidak terikat atau wajib. Namun, dalam persentase terhadap pendapatan total dan belanja mengikat serta belanja wajib, Ruang Fiskal menunjukkan fluktuasi, sempat menurun dari 40,10 persen pada 2020 menjadi 34,28 persen pada 2021, sebelum melonjak ke 45,35 persen pada 2022 dan kembali menurun ke 39,15 persen pada 2023.

Peningkatan nominal Ruang Fiskal ini didukung oleh pertumbuhan yang konsisten pada sektor Penerimaan, yang naik dari Rp6,10 triliun pada 2020 menjadi Rp12,99 triliun pada 2024. Kontribusi terbesar dalam Penerimaan berasal dari Pendapatan Mengikat (DAK, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Hibah), yang menunjukkan tren peningkatan.

Di sisi belanja, Belanja Mengikat dan Belanja Wajib juga menunjukkan kenaikan yang signifikan. Belanja Mengikat meningkat dari Rp2,16 triliun pada 2020 menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, didorong oleh Belanja Pegawai. Sementara itu, Belanja Wajib juga melonjak dari Rp1,10 triliun pada 2020 menjadi Rp3,39 triliun pada 2024, dengan Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan menjadi pendorong utama.

Meskipun Ruang Fiskal secara nominal terus bertumbuh, fluktuasi persentasenya mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan pendapatan dan belanja mengikat serta wajib tidak selalu seimbang. Peningkatan Pendapatan Mengikat dan kenaikan Belanja Wajib (terutama pendidikan dan kesehatan) menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap sektor-sektor esensial.

Namun, penting untuk terus mengelola Belanja Mengikat dan Wajib secara efisien agar tidak terlalu membebani anggaran dan tetap memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan belanja non-wajib yang mendukung pembangunan inovatif dan prioritas strategis daerah. Keberlanjutan Ruang Fiskal yang sehat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Indeks Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah, yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD untuk membiayai tugas pemerintahan. Terkait dengan berbagai hal perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan No. 116/PMK.07/2021 tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah* disebutkan bahwa Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Tabel 2.76
Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
dan Rasio Kapasitas Fiskal
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2024

Uraian	Tahun	Nilai	Kategori
Indeks KFD	2019	3,683	Sangat Tinggi
	2020	2,642	Sangat Tinggi
	2021	2,738	Sangat Tinggi
Rasio KFD	2022	1,832	Sedang
	2023	2,757	Sangat Tinggi
	2024	2,122	Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2019-2024

Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut.

$$KFD_{kabupaten'/kota-i} = Y - [Y_a + X]$$

Keterangan

- KFD* = Kapasitas Fiskal Daerah
- Y* = Pendapatan
- Y_a* = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
- X* = Belanja tertentu

Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$IKFD_{kabupaten'/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten'/kota-i}}{\sum KFD_{kabupaten'/kota-i}/508}$$

Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut untuk tahun 2021:

Tabel 2.77
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

Rentang IKFD 2021	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,530	Sangat rendah
0,530 < IKFD < 0,727	Rendah
0,727 ≤ IKFD < 1,053	Sedang
1,053 ≤ IKFD < 1,838	Tinggi
IKFD ≥1,838	Sangat Tinggi

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahun yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka dapat dikemukakan bahwa nilai Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2019-2021 selalu menunjukkan kategori “sangat tinggi”.

Sejak 2022 terdapat perubahan metode penghitungan Kapasitas fiskal oleh Kementerian Keuangan yaitu dengan menggunakan indikator Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Terkait dengan perhitungan perimbangan dana pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI mengemukakan definisi tentang kapasitas fiskal yang dikaitkan langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada pasal 1 Peraturan Kementerian Keuangan PMK No. 193/PMK.07/2022 tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah* disebutkan bahwa kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah, yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Adapun Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut.

$$KFD_{kabupaten'/kota-i} = Y - [Y_a + X]$$

Keterangan:

- KFD = Kapasitas Fiskal Daerah
- Y = Pendapatan
- Y_a = Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan
- X = Belanja tertentu

Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$RKFD_{kabupaten'/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten'/kota-i}}{Belanja\ Pegawai_{kabupaten'/kota-i}}$$

Berdasarkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut untuk tahun 2022:

Tabel 2.78
Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

Rentang RKFD 2022	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,171$	Sangat rendah
$1,171 < RKFD < 1,504$	Rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	Tinggi
$RKFD \geq 2,171$	Sangat Tinggi

Sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah oleh Kementerian Keuangan RI, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*, capaian RKFD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan daripada periode sebelumnya, dengan capaian 2022-2024 berturut-turut adalah kategori “sedang” dan “sangat tinggi”.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama periode 2020-2024, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

Hal tersebut juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para *stakeholders* pengelolanya. Pada 2023-2024 diasumsikan dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap

masa pemulihan ekonomi, maka akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat, sehingga dapat memasuki momentum pasca pemulihan ekonomi.

Metode proyeksi menggunakan data tren realisasi APBD selama lima tahun terakhir, serta data pada RKPD 2026. Selain itu, turut mempertimbangkan rencana kebijakan makro ekonomi daerah dalam lima tahun mendatang. Selanjutnya, potensi pajak dan retribusi menjadi tolak ukur tambahan, khususnya pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.79
Proyeksi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2030 (Juta Rupiah)

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PENDAPATAN	11.500.000,00	7.352.883,26	7.640.074,50	7.784.529,78	7.959.266,82	8.195.436,96	2,75%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	953.088,45	737.494,50	1.129.182,94	1.370.177,90	1.633.895,00	1.951.863,56	28,29%
Pendapatan Pajak Daerah	364.451,98	277.500,00	690.372,94	927.485,02	1.187.296,47	1.501.335,47	59,40%
Pendapatan Retribusi Daerah	487.820,48	356.319,55	369.825,83	371.404,27	372.982,71	374.561,15	1,27%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	44.145,89	80.045,00	59.877,43	61.726,53	63.575,64	65.424,75	-4,05%
Lain-lain PAD Yang Sah	56.670,10	23.629,95	9.106,74	9.562,08	10.040,18	10.542,19	-11,62%
PENDAPATAN TRANSFER	10.296.911,55	6.534.000,00	6.412.350,00	6.298.657,50	6.192.524,63	6.093.573,39	-1,73%
	-						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.597.752,67	5.659.000,00	5.499.850,00	5.348.657,50	5.205.024,63	5.068.573,39	-2,72%
Bagi Hasil Pajak	-	5.024.000,00	4.864.850,00	4.713.657,50	4.570.024,63	4.433.573,39	-3,08%
Dana Alokasi Umum (DAU)	-	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	0,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	-	-	-	-	-	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Dana Insentif Daerah	-						
Dana Desa	-						
Insentif Fiskal	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	699.158,88	850.000,00	887.500,00	925.000,00	962.500,00	1.000.000,00	4,15%
Pendapatan Bagi Hasil	-	850.000,00	887.500,00	925.000,00	962.500,00	1.000.000,00	4,15%
Bantuan Keuangan	-						
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.000,00	81.388,76	98.541,57	115.694,38	132.847,19	150.000,00	16,55%
Pendapatan Hibah	-						
Pendapatan Lainnya	-						
BELANJA	12.000.000,00	7.502.883,26	7.863.021,66	8.012.419,07	8.196.704,71	8.401.622,32	2,88%
BELANJA OPERASI	7.011.186,85	5.335.270,09	5.591.704,83	5.841.765,92	5.689.759,77	5.874.135,63	2,48%
Belanja Pegawai	2.470.351,10	2.435.670,56	2.552.742,06	2.570.311,00	2.617.197,49	2.702.010,39	2,64%
Belanja Barang dan Jasa	4.431.801,62	2.848.512,70	2.985.427,63	3.218.730,37	3.017.742,50	3.116.122,85	2,41%
Belanja Subsidi	140,7	150	150	150	200	200	8,33%
Belanja Hibah	105.602,87	48.076,03	50.386,83	49.653,74	51.206,04	52.865,42	2,43%
Belanja Bantuan Sosial	3.290,55	2.860,80	2.998,31	2.920,81	3.413,74	2.936,97	1,28%
BELANJA MODAL	3.749.518,32	1.373.831,30	1.439.863,21	1.320.399,15	1.596.407,42	1.594.408,24	4,32%
Belanja Modal Tanah	80.059,49	23.415,89	24.541,35	26.407,98	28.735,33	28.699,35	5,28%

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	665.128,41	152.997,47	160.351,15	145.243,91	167.622,78	167.412,87	2,67%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.155.012,55	547.304,76	573.610,45	528.159,66	606.634,82	605.875,13	2,90%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.736.639,78	644.607,87	675.590,35	615.902,20	787.749,68	786.681,03	5,93%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.320,17	4.751,80	4.980,19	3.961,20	4.789,22	4.783,22	1,28%
Belanja Modal Aset Lainnya	89.357,91	753,51	789,72	724,2	875,58	956,64	6,67%
BELANJA TAK TERDUGA	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Belanja Tak Terduga	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
BELANJA TRANSFER	1.189.294,84	783.781,87	821.453,61	840.254,00	900.537,52	923.078,46	4,19%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	36.928,96	63.381,96	66.428,35	67.220,32	72.043,00	73.846,28	3,92%
Transfer Bantuan Keuangan	1.152.365,88	720.399,92	755.025,26	773.033,68	828.494,52	849.232,18	4,22%
SURPLUS / (DEFISIT)	-500.000,00	-150.000,00	-222.947,15	-227.889,29	-237.437,89	-206.185,37	10,47%
PEMBIAYAAN	-						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000,00	150.000,00	268.347,15	273.289,29	282.837,89	251.585,37	18,30%
Penggunaan SiLPA	500.000,00	150.000,00	268.347,15	273.289,29	282.837,89	251.585,37	18,30%

URAIAN	APBD	RKPD	PROYEKSI				r (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-						
PEMBIAYAAN NETTO	500.000,00	150.000,00	222.947,15	227.889,29	237.437,89	206.185,37	10,47%
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	-	-	-	-	-	-	

Berdasarkan tabel di atas Proyeksi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2030 terlihat bahwa pendapatan total diproyeksikan akan menurun signifikan pada 2025 menjadi Rp11.50 triliun, dari Rp12.59 triliun pada 2024 (sebagai *baseline*). Namun demikian, setelah itu pendapatan diproyeksikan akan menunjukkan pertumbuhan bertahap hingga mencapai Rp8.20 triliun pada 2030.

Fluktuasi dan penurunan ini terutama disebabkan oleh dinamika pada komponen Dana Transfer yang sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Proyeksi pada 2025 dan 2026 menunjukkan penurunan drastis pada Dana Transfer dibandingkan dengan tahun 2024, yang secara langsung berdampak pada total penerimaan.

Lebih lanjut, analisis proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang positif dan menjadi kunci dalam strategi kemandirian fiskal daerah. Dari Rp953,09 miliar pada 2025, PAD diharapkan akan tumbuh secara konsisten dan signifikan hingga mencapai Rp1,95 triliun pada 2030. Peningkatan PAD ini didorong oleh pertumbuhan yang substansial pada Pajak Daerah, yang diproyeksikan melonjak dari Rp364,45 miliar pada 2025 menjadi Rp1,50 triliun pada 2030. Retribusi Daerah juga menunjukkan kenaikan, meskipun lebih moderat. Pertumbuhan PAD yang kuat ini sangat krusial untuk mengimbangi potensi penurunan pada Dana Transfer dan mengurangi ketergantungan daerah.

Di sisi lain, Dana Transfer, yang saat ini merupakan komponen terbesar dalam pendapatan daerah, diproyeksikan akan mengalami penurunan pada 2026. Dana Transfer diproyeksikan menurun menjadi Rp6,09 triliun pada 2030. Penurunan ini terutama disebabkan oleh proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan relatif stabil pada Rp635 miliar setiap tahun dan Transfer Antar Daerah menunjukkan tren peningkatan dari Rp850 miliar di RKPD 2026 menjadi Rp1,00 triliun pada 2030, penurunan DBH yang substansial menjadi faktor dominan yang menekan total Dana Transfer.

Kondisi proyeksi ini juga menyoroti urgensi bagi Pemerintah Daerah agar secara agresif mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Pertumbuhan yang diproyeksikan pada Pajak Daerah, sebagai tulang punggung PAD, harus didukung dengan kebijakan yang efektif dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Selain itu, eksplorasi potensi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan perlu terus dilakukan, mengingat kontribusi keduanya masih relatif kecil namun memiliki potensi untuk ditingkatkan. Dengan adanya proyeksi penurunan Dana Transfer, kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan stabilitas keuangan daerah di masa mendatang.

Selain dari sisi pendapatan, dari sisi Belanja tahun 2026-2030 juga diproyeksikan ke rata-rata periode sebelumnya. Belanja total daerah 2025 ditetapkan Rp12 triliun, pada 2026-2030 diproyeksikan dengan rata-rata 2,88 persen per tahun. Anggaran belanja juga diselaraskan dengan proyeksi pendapatan yang menurun pada 2026, karena adanya efisiensi dari Pemerintah Pusat.

Belanja terbesar pada 2026-2030 sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi pada 2030 sebesar Rp5,87 triliun (69,88 persen dari belanja total), di mana Belanja Pegawai mencapai Rp2,70 triliun dan Belanja Barang/Jasa Rp3,11 triliun. Belanja Modal dialokasikan Rp1,59 triliun (18,92 persen), dengan fokus pada infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan yang mencapai Rp786 Miliar. Alokasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp10 miliar konsisten tiap tahun. APBD Kutai Kartanegara 2025 mengalami defisit Rp500 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan, seluruhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya. Tren defisit menurun pada tahun berikutnya, bahkan berpotensi berkurang signifikan pada 2030.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan, prioritas utama difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD. Hal ini menjadi krusial mengingat proyeksi tren penurunan pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas utama seperti minyak dunia dan batubara.

Oleh karena itu, strategi utama akan bergeser dari ketergantungan pada sumber eksternal menjadi pendorong pertumbuhan internal yang berkelanjutan dan lebih stabil. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keberlanjutan fiskal daerah, tetapi juga untuk memberikan fleksibilitas lebih besar dalam alokasi anggaran untuk program-program pembangunan strategis yang selaras dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Peningkatan PAD secara signifikan akan didorong oleh intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah. Asumsi dasar yang mendasari proyeksi ini adalah adanya peningkatan rasio pajak daerah, sejalan dengan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Undang-undang itu memberikan ruang lebih besar dan landasan hukum yang kuat bagi daerah untuk menggali potensi pajaknya secara mandiri dan efektif. Identifikasi dan penarikan pajak dari sektor-sektor yang belum tergali secara maksimal akan menjadi fokus utama, mengingat masih banyaknya potensi pendapatan pajak yang belum terserap secara optimal, terutama jika dibandingkan dengan PDRB di setiap sektor lapangan usaha yang beragam dan dinamis di Kutai Kartanegara. Langkah-langkah ini akan mencakup perbaikan sistem administrasi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta ekstensifikasi objek dan subjek pajak yang baru.

Peningkatan *local tax ratio* menjadi landasan fundamental dalam arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, sejalan dengan semangat yang diusung oleh UU HKPD. Dalam konteks Kutai Kartanegara, upaya peningkatan rasio pajak daerah akan difokuskan pada optimalisasi jenis-jenis pajak yang ada dan eksplorasi potensi pajak baru sesuai kewenangan yang diberikan UU HKPD.

Target spesifik akan ditetapkan untuk mencapai peningkatan yang terukur, misalnya dengan target peningkatan *local tax ratio* yang saat ini masih di bawah satu persen menjadi minimal 1,3 persen pada 2030. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi sektor ekonomi yang tumbuh pesat namun belum berkontribusi optimal pada penerimaan pajak daerah, serta perbaikan sistem administrasi pajak agar lebih efisien dan transparan, termasuk percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain pajak daerah, optimalisasi pendapatan dari Retribusi Daerah juga akan menjadi agenda penting. Proyeksi didasarkan pada asumsi bahwa potensi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu yang saat ini belum 100 persen terserap akan dapat terserap penuh hingga tahun 2030.

Contoh spesifik yang selama ini belum terkelola secara optimal adalah retribusi parkir tepi jalan umum, yang memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Untuk mencapai target ini, akan dilakukan perbaikan regulasi retribusi, peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban retribusi. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi secara menyeluruh.

Untuk memperkuat diversifikasi sumber PAD dan mengurangi dominasi Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan didorong secara proaktif. Peningkatan ini akan utamanya berasal dari dividen penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan fokus utama pada Bankaltimta.

Pemerintah Daerah akan konsisten mengalokasikan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal setiap tahun, sejalan dengan target Bankaltimtara untuk mencapai aset atau target keuangan tertentu, dengan target penempatan modal hingga Rp747 Miliar pada 2030, yang diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan dividen yang signifikan bagi pendapatan daerah. Selain itu, peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga akan menjadi fokus, melalui peningkatan efisiensi layanan, inovasi dalam pengelolaan keuangan BLUD, dan pengembangan unit-unit usaha yang potensial dalam lingkup BLUD.

Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah yang memiliki celah fiskal tinggi diberikan ruang untuk pengalokasian Dana Abadi Daerah pada Pengeluaran Pembiayaan yang selanjutnya dapat menghasilkan kembali sebagai penerimaan pembiayaan bagi pemenuhan belanja layanan dasar yang diatur secara spesifik sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyiapkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjalankan kebijakan Dana Abadi Daerah.

Sementara itu, komponen Dana Transfer, meskipun diproyeksikan akan mengalami tren penurunan dan gejolak harga komoditas global, tetap menjadi bagian yang diperhitungkan dalam proyeksi pendapatan daerah. Asumsi yang digunakan adalah adanya peningkatan yang moderat dari Dana Transfer. Namun, proporsi Dana Transfer diharapkan akan berangsur-angsur mengecil seiring dengan penguatan PAD. Kebijakan ini menegaskan pergeseran paradigma dari ketergantungan menjadi kemandirian, mempersiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menghadapi tantangan fiskal di masa depan dengan fondasi ekonomi lokal yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Selain kebijakan pendapatan, kebijakan dari sisi belanja juga memegang peran penting sebagai instrumen keuangan daerah. Belanja daerah merupakan pendekatan yang dirancang dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran dengan berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta asas kepatutan dan kewajaran.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana anggaran yang matang, mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Dengan demikian, seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat didanai melalui APBD.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah diawali dengan penetapan belanja wajib di luar pagu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meliputi belanja transfer, belanja tidak terduga, serta pengeluaran pembiayaan yang wajib direalisasikan pada anggaran bersangkutan. Selisih antara perkiraan penerimaan daerah dengan belanja wajib tersebut menjadi potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap OPD.

Perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada belanja yang diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan pemerintahan dengan fungsi penunjang, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial dan umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan belanja perangkat daerah mencakup pengalokasian kebutuhan rutin untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, serta pendanaan kegiatan yang mendukung program pembangunan prioritas dan unggulan kepala daerah. Pengalokasian tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, dan pencapaian sasaran strategis daerah.

Dalam rangka mendorong pencapaian target makro daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan perhatian khusus pada upaya pengembangan ekonomi nonekstraktif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Untuk memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang fokus, tertib dan berkesinambungan maka kegiatan-kegiatan yang melewati tahun anggaran dapat di desain dalam skema belanja *multiyears*. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dapat mengidentifikasi kegiatan/proyek yang dapat dilaksanakan dalam skema *multiyears*, dengan syarat harus ditetapkan dalam peraturan daerah, analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, tidak mengganggu program prioritas yang bersifat wajib, dan dituangkan di dalam dokumen perencanaan (RKPD, KUA-PPAS, APBD, dan Renja Perangkat Daerah).

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah selama periode RPJMD. Perhitungan proyeksi kapasitas riil direncanakan bersumber dari pendapatan daerah dan penerimaan daerah. Penggunaan alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni:

- a. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah melalui pendanaan program unggulan Bupati;
- c. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80
Proyeksi Kapasitas Rill Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (dalam juta rupiah)

URAIAN	RKPD	PROYEKSI			
	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN	7.352.883,26	7.640.074,50	7.784.529,78	7.959.266,82	8.195.436,96
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000,00	268.347,15	273.289,29	282.837,89	251.585,37
PENDAPATAN NETTO	7.502.883,26	7.908.421,65	8.057.819,07	8.242.104,71	8.447.022,33
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BELANJA TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	63.381,96	66.428,35	67.220,32	72.043,00	73.846,28
Transfer Bantuan Keuangan	720.399,92	755.025,26	773.033,68	828.494,52	849.232,18
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya					
BELANJA NETTO	793.781,88	876.853,61	895.654,00	955.937,52	978.478,46
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN DAERAH	6.709.101,38	7.031.568,04	7.162.165,07	7.286.167,19	7.468.543,87
PEMANFATAAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	6.709.101,38	7.031.568,04	7.162.165,07	7.286.167,19	7.468.543,87
PRIORITAS I					
BELANJA MANDATORY DAN SPM	360.511,42	1.828.207,69	1.862.162,92	1.894.403,47	1.941.821,41
PRIORITAS II					
BELANJA PENCAPAIAN VISI, MISI, PROGRAM PRIORITAS	1.872.957,33	2.416.647,09	2.557.125,80	2.507.500,96	2.502.616,97
PRIORITAS III					
BELANJA PENYTELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH LAINNYA	4.475.632,63	2.786.713,26	2.742.876,35	2.884.262,76	3.024.105,49

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI DAERAH

Permasalahan dan isu strategis memegang peranan krusial dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan yang dihadapi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif.

Memahami hal tersebut dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu adanya pemahaman mendalam terhadap permasalahan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis tersebut harus diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, harus mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci untuk menjamin bahwa dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, permasalahan dan isu strategis juga harus menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran. Dengan mengutamakan program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian permasalahan dan pencapaian tujuan pembangunan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Evaluasi dan *monitoring* secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD juga penting untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan tetap berada pada jalur yang benar dan memberikan hasil yang diharapkan. Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan.

Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu internasional, nasional, regional, dan isu lokal dalam lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara, serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan demikian, permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada segmen Gambaran Umum Daerah, maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah dapat diidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan (atau kegagalan) kinerja pembangunan daerah.

Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok yang dijabarkan sebagai berikut.

(1). Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara belum menunjukkan performa yang optimal, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun memiliki

potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama dari sektor pertambangan, migas, dan kehutanan, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan cenderung belum merata dan belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan pendapatan masih terjadi, terutama antara masyarakat di wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara masyarakat lokal dan pelaku ekonomi besar yang berasal dari luar daerah. Sektor informal dan UMKM juga belum mampu berkembang secara optimal akibat minimnya akses permodalan, teknologi, dan pasar.

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi Kutai Kartanegara terhadap sektor ekstraktif seperti batu bara dan migas menyebabkan struktur ekonomi daerah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

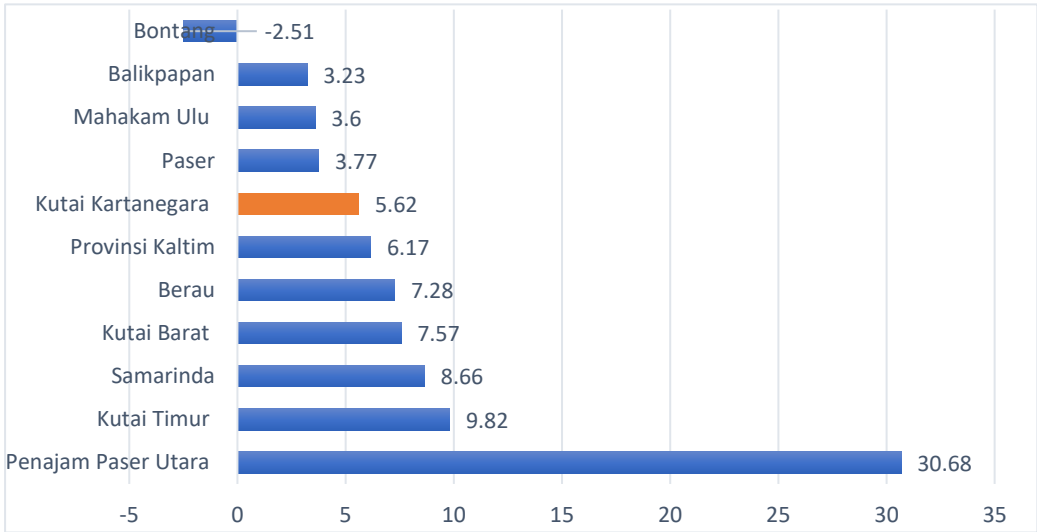
Ketika harga komoditas turun, dampaknya langsung terasa pada penerimaan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi daerah masih menjadi tantangan besar karena masih minim diversifikasi ekonomi yang kuat, terutama penguatan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri hilir yang berbasis potensi lokal.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 tercatat 5,62 persen, berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,17 persen. Kemudian, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur, LPE Kabupaten Kutai Kartanegara masih di bawah Kabupaten Berau dan Kutai Barat.

Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kontribusi ekonomi Kutai Kartanegara masih belum optimal dalam mendukung dinamika pertumbuhan regional, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah penyangga Ibukota Nusantara Negara (IKN) Nusantara.

Kondisi ini menunjukkan perlunya akselerasi penguatan sektor-sektor produktif non ekstraktif, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, serta peningkatan investasi dan inovasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.34
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Se-Provinsi Kalimantan Timur, 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengambil langkah-langkah strategis,

seperti mendorong pembangunan ekonomi berbasis wilayah dan potensi desa, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi rakyat, serta memperkuat kemitraan antara swasta, UMKM, dan masyarakat lokal. Selain itu, diperlukan pula regulasi yang mendorong investasi berwawasan lingkungan dan sosial, agar pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan.

(2). Belum Meratanya Pelayanan Infrastruktur Dasar

Pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan, terutama di wilayah-wilayah terpencil, perdesaan, dan kawasan pinggiran. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat secara adil.

Hal tersebut menyebabkan ketimpangan antarwilayah dalam menikmati manfaat pembangunan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan akses terhadap layanan publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar infrastruktur masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara desa-desa di wilayah pedalaman dan pesisir mengalami keterbatasan akses yang cukup signifikan.

Kondisi jalan yang rusak dan belum beraspal, terbatasnya pasokan listrik yang stabil, serta kesulitan memperoleh air bersih, menjadi masalah riil yang masih dihadapi masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pergerakan barang dan jasa, tetapi juga memperlemah konektivitas sosial dan ekonomi antarwilayah di dalam Kabupaten Kutai Kartanegara itu sendiri.

Meskipun pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami kemajuan, namun belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya 6,51 persen penduduk yang belum memiliki rumah layak huni. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi tempat tinggal yang kurang memenuhi standar kenyamanan dan kesehatan.

Kondisi tersebut menandakan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya di sektor perumahan, yang semestinya menjadi bagian integral dari upaya pembangunan inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat intervensi melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non pemerintah agar seluruh warga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Tingkat kuantitas jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 65,50 persen, menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari panjang total jalan di wilayah ini masih berada dalam kondisi rusak dan atau rusak berat. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, khususnya ke daerah-daerah terpencil atau kawasan pengembangan ekonomi baru, masih terganggu.

Infrastruktur jalan yang belum layak tersebut berpotensi menghambat distribusi barang dan jasa, memperlambat mobilitas masyarakat, serta mengurangi efisiensi pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan percepatan program perbaikan dan peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah serta menjamin pemerataan hasil pembangunan hingga ke pelosok desa.

Selain permasalahan di sektor perumahan dan infrastruktur jalan, capaian pelayanan dasar terkait akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih belum optimal.

Data menunjukkan bahwa rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 80,20 persen, sementara rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak baru sebesar 89,10 persen. Kondisi ini menunjukkan 1 dari 5 rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih yang memadai, atau hampir 10,90 persen rumah tangga belum menikmati fasilitas sanitasi yang layak.

Keterbatasan akses ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan atau kawasan padat penduduk. Pemerintah Daerah perlu memperluas cakupan infrastruktur air bersih dan sanitasi dengan pendekatan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, daerah, dan masyarakat, agar seluruh warga dapat terpenuhi hak dasarnya atas lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkeadilan, dengan memperkuat perencanaan berbasis data spasial dan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan sektor swasta dalam membiayai dan membangun infrastruktur dasar yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, perlu dikembangkan skema inovatif seperti infrastruktur berbasis komunitas, padat karya, dan digitalisasi layanan, agar pembangunan dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

(3). Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, praktik-praktik administrasi pemerintahan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, tumpang-tindih kewenangan, serta rendahnya kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Hal tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran dan lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat. Masih terdapat disparitas dalam kualitas pelayanan publik antarwilayah dan antarinstansi, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan.

Selain itu, implementasi prinsip keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten, sehingga masyarakat masih kesulitan mengakses data dan informasi yang seharusnya terbuka. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan juga memperlemah legitimasi dan efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, bersih, dan melayani.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 71,51, angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pada 2023 yakni sebesar 60,12. Meskipun demikian tantangan serius dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Terlebih lagi, capaian IRB tersebut masih terpaut cukup jauh dibandingkan dengan IRB Provinsi Kalimantan Timur (85,16) pada yang sama. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam mempercepat reformasi birokrasi di Kutai Kartanegara, khususnya dalam hal penyederhanaan prosedur pelayanan, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara berbasis digitalisasi dan kinerja.

Pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih belum optimal. Dengan nilai 67,86 pada 2023 (kategori B) dan mengalami penurunan menjadi 65,93 pada 2024 akibat adanya perubahan mekanisme penilaian, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama dalam hal konsistensi antara perencanaan program dan hasil capaian kinerja.

Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 (78,74), Kutai Kartanegara masih memiliki kesenjangan yang cukup besar dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perencana, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta integrasi sistem pelaporan kinerja menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan.

Untuk mendorong perwujudan tata kelola yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperkuat sistem integritas birokrasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta penerapan sistem pengawasan internal yang ketat dan independen. Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan juga harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pemerintahan digital (*e-government*) harus dioptimalkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

(4). Belum Optimalnya Pembangunan SDM yang Merata

Pembangunan SDM yang merata di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Kartanegara pada 2024 yang masih berada di angka 76,57. Capaian itu menempatkannya Kutai Kartanegara pada peringkat kelima dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Meskipun tergolong tinggi dalam klasifikasi nasional, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Timur (78,79). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pendapatan masyarakat di Kutai Kartanegara belum optimal, terutama di wilayah perdesaan, pesisir, dan terpencil.

Belum optimalnya pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan dalam peningkatan IPM, juga tampak dari terbatasnya infrastruktur dan kualitas layanan publik dasar di sejumlah kecamatan. Tantangan lain adalah masih tingginya ketimpangan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas pendidikan antarwilayah, serta belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

Untuk mendorong pemerataan pembangunan SDM, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengadopsi pendekatan yang berbasis wilayah dan data mikro, termasuk memperluas program afirmatif seperti beasiswa pendidikan tinggi untuk pelajar daerah, pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan terpadu di daerah tertinggal, serta peningkatan kapasitas tenaga medis dan guru melalui pelatihan berkelanjutan. Strategi ini penting agar seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menikmati manfaat pembangunan secara setara dan berkelanjutan.

(5). Belum Optimalnya Ketahanan Sosial dan Pelestarian Budaya dalam Upaya Menuju Masyarakat Berkebudayaan Maju

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai salah satu wilayah yang kaya akan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional, saat ini menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan sosial dan pelestarian budayanya. Proses modernisasi, urbanisasi, dan

masuknya arus globalisasi telah membawa dampak terhadap perubahan pola hidup masyarakat, yang sering kali menyebabkan tergerusnya identitas budaya lokal.

Nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, serta praktik-praktik budaya warisan leluhur mulai terpinggirkan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar budaya digital dan konsumtif. Ketahanan sosial masyarakat pun menjadi rentan terhadap konflik sosial, intoleransi, dan disintegrasi nilai-nilai kebangsaan.

Di sisi lain, upaya pelestarian budaya seperti seni tradisional, bahasa daerah, ritual adat, dan warisan sejarah belum mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai, baik dari segi kebijakan, pendanaan, maupun regenerasi pelaku budaya. Banyak komunitas adat yang mengalami marginalisasi, dan kegiatan budaya lokal kerap hanya bersifat seremonial tanpa proses dokumentasi dan revitalisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, lemahnya integrasi antara sektor pendidikan dan kebudayaan menyebabkan nilai-nilai lokal tidak terinternalisasi secara kuat dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya karakter dan jati diri masyarakat.

Permasalahan ini dapat dilihat dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada 2024 baru mencapai 57,42. Menelisik lebih mendalam, penilaian mandiri dari Indeks Pembangunan Kebudayaan, dimensi ekonomi budaya masih berada pada nilai 39,00, sehingga perlu adanya peningkatan dalam optimalisasi ketahanan sosial dan pelestarian budaya, dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, ketahanan sosial juga dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 58,60 pada 2022, kemudian pada 2023 meningkat sebesar 63,34, dan pada 2024 menjadi 66,96.

Capaian tersebut berada di atas *iBangga* Provinsi Kalimantan Timur (65,50), serta berada di atas capaian nasional (62,40). Namun demikian, dari capaian pada 2024 tersebut, aspek kemandirian masih masuk dalam kategori paling rendah untuk perhitungan komposit pembentuknya (59,01), jika dibandingkan dengan aspek ketenteraman (65,71) dan aspek kebahagiaan (76,16).

Capaian Kutai Kartanegara pada 2024 masih termasuk dalam kategori “cukup baik” (berkembang), belum mencapai kategori “baik” (tangguh). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan keluarga di Kutai Kartanegara, yang mencakup dimensi ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan, masih menghadapi tantangan dalam hal penguatan peran keluarga, akses terhadap layanan sosial dasar, dan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Upaya intensif diperlukan melalui sinergi lintas sektor untuk memperkuat program pemberdayaan keluarga, peningkatan literasi pengasuhan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan agar pembangunan keluarga di Kutai Kartanegara semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang berkebudayaan maju, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan strategi ketahanan sosial berbasis budaya lokal, memperkuat program pendidikan karakter berbasis nilai kearifan lokal, serta menyediakan ruang-ruang kreatif bagi komunitas seni dan budaya.

Dukungan regulasi yang mendorong perlindungan budaya lokal, pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan, serta sinergi antara lembaga adat, akademisi, dan pemerintah juga menjadi kunci untuk menjamin bahwa kekayaan budaya Kutai Kartanegara tidak hanya dipertahankan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dalam membentuk masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing dalam konteks budaya.

(6). Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat

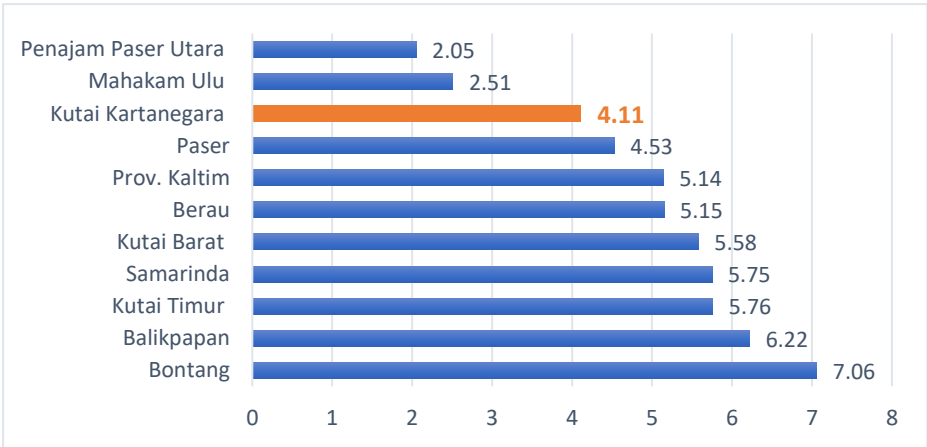
Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan perhatian strategis. Meskipun Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Timur, namun manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antara masyarakat di pusat kegiatan ekonomi dengan di daerah pesisir dan pedalaman, masih cukup tinggi. Kondisi ini ditandai dengan masih adanya kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja produktif.

Faktor lain yang memperparah kondisi tersebut adalah rendahnya tingkat literasi finansial, terbatasnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, serta belum optimalnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan struktural.

Di sisi lain, pendekatan program masih cenderung bersifat karitatif daripada transformatif, sehingga tidak menciptakan perubahan mendasar dalam struktur kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis data mikro, melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja, serta dukungan terhadap pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal yang mampu membuka lapangan kerja secara berkelanjutan.

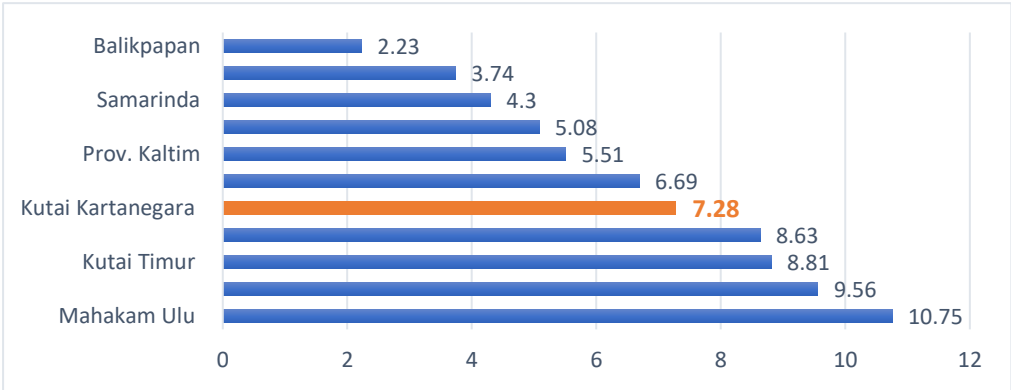
Gambar 2.35
Tingkat Pengangguran Terbuka
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 tercatat sebesar 4,11 persen, berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (5,14 persen). Angka tersebut menempatkan Kutai Kartanegara dalam posisi relatif lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain seperti Bontang (7,06 persen), Balikpapan (6,22 persen), maupun Kutai Timur (5,76 persen). Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan di Kutai Kartanegara tetap signifikan, terutama menyangkut kualitas penyerapan tenaga kerja lokal terhadap sektor formal yang produktif dan berkelanjutan. Dengan struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertambangan dan industri ekstraktif, Kutai Kartanegara perlu mendorong diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan keterampilan angkatan kerja, agar penurunan pengangguran tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga berkelanjutan dalam aspek kesejahteraan.

Gambar 2.36
Tingkat Kemiskinan
Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

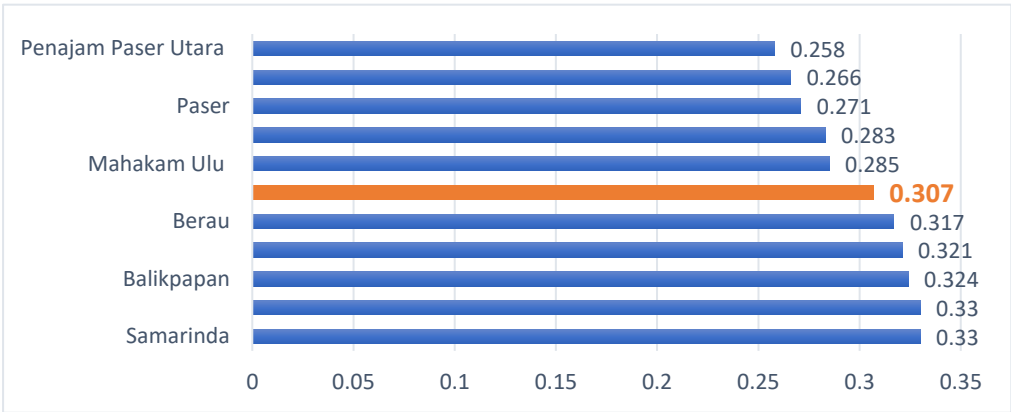


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Maret 2024 tercatat sebesar 7,28 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (5,51 persen) dan juga melampaui angka nasional (8,57 persen). Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Kalimantan Timur seperti Balikpapan (2,23 persen), Bontang (3,74 persen), dan Samarinda (4,30 persen), maka tingkat kemiskinan di Kutai Kartanegara masih cukup tinggi, mencerminkan adanya ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan meskipun Kutai Kartanegara memiliki kekayaan sumber daya alam dan kontribusi besar terhadap ekonomi provinsi, distribusi hasil pembangunan belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin, khususnya di daerah pedalaman dan pesisir. Upaya strategis untuk menurunkan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan akses ekonomi produktif, pelayanan dasar, serta program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Gambar 2.37
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur, 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 tercatat sebesar 0,307, berada di bawah Kabupaten Berau (0,317). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kutai Kartanegara relatif lebih rendah dibanding Berau, meskipun masih berada dalam kategori “sedang” menurut klasifikasi Badan Pusat Statistik.

Meskipun demikian, angka tersebut tetap menandakan adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan masyarakat, di mana kelompok berpenghasilan tinggi masih memiliki porsi ekonomi yang lebih besar dibandingkan kelompok bawah. Untuk itu,

upaya pengurangan ketimpangan perlu terus diperkuat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, akses layanan dasar yang merata, serta peningkatan keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam aktivitas ekonomi produktif.

(7). Meningkatnya Potensi Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Dampak Aktivitas Ekonomi dan Resiliensi Bencana Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara sedang menghadapi peningkatan potensi kerusakan lingkungan hidup yang signifikan, sebagai akibat dari aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.

Ekspansi lahan untuk keperluan industri ekstraktif dan pertanian berskala besar seringkali dilakukan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai, sehingga memicu deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta menurunnya kualitas keanekaragaman hayati. Akibatnya, daya dukung dan daya tampung lingkungan di berbagai wilayah mengalami penurunan drastis, yang turut mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, resiliensi terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya sistem mitigasi bencana, keterbatasan infrastruktur tanggap darurat, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko lingkungan. Perubahan iklim juga menjadi faktor yang memperparah kondisi, dengan meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang berdampak pada ketahanan pangan, sumber air bersih, dan stabilitas ekonomi lokal. Daerah-daerah dengan infrastruktur dan tata ruang yang tidak adaptif menjadi sangat rentan terhadap kerugian ekologis dan sosial-ekonomi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 tercatat sebesar 73,59, menunjukkan kondisi kualitas lingkungan di Kutai Kartanegara masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (76,63). Selisih ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas lingkungan di Kutai Kartanegara tergolong cukup baik, namun masih ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, pengelolaan limbah, pencemaran air dan udara, serta perlindungan terhadap kawasan lindung.

Rendahnya IKLH juga bisa menjadi refleksi dari tingginya tekanan aktivitas ekonomi, khususnya dari sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan yang cukup dominan di wilayah ini. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan sinergi kebijakan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan, termasuk melalui penguatan pengawasan lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian.

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 57,73 persen. Ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor ini mencerminkan struktur ekonomi yang belum beranjak ke arah diversifikasi dan keberlanjutan, mengingat sektor pertambangan merupakan sumber daya tak terbarukan yang rentan terhadap fluktuasi harga global serta berdampak besar terhadap lingkungan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, perlu didorong pengembangan sektor ekonomi alternatif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif agar ketahanan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Upaya ini dapat dilakukan melalui

penguatan pengawasan lingkungan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, rehabilitasi kawasan kritis, serta penerapan pendekatan ekonomi hijau.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana harus menjadi prioritas, termasuk melalui edukasi kebencanaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan penyusunan tata ruang berbasis risiko. Dengan demikian, daerah ini dapat membangun resiliensi lingkungan yang kuat sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Secara detail, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara per urusan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Permasalahan Tiap Bidang Urusan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Bidang Urusan	Permasalahan
Urusan Pendidikan	1. Ketidakmerataan kualitas pendidikan
	2. Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	3. Kurangnya aksesibilitas ke jenjang pendidikan terapan
	4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan
	5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan dasar
Urusan Kesehatan	1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya kesehatan
	2. Peran lintas sektor yang belum maksimal dalam mendukung kesehatan
	3. Belum optimalnya penuntasan prevalensi stunting
	4. Kurangnya keterbukaan masyarakat terkait TBC
	5. Ketidakstabilan kontinuitas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Kurang memadainya kondisi jalan dan jembatan
	2. Penurunan kualitas sarana irigasi
	3. Kurang memadainya infrastruktur dan sarana sanitasi
	4. Belum meratanya infrastruktur air siap minum perpipaan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Terbatasnya pendataan dan pembaruan informasi kawasan kumuh
	2. Tidak adanya kegiatan pencegahan terhadap kawasan kumuh
	3. Belum optimalnya penataan permukiman tepi sungai
Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Pos pemadam kebakaran belum sesuai standar sebagaimana peraturan perundang-undangan
	2. Kuantitas dan kualitas personil serta sarana prasarana pemadam kebakaran masih kurang
	3. Penataan ruang dan tata kelola DAS yang belum berbasis pengurangan risiko bencana
	4. Belum terbangunnya sistem kesiapsiagaan bencana
	5. Belum terintegrasinya kajian risiko bencana di dalam RTRW
	6. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah
Urusan Sosial	1. Perlambatan laju penurunan kemiskinan
	2. Kurangnya optimalisasi peran Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dalam pembaruan DTKS di desa
	3. Kekurangan tenaga kesejahteraan sosial untuk pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	4. Belum optimalnya komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada kelompok PSKS
Urusan Tenaga Kerja	1. Kurangnya akses pencari kerja ke program pelatihan
	2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal
	3. Terbatasnya kesempatan kerja

Bidang Urusan	Permasalahan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak
Urusan Pangan	1. Masih rendahnya skor pola pangan harapan ketersediaan dan konsumsi 2. Masih adanya desa rawan pangan
Urusan Pertanahan	1. Masih terkendalanya pembebasan lahan pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian dalam program strategis kepala daerah
Urusan Lingkungan Hidup	1. Tingginya Indeks Pencemaran Air 2. Meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca 3. Belum terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 4. Belum terbentuknya taman keanekaragaman hayati di luar hutan 5. Rendahnya ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Terbatasnya TPS dan fasilitas pengolahan sampah berbasis 3R
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Belum terintegrasi pelayanan penerbitan KIA di tingkat desa dan kecamatan 2. Belum optimalnya sosialisasi persyaratan dan penggunaan layanan berbasis teknologi informasi
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih rendahnya kualitas SDM Perangkat Desa, BPD, dan Kelembagaan Masyarakat 2. Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat 3. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) 2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana (KB)
Urusan Perhubungan	1. Belum optimalnya layanan jasa transportasi antar kecamatan baik darat maupun perairan 2. Belum adanya konektivitas atau akses jalan yang memadai bagi wilayah-wilayah Kutai Kartanegara ke wilayah IKN
Urusan Komunikasi dan Informatika	1. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi informasi 2. Strategi komunikasi publik yang belum menyeluruh dan terpadu
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Belum memadainya kompetensi SDM pengelola koperasi 2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro
Urusan Penanaman Modal	1. Belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri 2. Belum tersedianya dukungan regulasi tentang fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha di Kutai Kartanegara 3. Belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yang diperuntukkan 4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi hilirisasi pertanian dalam arti luas
Urusan Kepemudaan dan Olahraga	1. Rendahnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda 2. Kurangnya tenaga keolahragaan bersertifikasi 3. Belum meratanya pelaksanaan kejuaraan olahraga di daerah 4. Kurangnya fasilitas olahraga yang mudah diakses 5. Aspek finansial yang menghambat partisipasi dalam kegiatan olahraga
Urusan Statistik	1. Belum optimalnya capaian indeks pembangunan statistik 2. Belum optimalnya pemanfaatan Satu Data Indonesia
Urusan Persandian	1. Belum optimalnya jaminan keamanan informasi
Urusan Kebudayaan	1. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya

Bidang Urusan	Permasalahan
	2. Terkendalanya pemeliharaan cagar budaya yang terhambat oleh status kepemilikan aset 3. Belum optimalnya kolaborasi dan kemitraan dengan stakeholder 4. Belum adanya dokumen kajian terkait penetapan cagar budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara
Urusan Perpustakaan	1. Kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pembudayaan kegemaran membaca dan pengembangan literasi masyarakat
Urusan Kearsipan	1. Terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur teknologi kearsipan 2. Sistem manajemen arsip yang belum efisien
Urusan Kelautan dan Perikanan	1. Rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang penangkapan ikan berkelanjutan 2. Perlu peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil kelautan 3. Sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya belum memadai
Urusan Pariwisata	1. Masih kurangnya pengembangan destinasi wisata baru maupun revitalisasi objek wisata yang sudah ada 2. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung usaha pariwisata lokal 3. Belum optimalnya amenities pariwisata 4. Belum optimalnya potensi wisata alam dan budaya di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
Urusan Pertanian	1. Tingginya biaya produksi dan cara produksi yang masih manual 2. Belum optimalnya mitigasi terhadap risiko perubahan iklim, banjir, dan kekeringan 3. Keterbatasan solar, pupuk, dan benih bersubsidi 4. Alih profesi petani dan menurunnya jumlah peternak produktif 5. Serangan wabah penyakit ternak endemis
Urusan Kehutanan	1. Gangguan pada kawasan TAHURA yang menghambat pengelolaan dan penataan blok 2. Belum terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup terkait perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan 3. Belum optimalnya perlindungan habitat orangutan di TAHURA
Urusan Perkebunan	1. Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Rendahnya minat masyarakat dan petani dalam budidaya tanaman perkebunan, antara lain: kopi, aren, dan kakao
Urusan Perdagangan	1. Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan
Urusan Perindustrian	1. Masih belum aktifnya sentra IKM berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas
Urusan Pemerintahan Daerah	1. Belum optimalnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2. Pengukuran dan pemanfaatan kinerja yang belum optimal 3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal kurang memadai
Perencanaan	1. Terbatasnya basis data yang valid dan terbaru untuk Pembangunan 2. Kurangnya kompetensi perangkat daerah dalam perencanaan daerah 3. Perubahan regulasi yang tidak sinkron dengan tata kelola perencanaan pembangunan daerah 4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembangunan
Penelitian dan Pengembangan	1. Jumlah peneliti yang terbatas 2. Sarana dan prasarana riset yang belum memadai 3. Kurangnya dukungan regulasi 4. Pengendalian dan evaluasi hasil riset yang belum optimal
Keuangan	1. Belum optimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Bidang Urusan	Permasalahan
	2. Belum optimalnya proses administrasi dan penagihan pajak daerah 3. Belum tersedianya database potensi pajak daerah dan retribusi 4. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah
Kepegawaian	1. Masih belum optimalnya pelaksanaan sistem merit 2. Kurang optimalnya pengembangan kompetensi ASN 3. Belum terlaksananya manajemen talenta
Pengawasan	1. Keterbatasan tenaga pengawas yang kompeten 2. Lemahnya respon terhadap pengaduan prioritas
Pemerintahan Umum	1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2. Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik 3. Pendidikan politik belum menjangkau wilayah perdesaan 4. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan yang menyimpang dari ideologi Pancasila
Kewilayahan	1. Belum optimalnya layanan publik di kecamatan

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis mencakup berbagai urgensi yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal, karena relevansinya terhadap kondisi dan perihai yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, isu regional dan isu lokal yang saling terkait dan terintegrasi. Memahami pentingnya isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mengambil peluang untuk mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu Global

Isu strategis internasional menjadi isu RPJMN yang penting dalam pembangunan nasional, yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu global ini akan menjadi *warning action* dalam pembangunan secara menyeluruh, yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Geopolitik Dan Geoekonomi

Perubahan dinamika geopolitik dan geoekonomi global berdampak semakin nyata terhadap pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketegangan antarnegara besar, disrupsi rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, maupun ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, serta perubahan arah kebijakan ekonomi negara-negara maju dalam transisi energi bersih, mempengaruhi pasar ekspor komoditas strategis Indonesia-khususnya batu bara dan minyak bumi yang menjadi tulang punggung perekonomian Kutai Kartanegara. Ketergantungan daerah ini terhadap pasar global untuk komoditas tersebut menjadikannya sangat rentan terhadap gejolak harga dunia, kebijakan dekarbonisasi, serta hambatan perdagangan internasional.

Selain itu, transformasi ekonomi dunia menuju energi terbarukan dan ekonomi hijau, turut menekan daerah yang masih mengandalkan sektor ekstraktif. Kutai Kartanegara perlu bersiap menghadapi potensi penurunan permintaan global terhadap energi fosil, termasuk batu bara, yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama.

Jika tidak diantisipasi dengan strategi diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor baru seperti industri hijau, pertanian modern, serta pariwisata berbasis budaya dan alam, maka daerah ini dapat mengalami tekanan ekonomi yang serius dalam beberapa tahun ke depan.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu diorientasikan untuk adaptif terhadap dinamika global tersebut, serta memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi lokal agar tidak terlalu bergantung pada situasi geoekonomi dunia yang sangat dinamis.

b. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global berdampak nyata dan semakin terasa terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, menjadi ancaman serius bagi ketahanan wilayah ini.

Aktivitas pertambangan, deforestasi, serta alih fungsi lahan yang masif memperburuk daya dukung lingkungan dan mempercepat laju kerusakan ekosistem lokal. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat, tetapi juga berisiko terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan ekonomi secara umum.

Selain itu, Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang terletak di jalur sungai besar dan memiliki kawasan pesisir, turut menghadapi risiko peningkatan permukaan air laut dan erosi pantai akibat perubahan iklim global. Ketahanan infrastruktur dasar terhadap bencana hidrometeorologi masih terbatas, sehingga kerentanan masyarakat semakin tinggi, terutama di wilayah perdesaan.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terpadu, seperti rehabilitasi hutan, pengendalian emisi karbon, tata ruang berbasis risiko bencana, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Investasi dalam pendidikan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks dan berdampak lintas sektor.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah menjadikan transformasi digital sebagai isu global yang juga berdampak nyata bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Daerah terus memacu adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City, dan kebijakan Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola serta efisiensi layanan publik. Upaya digitalisasi mencakup pelatihan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat program Government Transformation Academy (GTA), pembekalan teknis keamanan siber, hingga penguatan kapasitas digital di internal OPD dan kecamatan.

Pendekatan menyeluruh ini bertujuan menghadirkan birokrasi yang cepat, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap tantangan modern. Inovasi teknologi juga merambah ke layanan desa, hal ini terlihat dari di bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan meluncurkan *Sekolah Google* sebagai percontohan pembelajaran digital interaktif yang menjadikan siswa lebih siap menghadapi kompetisi global. Transformasi digital ini membuka peluang baru bagi pemberdayaan masyarakat lokal, UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis teknologi.

d. Industri 5.0

Perkembangan konsep Industri 5.0 yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin cerdas, teknologi berorientasi keberlanjutan, serta ketahanan sistem industri menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi kawasan Kutai Kartanegara. Secara nasional, Indonesia telah mulai mengintegrasikan teknologi seperti AI, *cobots*, IoT, *digital twins*, dan *big data analytics* dalam sektor manufaktur guna meningkatkan produktivitas

sekaligus menjaga kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Namun, realisasi penerapan di daerah masih perlu dipercepat, apalagi ketika infrastruktur digital, kesiapan SDM, dan skema regulasi di sektor industri belum merata dan sering tertinggal dibanding kawasan prioritas nasional.

Khusus di Kutai Kartanegara, transformasi menuju Industri 5.0 dapat menjadi titik tolak diversifikasi ekonomi dari ketergantungan sektor ekstraktif batu bara dan migas ke industri manufaktur lokal yang lebih canggih, hijau, dan inklusif.

Dengan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah, akademisi, swasta, dan pelaku industri serta meningkatkan akses pelatihan teknis dalam teknologi digital dan otomasi daerah ini berpeluang menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Namun demikian, tantangan seperti biaya investasi awal yang tinggi, teman keterampilan pekerja lokal yang minim, dan integrasi sistem teknologi menjadi hambatan utama yang perlu ditangani secara strategis.

e. Adanya Pergeseran Budaya Dampak dari Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa dampak besar terhadap pola hidup, nilai-nilai sosial, dan budaya masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Digitalisasi dan akses luas terhadap media sosial, internet, serta perangkat komunikasi modern telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, belajar, bekerja, bahkan mengekspresikan identitas budaya.

Di satu sisi, kemajuan ini membuka ruang positif bagi penyebaran informasi, kreativitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga mengakibatkan terjadinya pergeseran budaya lokal yang signifikan, seperti menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi, bahasa daerah, serta nilai-nilai adat yang sebelumnya menjadi dasar kohesi sosial masyarakat Kutai.

Fenomena globalisasi informasi ini menciptakan budaya konsumtif, instan, dan individualistik yang kian menggantikan budaya kolektif dan kearifan lokal. Tradisi lisan, seni pertunjukan, serta kearifan-kearifan lokal mulai terpinggirkan oleh budaya populer global yang mudah diakses melalui internet. Bahkan, dalam konteks pendidikan dan keluarga, nilai-nilai budaya lokal mulai luntur karena kurangnya integrasi antara teknologi dan pelestarian budaya dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara bijak untuk mendukung pelestarian budaya lokal misalnya melalui digitalisasi arsip budaya, promosi seni daerah melalui platform digital, dan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal agar budaya Kutai tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang di era digital.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merupakan isu yang berpotensi menghambat pembangunan nasional, sehingga perluantisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah nasional yang tertuang dalam RPJMN dijabarkan sebagai berikut.

a. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Dalam konteks isu jangka menengah nasional, penguatan resiliensi ekonomi dan pemanfaatan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi agenda penting yang juga sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan migas, Kutai Kartanegara memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur dan perekonomian nasional.

Namun demikian, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif juga menjadikan struktur ekonomi daerah ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan tekanan kebijakan transisi energi hijau di tingkat internasional. Oleh karena itu, penguatan daya tahan ekonomi daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pembangunan jangka menengah di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, yang secara geografis berdekatan dengan Kutai Kartanegara, sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat mendorong tumbuhnya sektor jasa, konstruksi, logistik, UMKM, serta pariwisata budaya dan alam di Kutai Kartanegara, sekaligus menjadi peluang diversifikasi ekonomi yang selama ini didominasi sektor tambang.

Dengan meningkatkan konektivitas infrastruktur dan integrasi antarwilayah, serta memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal, Kutai Kartanegara berpotensi menjadi daerah penyangga ekonomi yang tangguh bagi pengembangan kawasan metropolitan baru di Kalimantan.

Namun demikian, untuk mewujudkan prospek ekonomi yang positif tersebut, dibutuhkan kebijakan daerah yang terarah, khususnya dalam mendukung iklim investasi, penguatan ekonomi hijau, pengembangan SDM lokal, dan digitalisasi sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu mengadopsi strategi pembangunan jangka menengah yang adaptif dan resilien terhadap perubahan, termasuk risiko krisis global, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam menciptakan ketahanan ekonomi yang tidak hanya mampu bertahan dari guncangan, tetapi juga tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

b. Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati serta potensi lingkungan yang sangat besar. Kawasan ini mencakup hutan tropis, sungai-sungai besar, dan ekosistem rawa serta gambut yang menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna endemik, termasuk bekantan, orangutan, dan berbagai jenis burung langka.

Keanekaragaman ini tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai basis ekonomi hijau melalui ekowisata, penelitian konservasi, dan jasa lingkungan. Dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah, pelestarian kekayaan hayati ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem di tengah tekanan pembangunan.

Namun demikian, keanekaragaman hayati dan potensi lingkungan di Kutai Kartanegara saat ini berada dalam kondisi yang rentan akibat eksploitasi sumber daya alam yang masif, seperti aktivitas pertambangan terbuka, pembukaan lahan skala besar, dan pembangunan infrastruktur yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Fragmentasi habitat, pencemaran sungai, serta konversi kawasan lindung menjadi lahan industri telah mengancam keberadaan spesies langka dan menurunkan fungsi ekosistem alami. Di sisi lain, perubahan iklim dan bencana ekologis juga semakin memperburuk daya tahan lingkungan, menjadikan isu pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi adaptasi nasional.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah, sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah seperti penguatan kawasan konservasi, penegakan hukum lingkungan,

pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan, serta edukasi masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian alam perlu diperluas.

Dukungan Pemerintah Pusat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk mengelola potensi lingkungan secara bijak, agar dapat menjadi pilar ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga warisan hayati bangsa Indonesia di masa depan.

c. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi SDM yang besar, didukung oleh jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat. Kondisi ini menjadi peluang strategis dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan daerah dan pencapaian target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan kualitas pendidikan, rendahnya keterampilan kerja, serta minimnya akses terhadap pelatihan vokasional dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri modern.

Masih tingginya angka pengangguran terbuka, khususnya pada lulusan SMA/SMK, menjadi indikator perlunya intervensi yang lebih serius dalam pembangunan modal manusia. Secara nasional, pembangunan modal manusia diarahkan untuk menciptakan SDM unggul yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu bersaing ditingkat global.

Di tingkat daerah, hal ini memerlukan perbaikan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan pelatihan kerja berbasis kebutuhan pasar, serta penciptaan ekosistem pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan karakter, literasi digital, dan kewirausahaan juga menjadi aspek penting agar SDM daerah tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan hadirnya IKN di kawasan yang berdekatan, kebutuhan SDM berkualitas akan semakin meningkat dan dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal jika disiapkan dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menyelaraskan kebijakan pembangunan SDM dengan prioritas nasional, termasuk memperluas kerja sama dengan sektor swasta, dunia pendidikan, dan lembaga pelatihan. Penyediaan insentif pendidikan, pembangunan pusat-pusat pelatihan kerja, serta digitalisasi layanan pendidikan dan ketenagakerjaan perlu diperkuat untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM lokal. Dengan strategi yang tepat, potensi sumber daya manusia di Kutai Kartanegara dapat diubah menjadi modal manusia yang produktif dan inovatif, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

d. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Pergeseran struktur kelas masyarakat di Indonesia, termasuk di Kutai Kartanegara, merupakan fenomena signifikan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi. Dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat mobilitas vertikal yang cukup signifikan, di mana sebagian orang dari kelompok berpendapatan rendah berhasil beralih ke kelas menengah. Proses ini didorong oleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, lapangan kerja yang lebih terbuka, dan peningkatan pendapatan. Namun, perlu dicatat bahwa perubahan ini tidak merata di seluruh masyarakat.

Kesenjangan sosial-ekonomi yang masih mendalam antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara sektor formal dan informal, menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Banyak masyarakat di perdesaan yang masih terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan teknologi yang modern sangat terbatas. Akibatnya, laju transformasi sosial menuju ke inklusi yang lebih baik menjadi terhambat.

Dalam konteks pembangunan nasional jangka menengah, pergeseran kelas masyarakat menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan erat dengan stabilitas sosial di masyarakat, pertumbuhan konsumsi domestik, dan pemerataan kesejahteraan.

Di Kutai Kartanegara, meskipun sektor pertambangan dan energi berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ini secara adil. Kelas pekerja dan masyarakat perdesaan sering kali menjadi kelompok yang paling tertinggal, disebabkan oleh keterbatasan modal, kurangnya keterampilan, dan minimnya kesempatan. Fenomena ini berisiko menghasilkan peningkatan jumlah kelompok rentan yang mengalami stagnasi sosial, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi.

Menyikapi tantangan ini, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kebijakan yang inklusif, tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas utama. Ini mencakup penguatan perlindungan sosial untuk masyarakat yang paling rentan, peningkatan keterampilan kerja agar masyarakat memiliki daya saing, serta akses terhadap pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan program-program pengembangan masyarakat yang berbasis pada wilayah dan budaya lokal. Dengan demikian, transformasi struktur kelas masyarakat di Kutai Kartanegara tidak hanya menghasilkan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keadilan antarwilayah. Pertumbuhan yang inklusif akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan merasakan manfaatnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan struktur kelas masyarakat di Kutai Kartanegara dapat bergerak ke arah yang lebih seimbang dan adil. Kebijakan yang tepat dan terarah akan menjadi kunci dalam menciptakan sosial yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam jangka panjang, ini akan mendukung stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membawa manfaat bagi semua warga Kutai Kartanegara.

e. Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah

Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah merupakan agenda strategis yang sangat penting bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi, efisiensi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk membangun sistem birokrasi yang profesional, responsif, dan bebas dari praktik korupsi.

Meskipun berbagai upaya reformasi birokrasi telah dilakukan, tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, masih menemui berbagai kendala. Beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain adalah lemahnya pengawasan internal, adanya tumpang tindih regulasi, serta rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

Di tingkat nasional, pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi data, dan penguatan pengawasan oleh lembaga eksternal serta partisipasi masyarakat sipil. Di Kutai Kartanegara, beberapa inisiatif seperti digitalisasi layanan, pemanfaatan *e-planning* dan *e-budgeting*, serta penerapan sistem pengaduan daring sedang dikembangkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Meskipun demikian, keberhasilan dari semua inisiatif ini sangat bergantung pada kapasitas SDM aparatur, komitmen politik dari pimpinan daerah, serta dukungan infrastruktur digital yang merata hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Tanpa adanya percepatan dalam reformasi sistemik, tata kelola yang lemah akan terus menghambat efektivitas program pembangunan serta menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperkuat regulasi internal, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan budaya kerja yang berbasis kinerja dan pelayanan, serta kolaborasi antarlembaga menjadi bagian penting dari strategi jangka menengah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dengan tata kelola yang baik, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan sekaligus mendukung target nasional dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, efisien, dan terpercaya.

Dengan langkah-langkah yang konsisten dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kutai Kartanegara akan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dan mendorong kemajuan yang lebih baik bagi seluruh warga.

f. Rendahnya Produktivitas

Rendahnya produktivitas merupakan isu strategis jangka menengah yang dihadapi secara nasional dan juga sangat relevan dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun daerah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertambangan, migas, dan kehutanan, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut masih relatif rendah. Kegiatan ekonomi cenderung berorientasi pada eksploitasi bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan di daerah, sehingga menciptakan ketergantungan pada sektor primer dan membuat produktivitas tenaga kerja serta daya saing ekonomi daerah menjadi stagnan. Hal ini diperparah oleh rendahnya adopsi teknologi, kurangnya pelatihan keterampilan kerja, serta lemahnya inovasi dan riset yang berbasis kebutuhan lokal.

Di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, produktivitas juga belum optimal. Banyak pelaku usaha kecil yang masih menggunakan metode konvensional, akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta belum terhubung ke ekosistem digital. Akibatnya, kontribusi sektor-sektor ini terhadap PDRB daerah belum signifikan, dan masyarakat lokal belum mendapatkan manfaat optimal dari potensi ekonomi yang ada. Selain itu, produktivitas birokrasi pemerintahan juga masih menjadi catatan penting, di mana pelayanan publik belum seluruhnya efisien, terukur, dan berbasis hasil, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan.

Untuk meningkatkan produktivitas daerah secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengarahkan strategi pembangunan ke peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi tepat guna, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang mendorong hilirisasi dan inovasi. Kebijakan afirmatif terhadap sektor-sektor strategis berbasis potensi lokal, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta kemitraan antara pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam membangun ekonomi daerah yang lebih produktif dan berdaya saing. Dengan demikian, Kutai Kartanegara tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam, tetapi juga mampu mengembangkan kekuatan manusianya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu *"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"* mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029.

Prioritas Nasional berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting

seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada prioritas nasional tersebut, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional, dengan 8 (delapan) Asta Cita sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN juga menyebutkan 17 program prioritas sebagai berikut.

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
5. Pemberantasan kemiskinan.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS Kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara, dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik, untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Selain itu, telah dirumuskan pula 8 (delapan) *quick wins* sebagai berikut.

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23 persen.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Salah satu isu penting yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah melakukan telaahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan isu regional secara menyeluruh. Telaah ini meliputi telaah arahan RPJMN terhadap wilayah Kalimantan, dan telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), agar mampu menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Integrasi semua aspek ini akan menjamin bahwa RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan secara komprehensif dan berkelanjutan, mendukung pengembangan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

a. Telaah Arahan RPJMN terhadap Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 menjamin keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Proses ini bertujuan untuk mendukung kebijakan yang terintegrasi dan efektif dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Adapun isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
2. Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
3. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
4. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan.
5. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria.

6. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta, tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
7. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik (orangutan dan bekantan), serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

Di tingkat nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 dalam buku IV memuat arah pembangunan kewilayahan di antaranya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur ikut andil dalam *highlight* indikasi intervensi sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.82
***Highlight* Intervensi Nasional**
untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Keterangan
Kawasan <i>Superhub</i> Ekonomi Ibu Kota Nusantara Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan kawasan <i>superhub</i> ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui:
	▪ Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, dengan output pembangunan SPAM Regional Kaltim.
	▪ Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar IKN.
	▪ Pengembangan klaster ekonomi kreatif di wilayah sekitar IKN.
	▪ Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar IKN.
	▪ Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu.
	▪ Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandarisasi di industri dasar (kimia dasar dan logam dasar).
	▪ Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki).
	▪ Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil.
	▪ Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil.
	▪ Peningkatan produksi pangan nabati.
	▪ Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik.
	▪ Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut.
Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan output: klaster revitalisasi tambak udang dan bandeng, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP), kampung perikanan budidaya air payau yang dikembangkan, klaster komoditas unggulan air tawar berbasis kawasan, klaster komoditas unggulan air payau berbasis kawasan dan revitalisasi tambak budidaya ikan air payau.

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Agroekowisata Kutai Kartanegara, melalui:
	▪ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan output: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman, sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan.
	▪ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan output: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/<i>Lastmile</i>, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan.
	▪ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan output: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa dan pengembangan BUMDesa.
	▪ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan output: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan dan pengembangan, penguatan tata kelola desa wisata dan penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim.
	▪ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan output: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa dan integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD.
	▪ Peningkatan produktivitas desa wisata, dengan output: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan.
Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk <i>Heart of Borneo</i> di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui:
	▪ Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan output: penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat dan udara, kelompok masyarakat yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta area penanganan dampak.
	▪ Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan output: lahan gambut yang dipulihkan

Highlight Indikasi Intervensi	Keterangan
	dan direstorasi serta data dan informasi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
	▪ Rehabilitasi ekosistem mangrove, dengan output: lahan rusak yang dipulihkan, pemulihan dan rehabilitasi ekosistem mangrove.
	▪ Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan output: inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
	▪ Pengendalian banjir di kawasan perkotaan dan daerah berisiko tinggi.
	▪ Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Penyelarasan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029 dilakukan untuk menjamin sinkronisasi pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan strategis seperti ketergantungan pada sektor hulu, minimnya pusat pertumbuhan baru, keterbatasan infrastruktur layanan dasar, tingginya kemiskinan dan pemerataan pendapatan, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara menindaklanjuti arahan RPJMN melalui Kawasan *Superhub* IKN, sentra perikanan Kalimantan Timur, kawasan perdesaan prioritas agroekowisata, dan kawasan strategis nasional jantung Kalimantan. *Highlight* intervensi nasional untuk Kabupaten Kutai Kartanegara akan ditindaklanjuti dengan dukungan daerah terhadap kebijakan nasional yang tertuang dalam buku IV RPJMN.

b. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Dengan memperhatikan Dokumen Ranperda RPJMD Provinsi Kalimantan Timur maka dijabarkan beberapa telaah substansi yang dijabarkan sebagai berikut.

Permasalahan Pembangunan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, diperoleh 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Belum meratanya kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
2. Masih lambatnya transformasi ekonomi.
3. Belum meratanya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi.
4. Kesenjangan pendapatan dan pembangunan wilayah.
5. Tingginya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu Strategis Daerah

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu regional, serta KLHS, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan Timur sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif.
4. Pemerataan pembangunan wilayah.
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi.
6. Peluang pembangunan *superhub* ekonomi dan mitra IKN.
7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi GRK.

8. Kemandirian pangan.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut.

- Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera.
- Misi 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah.
- Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan.
- Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi.
- Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal.
- Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Tahapan pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dijabarkan sebagai berikut:

A. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 1 (Tahun 2026)

Tahap 1 pembangunan daerah Kalimantan Timur berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Pembangunan ekonomi diarahkan pada penguatan industri berbasis komoditas unggulan dan hilirisasi, didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, reformasi tata kelola pemerintahan, pelestarian budaya lokal, dan pembangunan berwawasan lingkungan turut menjadi prioritas.

B. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 2 (Tahun 2027)

Tahap 2 pembangunan daerah Kalimantan Timur menekankan pada penguatan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kualitas serta daya saing SDM. Perekonomian diarahkan pada pengembangan sektor inklusif dan peningkatan investasi, didukung oleh reformasi birokrasi berbasis elektronik. Aspek budaya, kehidupan beragama, dan pelestarian lingkungan juga semakin diperkuat dalam seluruh proses pembangunan.

C. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 3 (Tahun 2028)

Tahap 3 pembangunan Kalimantan Timur fokus pada optimalisasi kawasan ekonomi strategis untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru dan peningkatan daya saing SDM melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Pengembangan ekonomi diarahkan pada perluasan industri berbasis komoditas unggulan dan sektor berkelanjutan, didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan teknologi. Pemerintahan diperkuat melalui peningkatan kapasitas ASN, digitalisasi, serta penegakan regulasi, dengan tetap menekankan pelestarian budaya, kehidupan beragama, dan keberlanjutan lingkungan.

D. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 4 (Tahun 2029)

Tahap 4 pembangunan Kalimantan Timur menandai tercapainya infrastruktur yang optimal, SDM unggul dan sejahtera, serta ekonomi inklusif berbasis industrialisasi. Pemerintahan semakin profesional dan berbasis teknologi dengan layanan publik

yang efisien dan transparan. Nilai-nilai kearifan lokal, keberagaman budaya, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan semakin diperkuat.

E. Penahapan Pembangunan Daerah Tahap 5 (Tahun 2030)

Tahap 5 pembangunan Kalimantan Timur menekankan kesinambungan pembangunan pada masa transisi pemerintahan, dengan menjaga kualitas SDM melalui sistem pendidikan dan kesehatan yang unggul. Ekonomi terus dibangun secara inklusif dengan peningkatan daya saing industri, serta optimalisasi infrastruktur untuk efisiensi. Tata kelola pemerintahan makin efektif berbasis teknologi, kehidupan sosial-budaya diperkuat, dan pembangunan berkelanjutan dijadikan landasan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

Arahan Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembangunan Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri, dan pariwisata, yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi. Berikut data capaian indikator makro beserta *highlights* indikasi kebijakan provinsi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

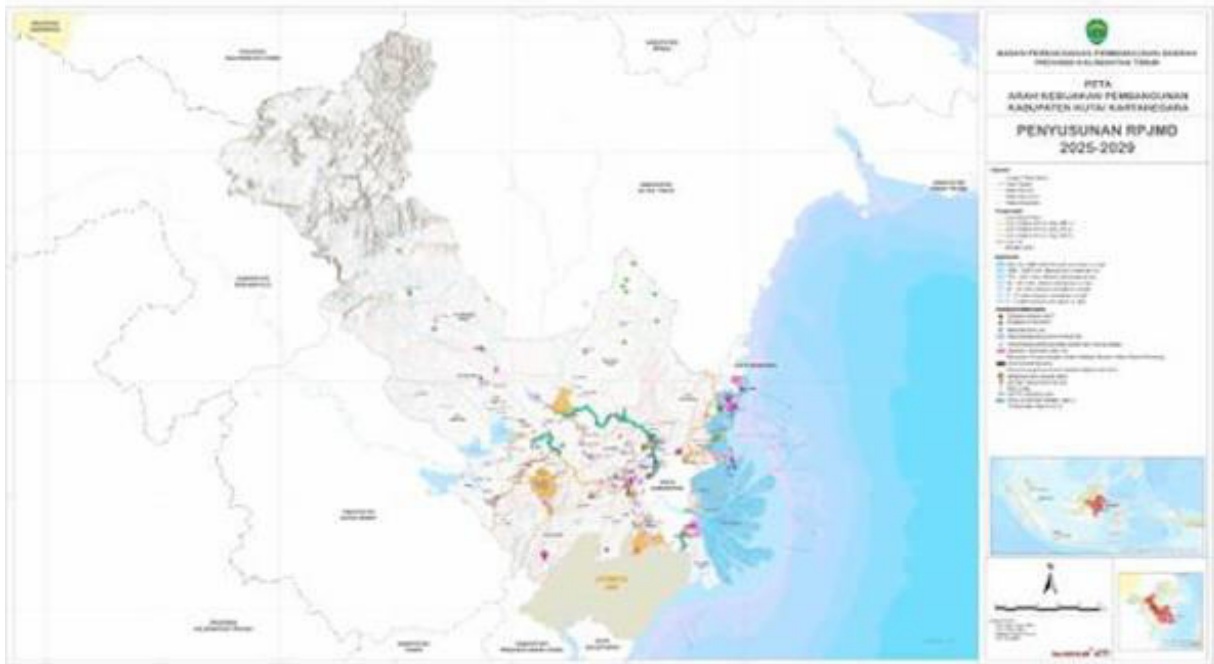
Tabel 2.83
Capaian dan Target Indikator Makro
Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator Makro	Capaian 2024	Baseline 2025	Target 2030
IPM	76,57	76,86	79,41
LPE(persen)	5,62	5,63-5,70	7,50-7,71
Tingkat Kemiskinan(persen)	7,28	6,50-6,95	4,80-5,24
Indeks Gini	0,307	0,285-0,301	0,265-0,282
TPT(persen)	4,11	3,85-4,00	3,00-3,18

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur. *Highlights* indikasi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.38
Peta Highlights Indikasi Kebijakan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025–2029



Sumber: Bappeda Prov. Kaltim, 2025

Adapun *highlights* Indikasi Kebijakan Provinsi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

1. Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi.
2. Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah.
3. Penyediaan afirmasi akses pendidikan.
4. Pengembangan dan pengelolaan kegiatan industri oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.
5. Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting.
6. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan.
7. Pengembangan ekonomi.
8. Pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
9. Pengembangan diversifikasi pangan.
10. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
11. Pengelolaan terminal timbau penumpang tipe B.
12. Pengembangan pelabuhan angkutan sungai Tenggarong .
13. Penguatan UMKM berbasis potensi lokal dan digital.
14. Pengembangan sentra IKM terintegrasi.
15. Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif.
16. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.
17. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
18. Pengembangan desa wisata berbasis budaya dan alam.
19. Penghijauan lingkungan.
20. Pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial.
21. Pemantauan sampah laut.
22. Peningkatan layanan air minum dan sanitasi.
23. Penyelenggaraan SPAM regional Marangkayu.
24. Penanganan kawasan kumuh.

25. Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
26. Pengendalian banjir.
27. Penyelenggaraan jalan provinsi.
28. Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.
29. Penyediaan PSU permukiman.
30. Penyiapan penyelenggaraan SPAM regional sistem Mahakam.
31. Penyediaan internet gratis di setiap desa.
32. Pembangunan sekolah unggulan (SMAN 3 Tenggarong Seberang).
33. Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan utamanya kawasan perdesaan Agromina Pastoral.

c. Telaah RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045

Memahami bahwa RPJMD 2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara terutama pada Tahap I, maka beberapa arahan RPJPD yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

Isu Strategis

- a). Pembangunan berwawasan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.
- b). Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah terpencil, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan secara merata.
- c). Mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat lembaga demokrasi dengan tujuan untuk penguatan pembangunan layanan dan informasi publik secara berkeadilan.
- d). Memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, dengan fokus pada pembangunan pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan kolaboratif melalui sinergitas dan kesinambungan pembangunan berbasis digital.
- e). Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor non ekstraktif, khususnya pembangunan ekonomi terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang produktif dan berorientasi hulu-hilir.
- f). Mendorong pembangunan regional yang merata, dengan peningkatan investasi di wilayah terpencil dan interkoneksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
- g). Pengembangan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ramah lingkungan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas berbasis fungsi keruangan.
- h). Pelestarian sosial dan budaya lokal, dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang harmoni dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.

Visi RPJPD

Visi RPJPD mempertimbangkan secara matang posisi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peta perencanaan nasional, mandat provinsi, hingga nilai historis yang dimiliki oleh daerah yang identik dengan Sungai Mahakam. Demikian pula dengan modal dasar maupun pengaruh eksternal yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah cita-cita jangka panjang sebagai **KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Dengan beberapa pokok visi di atas, maka masing-masing pokok visi dijabarkan sebagai berikut.

Kutai Kartanegara Maju

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan potensi perekonomian tertinggi di Indonesia. Hal ini harus mampu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, dalam rangka menuju kemajuan Kutai Kartanegara dalam 20 tahun ke depan, maka makna *Kutai Kartanegara Maju* diadopsi sebagai representasi masyarakat Kutai Kartanegara yang memiliki pendapatan tinggi setara dengan negara maju, sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing tingkat nasional, karena ditopang oleh bonus demografi sampai 2045, ditambah potensi migrasi tenaga terampil sebagai dampak dari keberadaan IKN.

Kutai Kartanegara Tangguh

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta penopang perekonomian nasional yang dapat diandalkan.

Kutai Kartanegara Tangguh merupakan representasi dari wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi, yang diwujudkan dengan kondisi perekonomian stabil dan kuat, karena adanya pergeseran struktur ekonomi menuju perekonomian yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam ekstraktif, melainkan perekonomian nonekstraktif, yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh juga memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kutai Kartanegara Berbudaya

Merupakan representasi dari identitas daerah yang berdiri di atas sejarah panjang peradaban dua kerajaan hingga menjadi seperti hari ini dengan tetap berdampingan dengan alam dan sangat menjunjung tinggi keberagaman.

Komitmen Kutai Kartanegara Berbudaya terletak pada pelestarian, pengembangan, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam proses pembangunan yang memperhatikan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan manusia yang berakhlak mulia.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya, mempromosikan keanekaragaman budaya, dan konservasi kekayaan biologis. Pembangunan berbudaya harus menjamin bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dengan menghormati dan memperkaya identitas budaya lokal, *mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal* sembari menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa melupakan jati diri daerah, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaju mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam pembangunan yang berkelanjutan pada 2045.

Kutai Kartanegara sebagai Pusat Pangan

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi, distribusi, dan pengembangan industri pangan yang berkelanjutan dan inovatif. Langkah strategis yang diambil mencakup pengembangan pertanian terintegrasi hulu-hilir, modernisasi pertanian melalui skema *smart farming* dan *smart fishing*, intensifikasi pertanian, pengembangan infrastruktur logistik, dan promosi industri pengolahan pangan yang ramah lingkungan.

Selain itu, visi ini juga mencakup aspek kedaulatan pangan dan pengembangan agrowisata (*agrotourism*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pariwisata perdesaan yang khas.

Kutai Kartanegara sebagai Pusat Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan beragam untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencakup pengembangan atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah yang mempromosikan kekayaan dan keunikan Kutai Kartanegara, serta penguatan infrastruktur pariwisata dan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan sektor. Selain atraksi dan infrastruktur, perlu diperhatikan terkait pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi yang juga menjadi faktor esensial terhadap kualitas pariwisata yang ditawarkan, sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan sektor jasa.

Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian dari skema pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pariwisata, khususnya terkait dengan pariwisata ekologis yang berbasis konservasi keanekaragaman hayati hutan hujan tropis dan didukung oleh kekayaan sosial-budaya masyarakat Kalimantan.

Kutai Kartanegara sebagai Pusat Industri Hijau

Posisi geografis yang strategis, serta kepemilikan cadangan sumber daya alam yang tinggi, maka harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki nilai tambah yang tinggi, maka diperlukan hilirisasi pemanfaatan sumber daya tersebut melalui skema industrialisasi. Akan tetapi industrialisasi tersebut juga harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan.

Hal tersebut dilakukan dengan mendorong perkembangan industri yang ramah lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Fokus pada penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan inovasi teknologi hijau. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya ekonomis maju tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kutai Kartanegara yang Sejahtera

Prinsip pada visi ini merupakan perwujudan mandat konstitusi yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, pada visi ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh elemen, dengan meminimalisir kemiskinan, khususnya dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem. Di samping itu, pendapatan masyarakat wilayah ini pada 2045 harus setara dengan wilayah-wilayah pada negara maju. Di samping itu, seluruh hak dasar warga negara dapat terpenuhi baik secara Pendidikan, Kesehatan, maupun hak untuk hidup layak dan bermartabat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kutai Kartanegara yang Berkelanjutan

Maksud dari visi berkelanjutan adalah segala arah pembangunan yang memanfaatkan sumber daya wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu dikelola secara arif dan bijaksana, agar dapat pula dinikmati oleh generasi penerus selanjutnya.

Hal tersebut sangat terkait dengan pengelolaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan kapasitas lingkungan hidup wilayah Kutai Kartanegara dalam mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, visi ini menjadi penyeimbang bagi berbagai aktivitas sosial-ekonomi dengan aktivitas konservasi lingkungan.

Misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.
4. Mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh.
5. Mewujudkan ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif.
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau.
8. Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan.

Arahan Tahap I RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara

Periode pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung selama periode 2025-2029. Pada periode pertama ini, agenda pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dititikberatkan pada *penguatan fondasi transformasi*. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting di dalam *roadmap* pembangunan.

Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahapan ini, seluruh fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi mulia daerah dipersiapkan. Fondasi ini terdiri atas berbagai aspek dan komponen yang memiliki dampak dan penentu keberhasilan pembangunan pada periodisasi berikutnya.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya fondasi dalam hal ini difungsikan sebagai sebuah pijakan atau “batu loncatan” bagi keberhasilan pembangunan. Apabila fondasi transformasi tidak kokoh maka bisa jadi upaya implementasi rencana pembangunan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, penguatan fondasi transformasi menjadi hal paling utama dilakukan pada periode pertama RPJPD.

Upaya pengokohan fondasi transformasi secara umum tersusun atas perwujudan aspek transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang ditopang oleh landasan transformasi berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi.

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti fasilitas pelayanan, infrastruktur dasar, SDM yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam periode ini pula, berbagai terobosan inovatif mulai diimplementasikan seperti diversifikasi ekonomi nonekstraktif, implementasi *smart government*, sinkronisasi perencanaan pembangunan, dan sebagainya, sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan rencana pembangunan berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, melalui fondasi yang kuat, tangguh, dan kokoh, Kabupaten Kutai Kartanegara siap untuk melanjutkan perjalanan pembangunan di periode berikutnya, serta siap untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang.

d. Telaah KLHS Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan 120

indikator (54,55 persen) sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), dan meningkat menjadi 128 indikator (58,18 persen) berdasarkan proyeksi tahun 2029.

Pada 2022, indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 49 indikator (22,27 persen), berdasarkan proyeksi capaiannya menurun menjadi 41 indikator (18,64 persen) pada 2029.

Pada 2022, indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 7 indikator (3,18 persen), dan indikator TPB yang belum ada data (NA) sebanyak 44 indikator (20,00 persen).

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, Dinas Kesehatan bertanggung jawab paling banyak atas indikator (42 indikator), diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (15 indikator), Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (15 indikator), Dinas Lingkungan Hidup (15 indikator), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (14 indikator), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah-BPBD (13 indikator).

Berdasarkan telaah beberapa data yang telah dikaji, maka dihasilkan beberapa isu strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Isu Strategis: Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana..
2. Isu Strategis: Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat
3. Isu Strategis: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).
4. Isu Strategis: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN.
5. Isu Strategis: Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat.
6. Isu Strategis: Penanggulangan Kekerasan Seksual.
7. Isu Strategis: Peningkatan Penggunaan Telepon Genggam (HP).
8. Isu Strategis: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar.
9. Isu Strategis: Peningkatan Layanan Jasa Keuangan.
10. Isu Strategis: Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM.
11. Isu Strategis: Peningkatan Kesempatan Kerja.
12. Isu Strategis: Peningkatan Kepariwisata.
13. Isu Strategis: Peningkatan Fasilitas Pelabuhan.
14. Isu Strategis: Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta.
15. Isu Strategis: Rehabilitasi Lahan Kritis dan Penanganan Satwa Langka.
16. Isu Strategis: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
17. Isu Strategis: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
18. Isu Strategis: Keuangan Daerah

e. Telaah RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara

1) Tujuan Penataan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2023-2042 menjelaskan arah perencanaan wilayah. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan utama terkait penggunaan ruang. Dalam upaya menggerakkan pembangunan daerah, melibatkan RTRW untuk membantu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan penataan ruang Kabupaten tersebut dirinci sebagai berikut.

“Mewujudkan daerah mitra Ibukota Negara (IKN) yang handal dan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah daerah, berbasis kawasan

andalan dengan mengembangkan sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan.”

Prinsip pelaksanaan tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan.

Prinsip implementasi tujuan tersebut harus tercermin dalam kebijakan penataan ruang wilayah, yang perlu dirancang secara holistik dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya bergantung pada aspek spasial, melainkan juga memperhatikan aspek sektoral sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi:
 - a. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
 - b. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis.
2. Pengembangan sistem jaringan prasarana dengan strategi meliputi :
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. mengembangkan sistem transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. mengembangkan bandar udara bertaraf nasional dan internasional sebagai penunjang IKN dan mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan;
 - d. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang terdapat di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 - f. mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - g. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - h. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan perkotaan.
3. Pemantapan fungsi dan kedudukan daerah dalam kawasan andalan dengan strategi meliputi:
 - a. Memantapkan kedudukan daerah sebagai kawasan andalan;
 - b. memantapkan fungsi daerah sebagai pusat pengembangan pertanian, industri, dan pariwisata;
 - c. mengoptimalkan kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antarkota dan antardesa; dan
 - f. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
4. Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dengan strategi meliputi :
 - a. Melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;
 - b. melakukan reklamasi terhadap kegiatan pascapertambangan;
 - c. mengalokasikan pemanfaatan lahan pascatambang yang disesuaikan dengan potensi lokal; dan
 - d. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan.
5. Pengembangan dan optimalisasi kawasan pertanian dengan strategi meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan agromina industri;
 - c. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; dan
 - f. melakukan tata kelola ulang kawasan perkebunan.
6. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya dengan strategi meliputi:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensi sejarah yang tinggi dan alam yang khas dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata;
 - d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat;
 - e. mewujudkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab untuk memperkuat identitas sebagai destinasi dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas.
 - f. membangun industri pariwisata berbasis sumber daya lokal yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing; dan
 - g. mengembangkan usaha ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing.
 7. Pengembangan kegiatan perikanan dengan strategi meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
 8. Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan dengan strategi meliputi:
 - a. Mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
 9. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dengan strategi meliputi :
 - a. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;
 - b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dengan luas paling sedikit 30 persen dengan ketentuan RTH publik minimal 20 persen dan RTH privat paling sedikit 10 persen dari luas wilayah perkotaan; dan
 - e. membatasi kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
 10. Pengoptimalan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal; dan
 - b. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
 11. Pengembangan kawasan industri dengan strategi meliputi pengembangan sektor hilirisasi industri.
 12. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi :

- a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan, dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap rencana sistem pusat permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

1. Pusat kegiatan lingkungan (PKL) terdapat di:
 - a. Kecamatan Muara Badak;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kota Bangun; dan
 - d. Kecamatan Loa Kulu.
2. Pusat pelayanan kawasan terdapat di:
 - a. Pusat pelayanan kawasan Anggana di Kecamatan Anggana;
 - b. Pusat pelayanan kawasan Kenohan di Kecamatan Kenohan;
 - c. Pusat pelayanan kawasan Kota Bangun Darat di Kecamatan Kota Bangun Darat;
 - d. Pusat pelayanan kawasan Loa Janan di Kecamatan Loa Janan;
 - e. Pusat pelayanan kawasan Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 - f. Pusat pelayanan kawasan Muara Jawa di Kecamatan Muara Jawa;
 - g. Pusat pelayanan kawasan Muara Kaman di Kecamatan Muara Kaman;
 - h. Pusat pelayanan kawasan Muara Muntai di Kecamatan Muara Muntai;
 - i. Pusat pelayanan kawasan Muara Wis di Kecamatan Muara Wis;
 - j. Pusat pelayanan kawasan Sanga Sanga di Kecamatan Sanga Sanga;
 - k. Pusat pelayanan kawasan Sebulu di Kecamatan Sebulu;
 - l. Pusat pelayanan kawasan Tabang di Kecamatan Tabang; dan
 - m. Pusat pelayanan kawasan Tenggarong Seberang di Kecamatan Tenggarong Seberang.
3. Kawasan Perkotaan Tenggarong memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana pola ruang wilayah kota merujuk pada rencana distribusi penggunaan lahan di wilayah kota, mencakup alokasi lahan untuk fungsi lindung dan budidaya yang ditargetkan hingga akhir masa berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.

Rencana tersebut memberikan gambaran tentang penggunaan lahan di wilayah kota ke depan. Diketahui bahwa alokasi pola ruang dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan fungsi aktivitas: Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.

Alokasi rencana pola ruang wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas:

Kawasan Lindung terdiri atas :

1. Kawasan Badan Air.
2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya.
3. Kawasan Konservasi meliputi :
 - a. Kawasan Suaka Alam berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang terdapat di Kecamatan Muara Kaman.

- b. Kawasan Pelestarian Alam berupa Taman Nasional Kutai yang terdapat di Kecamatan Muara Kaman
 - c. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil berupa Kawasan Konservasi di Perairan Mahakam Wilayah Hulu terdapat di Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai, dan Kecamatan Muara Wis.
4. Kawasan Ekosistem Mangrove berupa pantai dengan hutan bakau Kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Sanga Sanga.

Kawasan Budi Daya terdiri atas:

- 1. Kawasan Hutan Produksi.
- 2. Kawasan Pertanian.
- 3. Kawasan Perikanan.
- 4. Kawasan Pertambangan dan Energi.
- 5. Kawasan Peruntukan Industri terdapat di kecamatan: Kembang Janggut, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Muara Kaman, Sanga Sanga, Sebulu, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang.
- 6. Kawasan Pariwisata terdapat di kecamatan: Anggana, Loa Janan, Marang Kayu, Muara Badak, Tenggarong, dan Tenggarong Seberang.
- 7. Kawasan Permukiman.
- 8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- 9. Kawasan Transportasi.

3) Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Kawasan Strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting. Kawasan strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari:

- 1. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa kawasan peruntukkan industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Danau Kaskade Mahakam dan Kawasan Delta Mahakam.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri dari:

- 1. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan “pertumbuhan ekonomi” meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Kekembangan di Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.
 - b. Kawasan Strategis Mitra IKN.
 - c. Kawasan Strategis Perikanan Terpadu Muara Badak.
 - d. Kawasan Strategis Pertanian Terpadu Kota Bangun.
 - e. Kawasan Strategis Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu.
- 2. Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan “sosial dan budaya” meliputi:
 - a. Kawasan Museum Mulawarman.
 - b. Kawasan Strategis Muara Kaman.
 - c. Kawasan Strategis Desa Adat dan Budaya Leka Kidau, Kedang Ipil, dan Sungai Bawang.
- 3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan “fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” meliputi: Kawasan Strategis Konservasi Pesut di Kecamatan

f. Telaah Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RPIJPID) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

Berdasarkan hasil telaah RPIJPID dirumuskan strategi riset dan inovasi daerah dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Kapasitas dan pemahaman*: Analisis kesenjangan menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman dan kapasitas untuk melakukan kajian dan riset berbasis bukti di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2) *Infrastruktur dan pendanaan*: Keterbatasan dana dan infrastruktur penelitian menjadi tantangan berikutnya. Meski Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jaringan lembaga penelitian dan pengembangan yang kuat, namun pendanaan dan infrastruktur penelitian masih belum memadai untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi secara optimal.
- 3) *Keterampilan tenaga kerja*: Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan adalah aset berharga dalam mendorong riset dan inovasi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja sangat diperlukan.
- 4) *Kekuatan dan peluang*: Kekuatan ini meliputi jaringan lembaga penelitian dan pengembangan yang kuat dan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Sementara peluang yang ada mencakup potensi untuk meningkatkan dana dan investasi dalam riset dan inovasi.
- 5) *Perlunya Strategi Terpadu*: Melihat tantangan dan potensi tersebut, strategi terpadu diperlukan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, serta mengatasi tantangan yang ada. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, sektor swasta, dan masyarakat.

Pada bagian ini kita akan memperdalam pandangan terhadap upaya strategis dan progresif yang menjadi inti dalam menggerakkan riset dan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Segmen ini bertujuan untuk merangkum strategi dan langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah, *stakeholders*, dan masyarakat dalam mendorong riset dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berikut beberapa rancangan strategi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan berdasarkan analisis RPIJPID:

1. Memanfaatkan dan membangun jaringan lembaga penelitian dan pengembangan

- a. Membangun hubungan kerja sama yang kuat dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan.
- b. Menggalang dana bersama untuk membiayai proyek-proyek riset dan inovasi yang relevan dengan isu dan kebutuhan daerah.

Strategi pertama adalah memanfaatkan dan membangun jaringan lembaga penelitian dan pengembangan. Ini merupakan strategi yang berfokus pada kekuatan dan peluang (SO) yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejumlah kekuatan di bidang riset dan inovasi, salah satunya adalah adanya lembaga penelitian dan pengembangan yang aktif dan kompeten. Namun, untuk mencapai tingkat optimal, peningkatan jaringan dan kerjasama di antara lembaga-lembaga ini menjadi suatu keharusan.

Pertama, membangun hubungan kerja sama yang kuat dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional akan sangat membantu.

Kedua, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menggalang dana bersama dengan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan lainnya untuk membiayai proyek-proyek riset dan inovasi. Pendanaan ini bisa berasal dari anggaran pemerintah, donasi swasta, hingga hibah dari organisasi internasional.

Sebagai langkah awal, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan potensial, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

2. Pengembangan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan:

- a. Membuat program pelatihan dan pendidikan terus menerus untuk menjamin tenaga kerja memiliki keterampilan dan pengetahuan yang *up to date*, terutama dalam penerapan teknologi terbaru.
- b. Mengadakan program pelatihan khusus untuk membangun kapasitas peneliti dan inovator di daerah dalam melakukan kajian dan riset berbasis bukti.

Strategi kedua yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan. Strategi ini ditujukan untuk memitigasi kelemahan dan memanfaatkan peluang.

Untuk mengatasi kelemahan, langkah yang dapat diambil adalah dengan membuat program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang teknologi informasi dan digital, pengolahan data, hingga keterampilan penelitian dan inovasi.

Selain itu, perlu juga diadakan program pelatihan khusus untuk membangun kapasitas peneliti dan inovator di daerah dalam melakukan kajian dan riset untuk kebijakan berbasis bukti. Hal ini penting mengingat signifikansi *evidence-based policy* dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.

Untuk implementasinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu bekerja sama dengan berbagai *stakeholder*, termasuk lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta sektor swasta.

3. Adaptasi dan adopsi teknologi terbaru:

- a. Memantau perkembangan teknologi dan tren riset terkini, serta mengadaptasikannya ke dalam praktik riset dan inovasi di daerah.
- b. Mengembangkan kebijakan yang mendukung adopsi dan penggunaan teknologi baru dalam penelitian dan inovasi.

Strategi ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan dan mengatasi ancaman (ST Strategy). Dalam era yang semakin digital dan teknologi semakin maju, kemampuan untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi terbaru menjadi suatu keharusan. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang dapat diambil adalah dengan memantau perkembangan teknologi dan tren riset terkini, dan mengadaptasinya ke dalam praktek riset dan inovasi di daerah.

Selain itu, juga perlu dikembangkan kebijakan yang mendukung adopsi dan penggunaan teknologi baru dalam penelitian dan inovasi. Kebijakan ini dapat berupa

insentif untuk peneliti dan inovator yang menggunakan teknologi baru, hingga regulasi yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam penelitian dan inovasi.

4. Meningkatkan upaya penggalangan dana (WT Strategy):

- a. Mengidentifikasi dan menargetkan potensi donor atau investor yang tertarik pada riset dan inovasi.
- b. Menyusun proposal penggalangan dana yang kuat dengan menonjolkan keunggulan dan potensi daerah dalam riset dan inovasi.

Strategi keempat yang diidentifikasi dalam kerangka analisis SWOT untuk Kabupaten Kutai Kartanegara adalah meningkatkan upaya penggalangan dana. Strategi ini bertujuan untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada (WT Strategy).

Pertama, dengan mengidentifikasi dan menargetkan potensi donor atau investor yang tertarik pada riset dan inovasi. Ini bisa melibatkan berbagai jenis pelaku, mulai dari Pemerintah Pusat dan daerah, perusahaan swasta, lembaga donor internasional, hingga individu yang tertarik pada bidang ini.

Kedua, perlu disusun proposal penggalangan dana yang kuat. Proposal ini harus mampu menonjolkan keunggulan dan potensi daerah dalam riset dan inovasi, serta bagaimana dana atau investasi tersebut akan digunakan untuk memaksimalkan keunggulan tersebut.

5. Pembuatan kebijakan berbasis bukti:

- a. Mendorong pembuatan kebijakan yang didasarkan pada bukti dan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan.
- b. Mengedukasi dan melatih pembuat kebijakan tentang pentingnya evidence-based policy dan bagaimana cara membuatnya.

Mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti adalah suatu langkah yang signifikan dan penting. Kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti dan hasil kajian ilmiah lebih mungkin untuk memiliki dampak yang efektif dan berarti. Ini juga dapat membantu mengatasi tantangan seperti kurangnya infrastruktur penelitian dan inovasi dan kekurangan tenaga kerja yang terampil.

Dalam proses ini, pendidikan dan pelatihan pembuat kebijakan tentang pentingnya evidence-based policy dan bagaimana membuatnya menjadi penting. Mengubah cara kerja dan pola pikir konvensional tidaklah mudah, dan ini memerlukan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peluang yang baik untuk memanfaatkan riset dan inovasi sebagai sarana untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti.

Adapun Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk dikembangkan kedepannya adalah: 1) Sarang Burung Walet; 2) Padi; 3) Lada; 4) Karet; 5) Kopi Luwak Perangkat Baru; 6) Buah Naga Batuah; 7) Buah Elai Batuah; 8) Cokelat Lung Anai; 9) Ikan Air Tawar; 10) Kerupuk Kota Bangun; 11) Ikan Asin; 12) Klinik Kepiting; 13) Udang dna ikan air asin; 14) Produk Multikultural/handycraft; 15) Bruwun Geulis; 16) Pesta Adat Erau Pelas Benua; 17) Car Free Night Simpang Odah Etam; 18) Pulau Kumala; 19) pantai Pemedas; 20) Pantai Pulau Pengempang; 21) Desa Wisata Pela.

Dalam implementasi rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara direkomendasikan beberapa poin sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur riset dengan cara meningkatkan kompetensi SDM dalam riset dan inovasi melalui pelatihan berkelanjutan,

kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta dukungan terhadap program magang dan beasiswa. Program ini mencakup pelatihan keterampilan dasar sampai dengan penguasaan teknologi terbaru, untuk menunjang kemampuan riset berbasis teknologi. Memperkuat infrastruktur riset dengan membangun laboratorium riset yang memadai, meningkatkan akses digital, serta membentuk inkubator bisnis yang mendukung pengembangan inovasi daerah. Infrastruktur riset yang lebih baik akan membuka peluang lebih luas bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengoptimalkan hasil riset yang aplikatif dan berdaya guna.

- Pengembangan dan integrasi basis data riset dan inovasi akan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan dengan berbasis data. Pengelolaan data riset yang terpusat (centralized) akan memudahkan proses diseminasi dan pemanfaatan hasil riset oleh berbagai pemangku kepentingan.
- Kolaborasi antar pihak dalam mendukung inovasi dengan cara mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara BRIDA, lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk memperluas jaringan inovasi. Kolaborasi ini akan mempercepat penemuan-penemuan baru untuk mengatasi tantangan, serta mendorong keberlanjutan pengembangan inovasi daerah.
- Penguatan kebijakan inovasi yang responsif dan adaptif, harus disesuaikan dengan kondisi daerah akan mendorong fleksibilitas dalam pelaksanaan riset serta inovasi di daerah. Melalui reformasi kebijakan, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global, serta tantangan yang muncul dalam pembangunan wilayah. Kebijakan yang kuat memungkinkan adanya perlindungan terhadap inovator dalam mengembangkan solusi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Diseminasi dan publikasi hasil riset dan inovasi, melalui berbagai platform publikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini akan memperkenalkan hasil riset Kabupaten Kutai Kartanegara kepada khalayak yang lebih luas, mendorong pengakuan global serta menarik investor untuk mendukung komersialisasi inovasi daerah.

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kutai Kartanegara

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan urgensi dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu KLHS, Isu Global, Nasional dan Regional maka diidentifikasi isu strategis yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.84
Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM	Geopolitik Dan Geoekonomi	Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif	Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif	Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non-ekstraktif
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Industri 5.0		Kemandirian Pangan	Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)		Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN		Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN
Pengembangan Pariwisata Lokal		Peningkatan Kepariwisataan				
Komitmen tinggi Pemda dalam pembangunan pemerataan Infrastruktur daerah	Belum meratanya pelayanan infrastruktur dasar	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal
		Peningkatan fasilitas pelabuhan			Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi	
		Peningkatan Penggunaan Telepon Genggam (HP)				
Dukungan penerapan Smart Regency & Infrastruktur Digital	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Layanan Jasa Keuangan	Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi
		Keuangan Daerah				
		Peningkatan Anggaran Riset Pemerintah dan Swasta				

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah		
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi tinggi sebagai pusat pendidikan yang strategis, dengan infrastruktur lebih baik dan potensi penyerapan lulusan oleh perusahaan lokal	Belum optimalnya pembangunan SDM yang merata	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas		
		Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat				
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						
		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan						
		Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana						
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya dalam upaya menuju masyarakat berkebudayaan maju	Penanggulangan Kekerasan Seksual			Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya	Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural		
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan kesejahteraan masyarakat							
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya potensi kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas ekonomi dan resiliensi bencana daerah	Rehabilitasi Lahan Kritis dan Penanganan Satwa Langka			Dampak Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana
Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)						
fondasi kebijakan pemda terkait lingkungan hidup untuk mengarahkan program-program konkret—mulai dari penguatan kelembagaan								

Potensi	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Nasional	Regional	Isu Strategis Daerah
Dinas LH hingga pelibatan masyarakat dan pendanaan						
Pelaksanaan dan komitmen Pemda terkait pengendalian abrasi dan suplai air bersih di wilayah pesisir						

Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu-isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif

Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini sangat bergantung pada sektor ekonomi ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan minyak bumi, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah. Namun, model ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Peluang ini menjadi semakin penting mengingat Kutai Kartanegara berada di wilayah strategis yang berdekatan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk pangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan sektor-sektor tersebut melalui peningkatan infrastruktur pendukung, penyediaan akses pembiayaan untuk UMKM, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, serta promosi produk-produk unggulan lokal ke pasar regional dan nasional.

2. Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan andal

Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan merupakan isu strategis yang krusial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat luas wilayahnya yang mencakup daerah pesisir, pedalaman, dan perbukitan. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pembangunan infrastruktur harus tidak hanya difokuskan pada wilayah-wilayah strategis atau padat penduduk, tetapi juga diarahkan ke wilayah pinggiran dan tertinggal yang memiliki potensi ekonomi dan kebutuhan pelayanan dasar yang mendesak.

3. Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi

Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun transformasi digital mulai diimplementasikan melalui berbagai sistem seperti *e-government*, *e-planning*, dan layanan administrasi daring, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan sering kali terbentur oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, penguatan kehidupan demokrasi lokal juga menjadi bagian penting dalam tata kelola yang baik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan anggaran, dan pengambilan keputusan publik perlu diperluas agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Di saat yang sama, stabilitas keamanan dan ketertiban harus dijaga secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.

4. Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas

Peningkatan daya saing SDM menjadi isu strategis yang sangat penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di era pasca-ekstraktif dan menjelang beroperasinya IKN. Saat ini, kualitas SDM di Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pendidikan, keterampilan kerja, maupun kesehatan masyarakat.

Untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan terintegrasi. Pemerintah Daerah perlu memperkuat ekosistem pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi.

5. Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya

Ketahanan sosial dan pelestarian budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi, migrasi, serta kemajuan teknologi yang semakin masif. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tantangan ketahanan sosial terlihat dari masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah, meningkatnya urbanisasi, serta potensi konflik sosial akibat perebutan lahan, dampak pembangunan besar, dan perbedaan latar belakang etnis.

Di sisi lain, Kutai Kartanegara memiliki kekayaan budaya lokal yang luar biasa, termasuk tradisi Kesultanan Kutai, adat Dayak, dan warisan budaya takbenda lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai budaya ini menghadapi tantangan erosi karena kurangnya regenerasi, minimnya dokumentasi, dan belum terintegrasinya pelestarian budaya dalam sistem pendidikan maupun pariwisata daerah.

6. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural

Kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural menjadi tantangan strategis yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama pada wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan komunitas adat terpencil.

Kemiskinan ekstrem ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, kemiskinan kultural mencerminkan kondisi keterbelakangan sosial yang dipengaruhi oleh cara pandang, pola hidup, dan nilai-nilai lokal yang belum selaras dengan prinsip pembangunan modern.

7. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Jika tidak segera dikendalikan, kerusakan ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

Di sisi lain, Kutai Kartanegara juga memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak perubahan iklim.

Pengarusutamaan isu lingkungan ke dalam kebijakan daerah, penerapan prinsip ekonomi hijau, serta edukasi publik tentang gaya hidup ramah lingkungan akan menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, adaptif, dan tangguh terhadap bencana.

8. Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya lahan yang luas dan subur, serta ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai pilar ketahanan pangan daerah. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal akibat masih terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti irigasi, akses jalan produksi, sarana pascapanen, serta minimnya inovasi teknologi pertanian dan kapasitas kelembagaan petani.

Di tengah peningkatan kebutuhan pangan secara nasional, Kutai Kartanegara dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan produktivitas, menjamin keberlanjutan produksi, serta memperkuat akses pasar yang kompetitif agar mampu menjadi lumbung pangan andalan di Kalimantan Timur.

9. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dan menjadi wilayah strategis penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi geo-ekonomi dan geo-strategis yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN.

Selain itu, pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan migrasi ke wilayah sekitar IKN diproyeksikan akan meningkatkan tekanan terhadap permukiman, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memerlukan respons pembangunan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang strategis tersebut, akselerasi pembangunan Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga IKN harus diarahkan pada penguatan infrastruktur kawasan, revitalisasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas sumber daya manusia.

Diperlukan sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah, baik dengan Pemerintah Pusat, Otorita IKN, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sekitar, untuk menjamin integrasi rencana tata ruang dan konektivitas pembangunan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang melimpah.

Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal dengan sumber daya alamnya yang kaya, termasuk tambang, pertanian, dan pariwisata, yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan konteks ini, maka visi dan misi RPJMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan Tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, di mana visi mengenai pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang di Kabupaten Kutai Kartanegara, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah sebagai berikut.

KUKAR IDAMAN TERBAIK
***“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan,
Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”***

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yaitu *“Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut.

1. **Maju**, pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah Daerah berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan.

Dengan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat secara merata, sehingga akan

menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfokuskan diri untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga diimbangi dengan penguatan infrastruktur daerah seperti penyediaan akses jalan dan penataan ruang yang baik sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain itu, birokrasi pemerintahan sebagai penanggung jawab pembangunan daerah juga menjadi perhatian agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

2. **Sejahtera**, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal.

Pokok visi "sejahtera" juga diwujudkan dengan pengembangan SDM melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan hunian yang layak, sehingga tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.

3. **Berkelanjutan**, Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem.

3.1.2 Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut.

- 1) **MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.**

Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses di seluruh wilayah

2) MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.

Misi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan.

3) MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah.

4) MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Pendidikan karakter merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pendidikan karakter masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan lingkungan.

5) MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan juga merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing pokok visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan visi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk

mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria *SMART-C*.

Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan”					
Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Pembangunan	
				2025	2030
Maju	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,63 - 5,70	7,50-7,71
		PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	271,53- 271,71	402,83 - 404,53
	Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,34	82,50
		Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,88
Sejahtera	Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,50-6,95	4,80-5,24
Berkelanjutan	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	17,59	53,45

Pokok visi yang pertama yaitu Maju yang terdiri dari fokus perekonomian dan tata kelola pemerintahan. Pokok visi maju dengan fokus perekonomian memiliki tujuan untuk **Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi, dan berkelanjutan** di Kabupaten Kutai Kartanegara, sangat penting karena merupakan landasan utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tepat jika *Laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita* digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan. Kutai Kartanegara selama ini banyak bergantung pada sektor pertambangan dan migas, yang bersifat tidak terbarukan dan rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Dengan membangun fondasi ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan Sasaran peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor unggulan daerah, yang diharapkan mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri hijau. Potensi lokal yang dipilih sebagai fokus ekonomi menjadi ukuran keberhasilan yang tertuang dalam indikator *Pertumbuhan PDRB Ekonomi Non Ekstraktif*, yang merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang tidak bergantung pada pengambilan langsung sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi investor. Seiring dengan berkembangnya sektor unggulan, investasi daerah pun meningkat, baik dari investor domestik maupun asing. Masuknya investasi ini memperkuat struktur ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong

inovasi dan alih teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing daerah secara menyeluruh, ukuran keberhasilan investasi adalah *Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN*. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi tersebut, diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah yang terencana dan berkelanjutan yang dapat diukur dengan indikator *Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur*. Infrastruktur yang merata, baik jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, maupun konektivitas digital, akan membuka akses antarwilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar-kecamatan, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

Tujuan dari pokok visi maju selanjutnya Adalah **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing** dengan ukuran keberhasilan *Indeks Reformasi Birokrasi* dan *Indeks Daya Saing*. peningkatan kualitas pelayanan publik dan stabilitas kondusivitas daerah merupakan dua elemen yang saling menguatkan, dan menjadi indikator penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat dan daya saing daerah yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Salah satu sasaran keberhasilan tata kelola tersebut adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan indikatornya *Indeks Pelayanan Publik* dan *Nilai SAKIP*. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya mencerminkan reformasi birokrasi yang berjalan efektif, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini, pada gilirannya, berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan kondusivitas daerah, karena masyarakat merasa dilayani secara adil dan partisipatif, sehingga potensi konflik sosial dapat ditekan dan harmoni sosial dapat terjaga yang dapat diukur melalui indikator *Angka Kriminalitas*. Sebaliknya, stabilitas dan kondusivitas daerah menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif memungkinkan proses pelayanan berjalan lancar tanpa gangguan, serta menciptakan suasana kerja yang produktif bagi aparatur pemerintah. Kondisi ini juga mendukung tumbuhnya iklim investasi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum.

Pokok visi Sejahtera tercermin dari **Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat** melalui indikator *Tingkat kemiskinan* yang semakin menurun. peningkatan kualitas SDM, terbukanya lapangan kerja, dan penurunan ketimpangan merupakan komponen yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan saling terintegrasi, dengan fokus pada pembangunan manusia dan penciptaan peluang ekonomi yang merata. Salah satu pilar utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkarakter, yang dapat diukur melalui indikator *Indeks Pembangunan Manusia*. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan, serta penguatan nilai-nilai karakter dan etika kerja, SDM yang unggul dan sehat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, sekaligus mendorong produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. SDM yang berkualitas dan siap

kerja secara langsung berkontribusi terhadap meningkatnya kesempatan kerja yang diukur melalui indikator *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Tingginya kesempatan kerja berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun tumbuhnya wirausaha lokal di sektor informal dan UMKM. Hal ini membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi daerah. Seiring dengan meningkatnya kesempatan kerja, akan terjadi penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah maupun antar kelompok Masyarakat yang tercermin dari *indeks gini*. Pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan inklusif.

Pokok visi selanjutnya adalah Berkelanjutan dengan fokus Pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kebencanaan. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta meningkatnya potensi bencana alam, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menempatkan **keberlanjutan lingkungan** sebagai salah satu prioritas strategis Pembangunan yang diukur dengan indikator *penurunan emisi GRK* yang penting bagi Kutai Kartanegara karena merupakan fondasi utama bagi kelangsungan hidup masyarakat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, yang dapat diukur dengan *indeks kualitas lingkungan hidup* yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pelestarian ekosistem penting seperti hutan, sungai, dan kawasan pesisir. Kualitas lingkungan hidup yang terjaga tidak hanya menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat yang sehat, tetapi juga merupakan komponen penting dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana daerah yang diukur melalui *indeks Risiko Bencana*. Lingkungan yang baik dapat berperan dalam memitigasi risiko bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang terjadi di Kutai Kartanegara. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan perencanaan tanggap darurat yang matang, juga mendukung terjaganya kelestarian lingkungan. Masyarakat yang siaga dan sadar risiko akan lebih peduli dalam menjaga lingkungan sekitar, sehingga tercipta siklus positif antara ketangguhan wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Kutai Kartanegara dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada setiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut.

1. T1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut.

- Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah.
- Meningkatnya investasi daerah.
- Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah.

2. T2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan stabilitas kondusivitas daerah.

3. T3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut.

- Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter.
- Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan.

4. T4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.
- Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana daerah.

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN						
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan” MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71	
			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	259,19	271,53-271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53	
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,07 - 8,14	9,08 - 9,15	10,05-10,13	10,96 – 11,03	12,06-12,14	13,35-13,45	
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	10,85	11,07	11,29	11,51	11,74	11,98	12,22	
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
	Tujuan 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50	
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88	
			Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54
				Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01
			Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	106	100	95	90	85	80	75

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2024	TARGET PEMBANGUNAN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Tujuan 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,72	6,14 - 6,56	5,62 - 6,19	5,30 - 5,72	5,00 - 5,47	4,80 - 5,24
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85 - 4,00	3,67 - 3,83	3,50 - 3,66	3,33 - 3,49	3,16 - 3,33	3,00 - 3,18
			Rasio Gini	Indeks	0,307	0,285 - 0,301	0,281 - 0,299	0,277 - 0,295	0,272 - 0,290	0,268 - 0,287	0,265 - 0,282
	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,7	47,03	53,45
		Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,59	73,78	73,90	74,03	74,16	74,29	74,41
		Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan.

RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan bersifat terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Strategi yang disusun secara matang memungkinkan adanya fokus kewilayahan dan penetapan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi unggulan daerah.

Perencanaan strategis RPJMD bertujuan untuk mengoperasionalkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rencana kerja pembangunan lima tahunan.

Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 *adalah KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Kepala Daerah dirumuskan secara sistematis dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dalam RPJMD 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus dan lokus pembangunan, serta perumusan program prioritas dalam merespons dinamika lingkungan yang terus berubah.

Arah kebijakan RPJMD 2025–2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan diselaraskan dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai panduan normatif dan operasional, strategi dan arah kebijakan juga menjadi instrumen dalam mendorong transformasi, reformasi birokrasi, serta perbaikan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, program prioritas disusun melalui proses *cascading* kinerja, dimulai dari visi hingga capaian outcome, serta dilengkapi dengan indikator kinerja sesuai dengan jenjang perencanaannya.

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Strategi

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Sebagai kerangka perencanaan yang sistematis, strategi memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan.

Strategi yang dirumuskan secara jelas dan terukur mampu mengarahkan pembangunan agar lebih fokus, adaptif terhadap perubahan, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan strategi dalam RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan, dan potensi kewilayahan. Strategi tersebut merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus, serta pemilihan program prioritas. Dengan pendekatan ini, setiap

langkah pembangunan dirancang agar berjalan secara terarah, sinergis, dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai bagian dari strategi implementatif RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tema pembangunan tahunan yang menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja setiap tahunnya.

Penetapan tema ini bertujuan untuk memberikan fokus arah pembangunan secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap tema menggambarkan prioritas yang ingin dicapai pada tahun berjalan, sekaligus menjadi instrumen untuk mengkonsentrasi berbagai program lintas sektor agar selaras dengan tujuan pembangunan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat landasan transformasi struktural dan mempercepat realisasi visi pembangunan jangka menengah daerah secara bertahap. Tema pembangunan per tahun pada Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1
Tema Pembangunan Per Tahun RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029



Dalam melaksanakan kinerja pembangunan tahunan, maka perlu disusun penahapan pembangunan yang merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan	Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan
Ekonomi	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat	Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Infrastruktur	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah	Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berdaya saing	Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan	Pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan
Tata kelola	Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Sosial Budaya	Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat	Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan
Lingkungan	Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan	Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan	Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk

	2026	2027	2028	2029	2030
	peningkatan partisipasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan hidup	masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	mendukung pembangunan berkelanjutan

Adapun penahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui strategi berikut.

1. Pemenuhan Fondasi Infrastruktur Wilayah dan Penataan Kelembagaan

Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing daerah. Melalui pembangunan prasarana konektivitas yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah, diharapkan mampu mendorong terciptanya kawasan ekonomi potensial yang produktif dan berkelanjutan. Keterpaduan infrastruktur dengan kelembagaan yang efektif akan menciptakan ekosistem pembangunan yang sinergis, sehingga mampu meningkatkan arus barang, jasa, dan investasi di wilayah ini.

Selain itu, penguatan regulasi, tata kelola, dan pemanfaatan infrastruktur digital menjadi fondasi dalam membangun pelayanan publik yang adaptif, konsisten, dan implementatif. Digitalisasi pelayanan akan meningkatkan transparansi, mempercepat proses birokrasi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung penguatan daya tarik kawasan ekonomi strategis.

Pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pemenuhan layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan dasar yang memadai, serta pemenuhan gizi masyarakat merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, penguatan eksistensi budaya lokal sebagai identitas daerah menjadi pondasi penting bagi pembangunan sosial yang berkeadaban. Seluruh upaya ini berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui sistem pengelolaan yang berkualitas dan partisipasi aktif berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologi.

2. Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan

Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan menjadi landasan penting dalam mendorong terciptanya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah. Upaya ini dilakukan melalui perluasan pengembangan perekonomian tematik yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga mampu memberdayakan pelaku usaha masyarakat secara lebih optimal. Dengan memperkuat basis ekonomi wilayah melalui sektor unggulan yang khas, pembangunan tidak hanya terfokus pada pusat pertumbuhan, tetapi juga merata ke wilayah-wilayah lain yang memiliki potensi strategis. Peningkatan daya jangkauan infrastruktur kawasan dan layanan dasar diarahkan untuk mendukung pemerataan transformasi pembangunan, sehingga konektivitas antar wilayah semakin terbuka dan masyarakat dapat menikmati akses yang lebih baik terhadap berbagai peluang pembangunan.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur, serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah, menjadi prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif. Aparatur yang kompeten mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan secara efektif, sementara kelembagaan yang kuat memastikan koordinasi dan sinergi lintas sektor berjalan dengan baik. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi transformasi pembangunan berbasis kewilayahan yang tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat aspek kelembagaan sebagai motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Transformasi pembangunan juga perlu ditopang dengan perluasan akses terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sosial,

yang dibarengi dengan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas. Hal ini menjadi bagian dari penguatan ketahanan sosial masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan nilai-nilai budaya sebagai identitas daerah. Sejalan dengan itu, peningkatan ketahanan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengelolaan limbah terpadu yang bertanggung jawab menjadi prioritas, guna memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berwawasan lingkungan dan mendukung keseimbangan ekologi.

3. Peningkatan Kemanfaatan Transformasi Pembangunan

Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan inovatif yang mendorong lahirnya produk lokal masyarakat serta hilirisasi sektor-sektor strategis daerah. Dengan menumbuhkan iklim usaha yang adaptif terhadap perubahan dan berbasis inovasi, diharapkan potensi lokal dapat diolah menjadi nilai tambah yang berdaya saing tinggi, baik di tingkat regional maupun nasional. Upaya ini sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberdayakan masyarakat secara luas, dan membuka peluang kerja yang lebih besar.

Selain itu, penguatan sistem transportasi, logistik, dan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi menjadi prasyarat bagi terciptanya konektivitas ekonomi yang merata. Infrastruktur yang inklusif dan berdaya saing akan memperlancar distribusi barang, jasa, dan informasi, sehingga mendukung efisiensi perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, penerapan digitalisasi layanan publik serta penguatan sistem pengawasan diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Transformasi pembangunan juga ditopang oleh peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta pelestarian kebudayaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Upaya tersebut diiringi dengan pengendalian pencemaran dan optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan, guna memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ekologi. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya sebagai fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pembangunan yang berkemanfaatan nyata bagi semua.

4. Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK

Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK diarahkan pada pembangunan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan daerah sebagai landasan transformasi menuju pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau. Dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan mendorong hilirisasi sektor strategis, Kutai Kartanegara diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Upaya ini tidak hanya menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sekaligus menjadi pondasi bagi terciptanya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan identitas daerah.

Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur kewilayahan ditujukan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan yang merata. Infrastruktur yang terintegrasi dan modern akan memperkuat konektivitas antar wilayah, mendukung arus

distribusi barang dan jasa, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang adaptif, konsisten, dan implementatif, serta sistem evaluasi pembangunan yang efektif sebagai instrumen peningkatan kinerja. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan dapat berjalan terarah, terukur, dan mampu menjawab dinamika serta tantangan masa depan.

Fondasi transformasi juga diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia yang inovatif, berdaya saing, dan berkarakter, sekaligus memperkuat ikatan sosial masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berbudaya. Hal ini didukung oleh peran serta multi pihak dalam mengendalikan ancaman kerusakan lingkungan serta mengembangkan potensi energi ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, KUKAR IDAMAN TERBAIK tidak hanya menjadi visi pembangunan, tetapi juga menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.

5. Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan

Pemantapan menuju akselerasi transformasi pembangunan diarahkan pada penguatan rantai nilai dan percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan. Langkah ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara bijak serta mengedepankan prinsip keberlanjutan, hilirisasi komoditas unggulan diharapkan tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan usaha lokal.

Dalam mendukung hal tersebut, pemantapan infrastruktur menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya akselerasi transformasi pembangunan. Pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, energi, dan layanan dasar secara terintegrasi akan memperkuat konektivitas, menurunkan biaya distribusi, serta menciptakan efisiensi pembangunan. Di samping itu, penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam tata kelola pembangunan yang partisipatif. Sinergi lintas sektor ini akan memastikan bahwa setiap program pembangunan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Akselerasi transformasi pembangunan juga ditopang oleh pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya. Hal ini diwujudkan melalui penguatan solidaritas sosial, pelestarian nilai budaya lokal, serta penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi prioritas untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup. Dengan fondasi sosial yang kuat, dukungan energi berkelanjutan, dan tata kelola yang kolaboratif, transformasi pembangunan daerah akan bergerak lebih cepat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

b. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, ketahanan ekologi yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan kewilayahan yang berkualitas. Adapun rincian arah kebijakan dimaksud disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat
		2. Penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara
		3. Identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal
	Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	4. Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan
		5. Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat)
		6. Perlindungan sosial kelompok rentan
		7. Penyediaan hunian layak dan terjangkau
		8. Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
		9. Peningkatan mutu SDM melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja
		10. Transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata
	Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	11. SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha
	Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	12. Revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial
	Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan	13. Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional
		14. Promosi identitas budaya daerah secara luas
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)
		2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata
		3. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro
	Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat	4. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan
		5. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan
		6. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya
		7. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif
	Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	8. Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif
		9. Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (link dan match)
		10. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
	Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	11. Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah
		12. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN
		13. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan
	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan	14. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau
		15. Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif
		16. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	1. Penyusunan sistem perencanaan-penganggaran terpadu
		2. Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	3. Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik
		4. Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja
	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	5. Digitalisasi layanan publik
		6. Penguatan sistem pengaduan
	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	7. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
		8. Aplikasi dashboard lintas sektor
	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan	9. Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan
		10. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan hidup	1. Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana
		2. Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara
	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	3. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis
		4. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	5. Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana
		6. Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya
	Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	7. Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi
		8. Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif
	Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	9. Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan yang	1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara

Misi	Strategi	Arah Kebijakan
dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah	
	Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan 3. Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN
	Penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berdaya saing	4. Modernisasi desa melalui smart village (internet, sistem layanan digital, energi alternatif)
		5. Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan
	Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan	6. Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah
		7. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN
	Pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan	8. Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau
		9. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis

c. Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1: *Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, sebagai berikut.

a. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat

Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat menjadi prioritas utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, penyediaan fasilitas kesehatan dasar yang memadai, serta program gizi masyarakat yang berkesinambungan. Dengan memperkuat layanan dasar tersebut, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu menjadi modal utama pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan misi yang menekankan pemerataan akses layanan dasar sebagai hak fundamental seluruh warga.

Selain itu, penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara menjadi strategi penting dalam menanamkan identitas, nilai, serta kearifan lokal kepada generasi muda. Melalui integrasi kurikulum berbasis budaya daerah ke dalam sistem pendidikan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga dibekali pemahaman akan akar budaya dan sejarah yang membentuk karakter

daerah. Hal ini merupakan pondasi yang kuat untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas daerah di tengah arus globalisasi.

Strategi lainnya adalah melakukan identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal sebagai langkah awal dalam memperkuat eksistensi budaya daerah. Pemetaan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelestarian budaya yang lebih tepat sasaran, serta memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk berperan aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, pemenuhan layanan dasar tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat eksistensi budaya lokal sebagai bagian integral dari pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat;

Arah kebijakan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat difokuskan pada upaya mewujudkan pelayanan dasar yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan yang inklusif, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, serta penguatan ketahanan gizi sebagai bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penguatan eksistensi budaya lokal menjadi pondasi penting dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan, dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai inspirasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Seluruh arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik untuk mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang bermartabat, berdaya saing, serta berakar pada kekuatan budaya masyarakat.

2. Penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara; dan

Arah kebijakan penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat identitas daerah, serta membangun karakter peserta didik yang berakar pada budaya setempat namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui integrasi budaya dan sejarah Kutai Kartanegara dalam kurikulum pendidikan, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan kebanggaan terhadap warisan budayanya. Kebijakan ini selaras dengan strategi pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat melalui pendekatan yang holistik dan kontekstual, di mana penguatan eksistensi budaya lokal menjadi pondasi dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan yang berkarakter, berbudaya, dan berkeadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara

3. Identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal.

Arah kebijakan identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal diarahkan untuk menggali, mendokumentasikan, dan memperkuat potensi budaya serta struktur sosial masyarakat Kutai Kartanegara sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui pemetaan yang komprehensif, pemerintah dapat mengenali karakteristik, kebutuhan, serta kekuatan masing-masing komunitas lokal sehingga intervensi pada sektor pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat dapat disesuaikan dengan konteks sosial budaya setempat. Kebijakan ini menjadi bagian integral dari strategi penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat, di mana pelestarian budaya berjalan seiring dengan peningkatan

kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal serta memperkuat kohesi sosial di tingkat komunitas

b. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan

Perluasan akses pelayanan dasar menjadi strategi utama untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat menikmati hak-haknya secara adil. Melalui ekspansi program beasiswa, pelatihan, dan pendampingan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dan kelompok marjinal untuk berdaya. Strategi ini diperkuat dengan penyediaan hunian layak dan terjangkau sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh.

Di sisi lain, penguatan kelembagaan budaya lokal seperti sanggar seni dan komunitas adat menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah dan memperkuat ketahanan sosial. Dengan melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama, pelestarian kebudayaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga ruang aktualisasi diri yang mampu mempererat solidaritas sosial. Langkah ini sejalan dengan misi yang menempatkan perlindungan sosial sebagai pilar utama pembangunan, karena ketahanan sosial tidak hanya dibangun melalui layanan dasar, tetapi juga dengan memperkuat nilai-nilai budaya sebagai perekat kehidupan masyarakat.

Selain itu, strategi transformasi pembangunan diwujudkan melalui peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. Perlindungan sosial yang terarah akan memperkuat fondasi masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Dengan sinergi pelayanan dasar, penguatan budaya lokal, serta perlindungan kelompok rentan, Kutai Kartanegara dapat mewujudkan transformasi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan sosial. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan;

Arah kebijakan ekspansi program beasiswa, pelatihan, dan pendampingan bagi kelompok rentan difokuskan untuk membuka akses yang lebih luas terhadap kesempatan pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi maupun sosial. Melalui pemberian beasiswa yang berkeadilan, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta pendampingan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian dan daya saing kelompok rentan dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Upaya ini sejalan dengan strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai bentuk penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Seluruh arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, dengan menjadikan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi kesejahteraan dan keadilan sosial.

2. Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat);

Arah kebijakan penguatan kelembagaan budaya lokal, seperti sanggar seni, komunitas adat, dan lembaga pelestari tradisi, diarahkan untuk memperkuat

peran dan kapasitas lembaga budaya sebagai pusat pengembangan nilai, pengetahuan, dan identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Melalui dukungan terhadap kelembagaan budaya ini, diharapkan terjadi revitalisasi peran komunitas dalam menjaga warisan budaya sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi berbasis kearifan lokal. Kebijakan ini selaras dengan strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas, yang menempatkan budaya sebagai kekuatan sosial dalam memperkuat ketahanan masyarakat menuju transformasi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat serta berakar pada kekayaan budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan bersama.

3. Perlindungan sosial kelompok rentan;

Arah kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan difokuskan pada upaya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak. Melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan berbasis komunitas, kebijakan ini bertujuan memperluas akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang berkeadilan, sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Pendekatan pelestarian kebudayaan lokal dalam program perlindungan sosial juga menjadi strategi penting dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan masyarakat, karena nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang hidup dalam budaya daerah menjadi modal sosial menuju transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara secara berkeadilan dan bermartabat.

4. Penyediaan hunian layak dan terjangkau; dan

Arah kebijakan penyediaan hunian layak dan terjangkau difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal yang aman, sehat, dan sesuai standar kehidupan yang bermartabat. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik perumahan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan permukiman berbasis komunitas. Melalui strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal, penyediaan hunian dirancang untuk memperkuat kohesi sosial serta mendukung ketahanan masyarakat terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga identitas budaya daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, di mana penyediaan hunian layak menjadi bagian integral dari pembangunan manusia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

5. Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia.

Arah kebijakan peningkatan kualitas keluarga serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia diarahkan untuk membangun masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya melalui penguatan peran keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam menopang kesejahteraan bersama. Kebijakan ini menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar yang mudah diakses, pemberdayaan kelompok rentan, serta penciptaan lingkungan sosial yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Pendekatan ini dikaitkan dengan strategi perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas, di mana nilai-nilai

gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial yang hidup dalam budaya Kutai Kartanegara menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan sosial dan mendorong transformasi pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan, dengan menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

c. Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Kebudayaan yang Dapat Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat

Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan diarahkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penyelenggaraan sekolah vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Dengan memperkuat kompetensi masyarakat, terutama generasi muda, daerah akan memiliki tenaga kerja yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan serta dinamika ekonomi global.

Selain itu, transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan langkah strategis dalam menghubungkan pelestarian kebudayaan dengan penguatan perekonomian masyarakat. Melalui inovasi dan pengembangan produk berbasis budaya lokal, nilai-nilai tradisi tidak hanya terjaga, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sekaligus memperkuat identitas daerah, meningkatkan daya tarik pariwisata, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.

Dengan sinergi antara peningkatan mutu layanan dasar dan pemanfaatan budaya sebagai sumber ekonomi, strategi ini memperkuat misi Terbaik yang menempatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama. Pada saat yang sama, strategi ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya lokal sebagai pondasi sosial dan ekonomi daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu SDM melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja; dan

Arah kebijakan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui penguatan sekolah vokasi dan pelatihan kerja difokuskan pada pengembangan kompetensi dan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja serta berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan industri untuk menciptakan sistem pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus menumbuhkan jiwa kemandirian dan inovasi di kalangan generasi muda. Upaya ini selaras dengan strategi peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berdaya saing. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan, guna melahirkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang unggul, produktif, dan berkarakter.

2. Transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata.

Arah kebijakan transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kekayaan budaya lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus sarana pelestarian identitas daerah. Melalui pengembangan industri kreatif, ekonomi berbasis budaya, serta pariwisata yang berwawasan kearifan lokal, kebijakan ini

berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kebanggaan terhadap warisan budaya Kutai Kartanegara. Upaya ini sejalan dengan strategi peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan menempatkan budaya sebagai elemen penting dalam pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, melalui pendekatan pembangunan berbasis budaya yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

d. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing serta Ikatan Sosial Masyarakat yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya

Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing menjadi salah satu kunci akselerasi pembangunan daerah. Strategi ini ditempuh melalui penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia kerja, dan dunia usaha, sehingga tercipta ekosistem yang mampu menghasilkan SDM unggul, adaptif, serta relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat melalui pendidikan formal, sekolah vokasi, serta pelatihan yang terarah, Kutai Kartanegara dapat mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional. Upaya ini sejalan dengan misi Terbaik yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai pondasi pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Selain peningkatan kapasitas SDM, strategi transformasi pembangunan juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai lokal dalam memperkuat ikatan sosial masyarakat. Nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam dinamika pembangunan sosial sehingga masyarakat tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter yang berkeadilan, inklusif, dan berbudaya. Revitalisasi nilai-nilai lokal ini menjadi instrumen dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat identitas daerah, dan menjaga keberlanjutan pembangunan yang berakar pada kekuatan masyarakat.

Dengan sinergi antara peningkatan kualitas SDM dan penguatan ikatan sosial berbasis nilai budaya lokal, strategi ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang lebih inovatif, produktif, dan sejahtera. Pada saat yang sama, pembangunan tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan budaya, sehingga transformasi yang terjadi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha; dan

Arah kebijakan pengembangan SDM unggul dan adaptif melalui kolaborasi antara dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha difokuskan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran dan ketenagakerjaan yang saling terhubung, relevan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta kebutuhan industri modern. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan sektor industri dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi, program magang, serta pelatihan vokasi yang mampu melahirkan tenaga kerja terampil, inovatif, dan berdaya saing global. Kolaborasi ini juga memperkuat ikatan sosial masyarakat yang inklusif dan berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing serta Ikatan Sosial Masyarakat yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya, serta mendukung misi Terbaik dalam

mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial.

Arah kebijakan revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial diarahkan untuk menghidupkan kembali dan mengintegrasikan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral, etika, dan sosial dalam pembangunan masyarakat yang modern dan berdaya saing. Kebijakan ini menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai modal sosial yang memperkuat karakter sumber daya manusia di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Melalui penguatan peran lembaga adat, pendidikan berbasis budaya, serta kegiatan sosial kemasyarakatan, nilai-nilai lokal diaktualisasikan menjadi kekuatan transformatif yang menjaga keharmonisan dan memperkokoh identitas daerah. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Inovatif dan Berdaya Saing serta Ikatan Sosial Masyarakat yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya, serta mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dengan menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkarakter, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

e. Pemantapan Ketahanan Sosial yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan dan Berbudaya Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan

Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berbudaya merupakan pilar penting dalam mendorong akselerasi transformasi pembangunan. Strategi ini diarahkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia dan budaya di tingkat nasional, melalui pendidikan, pelatihan, serta pembinaan yang memperkuat kompetensi sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya lokal. Dengan membangun masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter, Kutai Kartanegara mampu menempatkan diri sebagai daerah yang tidak hanya unggul dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga dalam kualitas sosial dan budaya. Hal ini sejalan dengan misi yang menekankan pemenuhan pelayanan dasar sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.

Selain penguatan kapasitas SDM, strategi ketahanan sosial juga diwujudkan melalui promosi identitas budaya daerah secara luas. Warisan budaya lokal perlu diangkat menjadi bagian dari kebanggaan bersama sekaligus sebagai daya tarik di kancah nasional maupun internasional. Promosi budaya ini dapat dilakukan melalui festival, pameran, maupun platform digital, sehingga identitas daerah semakin dikenal dan menjadi modal sosial dalam memperkokoh solidaritas masyarakat. Dengan demikian, budaya bukan hanya warisan yang dilestarikan, tetapi juga aset strategis dalam membangun ketahanan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Melalui kombinasi peningkatan daya saing SDM dan promosi identitas budaya daerah, strategi ini akan memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kutai Kartanegara. Ketahanan sosial yang kokoh akan memastikan transformasi pembangunan berjalan lebih cepat, merata, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional; dan

Arah kebijakan peningkatan daya saing sumber daya manusia dan budaya di tingkat nasional difokuskan pada upaya membangun SDM yang unggul, kreatif, serta berkarakter kuat dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas daerah. Kebijakan ini mendorong pengembangan kapasitas individu melalui pendidikan berkualitas, pelatihan berbasis kompetensi, dan pemberdayaan komunitas budaya agar mampu bersaing dalam skala nasional

tanpa kehilangan akar kearifan lokalnya. Selain itu, pelestarian dan promosi budaya daerah dilakukan secara strategis sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan dan penguatan citra daerah di tingkat nasional. Langkah ini sejalan dengan strategi Pemantapan Ketahanan Sosial yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan, di mana pembangunan manusia dan budaya menjadi dua pilar utama dalam memperkuat kohesi sosial dan daya saing daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini turut mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, dengan menjadikan SDM dan budaya sebagai penggerak utama menuju kesejahteraan dan kemajuan Kutai Kartanegara.

2. Promosi identitas budaya daerah secara luas.

Arah kebijakan promosi identitas budaya daerah secara luas diarahkan untuk memperkuat kebanggaan dan kesadaran masyarakat terhadap jati diri budaya Kutai Kartanegara sekaligus memperkenalkan kekayaan nilai, tradisi, dan seni lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui kegiatan promosi budaya yang terintegrasi seperti festival daerah, pertukaran budaya, dan pemanfaatan media digital kebijakan ini bertujuan memperluas apresiasi publik terhadap warisan budaya lokal serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangannya. Upaya ini juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial melalui penguatan identitas kolektif yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Pemantapan Ketahanan Sosial yang Berkualitas, Inklusif, Berkeadilan, dan Berbudaya Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan, serta mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, di mana budaya menjadi kekuatan pemersatu dan pendorong utama pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

Misi 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru nonekstraktif, sebagai berikut.

a. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan

Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi ekonomi baru non-ekstraktif. Strategi ini diwujudkan melalui penetapan kawasan strategis pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), serta kawasan pangan, perikanan, perkotaan, dan perdesaan. Dengan perencanaan yang matang dan penataan ruang yang tepat, kawasan-kawasan tersebut akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, penguatan potensi usaha di sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diarahkan untuk menciptakan basis ekonomi rakyat yang kokoh dan inklusif. Melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan akses pasar, pelaku usaha lokal dapat lebih berdaya saing serta berkontribusi signifikan dalam hilirisasi sektor strategis daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan ini juga didorong dengan integrasi program lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi.

Sebagai penopang keberhasilan strategi tersebut, peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro menjadi prioritas dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan memperkuat UMKM. Dengan dukungan akses permodalan yang lebih mudah serta pemahaman manajemen usaha yang lebih baik, masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan misi yang menempatkan hilirisasi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan);

Arah kebijakan penetapan kawasan strategis pembangunan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), serta kawasan pangan, perikanan, perkotaan, dan perdesaan diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing, berkelanjutan, dan saling terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan potensi unggulan daerah melalui pengembangan sektor-sektor produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang mendorong investasi dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan strategi Pengembangan dan Penguatan Kawasan Ekonomi Potensial yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, di mana sinergi antara sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi motor utama transformasi ekonomi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara merata.

2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata; dan

Arah kebijakan penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan rantai nilai dan hilirisasi produk agar mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat. Sektor pertanian dan perikanan diarahkan menjadi basis ketahanan pangan daerah, sementara UMKM dan pariwisata dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kreatif yang memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Upaya ini selaras dengan strategi Pengembangan dan Penguatan Kawasan Ekonomi Potensial yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, yang menekankan kolaborasi lintas sektor dan wilayah untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro.

Arah kebijakan peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, dan wirausaha muda, agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran digital, serta kemudahan akses terhadap pembiayaan mikro dan lembaga keuangan inklusif, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi

rakyat yang tangguh dan berdaya saing. Langkah ini juga menjadi bagian penting dari strategi Pengembangan dan Penguatan Kawasan Ekonomi Potensial yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, dengan menumbuhkan wirausaha lokal yang berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berbasis potensi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang berorientasi pada kemandirian, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara.

b. Perluasan Pengembangan Perekonomian Kewilayahan Tematik untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat

Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik diarahkan untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Strategi ini dimulai dengan penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan yang terintegrasi, sehingga potensi lokal dapat dikembangkan sesuai karakteristik dan daya dukung wilayah. Dengan perencanaan ruang yang adaptif, kawasan-kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendukung hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan menjadi fokus utama dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya ini diperkuat dengan penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya, yang tidak hanya menggerakkan sektor ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai tradisi sebagai identitas daerah. Dengan demikian, pelaku usaha masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas jangkauan pasar.

Sebagai langkah inovatif, penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif akan menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan yang melibatkan multi pihak. Diarahkan untuk memperkuat model usaha yang ramah lingkungan, berbasis inovasi, dan mampu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan kombinasi antara penguatan sektor pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, strategi ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi non-ekstraktif yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan;

Arah kebijakan penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan difokuskan pada penataan dan optimalisasi pemanfaatan ruang yang berorientasi pada potensi unggulan daerah serta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui perencanaan yang terintegrasi, kebijakan ini bertujuan memastikan setiap kawasan memiliki fungsi dan arah pengembangan yang jelas sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan strategi Perluasan Pengembangan Perekonomian Kewilayahan Tematik untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat, yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pemanfaatan potensi kawasan secara produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, melalui pengelolaan ruang yang cerdas, inklusif, dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan;

Arah kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengelolaan sektor pertanian yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan produktivitas, penguatan infrastruktur pertanian, serta pembangunan sistem distribusi yang mampu menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan antarwilayah. Selain itu, pengembangan kawasan sentra pangan juga mendorong pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal melalui penerapan teknologi pertanian modern, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas. Upaya ini sejalan dengan strategi Perluasan Pengembangan Perekonomian Kewilayahan Tematik untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat, yang menekankan pembangunan ekonomi dari bawah melalui pemanfaatan potensi wilayah secara tematik dan inklusif. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, dengan menjadikan sektor pangan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

3. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya; dan

Arah kebijakan penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, dan pariwisata berbasis budaya lokal. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan skala lokal, promosi produk unggulan daerah, serta pengembangan destinasi wisata yang menonjolkan identitas dan kearifan masyarakat Kutai Kartanegara. Melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan infrastruktur ekonomi kreatif, kebijakan ini memperkuat ketahanan ekonomi berbasis komunitas. Langkah ini sejalan dengan strategi Perluasan Pengembangan Perekonomian Kewilayahan Tematik untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat, yang menekankan sinergi antarwilayah dan sektor untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berdaya saing. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

4. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif.

Arah kebijakan penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif diarahkan untuk membangun model pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Melalui pembentukan klaster percontohan, kebijakan ini berfokus pada integrasi sektor pertanian ramah lingkungan, energi terbarukan, industri kreatif, dan pariwisata berkelanjutan yang saling mendukung dalam menciptakan ekosistem ekonomi baru non-ekstraktif. Pendekatan ini juga menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal dalam mengembangkan produk bernilai tambah tinggi yang berbasis kearifan lokal dan inovasi teknologi. Upaya tersebut sejalan dengan strategi Perluasan Pengembangan Perekonomian Kewilayahan Tematik untuk Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan potensi wilayah secara tematik dan terpadu. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang tangguh, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

c. Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Inovatif dalam Mewujudkan Produk Lokal Masyarakat dan Hilirisasi Sektor Strategis

Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif menjadi langkah kunci dalam mendorong lahirnya produk lokal yang berdaya saing sekaligus mendukung hilirisasi sektor strategis daerah. Melalui program inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif, pemerintah daerah dapat menyediakan pendampingan, akses pembiayaan, serta dukungan teknis untuk mempercepat tumbuhnya wirausaha baru. Dengan demikian, pelaku usaha lokal akan lebih siap menghadapi tantangan pasar, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (*link and match*) menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia. Dengan menghadirkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, generasi muda serta tenaga kerja lokal dapat lebih adaptif, produktif, dan siap bersaing. Hal ini tidak hanya mendukung pengembangan UMKM, tetapi juga mempercepat hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang menjadi motor pembangunan ekonomi nonekstraktif.

Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pasar bagi pelaku usaha masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital akan mempercepat promosi, distribusi, dan penetrasi produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Dengan kombinasi antara inkubasi bisnis, penguatan vokasi, dan digitalisasi pemasaran, ekosistem kewirausahaan inovatif dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi fondasi kuat bagi transformasi ekonomi Kutai Kartanegara. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif;

Arah kebijakan inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif diarahkan untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui pembinaan terpadu, peningkatan kapasitas manajerial, dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal agar mampu menciptakan produk yang inovatif, berdaya saing, dan bernilai tambah tinggi. Kebijakan ini mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan komunitas kreatif dalam menyediakan akses terhadap pelatihan, teknologi, pemasaran digital, serta pembiayaan yang inklusif. Melalui program inkubasi, UMKM didorong untuk bertransformasi dari usaha konvensional menjadi pelaku ekonomi modern yang adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu berkontribusi pada hilirisasi sektor strategis daerah. Upaya ini sejalan dengan strategi Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Inovatif dalam Mewujudkan Produk Lokal Masyarakat dan Hilirisasi Sektor Strategis, yang berfokus pada pengembangan wirausaha produktif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang menumbuhkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (*link and match*); dan

Arah kebijakan pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (*link and match*) diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan siap kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pelaku industri, dan pemerintah dalam menyusun kurikulum berbasis kompetensi, menyediakan fasilitas pelatihan yang relevan, serta membuka peluang magang dan sertifikasi keahlian bagi peserta didik. Melalui

pendekatan ini, pelatihan vokasi tidak hanya menghasilkan tenaga kerja berkualitas, tetapi juga menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif dan mampu berkontribusi dalam hilirisasi sektor-sektor strategis daerah. Upaya ini sejalan dengan strategi Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Inovatif dalam Mewujudkan Produk Lokal Masyarakat dan Hilirisasi Sektor Strategis, yang berfokus pada penguatan keterhubungan antara pendidikan, industri, dan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis keterampilan dan kreativitas. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital.

Arah kebijakan pemasaran produk unggulan desa berbasis digital diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal melalui pemanfaatan teknologi informasi serta transformasi digital di tingkat komunitas. Kebijakan ini mendorong pelaku UMKM, kelompok tani, pengrajin, dan pelaku ekonomi kreatif di desa agar mampu memasarkan produknya secara efektif melalui platform daring, e-commerce, dan media sosial dengan dukungan pelatihan digital marketing serta pendampingan berkelanjutan. Selain meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, kebijakan ini juga bertujuan memperkuat jejaring antar pelaku usaha desa dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Langkah ini sejalan dengan strategi Penguatan Ekosistem Kewirausahaan Inovatif dalam Mewujudkan Produk Lokal Masyarakat dan Hilirisasi Sektor Strategis, yang menekankan pentingnya inovasi, teknologi, dan konektivitas dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang mendorong kemandirian ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

d. Perwujudan Ekonomi Mandiri Berbasis Produk Unggulan sebagai Fondasi Transformasi Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau

Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan diarahkan untuk memperkuat posisi Kutai Kartanegara sebagai pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang berdaya saing tinggi. Strategi utama dilakukan melalui hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan budaya agar menghasilkan produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Hilirisasi ini bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tawar pelaku usaha lokal, membuka lapangan kerja baru, serta memastikan bahwa potensi daerah dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah, termasuk kemitraan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi instrumen penting dalam memperluas jejaring pasar dan mempercepat arus distribusi barang serta jasa. Kolaborasi lintas wilayah akan menciptakan sinergi ekonomi yang saling menguntungkan, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan daya saing kawasan. Dengan integrasi yang baik, Kutai Kartanegara dapat mengambil peran strategis sebagai penopang ekonomi regional sekaligus memperluas akses bagi pelaku usaha kecil, menengah, maupun besar.

Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan menjadi prioritas. Iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berbasis keberlanjutan akan mendorong masuknya investasi ramah lingkungan di sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau. Investasi hijau ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan sosial, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dengan

strategi ini, Kutai Kartanegara mampu mewujudkan ekonomi mandiri yang berbasis produk unggulan sekaligus berkontribusi pada transformasi menuju daerah yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah;

Arah kebijakan hilirisasi hasil pertanian, kelautan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan rantai nilai yang menghubungkan petani, nelayan, pelaku industri, dan pelaku ekonomi kreatif dalam satu ekosistem ekonomi terpadu. Selain berfokus pada peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, kebijakan ini juga mendorong pemanfaatan potensi budaya lokal sebagai inspirasi dalam pengembangan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing di pasar nasional maupun global. Langkah ini sejalan dengan strategi Perwujudan Ekonomi Mandiri Berbasis Produk Unggulan sebagai Fondasi Transformasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau, yang menempatkan hilirisasi sebagai motor utama penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif, yang menumbuhkan nilai tambah, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN; dan

Arah kebijakan penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra Ibu Kota Negara (IKN) diarahkan untuk menciptakan sinergi pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan antara Kutai Kartanegara dan wilayah sekitarnya, dengan menjadikan potensi daerah sebagai bagian penting dari rantai pasok dan sistem pendukung ekonomi nasional. Kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan konektivitas infrastruktur, harmonisasi kebijakan antarwilayah, serta kolaborasi dalam pengembangan sektor-sektor strategis. Melalui integrasi ini, Kutai Kartanegara diharapkan mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung IKN, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai lumbung pangan dan pusat inovasi ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Langkah ini sejalan dengan strategi Perwujudan Ekonomi Mandiri Berbasis Produk Unggulan sebagai Fondasi Transformasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan kemandirian ekonomi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan.

Arah kebijakan peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan ramah lingkungan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Kebijakan ini berfokus pada penyederhanaan proses perizinan, peningkatan pelayanan investasi berbasis digital, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan ekonomi hijau. Melalui pendekatan ini, Kutai Kartanegara diharapkan menjadi destinasi investasi yang menarik sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Upaya ini juga memperkuat transformasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan. Kebijakan ini selaras dengan strategi Perwujudan Ekonomi Mandiri Berbasis

Produk Unggulan sebagai Fondasi Transformasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau, yang menempatkan investasi hijau sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berkelanjutan, berkeadilan, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

e. Penguatan Rantai Nilai dan Akselerasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah yang Ramah Lingkungan Guna Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan

Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi ini dilakukan melalui industrialisasi sektor unggulan, terutama pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif, dengan menitikberatkan pada pengembangan Kawasan Strategis hijau. Dengan pendekatan ini, hasil produksi lokal tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan produk kreatif menjadi fokus utama untuk memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya ini diperkuat melalui peningkatan kualitas produksi, standardisasi mutu, serta penguatan promosi berbasis digital dan jejaring perdagangan global. Dengan demikian, pelaku usaha lokal memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar luar negeri, sekaligus menjadikan Kutai Kartanegara sebagai basis ekonomi non-ekstraktif yang kompetitif.

Transformasi menuju ekonomi rendah karbon menjadi arah pembangunan yang tidak terpisahkan. Penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan akan memastikan bahwa akselerasi hilirisasi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan. Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekologi, sekaligus memperkuat fondasi transformasi menuju daerah yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau;

Arah kebijakan industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan kawasan strategis hijau diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi Kutai Kartanegara menuju sistem industri yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan rantai nilai melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Pengembangan kawasan strategis hijau dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip tata ruang berkelanjutan, efisiensi energi, dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Langkah ini sejalan dengan strategi Penguatan Rantai Nilai dan Akselerasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah yang Ramah Lingkungan Guna Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan, yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari pembangunan industri daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang tangguh, hijau, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif; dan

Arah kebijakan peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan produk kreatif diarahkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk unggulan Kutai Kartanegara di tingkat nasional maupun internasional

melalui penguatan hilirisasi, inovasi, dan penerapan standar mutu global. Kebijakan ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi, sertifikasi kualitas, dan penguatan branding produk lokal yang mencerminkan identitas daerah sekaligus memenuhi prinsip keberlanjutan. Selain itu, pengembangan infrastruktur logistik dan dukungan regulasi ekspor ramah lingkungan turut didorong untuk memastikan efisiensi rantai pasok serta keberlanjutan industri lokal. Upaya ini sejalan dengan strategi Penguatan Rantai Nilai dan Akselerasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah yang Ramah Lingkungan Guna Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan, yang berfokus pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk daerah di pasar global. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

3. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Arah kebijakan transformasi menuju ekonomi rendah karbon diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi daerah yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca tanpa mengurangi produktivitas dan daya saing daerah. Kebijakan ini menitikberatkan pada penerapan prinsip ekonomi hijau dalam setiap rantai nilai sektor unggulan. Melalui pemanfaatan teknologi bersih, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat, Kutai Kartanegara diarahkan menjadi pelopor ekonomi hijau di Kalimantan Timur. Upaya ini sejalan dengan strategi Penguatan Rantai Nilai dan Akselerasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah yang Ramah Lingkungan Guna Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan, yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam memperkuat struktur ekonomi lokal. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non-ekstraktif yang berdaya saing, hijau, dan menyejahterakan masyarakat Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Misi 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara, sebagai berikut.

a. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Serta Infrastruktur Digitalisasi Pelayanan Publik yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif

Penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif, konsisten, dan implementatif. Strategi ini diwujudkan melalui penyusunan sistem perencanaan–penganggaran terpadu yang selaras antara visi pembangunan daerah dengan alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan adanya integrasi perencanaan dan penganggaran, setiap program pembangunan dapat lebih terukur, transparan, serta menjawab kebutuhan prioritas masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, penataan kelembagaan daerah dilakukan untuk memastikan organisasi perangkat daerah mampu beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan baru. Penataan ini mencakup penyederhanaan struktur, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembentukan unit-unit kerja yang lebih responsif terhadap isu strategis daerah. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur digitalisasi pelayanan publik menjadi

prioritas untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan kombinasi penguatan regulasi, penataan kelembagaan, serta digitalisasi layanan publik, strategi ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, dan berintegritas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kapasitas aparatur sipil negara dalam mengawal transformasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan sistem perencanaan- penganggaran terpadu; dan

Arah kebijakan penyusunan sistem perencanaan-penganggaran terpadu diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui integrasi antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis kinerja. Kebijakan ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi pembangunan daerah, prioritas program, dan alokasi sumber daya agar setiap kebijakan publik dapat lebih tepat sasaran, efisien, serta berorientasi pada hasil yang terukur. Penerapan sistem ini juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dalam proses perencanaan dan monitoring, sehingga memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Langkah ini sejalan dengan strategi Penguatan Regulasi dan Tata Kelola serta Infrastruktur Digitalisasi Pelayanan Publik yang Adaptif, Konsisten, dan Implementatif, yang menekankan reformasi birokrasi berbasis data dan inovasi digital. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menuju birokrasi yang adaptif dan berdaya saing di Kutai Kartanegara.

2. Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru.

Arah kebijakan penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi pemerintahan yang efisien, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kebijakan ini berfokus pada penyesuaian fungsi, peran, dan kewenangan perangkat daerah agar selaras dengan arah pembangunan daerah dan prioritas strategis Kutai Kartanegara, termasuk penguatan koordinasi lintas sektor serta efektivitas pelaksanaan program. Proses penataan kelembagaan juga didukung oleh digitalisasi tata kelola dan penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi, guna meningkatkan kinerja birokrasi dan transparansi layanan publik. Langkah ini sejalan dengan strategi Penguatan Regulasi dan Tata Kelola serta Infrastruktur Digitalisasi Pelayanan Publik yang Adaptif, Konsisten, dan Implementatif, yang menekankan pentingnya birokrasi modern berbasis inovasi dan efisiensi. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berintegritas serta peningkatan kompetensi aparatur sipil negara dalam menjawab tantangan pembangunan yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

b. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur serta Penguatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur merupakan langkah fundamental dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan berbasis teknologi dan inovasi. Aparatur yang berkualitas akan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, memberikan pelayanan publik yang optimal, serta mendukung tata kelola kelembagaan publik yang lebih efektif dan efisien.

Penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk memastikan setiap unit kerja dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara maksimal. Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kebutuhan pembangunan serta tantangan baru yang dihadapi daerah. Sejalan dengan itu, penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja menjadi instrumen penting untuk menilai capaian program dan memastikan setiap kegiatan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan strategi ini, tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil pembangunan. Kombinasi antara ASN yang kompeten, kelembagaan yang kuat, serta mekanisme akuntabilitas yang berbasis kinerja akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung terwujudnya misi Terbaik dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik; dan

Arah kebijakan peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia aparatur serta optimalisasi kinerja kelembagaan pemerintahan. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas ASN melalui pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan karier yang transparan, serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan dilakukan dengan mendorong efisiensi struktur organisasi, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Langkah ini sejalan dengan strategi Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur serta Penguatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, yang bertujuan memperkuat fondasi birokrasi modern berbasis kinerja dan inovasi. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan terpercaya, sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara.

2. Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja.

Arah kebijakan penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pemerintah daerah terlaksana secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini menitikberatkan pada penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan yang terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil melalui penggunaan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kinerja dan evaluasi pembangunan juga menjadi prioritas, guna meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Langkah ini sejalan dengan strategi Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur serta Penguatan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, yang menekankan pentingnya aparatur yang kompeten dan lembaga yang kuat dalam mendukung akuntabilitas publik. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja, guna meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas pembangunan di Kutai Kartanegara.

c. Penerapan Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan Sistem Pengawasan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan digitalisasi layanan publik menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi, sehingga mampu memangkas proses birokrasi yang berbelit serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah daerah dapat memperkuat inovasi pelayanan yang konsisten dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang transparan, mudah diakses, dan responsif. Sistem ini berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun laporan dugaan penyimpangan, sehingga dapat segera ditindaklanjuti secara akuntabel. Dengan mekanisme pengaduan yang kuat, pemerintah daerah dapat memperbaiki kualitas layanan, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

Dengan sinergi antara digitalisasi layanan publik dan sistem pengawasan yang partisipatif, strategi ini mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berintegritas. Hal ini selaras dengan misi Terbaik, yakni menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan akuntabel sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara dalam mengawal transformasi pembangunan daerah. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Digitalisasi layanan publik; dan

Arah kebijakan digitalisasi layanan publik diarahkan untuk mewujudkan sistem pelayanan pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, integrasi data antarperangkat daerah, serta penerapan layanan publik berbasis elektronik (e-government) yang mudah diakses, cepat, dan akuntabel. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, sehingga meningkatkan transparansi, mencegah penyimpangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Selain itu, penguatan kapasitas ASN di bidang literasi digital dan inovasi teknologi menjadi bagian integral dari kebijakan ini untuk memastikan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah ini sejalan dengan strategi Penerapan Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan Sistem Pengawasan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, yang menekankan efisiensi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan terpercaya melalui transformasi digital sebagai fondasi pelayanan publik di Kutai Kartanegara.

2. Penguatan sistem pengaduan.

Arah kebijakan penguatan sistem pengaduan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui penyediaan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan terintegrasi secara digital. Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjadikan sistem pengaduan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui penerapan teknologi digital, sistem pengaduan dikembangkan agar lebih efisien, terpantau secara real-time, serta mampu memberikan umpan balik yang jelas dan terukur kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur

dalam menangani laporan publik dengan profesionalisme dan integritas juga menjadi prioritas untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Langkah ini sejalan dengan strategi Penerapan Digitalisasi Layanan Publik dan Penguatan Sistem Pengawasan untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, yang menekankan keterbukaan dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna membangun birokrasi yang melayani dan dipercaya masyarakat Kutai Kartanegara.

d. Perwujudan Tata Kelola dan Sistem Evaluasi Pembangunan yang Adaptif, Konsisten, serta Implementatif sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Pembangunan

Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Strategi ini diwujudkan dengan mendorong pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pembangunan, sehingga setiap program dan kegiatan dapat lebih transparan serta sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang dicapai bersama.

Pemanfaatan aplikasi dashboard lintas sektor menjadi terobosan strategis untuk memperkuat integrasi data, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Melalui sistem digital ini, pemerintah daerah dapat memantau capaian program secara real time, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, dan memastikan tindak lanjut kebijakan berjalan secara konsisten. Dashboard ini juga menjadi media akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melihat perkembangan pembangunan secara terbuka.

Dengan sinergi antara pelibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital, sistem evaluasi pembangunan diharapkan semakin responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini sejalan dengan misi Terbaik, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengawal transformasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan; dan

Arah kebijakan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan bersama. Melalui mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik, pengawasan berbasis komunitas, dan pemanfaatan platform digital untuk pelaporan serta pemantauan pembangunan, masyarakat didorong untuk aktif berperan dalam menjaga integritas dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Langkah ini juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola aspirasi serta masukan publik secara profesional dan terbuka. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Tata Kelola dan Sistem Evaluasi Pembangunan yang Adaptif, Konsisten, serta Implementatif sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Pembangunan, yang menekankan kolaborasi dan keterbukaan dalam manajemen pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, partisipatif, dan berintegritas, sebagai landasan peningkatan kualitas pembangunan di Kutai Kartanegara.

2. Aplikasi dashboard lintas sektor.

Arah kebijakan pengembangan aplikasi dashboard lintas sektor diarahkan untuk memperkuat sistem tata kelola dan evaluasi pembangunan yang terintegrasi, transparan, serta berbasis data secara real-time. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menghubungkan berbagai perangkat daerah agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan secara sinkron, efisien, dan terukur. Melalui dashboard lintas sektor, pemerintah daerah dapat memantau capaian indikator kinerja, mengidentifikasi kendala, serta mengambil keputusan strategis secara cepat dan berbasis evidensi. Selain meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi, kebijakan ini juga mendorong penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data dan analisis pembangunan secara profesional. Langkah ini sejalan dengan strategi Perwujudan Tata Kelola dan Sistem Evaluasi Pembangunan yang Adaptif, Konsisten, serta Implementatif sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Pembangunan, yang menempatkan digitalisasi dan integrasi data sebagai pilar utama peningkatan kinerja birokrasi. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil, guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kutai Kartanegara.

e. Penguatan Kolaborasi Multipihak (Pemerintah, Masyarakat, Swasta) dalam Tata Kelola Pembangunan

Penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Strategi ini mengedepankan pola kerja kolaboratif berbasis pentahapan, di mana setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi sesuai kapasitas masing-masing. Dengan melibatkan unsur masyarakat dan dunia usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan nyata, serta menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Selain itu, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan tata kelola pembangunan yang inklusif. Kolaborasi multipihak juga mencakup sinergi dalam menjaga lingkungan yang aman, kondusif, dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan, komunitas lokal, dan pelaku usaha dapat membangun sistem kewaspadaan dini serta program berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan sosial.

Mengedepankan tata kelola yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif, serta menjamin stabilitas keamanan wilayah, strategi ini memperkuat misi Terbaik dalam menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan mampu menggerakkan seluruh potensi daerah. Sinergi lintas sektor akan memastikan pembangunan berjalan lebih konsisten, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan; dan

Arah kebijakan tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan bertahap dan terukur dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah. Melalui tata kelola yang terbuka dan partisipatif, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada hasil. Selain itu, peningkatan kapasitas dan

profesionalisme aparatur juga menjadi kunci dalam mewujudkan birokrasi yang kreatif, responsif, dan mampu menjadi fasilitator kolaborasi lintas sektor. Kebijakan ini sejalan dengan strategi Penguatan Kolaborasi Multipihak (Pemerintah, Masyarakat, Swasta) dalam Tata Kelola Pembangunan, yang menempatkan kemitraan sebagai instrumen utama keberhasilan pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan kolaboratif menuju pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

2. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

Arah kebijakan peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis sebagai prasyarat utama bagi terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi multipihak antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga ketenteraman sosial, mencegah potensi konflik, serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap keamanan wilayah. Pendekatan partisipatif dan preventif diutamakan melalui peningkatan kapasitas lembaga keamanan daerah, penguatan peran masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk deteksi dini dan penanganan cepat terhadap potensi gangguan ketertiban. Upaya ini sejalan dengan strategi Penguatan Kolaborasi Multipihak (Pemerintah, Masyarakat, Swasta) dalam Tata Kelola Pembangunan, yang menempatkan sinergi dan gotong royong sebagai fondasi stabilitas daerah. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas, serta membangun ketahanan sosial wilayah Kutai Kartanegara menuju pembangunan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Misi 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, sebagai berikut.

a. Pengembangan Kualitas Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Partisipasi Multipihak dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Strategi ini diawali dengan penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan potensi bencana, sehingga pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan, mitigasi risiko, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan data yang akurat, upaya perlindungan lingkungan dapat lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat pendidikan karakter masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Selain itu, penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap kawasan dikelola sesuai fungsi ekologis dan sosialnya. Kebijakan zonasi ini akan memandu arah pembangunan agar tetap selaras dengan daya dukung lingkungan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Dengan adanya panduan per zona, pembangunan dapat berlangsung terarah, adaptif, dan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, serta ekologi.

Partisipasi multi pihak pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas lokal juga diperkuat untuk memastikan perlindungan lingkungan berjalan efektif. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai warisan bersama. Dengan

strategi ini, Kutai Kartanegara mampu mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan misi dalam mengembangkan pendidikan karakter dan menjaga kelestarian lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana; dan

Arah kebijakan penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana diarahkan untuk membangun sistem informasi lingkungan yang komprehensif, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi risiko bencana di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengumpulan dan pengelolaan data spasial terkait kondisi ekosistem, sumber daya alam, serta potensi kerentanan wilayah terhadap bencana alam, guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis evidensi. Melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga riset, masyarakat, dan sektor swasta, penyusunan basis data ini juga menjadi instrumen penguatan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keseimbangan alam. Langkah ini sejalan dengan strategi Pengembangan Kualitas Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Partisipasi Multipihak dalam Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menempatkan data dan kolaborasi sebagai fondasi kebijakan ekologis yang berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui pengelolaan lingkungan yang cerdas, partisipatif, dan berwawasan keberlanjutan demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.

2. Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara diarahkan untuk menciptakan tata kelola lingkungan yang terencana, berbasis potensi dan karakteristik ekologis masing-masing wilayah, serta mendukung keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian alam. Kebijakan ini menitikberatkan pada penetapan zona perlindungan lingkungan yang meliputi kawasan konservasi, kawasan budidaya, serta kawasan rawan bencana, dengan pendekatan pengelolaan yang adaptif terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melalui penyusunan kebijakan zonasi yang terintegrasi, pemerintah daerah berupaya mendorong keterlibatan multipihak—termasuk masyarakat adat, akademisi, dan pelaku usaha—dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial-ekonomi lingkungan. Upaya ini sejalan dengan strategi Pengembangan Kualitas Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Partisipasi Multipihak dalam Perlindungan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi aktif seluruh elemen dalam menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai ruang belajar bersama dalam membangun peradaban hijau yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara.

b. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat serta Pengelolaan Limbah Secara Terpadu dan Bertanggung Jawab

Peningkatan ketahanan lingkungan merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan sekaligus menjaga daya dukung ekosistem. Strategi ini diwujudkan melalui pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis, baik berupa pemulihan lahan terdegradasi, perlindungan kawasan resapan air,

maupun penghijauan wilayah rawan bencana. Upaya rehabilitasi ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter masyarakat agar semakin peduli pada pentingnya kelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.

Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat ketahanan lingkungan. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, permasalahan persampahan dapat ditangani secara lebih efektif. Pendekatan ini juga didukung dengan pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab, sehingga potensi pencemaran dapat ditekan dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan sampah yang produktif.

Dengan mengintegrasikan rehabilitasi lingkungan kritis dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, strategi ini tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga memperkuat karakter masyarakat yang lebih peduli lingkungan. Sejalan dengan misi Terbaik, langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga warisan ekologis bagi generasi mendatang. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis; dan

Arah kebijakan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis diarahkan untuk memulihkan fungsi ekosistem yang mengalami degradasi akibat aktivitas manusia maupun bencana alam, melalui pendekatan terpadu yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada kegiatan reforestasi, revegetasi, pengendalian erosi, serta konservasi sumber daya air dan tanah untuk mengembalikan keseimbangan ekologis serta mendukung ketahanan lingkungan daerah. Pelibatan masyarakat lokal, lembaga adat, dan dunia usaha menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi, dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian alam. Selain itu, integrasi dengan pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu turut memperkuat efektivitas program rehabilitasi, menjadikannya bagian dari ekosistem pengelolaan lingkungan yang holistik. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat serta Pengelolaan Limbah Secara Terpadu dan Bertanggung Jawab, yang menekankan kolaborasi dan kesadaran lingkungan sebagai dasar keberlanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan rehabilitasi lingkungan sebagai wujud nyata harmoni antara manusia dan alam di Kutai Kartanegara.

2. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Arah kebijakan penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pemanfaatan kembali. Kebijakan ini menekankan pentingnya perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta penerapan teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana, pelatihan, dan dukungan kelembagaan agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan efektif di tingkat komunitas dan desa. Selain memperkuat ketahanan lingkungan, kebijakan ini juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengelolaan sampah produktif yang melibatkan UMKM dan kelompok masyarakat. Langkah ini sejalan dengan strategi Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat serta Pengelolaan Limbah Secara

Terpadu dan Bertanggung Jawab, yang menempatkan kolaborasi dan kesadaran ekologis sebagai inti keberlanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menumbuhkan budaya peduli lingkungan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kutai Kartanegara.

c. Pengendalian Pencemaran serta Optimalisasi Kualitas Daya Dukung Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pengendalian pencemaran dan optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Upaya ini menekankan pentingnya menjaga kualitas air, udara, dan tanah agar tetap mendukung kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi. Dengan pengendalian pencemaran yang konsisten, pembangunan dapat berlangsung tanpa mengurangi kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya dan jasa ekosistem yang vital bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi diperkuat penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana menjadi instrumen penting dalam melindungi daya dukung lingkungan sekaligus keselamatan masyarakat. Sistem ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi bencana, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Selain melindungi masyarakat, peringatan dini juga menjadi sarana edukasi yang memperkuat pendidikan karakter tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kepedulian terhadap lingkungan berbasis kearifan lokal.

Dengan kombinasi pengendalian pencemaran, optimalisasi daya dukung lingkungan, dan penerapan sistem peringatan dini, strategi ini mendukung terwujudnya pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi yaitu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pendidikan karakter masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana.

Arah kebijakan penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam melalui pemanfaatan teknologi informasi serta kearifan lokal dalam mitigasi risiko. Kebijakan ini menekankan pentingnya pengembangan sistem pemantauan dan deteksi dini yang terintegrasi, berbasis data spasial dan sensor lingkungan, agar peringatan dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat di wilayah rawan. Selain itu, pelibatan masyarakat, lembaga adat, dan dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam membangun budaya tanggap bencana serta memperkuat edukasi lingkungan yang berakar pada nilai-nilai lokal. Penerapan sistem ini juga mendukung pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas daya dukung lingkungan melalui perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi dan keberlanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Pengendalian Pencemaran serta Optimalisasi Kualitas Daya Dukung Lingkungan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, guna menciptakan Kutai Kartanegara yang tangguh, aman, dan selaras dengan alam.

d. Perwujudan Peran Serta Multipihak dalam Pengendalian Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Pengembangan Potensi Energi Ramah Lingkungan

Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Strategi ini dapat diwujudkan melalui penerapan skema insentif perlindungan lingkungan swadaya yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, swasta, dan komunitas lokal dalam menjaga kelestarian alam. Insentif ini dapat berupa dukungan teknis, akses pembiayaan hijau, maupun penghargaan bagi inisiatif perlindungan lingkungan, sehingga tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga sumber daya alam berbasis kearifan lokal.

Penguatan tata ruang ekologis dan penetapan zonasi konservasi menjadi instrumen strategis dalam mencegah kerusakan lingkungan dan mengelola pemanfaatan ruang secara lebih berkelanjutan. Melalui tata ruang yang memperhatikan aspek ekologi, kawasan lindung dan konservasi dapat dijaga, sementara kawasan pemanfaatan dapat dikelola sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Dengan pendekatan ini, pembangunan tetap berjalan, namun tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan dan fungsi ekosistem.

Strategi ini juga mencakup pengembangan potensi energi ramah lingkungan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, biomassa, dan mikrohidro, dapat mendukung kebutuhan energi masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan sinergi peran multipihak, insentif lingkungan, tata ruang ekologis, serta energi bersih, Kutai Kartanegara dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan selaras dengan misi Terbaik dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya; dan

Arah kebijakan skema insentif perlindungan lingkungan swadaya diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, lembaga adat, dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pendekatan berbasis penghargaan dan tanggung jawab bersama. Kebijakan ini berfokus pada pemberian insentif baik dalam bentuk bantuan teknis, akses pembiayaan hijau, maupun pengakuan sosial bagi individu, kelompok, atau komunitas yang berinisiatif melaksanakan kegiatan konservasi, reboisasi, pengelolaan sampah, atau pemanfaatan energi terbarukan secara mandiri. Pendekatan ini memperkuat semangat gotong royong dan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam, sekaligus menjadi instrumen efektif untuk mengurangi ancaman kerusakan lingkungan dari aktivitas manusia. Upaya tersebut sejalan dengan strategi Perwujudan Peran Serta Multipihak dalam Pengendalian Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Pengembangan Potensi Energi Ramah Lingkungan, yang menekankan kolaborasi dan inovasi dalam pelestarian ekosistem. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan membangun budaya ekologis masyarakat Kutai Kartanegara yang mandiri, sadar lingkungan, dan berkelanjutan.

2. Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi.

Arah kebijakan penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi diarahkan untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui penataan ruang yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem. Kebijakan ini menekankan pentingnya penetapan zona konservasi dan kawasan lindung yang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, melindungi sumber daya alam, serta mengendalikan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam

pelaksanaannya, kebijakan ini mendorong kolaborasi multipihak melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga adat, akademisi, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa perencanaan tata ruang berlandaskan data ilmiah, kearifan lokal, serta prinsip pelestarian jangka panjang. Selain itu, penerapan energi ramah lingkungan dan praktik pembangunan hijau di dalam tata ruang juga menjadi bagian dari upaya mengurangi tekanan ekologis. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Peran Serta Multipihak dalam Pengendalian Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Pengembangan Potensi Energi Ramah Lingkungan, yang menempatkan kolaborasi dan kesadaran ekologis sebagai kunci pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan tata ruang ekologis sebagai instrumen utama menuju keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam di Kutai Kartanegara.

e. Penguatan Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan dan Rendah Karbon untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Strategi ini diwujudkan melalui implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif, dengan penerapan teknologi efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta penerapan prinsip ekonomi hijau dalam setiap aktivitas pembangunan. Upaya ini tidak hanya menekan emisi karbon, tetapi juga menanamkan pendidikan karakter masyarakat untuk lebih peduli terhadap penggunaan energi yang bijak dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Selain itu, perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor menjadi kunci dalam menjaga daya dukung lingkungan dan menguatkan komitmen terhadap pembangunan hijau. Pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat perlu bersinergi dalam melaksanakan program konservasi, baik melalui perlindungan hutan, rehabilitasi kawasan kritis, maupun pemeliharaan ekosistem pesisir dan perairan. Dengan partisipasi lintas sektor, konservasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan kolektif untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

Kombinasi implementasi pembangunan rendah karbon dan perluasan program konservasi, Kutai Kartanegara dapat memperkuat posisinya sebagai daerah yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Strategi ini sejalan dengan misi Terbaik, yaitu mengintegrasikan pelestarian lingkungan dengan pembentukan karakter masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif; dan

Arah kebijakan implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pengurangan emisi karbon serta efisiensi penggunaan sumber daya alam. Kebijakan ini menitikberatkan pada penerapan prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, dengan mendorong penggunaan energi terbarukan, teknologi bersih, serta praktik industri dan pertanian ramah lingkungan. Pembangunan di kawasan strategis dan produktif dirancang agar tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi

pembangunan rendah karbon berbasis kearifan lokal, yang menghormati nilai-nilai budaya dan keberlanjutan alam Kutai Kartanegara. Kebijakan ini sejalan dengan strategi Penguatan Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan dan Rendah Karbon untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, yang menempatkan transisi energi bersih sebagai fondasi utama pembangunan masa depan. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan membangun Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh, hijau, dan berdaya saing tinggi.

2. Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor.

Arah kebijakan perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor diarahkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi prinsip konservasi dan penggunaan energi ramah lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan, baik di sektor pertanian, industri, pariwisata, maupun jasa, sehingga setiap sektor menjadi bagian aktif dari upaya menurunkan emisi karbon dan menjaga daya dukung ekosistem. Melalui penerapan praktik berkelanjutan dan inovasi hijau, program konservasi diharapkan tidak hanya melindungi sumber daya alam, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan strategi Penguatan Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan dan Rendah Karbon untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, yang menempatkan kolaborasi multipihak sebagai kunci dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Dengan demikian, arah kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal, dengan menjadikan konservasi sebagai gerakan kolektif menuju masa depan Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, tangguh, dan berbudaya ekologis.

Misi 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, sebagai berikut.

a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Konektivitas dan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi yang Mendukung Ketahanan Wilayah

Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif. Strategi ini diarahkan pada penyelesaian kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Dengan pemerataan pembangunan jalan, jembatan, jaringan transportasi, energi, dan air bersih, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar serta aktivitas ekonomi.

Selain memperluas konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing daerah, dan membuka peluang investasi baru. Infrastruktur yang merata dan berkeadilan akan memperkuat ketahanan wilayah, karena mampu mendukung pergerakan barang, jasa, dan orang secara lebih cepat, aman, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan misi Terbaik, yaitu menghadirkan fondasi pembangunan kewilayahan yang adil dan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun mendukung keberlanjutan, memperkuat kohesi sosial, dan mempercepat transformasi

ekonomi. Infrastruktur kewilayahan yang terencana dengan baik akan menjadi pendorong terciptanya wilayah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pembangunan masa depan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.

Arah kebijakan penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara diarahkan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kebijakan ini mencakup percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi antarwilayah, guna memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur dasar juga dirancang agar mampu meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Selain memperhatikan aspek teknis, kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan sinergi antarlevel pemerintahan dalam pelaksanaannya. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Pembangunan Prasarana dan Sarana Konektivitas dan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi yang Mendukung Ketahanan Wilayah, yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pemerataan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, guna membangun Kutai Kartanegara yang maju, inklusif, dan tangguh secara berkelanjutan.

b. Peningkatan Daya Jangkau Infrastruktur Kawasan dan Layanan Dasar yang Diarahkan Mendukung Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan

Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar diarahkan untuk mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan di Kutai Kartanegara. Strategi ini mencakup peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada kawasan pangan, wisata, dan perikanan sebagai sektor strategis yang menopang kemandirian ekonomi daerah. Dengan infrastruktur yang memadai, kawasan-kawasan tersebut akan lebih produktif, mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta membuka akses pasar yang lebih luas. Hal ini juga berfungsi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi fokus penting agar masyarakat di wilayah sekitar memiliki akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya memastikan pemerataan pelayanan dasar, tetapi juga mempersiapkan desa penyangga agar mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru. Layanan dasar yang kuat akan memperkuat kualitas sumber daya manusia serta ketahanan sosial masyarakat lokal.

Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya dalam membangun infrastruktur dan layanan dasar yang merata, inklusif, dan berkeadilan. Peningkatan daya jangkau infrastruktur dan layanan dasar tidak hanya memperkuat fondasi pembangunan kewilayahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa transformasi pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan; dan

Arah kebijakan peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan daya saing wilayah melalui penyediaan prasarana yang mendukung produktivitas sektor unggulan daerah secara berkelanjutan. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jaringan irigasi, pelabuhan perikanan, fasilitas wisata, serta sarana distribusi hasil pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi lokal. Upaya ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal, agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan sumber daya alam. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Peningkatan Daya Jangkau Infrastruktur Kawasan dan Layanan Dasar yang Diarahkan Mendukung Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan, yang menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai kunci percepatan pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, guna menciptakan wilayah Kutai Kartanegara yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN.

Arah kebijakan peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN diarahkan untuk memperkuat kapasitas wilayah perdesaan dalam mendukung dinamika pembangunan nasional sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan strategis tersebut. Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan akses dan mutu layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan konektivitas transportasi di desa-desa penyangga agar mampu bertransformasi menjadi wilayah yang produktif, tangguh, dan berdaya saing. Pembangunan layanan dasar ini juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal yang selaras dengan arah pembangunan IKN, sehingga menciptakan sinergi wilayah yang saling menguatkan. Selain itu, pelibatan masyarakat dan pemerintah desa menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi lokal. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Peningkatan Daya Jangkau Infrastruktur Kawasan dan Layanan Dasar yang Diarahkan Mendukung Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan, yang menempatkan desa sebagai basis penting dalam pembangunan inklusif. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, menuju terciptanya desa penyangga IKN yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di Kutai Kartanegara.

c. Penguatan Sistem Transportasi dan Logistik serta Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Inklusif dan Berdaya Saing

Penguatan sistem transportasi dan logistik serta pembangunan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Strategi ini diwujudkan melalui modernisasi desa dengan konsep smart village, yang mengintegrasikan akses internet, sistem layanan digital, dan pemanfaatan energi alternatif. Dengan transformasi digital di tingkat desa, layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sekaligus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan diarahkan untuk memperlancar distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat. Peningkatan kualitas jaringan transportasi darat, laut, dan sungai serta pengembangan simpul logistik yang efisien akan menurunkan biaya distribusi dan memperluas jangkauan pasar produk lokal. Dengan konektivitas yang lebih baik, kawasan pangan, wisata, dan perikanan dapat saling terhubung, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkeadilan.

Melalui kombinasi modernisasi desa berbasis *smart village* dan penguatan konektivitas antar kawasan, Kutai Kartanegara dapat membangun infrastruktur kewilayahan yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing. Strategi ini tidak hanya memperkuat ketahanan wilayah, tetapi juga memastikan bahwa transformasi pembangunan berbasis kewilayahan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Modernisasi desa melalui *smart village* (internet, sistem layanan digital, energi alternatif); dan

Arah kebijakan modernisasi desa melalui *smart village* diarahkan untuk mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi di tingkat perdesaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Kebijakan ini berfokus pada penyediaan infrastruktur digital seperti jaringan internet, sistem layanan publik berbasis teknologi, serta pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan yang mendukung efisiensi dan kemandirian desa. Melalui pengembangan *smart village*, pemerintah daerah berupaya menciptakan desa yang adaptif, terhubung, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal melalui digitalisasi ekonomi, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya yang cerdas. Integrasi dengan sistem transportasi, logistik, dan infrastruktur wilayah juga menjadi prioritas agar desa dapat terhubung secara efektif dengan pusat-pusat ekonomi dan pelayanan. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Penguatan Sistem Transportasi dan Logistik serta Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berdaya Saing, yang menempatkan inovasi teknologi sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan menghadirkan desa modern yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan era digital.

2. Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan.

Arah kebijakan penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi dan distribusi yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memperkuat keterhubungan antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi darat, laut, dan sungai yang mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat, terutama antara kawasan produksi, kawasan industri, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi sistem logistik modern berbasis teknologi informasi juga menjadi prioritas untuk mempercepat distribusi dan menekan biaya ekonomi wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat guna memastikan konektivitas yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Penguatan Sistem Transportasi dan Logistik serta Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berdaya Saing, yang menempatkan konektivitas sebagai fondasi percepatan transformasi pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan membangun sistem transportasi dan

logistik yang mampu menghubungkan potensi antarwilayah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

d. Perwujudan Infrastruktur Kewilayahan yang Mendukung Terciptanya Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan

Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan menjadi prioritas untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjamin pemerataan hasil pembangunan. Strategi ini ditempuh melalui pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antarwilayah yang lebih terintegrasi. Dengan sistem logistik yang efisien, arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih cepat, murah, dan lancar, sehingga mampu mendukung produktivitas sektor-sektor unggulan daerah seperti pangan, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi langkah strategis untuk menempatkan Kutai Kartanegara sebagai mitra utama pembangunan kawasan inti pemerintahan negara. Aksesibilitas yang baik ke IKN akan membuka peluang investasi baru, memperluas pasar produk lokal, serta memperkuat posisi strategis daerah sebagai penopang pembangunan nasional. Infrastruktur yang berkualitas juga memastikan konektivitas antarwilayah semakin inklusif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan strategi ini, Kutai Kartanegara dapat membangun fondasi kewilayahan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berkeadilan. Infrastruktur yang terencana dengan baik akan memperkuat integrasi ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi, serta mempercepat transformasi wilayah menuju pusat pertumbuhan baru yang tangguh dan berkelanjutan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah; dan

Arah kebijakan pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antarwilayah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi dan distribusi barang serta memperkuat konektivitas ekonomi di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. Kebijakan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur logistik yang terintegrasi. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan menekan biaya distribusi, sehingga memperkuat daya saing produk lokal. Pendekatan ini juga mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memastikan sistem logistik yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Infrastruktur Kewilayahan yang Mendukung Terciptanya Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan, yang menempatkan penguatan logistik sebagai elemen kunci percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan menciptakan sistem logistik yang efisien, adaptif, dan mampu menghubungkan potensi antarwilayah secara produktif dan merata.

2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN.

Arah kebijakan peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke Ibu Kota Negara (IKN) diarahkan untuk memperkuat konektivitas strategis antara Kutai Kartanegara dan kawasan inti IKN sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan pemerataan pembangunan kewilayahan. Kebijakan ini menitikberatkan pada pembangunan serta peningkatan infrastruktur transportasi publik yang berkualitas, efisien, dan berkelanjutan guna memperlancar mobilitas orang, barang, serta jasa antarwilayah. Selain memperkuat integrasi ekonomi, infrastruktur ini juga diharapkan mampu membuka akses bagi masyarakat pedesaan dan kawasan produktif untuk

berpartisipasi dalam arus pembangunan nasional. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tepat sasaran. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Perwujudan Infrastruktur Kewilayahan yang Mendukung Terciptanya Efisiensi dan Efektivitas Pembangunan, yang menempatkan konektivitas sebagai penggerak utama efisiensi pembangunan lintas wilayah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, dengan menjadikan Kutai Kartanegara sebagai simpul utama konektivitas dan pemerataan pembangunan di kawasan penyangga IKN

e. Pemantapan Infrastruktur untuk Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan

Pemantapan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam mendorong akselerasi transformasi pembangunan yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Strategi ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur cerdas yang mengedepankan transportasi massal, pemanfaatan energi bersih, serta pengembangan kawasan hijau. Infrastruktur cerdas tidak hanya menjawab kebutuhan mobilitas dan energi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan emisi karbon dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur mendukung terwujudnya tata ruang wilayah yang modern, adaptif, dan ramah lingkungan.

Selain itu, implementasi infrastruktur terintegrasi di Kawasan Strategis menjadi prioritas untuk memperkuat peran Kutai Kartanegara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang inklusif. Infrastruktur yang terintegrasi akan memperlancar konektivitas antarwilayah, memperkuat distribusi logistik, serta menciptakan efisiensi pembangunan lintas sektor. Dengan pendekatan ini, setiap kawasan dapat berkembang sesuai potensinya, namun tetap saling terhubung dalam satu sistem pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui strategi pemantapan infrastruktur berbasis teknologi cerdas dan integrasi kawasan, Kutai Kartanegara mampu mempercepat transformasi pembangunan menuju wilayah yang tangguh, produktif, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan misi Terbaik, yaitu membangun fondasi kewilayahan yang adil dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau; dan

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur cerdas yang meliputi transportasi massal, energi bersih, dan kawasan hijau diarahkan untuk mewujudkan sistem pembangunan wilayah yang modern, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung transformasi pembangunan di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan teknologi inovatif dan prinsip ramah lingkungan dalam penyediaan infrastruktur publik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung upaya penurunan emisi karbon serta penguatan ketahanan lingkungan daerah. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur cerdas yang berdaya guna dan berkeadilan. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Pemantapan Infrastruktur untuk Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan, yang menjadikan pembangunan infrastruktur berteknologi dan berwawasan lingkungan sebagai pendorong utama perubahan ekonomi wilayah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang

berkeadilan, dengan membangun Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh, hijau, dan berdaya saing tinggi di era transformasi pembangunan.

2. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis.

Arah kebijakan implementasi infrastruktur terintegrasi di Kawasan Strategis diarahkan untuk memperkuat konektivitas, efisiensi, dan sinergi antarwilayah dalam mendukung percepatan transformasi pembangunan di Kutai Kartanegara. Kebijakan ini berfokus pada pengembangan infrastruktur yang saling terhubung antar sektor meliputi transportasi, energi, air, sanitasi, dan telekomunikasi guna menciptakan kawasan strategis yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Penerapan konsep integrasi ini juga mencakup penataan ruang yang efisien dan berwawasan lingkungan, sehingga setiap pembangunan infrastruktur mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian alam dan keseimbangan sosial. Kolaborasi lintas sektor dan multipihak menjadi fondasi utama dalam memastikan keselarasan antara infrastruktur ekonomi, sosial, dan ekologis di kawasan prioritas pembangunan. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi Pemantapan Infrastruktur untuk Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai katalis utama percepatan pembangunan wilayah. Dengan demikian, kebijakan ini mendukung misi Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan, melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi yang mendorong konektivitas, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Tabel 3.5
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi “Kutai Kartanegara IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	1. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dasar dan gizi masyarakat serta penguatan eksistensi budaya lokal sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	2. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	2. Penguatan kurikulum muatan lokal, budaya, dan sejarah Kutai Kartanegara
			3. Peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat	3. Identifikasi pokok budaya dan pemetaan komunitas lokal
			4. Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing serta ikatan sosial masyarakat yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya	4. Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan
			5. Pemantapan ketahanan sosial yang berkualitas, inklusif, berkeadilan dan berbudaya menuju akselerasi transformasi pembangunan	5. Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat)
				6. Perlindungan sosial kelompok rentan
				7. Penyediaan hunian layak dan terjangkau
				8. Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
				9. Peningkatan mutu SDM melalui sekolah vokasi dan pelatihan kerja
				10. Transformasi warisan budaya menjadi produk ekonomi dan pariwisata
				11. SDM unggul dan adaptif: kolaborasi dunia kerja, dunia pendidikan, dan dunia usaha
				12. Revitalisasi nilai-nilai lokal dalam transformasi sosial
				13. Peningkatan daya saing SDM dan budaya di tingkat nasional
				14. Promosi identitas budaya daerah secara luas
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan	Meningkatnya fondasi perekonomian yang	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	1. Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	1. Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya investasi daerah	2. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat	2. Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	3. Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	3. Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro
			4. Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	4. Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan
			5. Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan	5. Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan
				6. Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya
				7. Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif
				8. Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif
				9. Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (link dan match)
				10. Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital
				11. Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah
				12. Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN
				13. Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan
				14. Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau
				15. Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan, dan kreatif
				16. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon
Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	1. Penyusunan sistem perencanaan- penganggaran terpadu
		Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	2. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	2. Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru
			3. Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	3. Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	4. Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja
			5. Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan	5. Digitalisasi layanan publik
				6. Penguatan sistem pengaduan
				7. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan
				8. Aplikasi dashboard lintas sektor
				9. Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Meningkatnya keberkelanjutan lingkungan hidup daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Pengembangan kualitas sistem pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi multi pihak dalam perlindungan lingkungan hidup	1. Penyusunan basis data daya dukung lingkungan fisik dan bencana
			2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	
			3. Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	
	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	4. Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	2. Penyusunan kebijakan perlindungan lingkungan hidup per zona utama Kutai Kartanegara
			5. Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	3. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis
				4. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat
				5. Penerapan sistem peringatan dini di daerah rawan bencana
				6. Skema insentif perlindungan lingkungan swadaya
				7. Penguatan tata ruang ekologis dan zonasi konservasi
				8. Implementasi pembangunan rendah karbon di kawasan strategis dan kawasan produktif
				9. Perluasan kontribusi program konservasi oleh seluruh sektor
Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar	Meningkatnya fondasi perekonomian yang	Meningkatnya pemerataan infrastruktur	1. Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi yang mendukung ketahanan wilayah	1. Penyelesaian pembangunan kebutuhan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kutai Kartanegara

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	maju, terintegrasi dan berkelanjutan	pembangunan dan penataan wilayah	2. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan
			3. Penguatan sistem transportasi dan logistik serta infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, inklusif dan berdaya saing	3. Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN
			4. Perwujudan infrastruktur kewilayahan yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan	4. Modernisasi desa melalui smart village (internet, sistem layanan digital, energi alternatif)
			5. Pemantapan infrastruktur untuk menuju akselerasi transformasi pembangunan	5. Penguatan konektivitas dan logistik antar kawasan
				6. Pengembangan logistik wilayah dan jaringan distribusi antar wilayah
				7. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur ke IKN
				8. Pembangunan infrastruktur cerdas: transportasi massal, energi bersih, kawasan hijau
				9. Implementasi infrastruktur terintegrasi Kawasan Strategis

3.2.2 Program Prioritas Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Program prioritas disusun melalui cascading kinerja yang dimulai dari visi hingga outcome, dengan indikator yang jelas sesuai dengan tingkatannya. Setiap program dirancang dengan pendekatan yang terukur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas pelaksanaan serta dampak maksimal bagi masyarakat. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, program pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, program prioritas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Tabel 3.6
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan” MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB per Kapita		
				Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif		
			Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Pertumbuhan volume usaha koperasi		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Urusan Bidang Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Urusan Bidang Pariwisata
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan/atau Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Meningkatnya layanan administrasi perekonomian dan pembangunan	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya hasil produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Bidang Pertanian
			Meningkatnya hasil produksi hortikultura	Produksi Hortikultura		
			Meningkatnya hasil produksi komoditas peternakan	Produksi Komoditas Peternakan		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B/Yang Terlayani Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Bidang Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Bidang Pertanian
			Meningkatnya kemandirian dan daya saing petani melalui penguatan kelembagaan koperasi	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina		
			Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkat Kapasitasnya		
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Urusan Bidang Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan	Urusan Bidang Pangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
			ketahanan pangan masyarakat		Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Meningkatnya investasi daerah		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN		
			Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Urusan Bidang Perindustrian
			Meningkatnya kapasitas IKM	Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Bidang Penanaman Modal
				Realisasi Total Investasi		
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Bidang Penanaman Modal
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Urusan Bidang Perhubungan
			Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Sungai, Danau	Program Pengelolaan Pelayaran	Urusan Bidang Perhubungan
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya tertib pertanahan dan	Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan	Program Penatagunaan Tanah	Urusan Bidang Pertanahan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
			kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah			
			Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob		
			Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik		
			Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing			Indeks Reformasi Birokrasi		
				Indeks Daya Saing Daerah		
				Indeks Pelayanan Publik		
				Nilai SAKIP		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Keuangan
				Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		
			Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan	Indeks Penyerapan Anggaran	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Perencanaan
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan rancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase pejabat fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi diluar guru dan tenaga kesehatan		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Sangat Baik dan Baik		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan Kecamatan
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks Pelimpahan Kewenangan pada Kecamatan		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
				Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
				Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan		
			Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Penunjang Urusan Inspektorat Daerah
				Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP		
		Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah		Angka kriminalitas		
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase anggota Satpol PP yang dilatih		
			Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase anggota Satlinmas yang dilatih		
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
			Meningkatnya penegakan perda dan perkara	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan		
			Meningkatnya kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Urusan Pemerintahan Umum
				Tingkat Kemiskinan		
				Indeks Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi SD/Sederajat	Rata-rata skor kemampuan literasi dan numerasi SD/Sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Bidang Pendidikan
			Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi SMP/Sederajat	Rata-rata skor kemampuan literasi dan numerasi SMP/Sederajat		
			Meningkatnya mutu pendidikan PAUD	Persentase PAUD yang mendapatkan Akreditasi B		
			Meningkatnya iklim keamanan sekolah	Indeks Iklim Keamanan PAUD		
				Indeks Iklim Keamanan SD/Sederajat		
				Indeks Iklim Keamanan SMP/Sederajat		
			Meningkatnya iklim kebhinekaan sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SD/Sederajat		
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/Sederajat		
			Meningkatnya iklim inklusivitas sekolah	Indeks Iklim Inklusivitas SD/Sederajat		
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP/Sederajat		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS PAUD 5-6 Tahun		
				APS SD/Sederajat 7-12 Tahun		
				APS SMP/Sederajat 13-15 Tahun		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
				APS Kesetaraan 7-18 Tahun		
				Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun		
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Bidang Kesehatan
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
				Persentase lanjut usia yang mandiri		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
				Cakupan penemuan kasus TB		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita)		
				Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes		
				Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes		
				Insidensi Stunting Balita (kasus baru)		
				Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
				Eliminasi Kusta		
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Urusan Bidang Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Urusan Bidang Kebudayaan
			Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga		
			Meningkatnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial	Indeks Zakat Nasional	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung Urusan Sekretariat Daerah
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Bidang Pengendalian dan Keluarga Berencana

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
			pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat		
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan		Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Rasio Gini		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	Urusan Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Bidang Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Bidang Sosial
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti		
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni		
			Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Urusan Bidang Perumahan dan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
						Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya keberkelanjutan lingkungan hidup daerah			Penurunan Intensitas Emisi GRK		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Urusan Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Urusan Bidang Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah		Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN
			pada saat tanggap darurat			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		

3.2.3 Keterkaitan Program Strategis Nasional dengan Dukungan Program Provinsi Kalimantan Timur

Program Strategis Nasional merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan dan program prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMN dan RKP. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pemerataan pembangunan, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia, serta menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada arahan ini sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Arahan Pelaksanaan Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Sekolah rakyat	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Pembangunan 3 juta rumah	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
Kesehatan utnuk semua dengan proyek/kegiatan	Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Makan bergizi gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	Urusan
Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan	Pengendalian inflasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi dan UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi dan UKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi dan UKM
	Kemudahan perizinan di daerah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
Program strategis nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh presiden			

Salah satu strategi utama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 2 (dua) Program Unggulan yakni Gratispol dan Jospol yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut kedua program unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang telah disesuaikan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, berikut kegiatan-kegiatan unggulan:

Tabel 3.8.
Indikasi Kegiatan Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2025-2029 untuk Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
Program Unggulan Gratispol		
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB hingga S3	1. Program Pengelolaan Pendidikan
		2. Program Kesejahteraan Rakyat
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Gratis Internet di Setiap Desa	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
5	Gratis Seragam Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
6	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat
Program Unggulan Jospol		
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis Pertanian Modern		
1	Pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	Pengembangan kawasan tanaman Pisang Kepok (Grecek)	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Pengembangan Kawasan Tanaman Kakao dan Karet	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Prog. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	Kegiatan Unggulan	Nomenklatur Program
5	Peningkatan pengendalian OPT dan pengembangan APH	Program Pengendalian dan Penanggulangan
		Bencana Pertanian
Jospol 2 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik		
1	Pembangunan Aplikasi SAKTI (Super App)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Jospol 3 Peningkatan Insentif Guru Sekolah Umum, Pesantren, Serta Penjaga Rumah Ibadah		
1	Pemberian Insentif Dosen, Guru Sekolah Umum, Pesantren, dan Penjaga Rumah Ibadah	Program Kesejahteraan Rakyat
Jospol 4 Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif Dan Digital Untuk Mendukung UMKM		
1	Bantuan Permodalan, Peralatan dan Pembinaan UMKM Secara Terpadu	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	Kemitraan Pelaku Industri dengan UMKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Jospol 5 Mengembangkan Pariwisata dan Budaya Berbasis Desa		
1	Pengembangan Desa Wisata yang berstandar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2	Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Kesehatan dan Pendidikan		
1	Pembangunan SMA/SMK Unggulan	Program Pengelolaan Pendidikan
Jospol 7 Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Jalan, Jembatan, Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi, dan Pelabuhan Internasional		
1	Kegiatan peningkatan/rehabilitasi ruas jalan Provinsi	Program Penyelenggaraan Jalan
Jospol 8 Revitalisasi Sungai Mahakam untuk Transportasi Publik, Angkutan Industri dan Pariwisata		
1	Revitalisasi Dermaga Sungai Mahakam	Program Pengelolaan Pelayaran
Jospol 9 Memudahkan Investasi Termasuk Pemberian Insentif dan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta		
1	Pembuatan Peta Peluang Investasi, Penyusunan IPRO dan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Forum Investasi Daerah	Program Promosi Penanaman Modal

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi. Sinkronisasi dengan rencana tata ruang perlu dilakukan dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Selain untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, hal tersebut juga bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pengembangan wilayah dan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan di Kalimantan Timur. Highlights indikasi kebijakan pembangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan indikasi program utama RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 yang berlokus di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2.4 Program Unggulan Kepala Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

Program Unggulan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pendekatan yang berbasis pada potensi daerah serta kebutuhan Masyarakat.

Selama masa kampanye, Kepala Daerah terpilih mengusung serangkaian program kerja yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, hingga program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi janji Kepala Daerah terpilih memiliki urgensi krusial dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena representasi mandat rakyat yang harus diterjemahkan secara akuntabel ke dalam kebijakan pembangunan.

Keterkaitan erat antara janji kampanye dan program prioritas yang selaras dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak hanya responsif terhadap aspirasi pemilih, tetapi juga terstruktur, terukur, dan sinkron dengan prioritas nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan yang telah ditetapkan, sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang efektif serta tepat sasaran. Berikut disajikan Program Unggulan KDH yang dikaitkan dengan program prioritas sesuai dengan nomenklatur.

Tabel 3.9
Keterkaitan Program Unggulan KDH Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Prioritas RPJMD

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Pengelolaan Pelayaran

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4	Program Etam Sejahtera	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Hubungan Industrial
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Kawasan Permukiman
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6	Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh;	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pertanian)
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan)
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.	Program Perekonomian Dan Pembangunan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Pengembangan Umkm
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
10	Program Pelayanan Publik Cerdas;	Program Penataan Bangunan Gedung
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
11	Program ASN Kukar Terbaik.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
12	Program RT Ku-Terbaik	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanggulangan Bencana
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
16	Program Internet Desa Gratis.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
17	Program Permukiman Idaman Terbaik.	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Kawasan Permukiman
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Penataan Desa
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

17 Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan 17 Program Dedikasi sebagai bentuk komitmen nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program-program ini dirancang secara strategis untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dimana 17 Program Dedikasi ini merupakan turunan langsung dari misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Setiap program mencerminkan arah kebijakan yang fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta memperhatikan potensi dan karakteristik lokal. Berikut merupakan keterkaitan 17 Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan misi:

Tabel 3.10
Keterkaitan 17 Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara

Misi	Program Dedikasi
Misi 1 Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia
	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa
	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik
	Program Etam Sejahtera
Misi 2 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera
	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh
	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik
	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah
	Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi 3 Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara	Program Pelayanan Publik Cerdas
	Program ASN Kukar Terbaik
Misi 4 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal	Program RT Ku-Terbaik
	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku
	Program Jaga Lingkungan Lestari
Misi 5 Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik
	Program Internet Desa Gratis
	Program Permukiman Idaman Terbaik

Program Unggulan Kepala Daerah Kutai Kartanegara yang dikemas dalam 17 Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan serangkaian program strategis yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya diarahkan untuk menjawab tantangan aktual, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berikut penjabaran 17 Program Dedikasi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029:



Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, berupa pemberian makanan pokok bergizi pada balita atau kategori PAUD sebagai upaya mengeliminasi angka gizi buruk dan gizi kurang khususnya pada keluarga prasejahtera, serta pengurangan resiko angka prevalensi stunting, selanjutnya memberikan bantuan makanan sehat bagi lansia melalui penguatan posyandu, dengan pola pelaksanaan yang sinergi, tertib, dan berbasis data, serta ditopang oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan dan pengendalian yang berkala.



Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, dengan meringankan beban biaya perlengkapan sekolah dan biaya transportasi pada murid PAUD-SD-SMP, dengan penyediaan baju seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi murid setiap tahunnya, salah satunya melalui peningkatan BOSKAB pada masing-masing sekolah, khusus untuk fasilitasi transportasi sekolah disediakan sarana dan prasarana antar jemput sekolah, dengan unit transportasi menyesuaikan karakteristik wilayah Kutai Kartanegara dengan standard keamanan yang layak. Selain daripada itu, untuk menurunkan resiko putus sekolah dan rendahnya angka melanjutkan di wilayah terpencil, dikembangkan sekolah menengah pertama (SMP) berasrama (boarding school) bersubsidi dan berbasis pilot project pada lokasi yang dapat menjadi simpul dalam satu wilayah kecamatan.

Dalam memastikan daya saing sumber daya manusia yang unggul dan mendorong pencapaian prioritas daerah, maka tetap dilanjutkan program beasiswa stimulan kepada siswa/siswi Kutai Kartanegara, dengan sasaran prioritas: 1) Penyiapan Siswa Sekolah Kedinasan, 2) Masyarakat Prasejahtera dan 3) Siswa/Siswi. Berprestasi pada jenjang SD-SMP-SMA/Sederajat, serta beasiswa tuntas bagi mahasiswa Kutai Kartanegara khususnya menunjang penyediaan tenaga layanan dasar dan penyediaan tenaga teknis yang sejalan dengan prioritas daerah, diantaranya adalah: Tenaga Pendidik, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Teknik Industri, Seni, Sastra dan Budaya, serta Teknologi Informasi dengan target minimal 1.000 Orang Mahasiswa, yang dikelola secara profesional bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi minimal Baik Sekali. Selain daripada itu dikhususkan pula beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat tergolong pra sejahtera dalam kerangka kebijakan “Satu KK Satu Sarjana”



Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat sekolah swasta sebagai bagian dari satuan pendidikan di Kutai



Kartanegara, dengan memberikan program bantuan berbasis sekolah swasta/pondok pesantren bagi peningkatan kesejahteraan dan kapasitas guru swasta, sarana dan prasarana sekolah.

Program Etam Sejahtera

merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat prasejahtera, dengan memberikan bantuan pangan bagi kelompok kategori jompo, disabilitas dan anak terlantar kategori miskin. Memastikan jaminan kesehatan terpenuhi 100%, jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja rentan termasuk relawan kebencanaan/kemanusiaan, dan perbaikan rumah tidak layak huni minimal 500 unit per tahun, serta memfasilitasi kelompok disabilitas agar mendapat akses pada lapangan kerja formal dan informal melalui penguatan dan integrasi program kukar siap kerja dan klinik wirausaha pemuda mandiri, dengan membuka unit layanan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja hingga di setiap kecamatan. Khusus untuk peningkatan layanan kesehatan dikembangkan jaminan kesehatan, dengan pola Berobat Gratis cukup dengan KTP.



Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pembangunan kawasan-kawasan strategis/khusus untuk mempersiapkan simpul kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien, berbasis pada sumber daya ekonomi terbarukan, dengan membangun pola hubungan industri hulu dan hilir yang produktif, dalam satu kesatuan wilayah ekonomi potensial, dengan tujuan menciptakan suatu ekosistem perekonomian wilayah yang menjangkau seluruh potensi daerah secara terintegrasi dan terstruktur dalam bingkai rantai nilai yang saling terkait, dengan melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari penyiapan lahan, SDM, sarana dan prasarana, jaringan logistik, tata kelola pengairan, hingga kelembagaan yang disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan yang dilaksanakan secara fokus, gradual dan berkesinambungan. Adapun target pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera (KES), tersebut berada pada 3 zona tematik, yakni :

- a. Zona Selatan;
- b. Zona Timur; dan
- c. Zona Utara.



Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan dan menyediakan generasi petani /peternak /nelayan tangguh yang dilaksanakan dengan metode pelatihan, pendampingan, magang dan yang diiringi dengan fasilitasi sarana dan prasarana petani/nelayan. Program ini untuk mendorong tumbuhnya

petani/nelayan millenial yang memiliki keterampilan/keahlian pengelolaan pertanian dan perikanan yang maju dan modern dengan metode sekolah dilaksanakan di dalam/luar wilayah Kutai Kartanegara.

Selain untuk pengembangan sumber daya manusia, maka perlu didukung penguatan kapasitas produksi di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan penyediaan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang layak dan modern pada sektor perikanan dan pertanian, melalui program bantuan untuk 100 Ribu Petani, Nelayan, dan Peternak Produktif. Dan dalam rangka menjaga kelangsungan nelayan agar mudah mengakses BBM, dilakukan fasilitasi pembangunan SPBN di wilayah potensi perikanan tangkap.



Program Kredit Kukar Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memfasilitasi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Peternak dan Nelayan, untuk mengakses bantuan permodalan yang bersumber dari bank, dengan pengurusan yang mudah, cepat dan tanpa bunga, dengan rentang nilai kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Serta memperkuat permodalan pada Koperasi dan BUMDesa dengan alokasi sebesar 1 Milyar Rupiah, salah satunya dalam rangka menyediakan pupuk bersubsidi yang dijalankan secara selektif dan berdampak bagi geliat perekonomian di desa/kelurahan.



Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk pelestarian dan pengembangan seni budaya Kukar, dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada sanggar seni dan budaya, baik berupa sarana dan prasarana, fasilitasi legalitas kelembagaan, promosi pertunjukan, serta peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pembangunan daya tarik destinasi wisata daerah. Dengan kegiatan utama adalah pembangunan pusat seni dan budaya daerah di setiap kecamatan, re-visioning Pulau Kumala sebagai kawasan wisata kuliner, seni dan budaya nusantara yang modern sebagai bagian dari Pembangunan Tenggarong sebagai pusat sejarah dan budaya.



Program Stimulus Komunitas Kreatif

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada seluruh insan kreatif di Kutai Kartanegara, dengan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang produktif, dengan memberikan stimulus dalam membangun kolaborasi komunitas ekraf minimal bantuan stimulus sebesar 100 juta rupiah bagi komunitas ekraf yang diikuti dengan mengoptimalkan Fasilitas Gedung Ekonomi Kreatif secara gratis sebagai sharing pengetahuan, peningkatan keterampilan, fasilitasi HAKI, dan wadah membangun jaringan kemitraan dan



pertunjukan yang diselenggarakan secara kolaboratif. Minimal 2 kali setahun rutin menyelenggarakan kontes karya kreatif yang bertaraf nasional, dan 1 Event 1 Kecamatan yang bertaraf Nasional.

Program Pelayanan Publik Cerdas

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.



Program ASN Kukar Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk menjalankan prinsip-prinsip ASN BerAKHLAK secara optimal, dengan fokus pada perbaikan kapasitas SDM Aparatur, melalui implementasi merit system pada jenjang karir yang disertai dengan peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai dan melakukan perbaikan tata kelola yang berkeadilan bersandar pada perhitungan beban kerja yang realistis dan faktual. Selain daripada itu diperkuat dengan peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dengan kegiatan utama beasiswa tugas belajar kepada ASN potensial mulai jenjang S1, S2 dan S3. Disisi lain dalam upaya meningkatkan keahlian ASN, diperkuat dengan Optimalisasi Pelayanan Diklat Kepegawaian, tahap awal didukung dengan skema kerjasama dengan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi.



Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka

diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab.

Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.



Program Terima Kaseh Guru Ngaji-Ku

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk penghargaan kepada guru mengaji kitab suci (seluruh agama) terdaftar pada lembaga pendidikan keagamaan, serta imam, khotib dan marbot masjid/mushola/rumah ibadah lainnya yang terdaftar, dengan memberikan insentif bulanan yang dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya untuk memberikan apresiasi kepada pemuka dan pelaku keagamaan disiapkan Umroh Gratis, dan khusus bagi kegiatan-kegiatan pengajian melalui lembaga majelis ta'lim dan shalawat di berikan bantuan 25 juta rupiah untuk penunjang aktivitas rutin yang lebih bernilai. Seluruh kebijakan tersebut diintegrasikan dengan Program RT Ku-Terbaik.



Program Jaga Lingkungan Lestari

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui peningkatan pengawasan pada seluruh perusahaan yang beraktifitas di wilayah Kutai Kartanegara untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup, dengan mewajibkan kepada seluruh perusahaan untuk mengalokasikan Program Kelestarian Lingkungan Hidup di sekitar daerah operasi. Selanjutnya melanjutkan program Kukar Peduli Lingkungan dengan menyediakan pengelolaan persampahan yang baik, dengan memperluas pembangunan unit TPS-3R (*reduce, reuse, recycle*) modern dengan standar kelayakan yang tinggi minimal satu Unit per-kecamatan, serta melanjutkan Program Desa Ramah Lingkungan, dengan target seluruh desa di wilayah Kutai Kartanegara.



Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memberikan ruang kepada

pemerintahan desa, untuk memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis potensi desa, dengan mendorong kerjasama antar Pemerintah Desa dalam kerangka pembangunan wilayah perdesaan yang di desain secara fokus dan tematik. Adapun kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa, melakukan dukungan kebijakan melalui penguatan fiskal pemerintah desa melalui BKKD, baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, serta promosi dan pemasaran hasil produk BUMDes. Dengan Mengalokasikan anggaran dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar 100 Milyar Per Tahun. Kondisi ini ditopang pula dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Program Internet Desa Gratis

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memastikan Kukar tanpa *blank spot* dengan menyediakan internet desa secara mudah dan gratis, dengan mengembangkan dan mengoptimalkan teknologi informasi yang adaptif dan modern.



Program Permukiman Idaman Terbaik

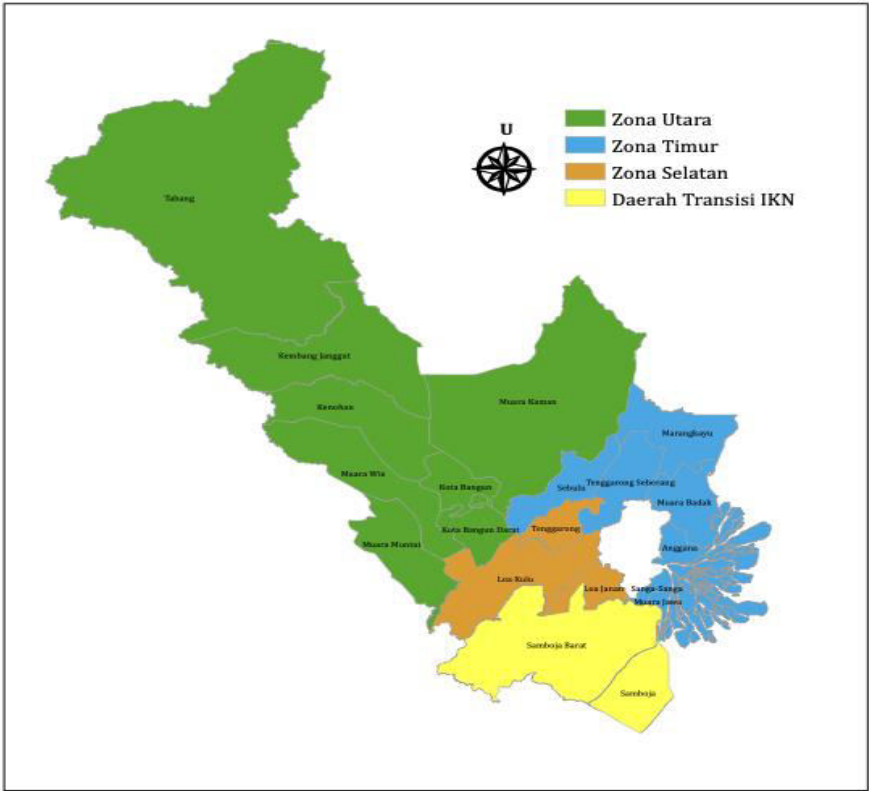
Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas permukiman di seluruh wilayah Kutai Kartanegara dengan kegiatan utama peningkatan kualitas jalan lingkungan, penyediaan penerangan jalan umum, perluasan cakupan air bersih, penyediaan energi baru terbarukan, rumah ibadah, drainase, dan ruang terbuka hijau/taman/pemakaman. Untuk mendukung penyediaan permukiman yang layak di wilayah perkotaan, adapun proyek prioritas yang dilaksanakan dalam periode kepemimpinan adalah: 1) Penataan Permukiman Tepi Sungai; 2) Fasilitasi Kerjasama dengan Pengembang Perumahan Yang Terjangkau Bagi Korban Bencana/Relokasi dan Masyarakat yang Termasuk Kategori Berpendapatan Rendah. 3) Penyediaan energi listrik dan air bersih berbasis perdesaan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau PLN dan PDAM, sebagai pengembangan Program Terang Kampongku dan Program Air Bersih Desa.

3.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan arah kebijakan pengembangan wilayah yang berfokus pada optimalisasi potensi lokal sesuai karakteristik masing-masing kecamatan, mulai dari penguatan sektor agraris dan kehutanan, pengembangan industri, perdagangan, serta jasa, hingga pemanfaatan sumber daya migas, kelautan, dan perikanan secara berkelanjutan; sehingga seluruh wilayah dapat berkembang secara terpadu dan seimbang, mendukung pertumbuhan

ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Berikut merupakan peta zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.2
Peta Zonasi Tematik Pembangunan Wilayah Kutai Kartanegara



Kabupaten Kutai Kartanegara membagi wilayah pengembangan perekonomian menjadi tiga zona strategis, yaitu zona utara, zona timur, dan zona selatan. Pembagian ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, memperhatikan karakteristik geografis, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Zona utara difokuskan pada pengelolaan potensi pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Zona timur diarahkan pada pengembangan industri berkelanjutan. Sementara itu, zona selatan lebih kawasan perkotaan modern sekaligus mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Berikut tabel pemetaan arah kebijakan berdasarkan zona di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.11
Pemetaan Arah Kebijakan Berdasarkan Zona

ZONA	ARAH KEBIJAKAN
UTARA	Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata
TIMUR	Pengembangan industri berkelanjutan
SELATAN	Pengembangan kawasan perkotaan modern dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
DAERAH TRANSISI IKN	Mitra Pelayanan Publik (sebelum PEMDASUS IKN)

Dengan adanya pembagian zona ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

3.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Zona Utara

Penetapan Zona Utara Kutai Kartanegara sebagai kawasan prioritas pengembangan pangan dan pariwisata karena memiliki karakteristik wilayah yang mendukung kedua sektor tersebut. Secara geografis, Zona Utara Kutai Kartanegara didominasi oleh bentang alam dataran tinggi dan berbukit dengan kualitas tanah yang subur dan ketersediaan air permukaan yang melimpah sehingga menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan pertanian pangan. Selain itu, wilayah ini menyimpan kekayaan biodiversitas, bentang alam yang eksotik, serta budaya lokal yang masih lestari sehingga menjadikannya sangat cocok untuk pengembangan pariwisata berbasis alam, ekowisata, dan wisata budaya.

Wilayah seperti Kecamatan Tabang, Kota Bangun Darat, hingga Kota Bangun menyuguhkan atraksi wisata alami yang unik, seperti danau, air terjun, gunung, hingga hutan hujan tropis yang masih alami. Keberadaan komunitas adat dan kearifan lokal juga menjadi daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki wilayah lain. Kombinasi antara kesuburan lahan, kekayaan potensi wisata, dan kekhasan budaya inilah yang menjadikan Zona Utara memiliki keunggulan komparatif sebagai kawasan terpadu untuk pengembangan pangan dan pariwisata secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, wilayah Kutai Kartanegara Zona Utara juga memiliki posisi strategis dalam mendukung peran kabupaten ini sebagai bagian dari Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya untuk Kecamatan Kota Bangun. Selanjutnya, berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01.1/590/PL/DPPR/II/2022 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Komoditas Padi di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa kawasan pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sawah eksisting dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.093,06 ha yang salah satunya merupakan Kawasan Pertanian Kecamatan Sebulu – Muara Kaman.

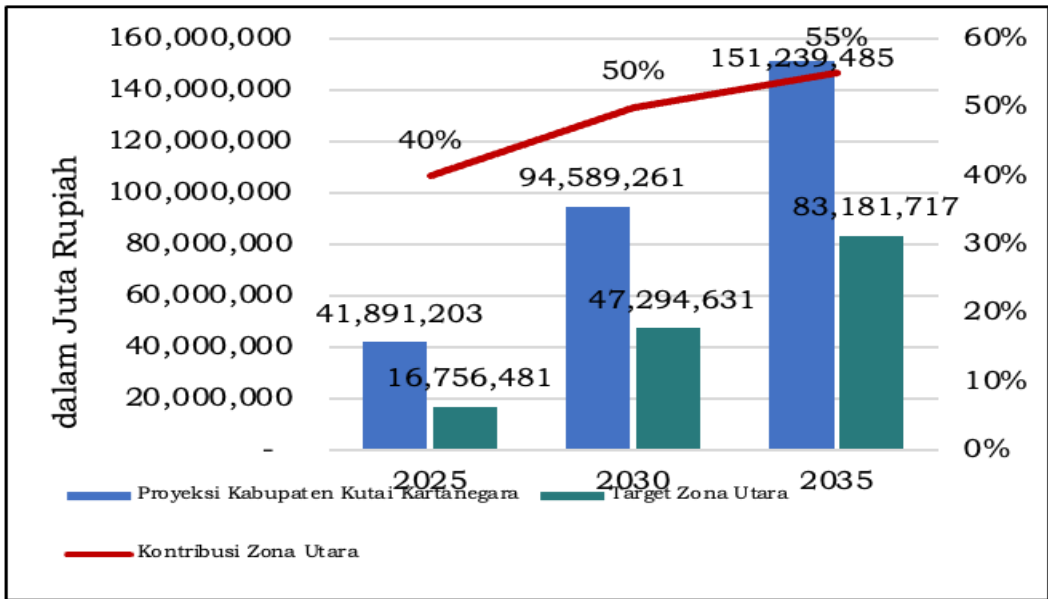
Wilayah seperti Kota Bangun dan Muara Kaman memiliki luasan lahan yang cukup besar dengan kesuburan tanah yang baik, ketersediaan sumber air tawar dari danau dan sungai, serta ekosistem yang relatif masih alami. Kondisi ini sangat ideal untuk pengembangan subsektor tanaman pangan sebagai basis penguatan ketahanan pangan daerah maupun nasional. Di sisi lain, Kutai Kartanegara Zona Utara juga memiliki keunikan alam dan budaya yang berdaya tarik tinggi bagi pariwisata, seperti keberadaan Danau Semayang, Danau Melintang, Danau Jempang, Gunung Babi, Sungai Lauw, dan situs-situs budaya lokal, yang menjadikannya sangat potensial untuk pengembangan wisata berbasis ekologi dan budaya.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona utara fokus pada pertanian dan pengembangan pariwisata, dengan rincian sebagai berikut

1. Zona Kawasan Pusat Pangan Pembangunan Irigasi dan Perluasan Lahan Pertanian Baru serta Area Perikanan Strategis.

Dengan Kebutuhan Lahan Pangan seluas 74, 9 Ribu Ha, dan target Penambahan Lahan Pangan di Zona Utara (41 Ribu Ha). Implikasi dari pemenuhan sarana irigasi dan lahan pertanian kedepannya dapat menjadi kawasan pusat pangan yang terletak di 8 kecamatan dengan total daerah irigasi (DI) sebanyak 29 dengan luas 45.333 ha. Pembentukan zona pangan ini dapat berkontribusi ekonomi sebesar 50% dalam lima tahun ke depan, dengan rincian sebagai berikut.

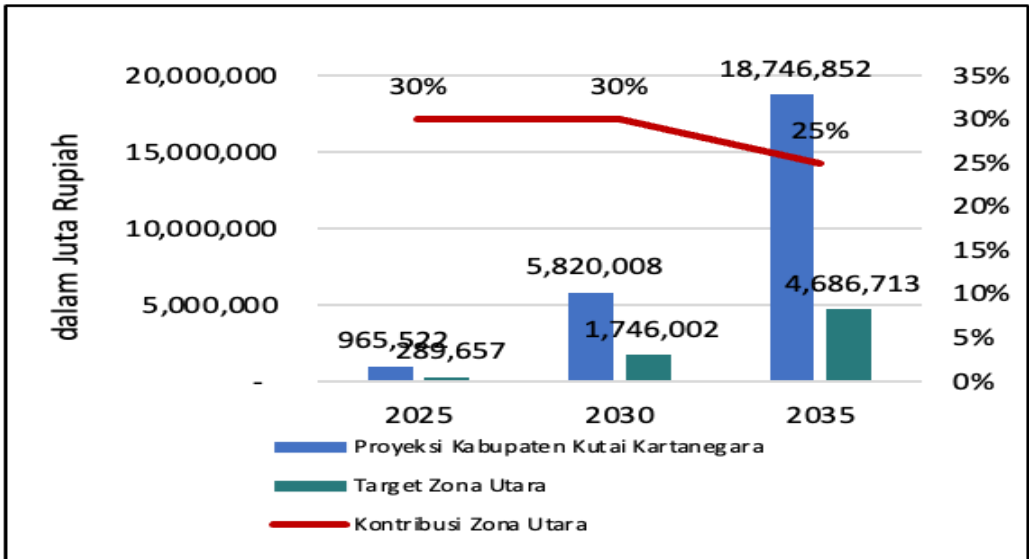
Gambar 3.3
Proyeksi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Target
Kontribusi Zona Utara



2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Baru

Pengembangan perekonomian untuk zona utara dengan fokus pariwisata baru untuk Jelajah Ekosistem Hutan Tropis Kalimantan. Kawasan pariwisata baru ini terdiri dari enam kawasan yaitu Kawasan Tabang I, Tabang II, Wisata Tiga Danau, Wisata Kota Bangun, Kawasan Kota Bangun Darat, dan Kawasan Kedang Ipil. Pembentukan Kawasan pariwisata ini dapat berkontribusi ekonomi sebesar 30% dalam lima tahun ke depan yang terakumulasi dalam sektor penyediaan akomodasi, makan minum, dengan rincian sebagai berikut

Gambar 3.4
Proyeksi PDRB Sektor Penyedia Akomodasi Mamin
dan Target Kontribusi Zona Utara



Beberapa kecamatan yang masuk dalam zona utara antara lain: Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut,

Tabang, yang masing-masing memiliki potensi. Berikut ini potensi zona Utara yang disertai dengan permasalahan dan indikasi intervensi:

Tabel 3.12
Pemetaan Potensi Zona Utara

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Identifikasi Lokasi Prioritas
Pertanian	Padi	Kuantitas, kualitas, dan kapasitas faktor produksi pangan, terutama lahan dan air yang semakin menurun	- Perluasan lahan pertanian pada lahan potensial - Pemanfaatan lahan dengan dua (2) masa tanam padi dan diselingi satu (1) masa tanam palawija/jagung	Kecamatan Kota Bangun, Kota Bangun Darat, dan Muara Kaman
		Skala usaha tani yang masih rendah	- Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandarisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu - Penguatan rantai pasok dan jaminan ketersediaan bahan baku/penolong di industri padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil dan produksi tekstil (TPT) dan alas kaki) - Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi padat karya terampil - Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil;	
		Relatif terbatasnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur wilayah di pedesaan dan pertanian	Penyediaan sarpras penunjang pertanian	
		Masih terdapatnya potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk pangan secara berkelanjutan	Intensifikasi lahan pertanian untuk komoditas padi di zona utara melalui perluasan lahan pertanian pada lahan potensial	
	Ubi kayu	Belum optimalnya hilirisasi ubi Kayu menjadi alternatif pangan bebas gluten	Peningkatan produksi pangan nabati; dan peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional serta konektivitas infrastruktur penunjang logistik.	Kecamatan Kota Bangun, Kota Bangun Darat, dan Muara Kaman
Perikanan air tawar	Ikan patin dan nila	Teknologi budidaya utama yang diaplikasikan oleh rumah tangga perikanan masih bersifat sederhana	Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya air tawar berbasis keramba	Muara Muntai; Muara Wis; Kota Bangun; Kota Bangun Darat; Muara Kaman; Kenohan; Kembang Janggut; Tabang

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Identifikasi Lokasi Prioritas
Pariwisata	● Kawasan Wisata Pela ● Kawasan Wisata Kedang Ipil ● Kawasan Wisata Kota Bangun Darat ● Kawasan Wisata Tabang 1 ● Kawasan Wisata Tabang 2		- Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antar objek wisata, jaringan telekomunikasi, dan fasilitas pelayanan wisata dapat menjadi langkah strategis untuk membuka isolasi kawasan, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal secara berkelanjutan - Pengembangan wisata yang unik, bertema khusus, dan menyasar segmen pasar tertentu. Tabang memiliki potensi keunikan budaya, alam, dan ekowisata yang sesuai dengan pendekatan <i>niche</i>, sehingga pengembangannya sejak awal dianggap strategis untuk membentuk identitas kawasan wisata yang khas serta menarik wisatawan dengan minat khusus	Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang

3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Zona Selatan

Arah pengembangan Zona Selatan Kutai Kartanegara diarahkan untuk menjadi kawasan perkotaan modern sekaligus mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah ini mencakup Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, dan Loa Janan. Posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan IKN menjadikan Zona Selatan memiliki peran sebagai daerah penyangga, yang mampu menampung limpahan aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan dari kawasan inti IKN.

Pengembangan zona selatan Kabupaten Kutai Kartanegara berkaitan erat dengan mandat yang diberikan kepada Otorita IKN, yang memiliki kewenangan dalam perencanaan Ibu Kota Negara, karena sebagian daerah kabupaten ini termasuk dalam area yang tercakup batasan wilayah IKN. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Sangasanga, Muara Jawa, dan Samboja Barat, yang berfungsi sebagai Daerah Mitra IKN.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Otorita IKN Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022, kerja sama dengan Daerah Mitra IKN mencakup delapan sektor pembangunan, yaitu: Ekonomi dan Industri, Logistik dan Konektivitas, SDM dan Ketenagakerjaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Energi dan Ketenagalistrikan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada RTR KSN Ibu Kota Nusantara dan RTRW Pulau Kalimantan. Pengembangan Zona Selatan didasarkan pada penetapan fungsi pusat pertumbuhan. Tenggarong ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Loa Kulu sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), dan Loa Janan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Penetapan ini selaras dengan RTRW Kutai Kartanegara 2023–2042 dan menjadi landasan penting untuk mengoptimalkan peran masing-masing kecamatan. Dengan struktur ini, Zona Selatan diharapkan dapat menghadirkan tata ruang perkotaan yang

modern, terkoneksi, dan berkelanjutan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas dari IKN.

Secara strategis, posisi Zona Selatan yang berada di segitiga emas Balikpapan–Samarinda–IKN menjadikannya wilayah dengan potensi ekonomi tinggi. Kehadiran fasilitas *Tax Holiday* bagi investor di IKN akan menarik arus investasi yang juga berdampak ke Kutai Kartanegara. *Spillover activity* ini mencakup permintaan perumahan, infrastruktur dasar, kawasan komersial, serta jasa pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, arah pengembangan wilayah ini difokuskan pada penyediaan permukiman perkotaan, penguatan utilitas, transportasi, serta peningkatan layanan publik untuk mendukung urbanisasi yang cepat. Dua konsep besar pembangunan perkotaan yaitu *waterfront city* yang menyasar kawasan di sepanjang sungai (Tenggarong–Loa Kulu, Jongkang, dan sebagian Loa Janan), serta kota kompak yang dikembangkan di Jonggon.

Kedua konsep ini dipilih untuk menyeimbangkan kebutuhan ruang kota modern dengan pelestarian lingkungan, sekaligus menghadirkan identitas khas perkotaan Kutai Kartanegara yang ramah lingkungan dan menarik investasi. Dengan demikian, alasan utama pengembangan Zona Selatan Kutai Kartanegara ke arah perkotaan modern adalah karena posisi strategisnya sebagai mitra IKN, fungsi kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan RPJPD, serta proyeksi pertumbuhan penduduk yang signifikan.

Zona ini diproyeksikan menjadi pusat hunian, perdagangan, dan jasa yang berperan vital dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN sekaligus meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona selatan masuk dalam pengembangan kawasan perkotaan baru, pembangunan kawasan pangan dan pariwisata sebagai bagian dari mitra IKN. Zona Selatan juga masuk dalam kawasan strategis pendukung IKN.

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Lokasi 4 Kawasan perkotaan baru Kawasan Perkotaan Loa Ipuh Darat-Jonggon; Jongkang; Tenggarong-Loa Kulu; Loa Janan Ulu. Dengan luasan 4.151 ha yang terdiri dari perumahan, perdagangan, jasa, transportasi, dan utilitas permukiman.

2. Pengembangan Kawasan Pangan

Pengembangan Kawasan Pangan Potensi pengembangan sawah irigasi di 18 Desa sebesar 4.929,93 Ha (17 Daerah Irigasi Potensial kewenangan kabupaten dan 1 Daerah Irigasi Potensial kewenangan provinsi).

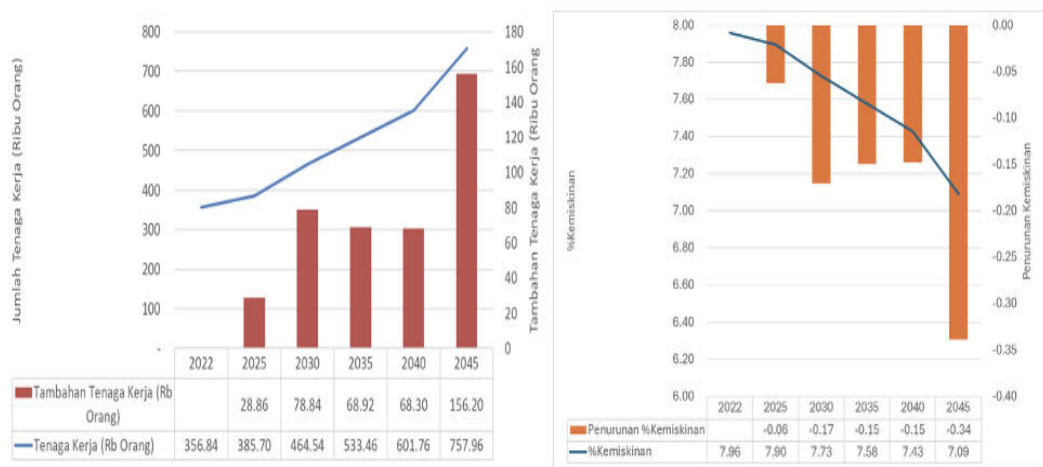
3. Pengembangan Kawasan Pariwisata Mitra IKN

Pengembangan kawasan pariwisata mitra IKN terbagi atas dua zona layanan pariwisata :

- **Zona Inti** Radius 1.000 m atau 15 menit berjalan kaki. Terdapat Museum Mulawarman menjadi pusat pariwisata.
- **Zona Pendukung** Radius 4.000 m atau 60 menit berjalan kaki. Daya Tarik Wisata: Waduk Panji Sukarame.

Pembentukan ketiga proyek strategis Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 3.5
Dampak Ekonomi dari Ketenagakerjaan dan Kemiskinan



Berikut ini potensi zona Selatan yang disertai dengan permasalahan dan indikasi intervensi:

Tabel 3.13
Pemetaan Potensi Zona Selatan

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
Permukiman perkotaan	Kawasan perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, komersial	(1) Keterbatasan infrastruktur dasar (air bersih, listrik, sanitasi) (2) Pertumbuhan penduduk cepat memicu potensi kawasan kumuh (3) Kesiapan lahan yang belum optimal untuk pembangunan kota baru	Pembangunan kawasan perkotaan baru (<i>compact city & waterfront city</i>), pengembangan jaringan utilitas, peningkatan kualitas permukiman eksisting	Kawasan Perkotaan Tenggara, Loa Kulu, Loa Janan, Jonggon, Jongkang
Pertanian	Padi, hortikultura, perikanan air tawar	(1) Alih fungsi lahan sawah akibat urbanisasi (2) Sistem irigasi yang terbatas (3) Produktivitas rendah dibanding kebutuhan pangan regional	Penguatan kawasan pangan, revitalisasi irigasi, ekstensifikasi lahan sawah teknis, penerapan pertanian modern	Kawasan sawah irigasi teknis di Loa Kulu, Loa Janan, Tenggara
Pariwisata	Wisata budaya, sejarah, alam, <i>waterfront</i> Tenggara	(1) Fasilitas wisata belum memadai (2) Promosi dan aksesibilitas rendah (3) Belum terintegrasi dengan pusat kota & IKN	Pengembangan destinasi unggulan (<i>waterfront city</i> , wisata budaya Kutai), pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi & integrasi dengan jalur IKN-Samarinda-Balikpapan	Tenggara (Museum Mulawarman, Kedaton), Loa Kulu (agrowisata), kawasan Jonggon & Jongkang

3.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Zona Timur

Zona Timur Kabupaten Kutai Kartanegara yang terletak di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri hijau yang mendukung konsep ekonomi berkelanjutan berbasis efisiensi energi, pemanfaatan sumber daya terbarukan, dan pengurangan dampak lingkungan.

Strategi pengembangan ini mengintegrasikan berbagai aspek infrastruktur, konektivitas, dan sistem pendukung untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan. Zona Timur Kutai Kartanegara memiliki potensi signifikan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertema industri.

Keunggulan utama calon lokasi KEK ini terletak pada lokasinya yang berasosiasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai RTRW, serta kawasan industri eksisting di Marang Kayu dan Muara Badak. Posisinya yang strategis di tepi laut juga menjamin aksesibilitas tinggi terhadap jalur pelayaran, menjadikannya ideal untuk kegiatan ekonomi berskala regional dan internasional.

Potensi ini semakin diperkuat dengan adanya rencana pembangunan konektivitas baru berupa Pelabuhan Khusus dan Pengumpan Regional, serta Jalan Tol Samarinda-Bontang yang akan meningkatkan efisiensi logistik dan distribusi. Pusat pertumbuhan primer di Zona Timur akan memancarkan pengaruh ekonomi ke wilayah sekitarnya, bahkan hingga Kota Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan kawasan IKN. Dengan demikian, Zona Timur tidak hanya menjadi episentrum industri Kutai Kartanegara, tetapi juga bagian penting dari ekosistem ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Dari sisi infrastruktur, pengembangan diarahkan pada peningkatan konektivitas transportasi, baik laut, darat, maupun udara. Kecamatan Anggana ditetapkan sebagai pintu gerbang laut Kutai Kartanegara, sementara Tenggarong Seberang diposisikan sebagai penyangga inti pertumbuhan.

Selain itu, pembangunan pelabuhan, terminal, bandara khusus, dan jaringan jalan menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas logistik dan distribusi barang. Infrastruktur ini dirancang agar Zona Timur memiliki daya tarik investasi yang kuat sekaligus menunjang operasional industri berskala regional. Alasan utama pengembangan ini adalah potensi strategis Zona Timur yang berada di koridor ekonomi penting Kalimantan Timur.

Dengan basis sumber daya alam, akses ke jalur perdagangan, dan kedekatannya dengan IKN, wilayah ini berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri ramah lingkungan. Pendekatan *green economy* diharapkan meningkatkan efisiensi energi, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat daya saing regional, serta menjaga ketahanan ekologi. Pada akhirnya, arah pengembangan ini dimaksudkan agar Kutai Kartanegara dapat bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Dalam perencanaan jangka menengah, zona timur Kutai Kartanegara fokus pada sektor industri pengolahan, yang disertai dengan amanat kebijakan kewilayahan RPJMN yang masuk dalam perencanaan zona timur antara lain: **Kawasan Perdesaan Prioritas** dan **Kawasan Sentra Perikanan**. Berikut kegiatan prioritas zona timur :

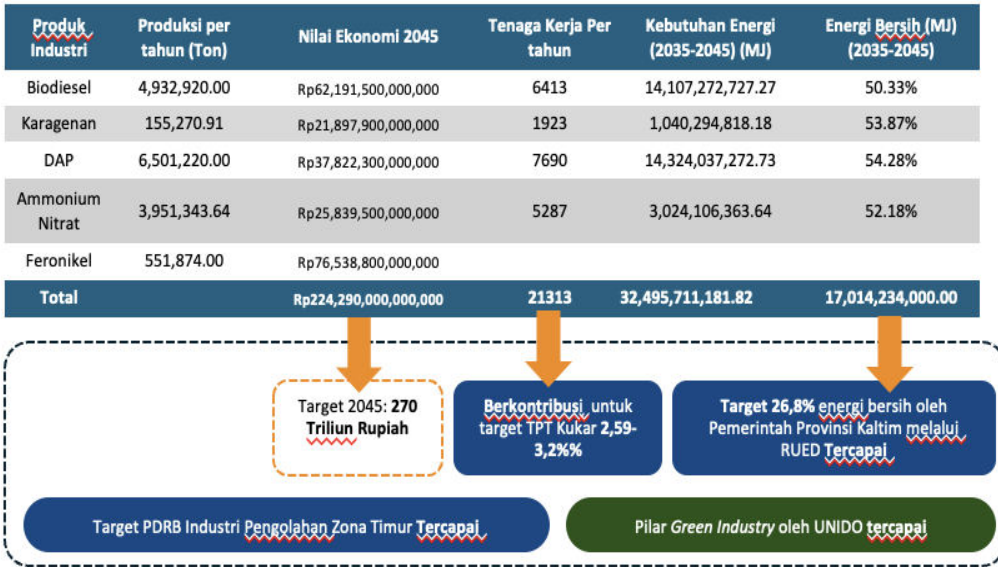
1. **Penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kutai Kartanegara untuk Industri Hijau**

Dalam perencanaan jangka menengah, Kutai Kartanegara sudah menetapkan lima 5 Lokasi Indikatif yang dapat diusulkan menjadi Kawasan Industri & 1 Lokasi indikatif menjadi KEK:

- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Sebulu
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Muara Badak 1
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Muara Badak 2
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Muara Badak 3
- Lokasi Indikatif Kawasan Industri Marangkayu

Dari lima Kawasan ekonomi tersebut, harapannya dapat meningkat nilai ekonomi dari sektor industri pengolahan, dengan rincian proyeksi nilai ekonomi sebagai berikut:

Gambar 3.6
Nilai Ekonomi Sektor Industri Pengolahan



2. **Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional** di SEPARI SEJAHTERA. Dengan ditetapkannya Separi Sejahtera sebagai bagian dari kebijakan nasional maka dalam jangka menengah, disusun arah kebijakan berdasarkan aspek agroekowisata sebagai berikut:

Tabel 3.12
Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Aspek Agroekowisata	Arah Kebijakan
Rekreasi	● Pengembangan Paket Wisata Tematik (Agro+Budaya+Alam), pengembangan wisata pertanian padi semi-subak (konsep Bali-Kutai) ● Pengembangan wisata atraksi alam yang dipadukan dengan lanskap perkebunan, pertanian kawasan melalui pengadaan jembatan gantung, perosotan, dan <i>walking path</i>/jalur sawah.
Edukasi	● Pengembangan wisata edukasi berbasis pengelolaan pertanian terintegrasi
Pelestarian Lingkungan	● Rehabilitasi lahan bekas tambang di Bukit Pariaman menjadi agroekowisata berbasis budaya dan pertanian. ● Penataan jalur wisata sawah, sarana edukatif, amenitas wisata, dan pemenuhan prasarana dasar berwawasan lingkungan.
Kearifan Lokal	● Penerapan langgam bangunan bercorak budaya kutai dan bali, serta <i>landmark</i>serta penanda kawasan yang khas budaya setempat untuk menguatkan citra kawasan dan rasa <i>sense of belonging</i>.
Pemanfaatan Ekonomi	● Pengembangan pusat pengelolaan produk pertanian terintegrasi. ● Penguatan UMKM lokal (kerajinan tangan, olahan keripik) melalui penyediaan pusat perdagangan skala WP-SWP dan fungsi campuran kawasan
Partisipasi Masyarakat dan Tata Kelola	● Pelatihan pengelolaan wisata dan pertanian ● Pelatihan pemandu wisata bagi pemuda desa. ● Pelatihan pengelolaan kawasan agroekowisata antar-desa. ● Penguatan kelembagaan Pokdarwis dan kelompok tani dalam pengembangan kawasan

3. **Pembangunan Kawasan Sentra Perikanan Budidaya** (Marangkayu-Muara Badak-Anggana)

Berdasarkan atas potensi pengembangan sentra perikanan di wilayah pesisir berikut indikasi kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan:

- **Pengembangan dan Dukungan Infrastruktur**

1. Pembangunan & Percepatan Pengoperasian *Hatchery* Udang Windu
 2. Pemetaan & Legalisasi Lahan Potensial Budidaya & Hatchery
 3. Penataan Kawasan Budidaya & Tata Lingkungan
 4. Penguatan Sistem Distribusi & Logistik Benih Udang
 5. Revitalisasi Infrastruktur Tambak Udang & Rumput Laut
- **Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan**
 1. Penguatan Kapasitas SDM Budidaya
 2. Penguatan Kelembagaan Koperasi/Kelompok
 - **Pemasaran dan Keberlanjutan Program**
 1. Dukungan Pembiayaan Operasional Pabrik Rumput Laut
 2. Monitoring & Evaluasi Terpadu Tahunan
 3. Pengembangan Rantai Pasok Rumput Laut Berbasis Industri
 4. Peningkatan Akses Pasar & Promosi Hasil Budidaya

Wilayah Zona Timur Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Sebulu, Tenggarong Seberang, Muara Badak, Marang Kayu, Anggana, Sangasanga mencapai 5.433,50 km2 dan setara 20% luas wilayah dari total luas wilayah zona timur. Berikut ini potensi zona Timur yang disertai dengan permasalahan dan indikasi intervensi:

Tabel 3.15
Pemetaan Potensi Zona Timur

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
Industri Hijau & Pengolahan	Biodiesel dari kelapa sawit	(1) Ketergantungan bahan baku CPO yang fluktuatif; (2) Infrastruktur logistik terbatas; (3) Limbah produksi belum tertangani optimal	Hilirisasi kelapa sawit berbasis biodiesel, penerapan <i>green industry & waste management</i>	Muara Badak, Marangkayu
	Karagenan dari rumput laut	(1) Pasokan bahan baku rumput laut tidak stabil; (2) Keterbatasan teknologi pengolahan; (3) Daya saing pasar rendah	Penguatan rantai pasok rumput laut, investasi teknologi pengolahan modern, diversifikasi produk	Muara Badak, Marangkayu
	Diammonium Phosphate (DAP)	(1) Ketergantungan impor bahan baku; (2) Tingginya biaya produksi; (3) Emisi & limbah kimia tinggi	Substitusi impor dengan bahan lokal, efisiensi energi, penerapan teknologi rendah emisi	Tenggarong Seberang
	Ammonium Nitrate	(1) Risiko keselamatan tinggi (bahan peledak); (2) Kebutuhan energi besar; (3) Potensi pencemaran lingkungan	Pengendalian ketat keselamatan industri, bauran energi bersih, teknologi pengurangan limbah	Sebulu, Muara Badak
Industri Penopang	Feronikel (existing)	(1) Produksi rendah dibanding potensi; (2) Ketergantungan energi fosil; (3) Dampak lingkungan tinggi	Transisi ke produksi hijau berbasis EBT, investasi upgrading teknologi	Marangkayu
Energi Baru Terbarukan (EBT)	Pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	(1) Ketergantungan energi fosil masih dominan; (2) Keterbatasan infrastruktur transmisi; (3) Investasi awal tinggi	Penerapan target RUED Kaltim (26,8% energi bersih 2045), integrasi energi terbarukan di kawasan industri	Marangkayu, Muara Badak, Sebulu
Perikanan & Kelautan	Rumput laut, perikanan	(1) Fluktuasi produksi;	Penguatan <i>cold storage</i> , diversifikasi produk	Anggana, Muara Badak

Potensi	Produk	Permasalahan	Indikasi Intervensi	Indikasi Lokasi Prioritas
	tangkap & budidaya	(2) Keterbatasan sarana penyimpanan & pengolahan; (3) Akses pasar lemah	olahan, penguatan akses pasar ekspor	
Pertanian & Perkebunan	Kelapa sawit, padi, hortikultura	(1) Produktivitas menurun akibat degradasi lahan; (2) Keterbatasan irigasi; (3) Rantai distribusi belum efisien	Intensifikasi & diversifikasi pertanian, penguatan irigasi, modernisasi rantai pasok	Tenggarong Seberang, Sebulu

3.3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Transisi IKN

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah transisi menuju pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelum terbentuknya pemerintahan daerah khusus (Pemdusus) IKN, Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai Mitra Pelayanan Publik, dengan tanggung jawab mendukung penyediaan layanan dasar seperti permukiman, transportasi, utilitas, pendidikan, dan kesehatan yang akan menopang pertumbuhan kawasan IKN. Hal ini selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2022, di mana Kutai Kartanegara diarahkan untuk menyediakan infrastruktur pendukung serta menjadi penyangga logistik, pangan, energi, dan layanan sosial, sehingga transisi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara geografis, beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara seperti Samboja dan Samboja Barat telah diposisikan sebagai daerah mitra utama IKN. Kedua wilayah ini memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan kawasan inti IKN sekaligus akses langsung ke jalur konektivitas menuju Balikpapan dan Samarinda. Arah kebijakan pembangunan di kawasan ini menitikberatkan pada pembentukan pusat layanan publik, pengembangan kawasan permukiman terintegrasi, serta peningkatan peran sebagai hub logistik dan transportasi. Selain itu, Samboja dan Samboja Barat juga diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian, sehingga mampu berperan ganda: mendukung kebutuhan langsung IKN sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dengan demikian, peran Kutai Kartanegara sebagai daerah transisi IKN tidak hanya sebatas penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan strategis yang memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penetapan Samboja dan Samboja Barat sebagai bagian dari kawasan mitra IKN menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan pembangunan daerah dengan agenda nasional, sehingga Kutai Kartanegara dapat mengambil manfaat maksimal dari keberadaan IKN, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

3.3.5. Distribusi Program Prioritas Per Kecamatan Berdasarkan Arah Kebijakan Kewilayahan

Pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan secara tematik melalui pengembangan zona strategis yang menekankan potensi unggulan, penguatan sektor prioritas, dan integrasi dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

1. Zona Utara

Zona utara difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berbasis perikanan air tawar serta pariwisata lokal. Kecamatan seperti Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis, dan Tabang diarahkan untuk:

- Peningkatan produktivitas pertanian (padi dan ubi kayu).
- Penguatan sentra perikanan air tawar.
- Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam dan budaya.

Adapun targetnya terwujudnya lumbung pangan daerah yang berkelanjutan, peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor perikanan, serta tumbuhnya ekonomi wisata berbasis kearifan lokal.

2. Zona Selatan

Zona selatan diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru, pusat permukiman, pertanian hortikultura, dan agrowisata. Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Tenggarong menjadi titik pertumbuhan utama dengan fokus pada:

- Pembangunan pusat perkotaan baru (Loa Janan Ulu, Jongkang, Loa Ipuh Darat-Jonggon).
- Penyediaan kawasan permukiman perkotaan terencana.
- Pengembangan pertanian hortikultura terpadu dan perikanan air tawar.
- Pariwisata perkotaan dan agrowisata.

Adapun targetnya yaitu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan perkotaan baru yang mendukung IKN, penguatan pangan hortikultura, serta pengembangan pariwisata modern.

3. Zona Timur

Zona timur diarahkan menjadi pusat industri hijau, energi baru terbarukan, dan sentra kelautan serta perikanan. Kecamatan Anggana, Marang Kayu, Muara Badak, Muara Jawa, Sebulu, dan Tenggarong Seberang berfokus pada:

- Kawasan sentra perikanan budidaya (udang, rumput laut, dan perikanan tangkap).
- Pengembangan industri hilirisasi kelapa sawit, rumput laut, dan amonium nitrat.
- Pengembangan energi baru terbarukan (listrik tenaga surya, angin, dan hidro).
- Penyelenggaraan SPAM regional dan pembangunan pelabuhan.

Adapun targetnya adalah tercapainya kawasan industri hijau yang berdaya saing, terbangunnya rantai pasok kelautan terpadu, serta dukungan infrastruktur energi dan logistik yang berkelanjutan.

4. Daerah Transisi IKN

Kecamatan Muara Jawa, Samboja dan Samboja Barat ditetapkan sebagai zona transisi Ibu Kota Negara (IKN) dengan fungsi sebagai penyangga strategis.

- Peningkatan infrastruktur dasar dan transportasi.
- Penataan ruang permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan IKN.
- Pengembangan kawasan strategis sebagai daerah penopang pertumbuhan ekonomi baru.

Adapun targetnya adalah terciptanya kawasan transisi yang terintegrasi dengan IKN, serta menjadi pusat pelayanan dan permukiman yang modern sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Berikut merupakan tabel distribusi program strategis per kecamatan.

Tabel 3.14
Distribusi Program Strategis Per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Program Strategis	Keterangan	Kode
A	Anggana	Kawasan Sentra perikanan budidaya	Zona Timur	A1
		Penataan Kawasan Budidaya & Tata Lingkungan	Zona Timur	A1

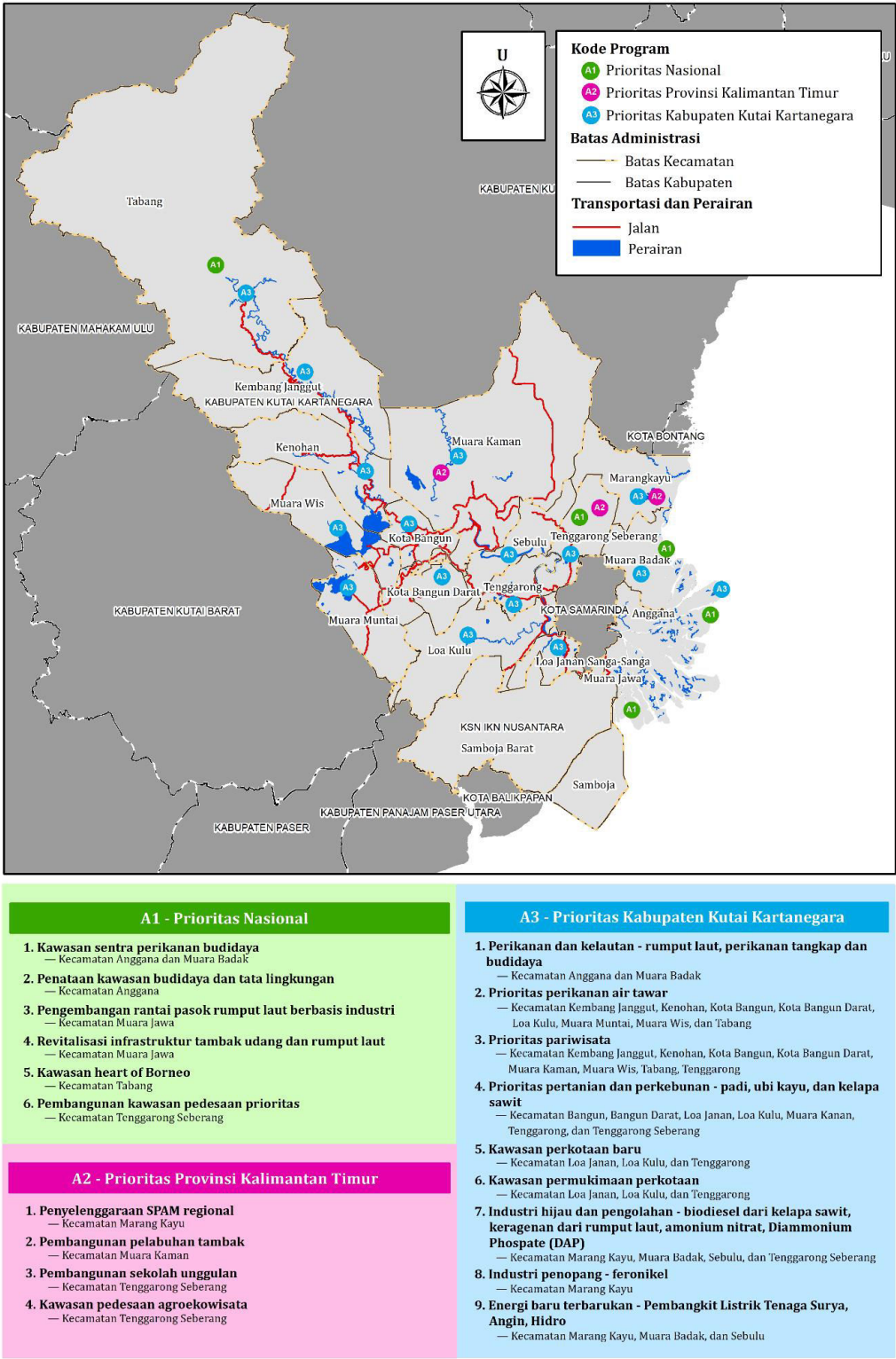
No	Nama Kecamatan	Program Strategis	Keterangan	Kode
		Perikanan dan kelautan - rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya	Zona Timur	A3
B	Kembang Janggut	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
C	Kenohan	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
D	Kota Bangun	Prioritas pertanian - padi	Zona Utara	A3
		Prioritas pertanian - ubi kayu	Zona Utara	A3
		Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
E	Kota Bangun Darat	Prioritas pertanian - padi	Zona Utara	A3
		Prioritas pertanian - ubi kayu	Zona Utara	A3
		Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
F	Loa Janan	Kawasan Perkotaan Baru	Loa Janan Ulu	A3
		Kawasan permukiman perkotaan	Zona Selatan	A3
		Pertanian - padi hortikultura, perikanan air tawar	Zona Selatan	A3
G	Loa Kulu	Kawasan Perkotaan Baru	Jongkang	A3
		Kawasan permukiman perkotaan	Zona Selatan	A3
		Pertanian - padi hortikultura, Perikanan air tawar	Zona Selatan	A3
		Kawasan pariwisata agrowisata	Zona Selatan	A3
H	Marang Kayu	Industri hijau dan pengolahan-Biodiesel dari kelapa sawit	Zona Timur	A3
		Industri hijau dan pengolahan-Karagenan dari rumput laut	Zona Timur	A3
		Industri penopang - feronikel	Zona Timur	A3
		Energi Baru terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	Zona Timur	A3
		Penyelenggaraan SPAM regional Marangkayu	Zona Timur	A2
I	Muara Badak	Kawasan Sentra perikanan budidaya	● Pembangunan & Percepatan Pengoperasian Hatchery Udang Windu ● Penguatan Sistem Distribusi & Logistik Benih Udang ● Pemetaan & Legalisasi Lahan Potensial Budidaya & Hatchery ● Penguatan Kapasitas SDM Budidaya ● Penguatan Kelembagaan Koperasi/Kelompok ● Dukungan Pembiayaan Operasional Pabrik Rumput Laut ● Peningkatan Akses Pasar & Promosi Hasil Budidaya ● Monitoring & Evaluasi Terpadu Tahunan	A1
		Industri hijau dan pengolahan-Biodiesel dari kelapa sawit	Zona Timur	A3
		Industri hijau dan pengolahan-Karagenan dari rumput laut	Zona Timur	A3
		Industri hijau dan pengolahan-Amonium Nitrat	Zona Timur	A3
		Energi Baru terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	Zona Timur	A3
		Perikanan dan kelautan - rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya	Zona Timur	A3

No	Nama Kecamatan	Program Strategis	Keterangan	Kode
J	Muara Jawa	Pengembangan Rantai Pasok Rumput Laut Berbasis Industri	Masuk daerah transisi IKN	A1
		Revitalisasi Infrastruktur Tambak Udang & Rumput Laut	Masuk daerah transisi IKN	A1
K	Muara Kaman	Prioritas pertanian - padi	Zona Utara	A3
		Prioritas pertanian - ubi kayu	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
		Pembangunan pelabuhan tambat	Zona Utara	A2
L	Muara Muntai	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
M	Muara Wis	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
N	Sangasanga	Pengembangan Kawasan Industri Eksisting	Zona Timur	-
O	Sebulu	Industri hijau dan pengolahan-Amonium Nitrat	Zona Timur	A3
		Energi Baru terbarukan - pembangkit listrik tenaga surya, angin, hidro	Zona Timur	A3
		Pertanian dan perkebunan - kelapa sawit, padi, hortikultura	Zona Timur	A3
P	Tabang	Prioritas perikanan air tawar	Zona Utara	A3
		Prioritas pariwisata	Zona Utara	A3
		Kawasan <i>Heart of Borneo</i>	Zona Utara	A1
Q	Tenggarong	Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan perkotaan Loa Ipuh Darat-Jonggon	A3
		Kawasan permukiman perkotaan	Zona Selatan	A3
		Pertanian - padi hortikultura, perikanan air tawar	Zona Selatan	A3
		Kawasan pariwisata - museum mulawarman kedaton	Zona Selatan	A3
R	Tenggarong Seberang	Pembangunan kawasan perdesaan prioritas		A1
		Industri hijau dan pengolahan-Diammonium Phosphate (DAP)	Zona Timur	A3
		Pertanian dan perkebunan - kelapa sawit, padi, hortikultura	Zona Timur	A3
		Pembangunan sekolah unggulan		A2
		Pembangunan kawasan perdesaan agro ekowisata separi sejahtera		A3
S	Samboja		Masuk daerah transisi IKN	
T	Samboja Barat		Masuk daerah transisi IKN	

Keterangan:
A1: Prioritas Nasional
A2: Prioritas Provinsi Kalimantan Timur
A3: Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan arah kebijakan kewilayahan secara utuh, dapat di sajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.7
Sebaran Program Strategis dalam Pendekatan Wilayah



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2030. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana program PD dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034;

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya. Pada Dokumen Rancangan RPJMD ini, Pagu Indikatif yang tertera telah sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Berikut outcome dan program perangkat daerah yang disertai target indikator dan pendanaan.

Tabel 4.1
Program, Target dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026-2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4,042,751,534,403		4,010,436,018,165		4,087,015,015,269		4,142,230,581,656		4,200,349,170,675		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1,456,864,943,951		1,552,414,943,552		1,577,237,280,588		1,613,695,505,291		1,654,430,531,380		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			1,456,864,943,951		1,552,414,943,552		1,577,237,280,588		1,613,695,505,291		1,654,430,531,380		
1.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20,213,719,384		927,438,719,384		932,861,056,421		927,438,719,384		927,438,719,384	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	61.83	73.5		74		74.5		75		75.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				33,131,224,567		17,356,224,168		36,756,224,167		78,636,785,907		19,371,811,996	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi SD/Sederajat	Rata-rata skor kemampuan literasi dan numerasi SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	67.2	72.2		74.7		77.2		79.7		81.2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi SMP/Sederajat	Rata-rata skor kemampuan literasi dan numerasi SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	78.64	84.64		87.64		90.64		93.64		96.64		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya mutu pendidikan PAUD	Persentase PAUD yang mendapatkan Akreditasi B (Dengan Satuan:Persen)	47.36	49.92		50.12		50.32		50.52		50.72		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya iklim keamanan sekolah	Indeks Iklim Keamanan PAUD (Dengan Satuan:Persen)	65.56	68.74		68.94		69.14		69.34		69.54		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Keamanan SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	70.87	71.15		71.35		71.55		71.75		71.95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Keamanan SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	69.71	70.57		70.77		70.97		71.17		71.37		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya iklim kebhinekaan sekolah	Indeks Iklim Kebhinekaan SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	70.79	71.99		72.19		72.39		72.59		72.79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	73.12	73.22		73.52		73.72		73.92		74.12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya iklim inklusivitas sekolah	Indeks Iklim Inklusivitas SD/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	53.59	55.39		55.59		55.79		55.99		56.19		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Iklim Inklusivitas SMP/Sederajat (Dengan Satuan:Persen)	56.46	57.52		57.72		57.92		58.12		58.32		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS PAUD 5-6 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	60.51	74.54		74.74		74.94		75.34		75.54		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS SD/Sederajat 7-12 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	99.78	99.78		99.78		99.78		99.88		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
		APS SMP/Sederajat 13-15 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	99.46	99.46		99.56		99.66		99.76		99.76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APS Kesetaraan 7-18 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	18.1	27.53		28.53		29.53		30.53		31.53		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1,720,000,000		5,520,000,000		5,520,000,000		5,520,000,000		5,520,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru PAUD (Dengan Satuan:Indeks)	0.27	0.56		0.76		0.96		1.16		1.36		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Distribusi Guru SD (Dengan Satuan:Indeks)	0.38	0.72		0.92		1.12		1.32		1.52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Distribusi Guru SMP (Dengan Satuan:Indeks)	0.27	0.72		0.92		1.12		1.32		1.52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD (Dengan Satuan:Persen)	28.69	34.5		35.5		36.5		37.5		38.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD (Dengan Satuan:Persen)	36.04	62.89		63.89		64.89		65.89		66.89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP (Dengan Satuan:Persen)	36.94	47.5		48.5		49.5		50.5		51.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah D.4 atau S.1 (Dengan Satuan:Persen)	0.2	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				530,000,000		680,000,000		680,000,000		680,000,000		680,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				820,000,000		970,000,000		970,000,000		970,000,000		970,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Terlestariannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,327,442,538,847		1,209,161,992,556		1,221,957,883,176		1,236,491,720,677		1,250,280,108,558		
	DINAS KESEHATAN			1,327,442,538,847		1,209,161,992,556		1,221,957,883,176		1,236,491,720,677		1,250,280,108,558		
1.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				81,960,254,298		36,556,732,748		55,143,128,200		79,882,846,210		99,469,029,534	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75.12	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
		Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit (Dengan Satuan:Nilai)	82.6	82.75		83		83.25		83.5		84		Dinas Kesehatan
		Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti (Dengan Satuan:Nilai)	86.6	89.66		92.72		95.78		98.84		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja (Dengan Satuan:Nilai)	79.4	80.5		81		81.5		82		83		Dinas Kesehatan
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			31,877,284,549		61,495,259,808		55,704,754,976		45,498,874,467		39,701,079,024		Dinas Kesehatan
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia ? 15 tahun (Dengan Satuan:Persen)	1.56	1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	7.2	12.2		14.7		17.2		22.2		24.7		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (Dengan Satuan:Persen)	43.42	40.11		36.79		33.48		30.16		26.85		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	58.83	60		65		70		75		80		Dinas Kesehatan
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	84.5	84.5		85.5		86.5		87.5		88		Dinas Kesehatan
		Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (Dengan Satuan:Persen)	70	80		85		90		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Dengan Satuan:Persen)	83	83		83		86		86		86		Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	80	80		85		90		95		100		Dinas Kesehatan
		Persentase lanjut usia yang mandiri (Dengan Satuan:Persen)	82.78	77		79		81		83		85		Dinas Kesehatan
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Dengan Satuan:Persen)	7.7	7.6		7.6		7.6		7.5		7.4		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Cakupan penemuan kasus TB (Dengan Satuan:Persen)	70.6	80		85		90		91		91		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	92	92		93		93		94		95		Dinas Kesehatan
		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita (Dengan Satuan:Persen)	9	9		8.5		8		7.5		7		Dinas Kesehatan
		Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes (Dengan Satuan:Persen)	50	70		80		90		100		100		Dinas Kesehatan
		Insidensi Stunting Balita (kasus baru) (Dengan Satuan:Persen)	2	2		2		1		1		1		Dinas Kesehatan
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (Dengan Satuan:Angka)	388	326		278		244		219		199		Dinas Kesehatan
		Eliminasi Kusta (Dengan Satuan:Persen)	0.3	0.2		0.15		0.1		0.05		0.01		Dinas Kesehatan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				4,350,000,000		3,780,000,000		3,780,000,000		3,780,000,000		3,780,000,000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Per 1000)	3.77	4.35		4.59		4.81		5.01		5.2		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	44.44	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	66.67	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				730,000,000		730,000,000		730,000,000		730,000,000		730,000,000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Dengan Satuan:Persen)	98.8	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	72	72		74		76		78		80		Dinas Kesehatan
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (Dengan Satuan:Persen)	75	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	70	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Dengan Satuan:Persen)	90	91		92		93		94		95		Dinas Kesehatan
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				8,525,000,000		6,600,000,000		6,600,000,000		6,600,000,000		6,600,000,000	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Dengan Satuan:Persen)	34	35		45		64		80		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Kemitraan atau kerjasama yang terlaksana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			925,461,523,485		636,424,389,939		616,731,979,822		605,094,834,579		608,567,269,561		
	DINAS PEKERJAAN UMUM			712,181,023,485		577,319,389,939		469,063,970,822		457,242,725,579		459,765,160,561		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			47,644,658,111		56,784,138,659		58,172,750,479		58,184,652,979		58,198,340,854	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.47	77.05		77.1		77.15		77.2		77.25	Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			45,312,170,934		60,404,727,034		34,276,245,143		30,582,333,578		30,548,046,404	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (Dengan Satuan:Persen)	17.24	29.46		32.19		35.10		37.06		39.06	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi dan banjir rob	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob (Dengan Satuan:Persen)	2.82	6.94		8.60		8.60		8.60		8.60	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	70.11	73.53		74.33		75.23		75.95		76.68	Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			48,750,000,000		34,287,629,313		37,789,117,465		26,856,903,963		27,805,869,377	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	N/A	6.93		11.81		17.18		21		24.95	Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.0 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			20,993,501,200		17,206,732,073		14,167,969,809		13,836,136,970		13,906,735,723	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:Persen)	61.29	62.37		62.90		63.44		63.98		64.52	Dinas Pekerjaan Umum	
	Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten (Dengan Satuan:Persen)	100	100		11		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.0 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			36,699,437,240		46,951,851,183		24,835,220,574		30,208,519,524		29,653,979,071	Dinas Pekerjaan Umum	
	Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata (Dengan Satuan:Persen)	69.75	71		71.38		71.75		72.13		72.5	Dinas Pekerjaan Umum	
1.03.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			08,616,256,000		58,585,837,243		97,347,741,600		95,029,455,551		97,096,821,873	Dinas Pekerjaan Umum	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Dengan Satuan:Persen)	63.198	65.981		66.48		66.484		67.23		67.79		Dinas Pekerjaan Umum
1.03.1 1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4,165,000,000		3,098,474,435		2,474,925,753		2,544,723,014		2,555,367,258	Dinas Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Bersertifikat (Dengan Satuan:Persen)	3.43	5.17		6.39		7.22		8.06		8.92		Dinas Pekerjaan Umum
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			208,255,500,000		52,905,000,000		141,668,009,000		142,502,109,000		142,502,109,000		
1.03.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				30,828,000,000		50,775,000,000		12,528,000,000		13,970,000,000		13,970,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten (Dengan Satuan:Persen)	80.2	84.78		87.28		89.84		92.49		96.11		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.03.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				77,427,500,000		2,130,000,000		29,140,009,000		28,532,109,000		28,532,109,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Dengan Satuan:Persen)	89.1	98.94		99.16		99.3		99.38		99.4		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG			5,025,000,000		6,200,000,000		6,000,000,000		5,350,000,000		6,300,000,000		
1.03.1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5,025,000,000		6,200,000,000		6,000,000,000		5,350,000,000		6,300,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (Dengan Satuan:Persen)	58.2	68.87		76.96		84.8		91.78		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			173,620,185,757		452,217,401,871		505,114,955,264		507,459,610,021		496,927,045,003		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			173,620,185,757		452,217,401,871		505,114,955,264		507,459,610,021		496,927,045,003		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32,882,935,757		36,546,331,853		36,896,331,853		38,396,331,853		38,396,331,853	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70.12	70.5		71		71.5		72		72.5		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				43,201,000,000		71,595,000,000		46,795,000,000		46,395,000,000		46,395,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas rumah layak huni (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.0 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4,875,000,000		4,850,000,000		4,600,000,000		4,600,000,000		4,600,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupten yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	77.42	43.66		60.56		77.46		88.73		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.0 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				40,300,000,000		50,667,500,000		50,667,500,000		50,667,500,000		50,667,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani (Dengan Satuan:Persen)	43.56	53.90		65.43		76.95		88.48		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				52,286,250,000		87,558,570,018		65,156,123,411		66,400,778,168		55,868,213,150	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (Dengan Satuan:Persen)	16.03	46.41		54.85		63.29		71.73		80.17		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				75,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum PSU (Dengan Satuan:Persen)	n.a	11.76		17.65		23.53		29.41		35.29		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			122,243,961,864		119,055,920,641		123,343,185,811		133,812,694,066		141,602,140,650		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			39,679,659,345		40,536,106,166		42,115,934,762		45,333,933,405		47,887,509,560		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36,836,573,345		34,176,106,166		35,955,934,762		33,934,079,153		36,249,269,560	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66.29	67		68		69		70		71		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				2,843,086,000		6,360,000,000		6,160,000,000		11,399,854,252		11,638,240,000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase anggota SATPOL PP yang dilatih (Dengan Satuan:Persen)	1.16	20		40		60		80		Satuan Polisi Pamong Praja		
	Meningkatnya kapasitas SDM Satlinmas	Persentase anggota SATLINMAS yang dilatih (Dengan Satuan:Persen)	0	20		40		60		80		Satuan Polisi Pamong Praja		
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Dengan Satuan:Persen)	64	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja	
	Meningkatnya kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	0	20	40		60		80		100		Satuan Polisi Pamong Praja	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			24,447,757,748		23,800,200,611		25,385,763,004		28,564,517,761		31,086,952,743		
1.05.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20,282,757,748		18,439,450,293		18,950,763,004		22,231,210,306		24,801,952,743	Badan Penanggulan an Bencana Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	64.62	72.5		72.52		72.54		72.56		72.58		Badan Penanggulan an Bencana Daerah
1.05.0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				4,165,000,00 0		5,360,750,31 8		6,435,000,00 0		6,333,307,45 5		6,285,000,00 0	Badan Penanggulan an Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulan an Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulan an Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulan an Bencana Daerah
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			46,381,516,166		41,578,801,948		43,164,364,341		46,343,119,098		48,865,554,080		
1.05.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				40,363,016,166		39,133,801,948		40,439,364,341		43,198,119,098		45,470,554,080	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	46.31	60		62		64		66		68		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGANPENYELAM ATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6,018,500,00 0		2,445,000,00 0		2,725,000,00 0		3,145,000,00 0		3,395,000,00 0	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
		Cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)																Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Meningkatnya sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran	Cakupan sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran sesuai standar dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	64.04	66									68	70	72	74	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11,735,028,605		13,140,811,917		12,677,123,703		13,571,123,802		13,762,124,267						
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,735,028,605		13,140,811,917		12,677,123,703		13,571,123,802		13,762,124,267	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75.34	77		78		79		80		81		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			37,118,380,499		41,161,369,607		42,629,730,607		45,676,217,022		48,542,075,522						
	DINAS SOSIAL			37,118,380,499		41,161,369,607		42,629,730,607		45,676,217,022		48,542,075,522						
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,387,210,499		17,399,099,607		17,608,210,607		16,529,697,022		17,780,555,522	Dinas Sosial				
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	73.57	75.00		80.00		80.50		81.00		81.50		Dinas Sosial				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				7,058,800,000		7,358,800,000		7,958,800,000		7,958,800,000		10,558,800,000	Dinas Sosial				
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	37.5	62.5		70.8		79.8		91.6		100		Dinas Sosial				

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	60.61	68.1		76		83.7		93.6		100		Dinas Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				25,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Sosial
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				5,693,370,000		7,933,720,000		8,483,720,000		9,083,720,000		9,583,720,000	Dinas Sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Sosial		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		Dinas Sosial				
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		Dinas Sosial				
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3,904,000,000		6,294,750,000		5,979,000,000		7,604,000,000		8,044,000,000	Dinas Sosial
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Dengan Satuan:Persen)	80	82		85		87		88		90		Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Dengan Satuan:Persen)	n/a	6.54	9.82	9.82	13.09		16.36		19.63		Dinas Sosial					
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Dengan Satuan:Persen)	n/a	6.54									13.09	16.36	19.63	Dinas Sosial		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				1,550,000,000		1,800,000,000		2,225,000,000		2,150,000,000		2,200,000,000	Dinas Sosial				
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100		100	100		100	100	Dinas Sosial				
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (Dengan Satuan:Persen)	n/a	3.78										5.75	7.73	9.70	11.68	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100										100	100	100	100	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				3,500,000,000		325,000,000		325,000,000		2,300,000,000		325,000,000	Dinas Sosial				
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Sosial				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			805,326,648,807		622,694,217,301		640,761,603,241		653,621,776,466		694,207,453,897						
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			33,269,494,450		40,259,452,768		41,820,015,161		44,548,769,918		47,735,482,769						
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			33,269,494,450		40,259,452,768		41,820,015,161		44,548,769,918		47,735,482,769						
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,039,494,450		18,855,732,768		20,125,770,161		18,928,184,918		20,334,277,769	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja				

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	70.92	72.26		72.76		73.26		73.76		74.26		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.0 2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				75,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		550,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				4,150,000,000		5,962,020,000		4,849,545,000		7,783,885,000		8,214,505,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (Dengan Satuan:Persen)	21.79	22.93		23.12		23.47		23.78		24.07		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.0 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				3,405,000,000		3,550,000,000		4,550,000,000		5,150,000,000		6,050,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Dengan Satuan:Persen)	18.05	24.43		26.85		29.00		30.93		32.66		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.07.0 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				10,600,000,000		11,741,700,000		12,144,700,000		12,536,700,000		12,586,700,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			15,094,373,547		20,122,244,765		21,625,008,551		24,686,031,650		28,443,598,852		
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			15,094,373,547		20,122,244,765		21,625,008,551		24,686,031,650		28,443,598,852		
2.08.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,944,373,547		12,247,244,765		12,475,008,551		14,786,031,650		16,093,598,852	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	58.89	71		71.5		71.8		72		73		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.0 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				1,400,000,000		2,150,000,000		2,350,000,000		2,350,000,000		2,450,000,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Dengan Satuan:Persen)	18.74	25.99		35		40		45		50		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				925,000,000		1,850,000,000		1,850,000,000		1,850,000,000		1,850,000,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				300,000,000		925,000,000		1,000,000,000		1,200,000,000		2,000,000,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	15	25		30		35		40		45		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				50,000,000		150,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender (Dengan Satuan:Persen)	53.45	65.52		75.86		82.76		89.66		100.00		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				275,000,000		1,000,000,000		1,150,000,000		1,550,000,000		2,150,000,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (Dengan Satuan:Nilai)	690	710		750		800		850		880		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				1,200,000,000		1,800,000,000		2,550,000,000		2,700,000,000		3,650,000,000	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			52,868,585,612		32,092,118,569		33,721,947,165		36,939,945,808		38,164,966,226		
	DINAS KETAHANAN PANGAN			52,868,585,612		32,092,118,569		33,721,947,165		36,939,945,808		38,164,966,226		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,775,265,612		13,342,118,569		13,976,947,165		14,334,945,808		14,222,466,226	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66.94	69		70.00		71.00		72.00		73.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				15,770,000,000		5,300,000,000		5,300,000,000		6,700,000,000		6,900,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	200	100		100		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				19,087,960,000		10,800,000,000		11,270,000,000		12,155,000,000		12,992,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Dengan Satuan:Skor)	93.8	94		94.50		95.00		95.50		96.00		Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.0 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				2,200,000,000		1,700,000,000		2,100,000,000		2,550,000,000		2,800,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan (Dengan Satuan:Persen)	7.30	5.90		5.06		4.22		3.38		3		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.0 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				4,035,360,000		950,000,000		1,075,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Dengan Satuan:Persen)	93	72.28		73.79		74.80		75.82		76.83		Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			44,689,753,689		21,044,223,651		21,289,188,830		24,682,480,272		27,396,623,955		
	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG			44,689,753,689		21,044,223,651		21,289,188,830		24,682,480,272		27,396,623,955		
2.10.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,367,021,505		16,144,223,651		17,330,499,404		19,785,534,225		22,471,623,955	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75.57	77.75		77.80		77.85		77.90		78.00		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.0 4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				1,600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase kasus tanah garapan yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	73	82		89		89		89		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.0 5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				22,972,732,184		2,000,000,000		1,183,689,426		2,071,946,047		2,000,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Dengan Satuan:Persen)	60	70		70		80		90		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.0 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				650,000,000		375,000,000		350,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria	Persentase luas realisasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Dengan Satuan:Persen)	n/a	11,62		17,44		23,25		29,06		30,00		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.0 7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				0		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Terlaksananya penetapan tanah ulayat	Persentase Lokasi Tanah Ulayat yang diusulkan untuk ditetapkan (Dengan Satuan:Persen)	45	45		61		62		63		64		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.0 8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				950,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya bidang Tanah Asset Pemda yang bersertipikat	Persentase luas realisasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Dengan Satuan:Persen)	17.75	19.99		21.19		22.22		23.25		24.28		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.0 9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				500,000,000		500,000,000		400,000,000		400,000,000		500,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertib administrasi pemberian izin membuka tanah	Persentase permohonan izin membuka tanah /dan atau surat tanah yang diterbitkan Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.10.1 0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				650,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan (Dengan Satuan:Persen)	78	80		81		82		83		84		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan (Dengan Satuan:Persen)	29	45		50		60		70		80		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			211,818,710,838		108,145,842,481		109,831,404,874		83,030,159,631		84,224,038,876		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			211,818,710,838		108,145,842,481		109,831,404,874		83,030,159,631		84,224,038,876		
2.11.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,341,593,838		21,038,383,542		21,271,276,534		20,638,383,542		20,893,720,942	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69.76	70.52		72.56		73.25		73.45		73.55		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.0 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				800,000,000		700,000,000		500,000,000		0		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		0		0		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4,882,611,000		3,820,000,000		3,870,000,000		3,895,000,000		4,220,916,994	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya status mutu lingkungan perairan	Indeks Pencemaran Air (Dengan Satuan:Indeks)	2.24	4		3.74		3.5		3.25		3		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya status mutu udara	Indeks Pencemaran Udara (Dengan Satuan:Indeks)	0.23	2		1.75		1.5		1.25		1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				9,198,506,000		8,448,506,000		8,598,506,000		8,498,506,000		8,448,506,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dengan Satuan:Persen)	0.37	0.39		0.40		0.41		0.42		0.43		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.0 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				475,000,000		400,000,000		400,000,000		475,000,000		400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				180,000,000		600,000,000		625,000,000		650,000,000		800,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU (Dengan Satuan:Persen)	44.95	19.32		20.00		20.83		21.67		22.50		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				75,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		240,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Persen)	n.a	1		1		1		1		1		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				480,000,000		850,000,000		850,000,000		850,000,000		900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	35	40		40		40		40		40		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200,000,000		400,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				280,000,000		430,000,000		430,000,000		430,000,000		480,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana (Dengan Satuan:Persen)	100	84	89	89	89	89	89	89		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			71,906,000,000	71,268,952,939	72,596,622,340	46,903,270,089	47,340,894,940				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Dengan Satuan:Indeks)	39.90	55	57	60	61	62				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			16,629,598,801		24,439,735,623		26,000,298,016		29,179,052,773		33,030,043,493		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			16,629,598,801		24,439,735,623		26,000,298,016		29,179,052,773		33,030,043,493		
2.12.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,464,598,801	21,039,735,623	21,964,404,810	23,568,159,567	25,869,150,287				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	74.58	75	76	77	78	79				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
2.12.0 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			395,000,000	1,100,000,000	1,375,000,000	1,650,000,000	2,600,000,000				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-el (Dengan Satuan:persen)	99.79	99.80	99.81	99.82	99.83	99.84	99	99.4	99.4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak (KIA) (Dengan Satuan:persen)	68.01	85		90		95						
2.12.0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			420,000,000	1,300,000,000	1,410,893,206	1,410,893,206	1,410,893,206				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (Dengan Satuan:persen)	99.68	99	99	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan (Dengan Satuan:persen)	70.46	73		76		79				82	85	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100				100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				250,000,000		700,000,000		950,000,000		1,800,000,000		2,300,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				100,000,000		300,000,000		300,000,000		750,000,000		850,000,000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			66,871,585,511		100,335,258,800		102,009,736,408		104,015,634,480		105,406,920,761		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			66,871,585,511		100,335,258,800		102,009,736,408		104,015,634,480		105,406,920,761		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,753,414,441		19,523,533,840		21,265,002,182		21,360,002,182		21,360,002,182	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	78.65	78		80		82		84		85		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				2,550,000,000		775,000,000		2,600,000,000		4,238,188,428		2,150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Dengan Satuan:Persen)	29.17	50		66.67		83.33		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				435,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		1,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Dengan Satuan:Persen)	33.33	50		66.67		83.33		91.67		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				21,194,043,870		28,003,472,960		25,063,164,226		25,794,193,870		29,413,108,579	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Persen)	9.79	10.79		16.25		17.22		21.55		27.53		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				23,939,127,200		50,733,252,000		51,681,570,000		51,123,250,000		50,983,810,000	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K) (Dengan Satuan:Persen)	98.12	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat (Dengan Satuan:persen)	100	100		100		100		100		Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			17,092,873,076		22,648,750,422		24,171,514,208		27,282,537,307		31,140,104,509		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			17,092,873,076		22,648,750,422		24,171,514,208		27,282,537,307		31,140,104,509		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,083,073,076		12,140,324,190		12,140,324,190		12,140,324,190		12,140,324,190	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	59	62		65		68		71		74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				800,000,000		3,426,000,000		3,926,944,018		4,947,404,372		6,199,928,319	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terkendalinya penambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Dengan Satuan:Angka)	2.2	2.19		2.18		2.18		2.17		2.17		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility	25.8	25		24.6		24.3		23.9		23.6		Dinas Pengendalian Penduduk dan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rate/ASFR 15-19) (Dengan Satuan:Angka)												Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1,075,000,000		3,656,426,232		4,177,123,000		5,247,404,373		6,599,926,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Dengan Satuan:Persen)	80.2	80.3		80.3		80.3		80.4		80.4		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Dengan Satuan:Persen)	14.7	10.7		9.6		8.9		8.4		8.1		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Dengan Satuan:Persen)	3.47	13.19		22.92		32.64		42.36		50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				4,134,800,000		3,426,000,000		3,927,123,000		4,947,404,372		6,199,926,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS]	Indeks Pengasuhan Remaja (Dengan Satuan:Nilai)	90.4	91.4		91.8		92.2		92.6		93		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Lansia Berdaya (Dengan Satuan:Nilai)	56.5	58.2		59.1		59.9		60.7		61.4		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			115,094,761,856		64,731,818,383		63,062,107,610		63,690,276,769		66,648,688,168		
	DINAS PERHUBUNGAN			115,094,761,856		64,731,818,383		63,062,107,610		63,690,276,769		66,648,688,168		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46,345,726,331		40,613,222,331		40,613,222,331		40,613,222,331		40,613,222,331	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	55.85	60		65		70		75		80		Dinas Perhubungan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.15.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				62,274,035,525		17,643,596,052		15,973,885,279		16,602,054,438		19,560,465,837	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Konektivitas Darat (Dengan Satuan:Rasio)	0.038	0.113		0.188		0.263		0.3		0.3		Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (Dengan Satuan:Persen)	39.62	41.45		56.09		70.73		85.36		100.00		Dinas Perhubungan
2.15.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				6,475,000,000		6,475,000,000		6,475,000,000		6,475,000,000		6,475,000,000	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Sungai, Danau (Dengan Satuan:Rasio)	0.581	0.609		0.616		0.623		0.637		0.644		Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			51,298,010,636		50,651,332,968		51,119,506,503		54,151,408,002		57,573,154,841		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			51,298,010,636		50,651,332,968		51,119,506,503		54,151,408,002		57,573,154,841		
2.16.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28,584,422,466		28,368,863,242		28,524,921,085		29,535,554,924		30,676,137,203	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	66.17	75		78		80		81		82		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2,155,000,000		1,939,440,778		2,095,498,624		3,106,132,454		4,246,714,734	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				20,558,588,170		20,343,028,948		20,499,086,794		21,509,720,624		22,650,302,904	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			27,085,435,394		24,392,165,955		26,010,526,955		29,307,013,370		30,594,316,133		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			27,085,435,394		24,392,165,955		26,010,526,955		29,307,013,370		30,594,316,133		
2.17.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,195,435,394		13,167,165,955		14,570,526,955		13,687,013,370		14,059,316,133	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	61.54	63.33		64.54		65.00		66.54		67.54		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.0 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				1,250,000,00 0		1,250,000,00 0		1,250,000,00 0		2,200,000,00 0		2,200,000,00 0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Dengan Satuan:Persen)	24.29	28.90		51.81		53.68		55.56		57.43		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.0 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				865,000,000		1,235,000,00 0		1,450,000,00 0		1,565,000,00 0		1,880,000,00 0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat dan Cukup Sehat (Dengan Satuan:Persen)	19.71	24.67		25.45		26.11		26.67		27.69		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.0 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				650,000,000		650,000,000		650,000,000		870,000,000		870,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Dengan Satuan:Persen)	16.51	19.50		32.80		34.33		46.82		48.06		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				230,000,000		735,000,000		735,000,000		735,000,000		735,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Dengan Satuan:Persen)	51.82	53.28		54.74		56.20		58.39		60.58		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pertumbuhan volume usaha koperasi (Dengan Satuan:Persen)	108.28	2.00		2.00		2.50		3.00		3.00		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				3,205,000,00 0		2,780,000,00 0		2,780,000,00 0		4,500,000,00 0		5,000,000,00 0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari informal ke formal (Dengan Satuan:Persen)	74.21	75.69		76.53		77.38		78.22		79.06		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya ekosistem wirausaha skala mikro	Pertumbuhan Wirausaha (Dengan Satuan:Persen)	0.99	1.2		1.35		1.48		1.49		1.62		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				8,690,000,000		4,575,000,000		4,575,000,000		5,750,000,000		5,850,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan/atau Ekspor (Dengan Satuan:Persen)	2.04	5.30		5.48		6.20		6.13		6.07		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			23,534,440,481		26,006,463,819		26,835,831,784		29,543,659,910		33,020,956,558		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			23,534,440,481		26,006,463,819		26,835,831,784		29,543,659,910		33,020,956,558		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,934,440,481		18,786,463,819		19,735,927,864		22,025,512,532		23,177,237,320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	78.54	79.33		79.72		80.12		80.52		80.93		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2,500,000,000		1,075,000,000		1,705,000,000		1,868,147,378		3,676,219,238	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total investasi (Dengan Satuan:Rupiah (trilyun))	11.62	11.8		12.07		12.43		12.85		13.39		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Realisasi Total terhadap Target Investasi (Dengan Satuan:Persen)	105.84	74.87		75.98		77.67		79.93		82.58		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1,050,000,000		825,000,000		1,560,000,000		2,010,000,000		2,497,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (Dengan Satuan:Persen)	75.00	80.00		83.00		85.00		88.00		90.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1,300,000,000		1,495,000,000		1,535,000,000		1,665,000,000		1,820,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				750,000,000		825,000,000		900,000,000		975,000,000		1,050,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (Dengan Satuan:Persen)	75.00	77.00		79.00		80.00		82.00		84.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1,000,000,000		3,000,000,000		1,399,903,920		1,000,000,000		800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			86,099,615,063		30,651,044,466		32,256,606,859		35,435,361,616		36,629,240,861		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA			86,099,615,063		30,651,044,466		32,256,606,859		35,435,361,616		36,629,240,861		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25,819,615,063		19,656,044,466		20,511,606,859		20,440,361,616		20,415,082,861	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.78	75		77		80		82		82		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				7,925,000,000		3,150,000,000		3,750,000,000		3,800,000,000		3,800,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Dengan Satuan:Persen)	0.76	1		1.25		1.5		1.75		2		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				50,985,000,000		6,525,000,000		6,675,000,000		9,875,000,000		11,094,158,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional (Dengan Satuan:Persen)	4.07	1.02		3.7		4.63		1.02		1.02		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga (Dengan Satuan:Persen)	4.6	6.6		7.6		8.6		9.6		10.6		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1,370,000,000		1,320,000,000		1,320,000,000		1,320,000,000		1,320,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan (Dengan Satuan:Persen)	80	82		84		86		88		90		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			2,281,000,000		2,065,440,778		2,221,498,624		3,232,132,454		4,372,714,734		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2,281,000,000		2,065,440,778		2,221,498,624		3,232,132,454		4,372,714,734		
2.20.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				2,281,000,000		2,065,440,778		2,221,498,624		3,232,132,454		4,372,714,734	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indek Pembangunan Statistik (Dengan Satuan:Nilai)	2.31	2.6		2.6		2.75		2.75		2.9		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1,485,000,000		1,269,440,778		1,425,498,624		2,436,132,454		3,576,714,734		
2.21.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				1,485,000,000		1,269,440,778		1,425,498,624		2,436,132,454		3,576,714,734	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) (Dengan Satuan:Persen)	0	26.78		44.64		71.42		89.28		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			15,090,000,000		23,500,579,817		25,500,579,817		26,500,579,817		27,500,579,818		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			15,090,000,000		23,500,579,817		25,500,579,817		26,500,579,817		27,500,579,818		
2.22.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				9,500,000,000		15,510,579,817		17,510,579,817		18,510,579,817		19,510,579,818	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Dengan Satuan:Persen)	98	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.0 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				390,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000		1,140,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Dengan Satuan:Persen)	73	75.5		76		76.5		77		77.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.0 4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				500,000,000		950,000,000		950,000,000		950,000,000		950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Dengan Satuan:Persen)	75.52	76.28		76.84		77.32		77.91		78.31		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.0 5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				3,900,000,000		4,700,000,000		4,700,000,000		4,700,000,000		4,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.0 6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				800,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tata kelola museum	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum (Dengan Satuan:Persen)	11.05	12.91	13.84		14.23		15.05		15.79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6,950,000,000		6,000,000,000		6,700,000,000		8,400,000,000		9,350,000,000		
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			6,950,000,000		6,000,000,000		6,700,000,000		8,400,000,000		9,350,000,000		
2.23.0 2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				6,695,000,000		5,150,000,000		5,650,000,000		7,350,000,000		8,100,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	10.74	18	24		32		41		50			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.0 3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				255,000,000		850,000,000		1,050,000,000		1,050,000,000		1,250,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			18,073,409,853		24,338,303,260		25,160,333,249		26,560,600,234		29,399,308,608		
2.24.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17,178,409,853		22,028,303,260		22,460,333,249		23,860,600,234		25,874,308,608	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.24	73	73.5		74		74.5		75			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				450,000,000		1,650,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		2,300,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase arsip yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.0 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				410,000,000		625,000,000		625,000,000		625,000,000		1,150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				35,000,000		35,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			456,051,621,026		813,656,395,413		822,416,394,846		834,846,753,548		848,334,740,121		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			136,554,799,081		496,900,074,142		498,595,499,952		502,048,961,910		504,789,385,101		
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			136,554,799,081		496,900,074,142		498,595,499,952		502,048,961,910		504,789,385,101		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				20,134,399,081		27,665,480,957		28,635,480,957		23,227,666,957		22,815,480,957	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69.82	70.5		72.5		75		75.5		80		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				34,510,400,000		20,563,248,417		20,697,674,227		11,502,150,185		24,835,559,376	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan:Ton)	116.850,23	162.592		182.916		206.329		232.945		263.229		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				72,100,000,000		31,991,344,768		31,562,344,768		248,619,144,768		217,638,344,768	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	206.327.78	243.888		274.374		309.494		349.418		394.843		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3,250,000,000		5,050,000,000		5,050,000,000		5,050,000,000		5,050,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha (Dengan Satuan:Persen)	90.00	92.00		93		94		95		96		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				6,560,000,000		11,630,000,000		12,650,000,000		13,650,000,000		14,450,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Dengan Satuan:Kg/ Orang/ Tahun)	67.13	34.88		35.64		36.42		37.22		38.03		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil pengolahan perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	23.900	26250		27.563		28.941		30.388		31.907		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya volume ekspor produk kelautan dan perikanan	Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Ton)	1.761	1845		1.891		1.938		1.987		2.037		Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			61,972,579,136		59,089,583,540		60,707,944,540		59,004,430,955		61,620,289,455		
	DINAS PARIWISATA			61,972,579,136		59,089,583,540		60,707,944,540		59,004,430,955		61,620,289,455		
3.26.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23,027,335,968		23,154,583,540		22,763,640,000		22,814,430,955		22,735,420,001	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68.88	75		75.40		75.60		75.8		76.00		Dinas Pariwisata
3.26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				15,720,243,168		15,650,000,000		15,009,304,540		11,250,000,000		12,000,000,000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Dengan Satuan:Persen)	0.8	1.5		1.6		1.7		1.8		1.9		Dinas Pariwisata
3.26.0 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				6,575,000,000		2,525,000,000		3,675,000,000		3,675,000,000		4,599,869,454	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Akses Terhadap Media Pemasaran Pariwisata (Dengan Satuan:Persen)	n.a	7		9		11		13		15		Dinas Pariwisata
3.26.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				13,650,000,000		16,175,000,000		17,675,000,000		18,175,000,000		18,175,000,000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memilki Kekayaan Intelektual (Dengan Satuan:Persen)	0.479	0.815		0.924		1.025		1.125		1.222		Dinas Pariwisata
3.26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				3,000,000,000		1,585,000,000		1,585,000,000		3,090,000,000		4,110,000,000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Dengan Satuan:Persen)	60	70		75		80		85		90		Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			189,208,245,291		202,019,010,210		205,871,861,831		212,755,785,747		218,271,632,128		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN			159,008,487,666		161,915,156,362		163,984,049,768		167,336,023,954		170,049,164,799		
3.27.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				70,652,087,666		77,124,248,318		78,595,326,927		82,246,036,454		82,915,109,089	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	64	72		76		80		84		85		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				52,492,400,000		55,005,987,500		55,255,987,500		55,375,987,500		55,795,987,500	Dinas Pertanian dan Peternakan
	meningkatnya hasil produksi tanaman pangan	Produksi Tanaman Pangan (Dengan Satuan:Ton)	131.619.96	136.825		139.838		143.132		146.727		150.641		Dinas Pertanian dan Peternakan
	meningkatnya hasil produksi hortikultura	Produksi Hortikultura (Dengan Satuan:Ton)	80.774	82.759.27		83.769,51		84.791,63		85.825,79		86.872.11		Dinas Pertanian dan Peternakan
	meningkatnya hasil produksi komoditas peternakan	Produksi Komoditas Peternakan (Dengan Satuan:Kg)	32,642,246	42,440,469		48,399,110		55,199,184		62,960,188		71,818,686		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				23,805,000,000		12,505,920,544		12,853,735,341		12,435,000,000		14,059,068,210	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B/Yang Terlayani Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	35.29	47.06		52.94		58.82		64.71		70.59		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				505,000,000		505,000,000		505,000,000		505,000,000		505,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan asal hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Dengan Satuan:Persen)	65	65		65		65		65		Dinas Pertanian dan Peternakan		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1,675,000,000		1,675,000,000		1,675,000,000		1,675,000,000		1,675,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	82.22	78.49		76.36		74.02		71.48		68.68		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Menurunnya kerentanan petani dan lahan pertanian akibat bencana iklim	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Dengan Satuan:Persen)	86.23	84.07		82.24		79.84		76.8		73.04		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan/Direkomendasikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				9,729,000,000		14,949,000,000		14,949,000,000		14,949,000,000		14,949,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Dengan Satuan:Persen)	4.58	5.06		5.59		6.01		6.64		7.51		Dinas Pertanian dan Peternakan
	Meningkatnya kemandirian dan daya saing petani melalui penguatan kelembagaan koperasi.	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		Dinas Pertanian dan Peternakan		
	DINAS PERKEBUNAN			30,199,757,625		40,103,853,848		41,887,812,063		45,419,761,793		48,222,467,329		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,569,757,625		29,243,853,848		28,986,786,352		28,131,786,352		28,131,786,352	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.37	74.5		76		77.5		79		81.5		Dinas Perkebunan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				4,625,000,000		5,180,000,000		5,891,025,711		9,327,975,441		11,830,680,977	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Dengan Satuan:Ton)	3.581.861.51	4.026.651.12		4.272.514.95		4.534.450.29		4.813.552.77		5.111.011.89		Dinas Perkebunan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5,005,000,000		4,530,000,000		5,760,000,000		6,360,000,000		6,660,000,000	Dinas Perkebunan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar (Dengan Satuan:Ha)	410	640		800		970		1150		1350		Dinas Perkebunan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				400,000,000		400,000,000		400,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persentase Penanganan Bencana Perkebunan (Dengan Satuan:Persen)	55.00	60		65		72.5		81.25		91.25		Dinas Perkebunan
	Meningkatnya kepatuhan perusahaan/pekebun pemegang izin terhadap kewajiban menjaga ANKT	Persentase Terbinanya Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam wilayah berijin (Dengan Satuan:Persen)	64.06	66.27		66.82		67.37		67.92		68.48		Dinas Perkebunan
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				250,000,000		250,000,000		300,000,000		450,000,000		450,000,000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizin usaha perkebunan	Persentase perkebunan besar berijin usaha yang terbina dan terawasi (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perkebunan
	Meningkatnya legalitas usaha perkebunan rakyat	Persentase STDB yang diterbitkan (Dengan Satuan:Persen)	1.43	2.81		3.50		4.54		6.06		7.58		Dinas Perkebunan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				350,000,000		500,000,000		550,000,000		650,000,000		650,000,000	Dinas Perkebunan
	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Persen)	4.88	8.8		17.71		31.6		50.48		70.42		Dinas Perkebunan
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			2,775,000,000		675,000,000		550,000,000		500,000,000		500,000,000		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			2,775,000,000		675,000,000		550,000,000		500,000,000		500,000,000		
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				2,775,000,000		675,000,000		550,000,000		500,000,000		500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Meningkatnya Pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase Luasan TAHURA yang dikelola (Dengan Satuan:Persen)	15	15.4		17.3		17.3		17.3		17.3		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			25,370,000,000		8,073,702,599		8,892,063,600		10,192,063,600		10,192,063,600		
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			25,370,000,000		8,073,702,599		8,892,063,600		10,192,063,600		10,192,063,600		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.0 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				160,000,000		139,592,000		139,592,000		139,592,000		139,592,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan ketentuan. (Dengan Satuan:Persen)	5	1		1.00		1.00		1.00		1.00		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				20,250,000,000		5,221,928,599		6,040,289,600		6,840,289,600		6,840,289,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, tertata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Dengan Satuan:Persen)	53.57	70.96		70.96		70.96		70.96		70.96		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				2,360,000,000		945,990,600		945,990,600		1,445,990,600		1,445,990,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga antar waktu (Dengan Satuan:Koefisien)	3.52	3.5		3.49		3.48		3.47		3.46		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Persentase kinerja realisasi pupuk (Dengan Satuan:Persen)	62.68	66		68		70		72		75		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				850,000,000		840,498,200		840,498,200		840,498,200		840,498,200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya Total Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Dengan Satuan:USD)	2.525.592.538,60	3.224.929.112,54		3.644.169.897,17		4.117.911.983,80		4.653.240.541,69		5.258.161.812,11		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1,200,000,000		551,900,600		551,900,600		551,900,600		551,900,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Dengan Satuan:Persen)	41.98	50		55		60		65		70		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.0 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				550,000,000		373,792,600		373,792,600		373,792,600		373,792,600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase IKM yang menjalin kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (Dengan Satuan:Persen)	5	1		2		3		4		5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			40,070,997,518		45,999,024,923		46,799,024,922		48,795,511,337		51,411,369,837		
3.31.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				38,220,997,518		35,682,119,132		35,682,119,131		35,682,119,132		35,682,119,131	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60	70		72		75		78		80		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.0 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1,450,000,000		9,882,906,991		10,682,906,991		12,679,393,405		15,295,251,906	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Dengan Satuan:Persen)	0.97	2.05		2.57		3.09		3.61		4.13		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya kapasitas IKM	Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Dengan Satuan:Persen)	1	2.05		2.57		3.09		3.61		4.13		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				400,000,000		433,998,800		433,998,800		433,998,800		433,998,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tingkat ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Dengan Satuan:Persen)	5	7		9		10		12		15		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			100,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,550,000,000		1,550,000,000		
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA			100,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,550,000,000		1,550,000,000		
3.32.0 2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				100,000,000		800,000,000		800,000,000		1,200,000,000		1,200,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	15	25		50		75		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.0 3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				0		100,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya kualitas pembangunan transmigrasi	Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang ditata/dibangun (Dengan Satuan:Persen)	n/a	0		25		50		75		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				0		0		0		150,000,000		150,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan (Dengan Satuan:Persen)	n/a	0		0		0		100		100		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			343,248,424,748		307,413,965,445		303,651,830,994		309,381,438,333		313,928,049,536		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			220,095,227,729		186,634,784,974		181,466,217,749		184,331,021,419		186,604,327,020		
	SEKRETARIAT DAERAH			220,095,227,729		186,634,784,974		181,466,217,749		184,331,021,419		186,604,327,020		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			37,986,171,944		17,008,532,152		13,768,158,368		15,564,214,084		16,989,436,888		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.5	72.6		72.7		72.8		72.9		73		Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Angka)	88.3	88.4		88.6		88.7		88.9		90		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			77,927,455,400		66,080,369,085		64,250,373,514		65,264,692,918		66,069,585,067		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Angka)	n.a	70		73		76		79		82		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial	Indeks Zakat Nasional (Dengan Satuan:Indeks)	0.39	0.45		0.48		0.51		0.54		0.57		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4,181,600,385		3,545,883,737		3,447,685,867		3,502,114,417		3,545,305,065		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya layanan administrasi perekonomian dan pembangunan	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan (Dengan Satuan:Angka)	n.a	65		67		69		71		73		Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD			123,153,197,019		120,779,180,470		122,185,613,245		125,050,416,915		127,323,722,516		
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			123,153,197,019		120,779,180,470		122,185,613,245		125,050,416,915		127,323,722,516		
4.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				95,869,437,019		92,441,867,715		92,176,028,001		94,995,344,915		96,176,028,000	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60.01	67		69		71		73		75		Sekretariat DPRD
4.02.0 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				27,283,760,000		28,337,312,755		30,009,585,244		30,055,072,000		31,147,694,516	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase ketepatan penetapan perda APBD tahun N (Dengan Satuan:Persen)	80	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
		Persentase penetapan Ranperda tahun N (Dengan Satuan:Persen)	80.06	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	27.07	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,196,974,497,831		1,037,108,311,108		1,052,825,140,578		1,079,599,567,418		1,110,700,704,843		
5.01	PERENCANAAN			38,942,454,827		35,149,439,001		36,478,806,966		39,186,635,092		41,335,376,003		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			38,942,454,827		35,149,439,001		36,478,806,966		39,186,635,092		41,335,376,003		
5.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31,017,454,827		28,324,439,001		28,853,806,966		30,311,635,092		32,810,376,003	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	77.84	78.62		79.01		79.41		79.81		80.21		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.0 2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				3,725,000,00 0		2,925,000,00 0		3,725,000,00 0		4,375,000,00 0		3,725,000,00 0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Daerah	Nilai Sinergitas dokumen Perencanaan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	17.8		18.3		18.8		19.3		19.8		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai Kualitas perencanaan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	44.2		46.2		48.2		50.2		52.2		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				4,200,000,00 0		3,900,000,00 0		3,900,000,00 0		4,500,000,00 0		4,800,000,00 0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Persen)	94.55	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Dengan Satuan:Persen)	93.65	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran Renja dan Renstra PD pada Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	92.98	100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02	KEUANGAN			1,077,578,333,881		941,171,917,288		952,830,916,030		970,532,444,089		995,151,382,365		
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			70,501,301,193		72,783,781,689		74,286,545,475		77,347,568,574		79,776,580,039		
5.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				62,101,301,193		58,533,781,689		60,036,545,475		62,997,568,574		65,426,580,039	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	72.61	72.65		72.85		73		74		75		Badan Pendapatan Daerah
5.02.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				8,400,000,000		14,250,000,000		14,250,000,000		14,350,000,000		14,350,000,000	Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	6.20	10.03		14.78		17.60		20.53		23.82		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Dengan Satuan:Persen)	5.38	13.13		25.81		37.63		60.22		73.22		Badan Pendapatan Daerah
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital (Dengan Satuan:Persen)	21.97	36.83		57.64		70.22		76.85		83.10		Badan Pendapatan Daerah
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			1,007,077,032,688		868,388,135,599		878,544,370,555		893,184,875,515		915,374,802,326		
5.02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50,897,263,014		60,882,695,599		62,475,440,001		61,375,440,001		61,375,440,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	74.34	74.60		74.80		75.00		75.20		75.40		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				51,110,831,324		99,982,695,599		808,518,930,554		824,214,435,514		846,449,362,326	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dengan Satuan:Nilai)	12.001	12.002		12.003		12.004		12.005		12.015		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD (Dengan Satuan:Nilai)	20	20		20		20		20		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya tatakelola akuntansi dan pelaporan	Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dengan Satuan:Nilai)	13.1897	13.1997		13.12		13.121		13.122		14		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan	Indeks Penyerapan anggaran (Dengan Satuan:Nilai)	15	15		15		15		15				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				5,068,938,350		7,522,744,401		7,550,000,000		7,595,000,000		7,550,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap (Dengan Satuan:Persen)	15.98	8		8		8.5		8.75		9		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN			52,511,859,981		33,583,085,708		34,905,115,697		38,405,382,682		39,465,535,319		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			52,511,859,981		33,583,085,708		34,905,115,697		38,405,382,682		39,465,535,319		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				43,478,859,981		24,015,085,708		24,015,085,708		24,015,085,708		24,015,085,708	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76.42	77.85		78.5		79		80		80		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9,033,000,000		9,568,000,000		10,890,029,989		14,390,296,974		15,450,449,611	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi (Dengan Satuan:Persen)	95	97		98		99		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	53.75	91		92		93		94		95		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan:Persen)	50	55		60		65		70		75		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai sangat baik dan baik (Dengan Satuan:Persen)	87	89		90		91		92		93		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			6,950,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000		4,700,000,000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6,950,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000		3,700,000,000		4,700,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:Persen)	25.57	27.85		28.5		30		33.5		36		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan rancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	80.28	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase pejabat fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi diluar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	50.39	63		66		69		72		75		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:Person)	50.57	52		54		56		58		60		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			20,991,849,142		23,503,869,110		24,910,301,885		27,775,105,555		30,048,411,156		
	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH			20,991,849,142		23,503,869,110		24,910,301,885		27,775,105,555		30,048,411,156		
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,586,849,142		13,884,316,355		13,884,316,356		13,884,316,356		13,884,316,355	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67.03	68.71		69.55		70.39		71.23		72.07		Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				7,205,000,000		7,214,664,570		8,269,489,149		10,418,091,904		12,123,071,101	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Dengan Satuan:Person)	64.36781609	85		90		95		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Dengan Satuan:Person)	64.36781609	85		90		95		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dengan Satuan:Person)	64.36781609	85		90		95		100		100		Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				1,200,000,000		2,404,888,185		2,756,496,380		3,472,697,295		4,041,023,700	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Persen)	90.69	90.79	90.89		90.99		91.09		91.19		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Dengan Satuan:Persen)	90.69	90.79	90.89		90.99		91.09		91.19		Badan Riset dan Inovasi Daerah	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			45,079,247,807		35,274,178,637		36,603,546,602		39,311,374,728		41,460,115,639		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			45,079,247,807		35,274,178,637		36,603,546,602		39,311,374,728		41,460,115,639		
	INSPEKTORAT KABUPATEN			45,079,247,807		35,274,178,637		36,603,546,602		39,311,374,728		41,460,115,639		
6.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37,879,247,807		27,574,178,637		27,553,546,602		29,761,374,728		31,710,115,639	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	76.23	76.99		77.74		78.50		79.25		80.01		Inspektorat Kabupaten
6.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5,350,000,000		5,750,000,000		6,750,000,000		7,000,000,000		7,200,000,000	Inspektorat Kabupaten
	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindakanlanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Dengan Satuan:Persen)	90.11	90.11		90.20		90.30		90.40		90.50		Inspektorat Kabupaten
		Persentase Tindakanlanjut Rekomendasi APIP (Dengan Satuan:Persen)	82.69	82.70		84.00		86.00		88.00		90.00		Inspektorat Kabupaten
6.01.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1,850,000,000		1,950,000,000		2,300,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi (Dengan Satuan:Persen)	97	100		100		100		100		100		Inspektorat Kabupaten
7	UNSUR KEWILAYAHAN			601,638,980,378		1,022,128,520,424		1,052,869,034,418		1,119,269,689,337		1,171,960,553,413		
7.01	KECAMATAN			601,638,980,378		1,022,128,520,424		1,052,869,034,418		1,119,269,689,337		1,171,960,553,413		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN TENGGARONG			103,556,454,700		140,372,083,471		141,917,710,674		145,253,440,974		147,900,440,647		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50,559,213,879		50,659,213,879		50,559,213,879		50,559,213,879		50,559,213,879	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	70.55	70.6		70.7		70.7		70.75		70.8		Kecamatan Tenggarong
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13,050,000,000		11,415,628,771		13,061,255,974		16,396,986,274		19,043,985,947	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		Kecamatan Tenggarong		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				39,552,240,821		77,902,240,821		77,902,240,821		77,902,240,821		77,902,240,821	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000	Kecamatan Tenggarong
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		80		80		80		Kecamatan Tenggarong
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	n.a	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	Kecamatan Tenggarong
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	70	70		75		80		85		90		Kecamatan Tenggarong
	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG			34,840,107,359		67,537,308,858		69,074,936,061		72,410,666,361		75,057,666,034		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,095,207,359		10,820,491,599		10,180,491,599		10,180,491,599		10,200,491,599	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	54.53	60		65		70		75		80		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24,863,900,000		10,910,817,259		13,113,444,462		16,449,174,762		19,051,174,435	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		45,125,000,000		45,125,000,000		45,125,000,000		45,125,000,000	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		361,000,000		361,000,000		361,000,000		361,000,000	Kecamatan Tenggarong Seberang
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000	Kecamatan Tenggarong Seberang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		Kecamatan Tenggarong Seberang	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75,000,000		125,000,000		100,000,000		100,000,000		125,000,000	Kecamatan Tenggarong Seberang	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	61	70	75		80		85		90		Kecamatan Tenggarong Seberang	
	KECAMATAN LOA KULU			29,047,896,284		56,260,330,383		57,797,957,586		61,133,687,886		63,780,687,559		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,915,193,284		14,329,293,284		14,582,293,284		15,211,293,284		15,722,293,284	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	64.64	74	75		76		77		78		Kecamatan Loa Kulu	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18,221,703,000		9,095,037,099		10,214,664,302		12,756,394,602		14,757,394,275	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		Kecamatan Loa Kulu	
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3	3		3		3		3		Kecamatan Loa Kulu	
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		31,950,000,000		32,040,000,000		32,130,000,000		32,190,000,000	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	80	81	82		81		81		81		Kecamatan Loa Kulu	
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130,000,000		140,000,000		160,000,000		180,000,000		200,000,000	Kecamatan Loa Kulu
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang	100	100	100		100		100		100		Kecamatan Loa Kulu	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		ditangani (Dengan Satuan:Persen)												
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		421,000,000		421,000,000		421,000,000		421,000,000	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Kulu
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				150,000,000		325,000,000		380,000,000		435,000,000		490,000,000	Kecamatan Loa Kulu
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	75	76		77		78		76		76		Kecamatan Loa Kulu
	KECAMATAN LOA JANAN			26,392,635,977		49,982,304,536		51,519,931,739		54,855,662,039		57,502,661,712		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,365,987,977		6,323,927,977		7,765,987,977		6,720,987,977		7,770,987,977	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	59.78	60.75		64.37		66.03		68.07		70.37		Kecamatan Loa Janan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19,155,648,000		13,017,376,559		13,032,943,762		17,413,674,062		19,010,673,735	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Loa Janan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		30,286,000,000		30,286,000,000		30,286,000,000		30,286,000,000	Kecamatan Loa Janan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				165,000,000		165,000,000		165,000,000		165,000,000		165,000,000	Kecamatan Loa Janan
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		115,000,000		195,000,000		195,000,000		195,000,000	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Kecamatan Loa Janan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Loa Janan
	KECAMATAN MUARA BADAK				17,457,816,557		49,321,150,637		50,935,842,650		54,428,548,494		57,200,112,857	
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,539,770,657		12,627,315,558		12,662,275,558		13,757,275,558		13,552,275,558	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	60.13	74.5				76		77		78		Kecamatan Muara Badak
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9,814,000,000		4,372,835,079		5,487,567,092		7,850,272,936		10,386,837,299	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Badak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3	3		3		3		3		3	Kecamatan Muara Badak
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				659,045,900		29,950,000,000		30,275,000,000		30,250,000,000		30,325,000,000	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		521,000,000		461,000,000		546,000,000		611,000,000	Kecamatan Muara Badak
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	95		96		97		98		99		Kecamatan Muara Badak
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		850,000,000		925,000,000		975,000,000		1,150,000,000	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75,000,000		1,000,000,000		1,125,000,000		1,050,000,000		1,175,000,000	Kecamatan Muara Badak
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	95	98		99		100		100		100		Kecamatan Muara Badak
	KECAMATAN MARANGKAYU			12,622,030,723		44,121,483,988		45,785,798,001		49,278,503,845		52,050,068,208		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,198,540,723		14,365,730,126		14,305,730,125		14,265,730,125		14,265,730,125	Kecamatan Marangkayu
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	62.86	76.46		76.46		76.46		76.46		76.46		Kecamatan Marangkayu
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5,542,490,000		4,755,753,862		6,480,067,876		10,012,773,720		12,784,338,083	Kecamatan Marangkayu

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Marangkayu	
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kecamatan Marangkayu	
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			436,000,000	24,250,000,000		24,250,000,000		24,250,000,000		24,250,000,000		Kecamatan Marangkayu	
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Marangkayu	
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			175,000,000	175,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000		Kecamatan Marangkayu	
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Marangkayu	
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			195,000,000	500,000,000		500,000,000		500,000,000		500,000,000		Kecamatan Marangkayu	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Marangkayu	
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75,000,000	75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		Kecamatan Marangkayu	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Marangkayu	
	KECAMATAN MUARA JAWA			54,412,725,138	59,205,963,132	60,676,525,525	63,855,280,282	66,377,715,264						
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,722,075,138	22,809,248,414	22,859,248,414	22,964,806,414	23,159,806,414					Kecamatan Muara Jawa	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	57.51	61	62	63	64	65					Kecamatan Muara Jawa	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12,649,650,000		3,421,714,718		4,817,277,111		7,890,473,868		10,217,908,850	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		Kecamatan Muara Jawa		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20,581,000,000		31,129,000,000		31,154,000,000		31,154,000,000		31,154,000,000	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				125,000,000		1,016,000,000		1,016,000,000		1,016,000,000		1,016,000,000	Kecamatan Muara Jawa
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				335,000,000		830,000,000		830,000,000		830,000,000		830,000,000	Kecamatan Muara Jawa
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Jawa
	KECAMATAN SAMBOJA				62,072,870,947		61,784,373,223		63,255,392,616		66,434,147,373		68,956,582,355	
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21,945,362,697		22,292,130,655		22,641,130,655		24,490,239,123		25,474,439,123	Kecamatan Samboja
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	56.00	74.93		77		77		77		77		Kecamatan Samboja
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18,950,108,250		2,605,108,250		2,827,161,961		3,035,108,250		3,310,108,250	Kecamatan Samboja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Samboja	
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Kecamatan Samboja	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20,457,400,000		35,115,134,317		35,970,100,000		36,522,800,000		37,511,034,982	Kecamatan Samboja	
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	98.39	98.39	98.39	98.39	98.39	98.39	98.39	98.39	98.39	98.39	Kecamatan Samboja	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			175,000,000		911,000,000		911,000,000		911,000,000		911,000,000	Kecamatan Samboja	
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Samboja	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			470,000,000		715,000,001		765,000,000		1,325,000,000		1,600,000,000	Kecamatan Samboja	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Samboja	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75,000,000		146,000,000		141,000,000		150,000,000		150,000,000	Kecamatan Samboja	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	na	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Samboja	
	KECAMATAN SEBULU			14,390,770,195		53,134,293,275		54,748,985,288		58,241,691,132		61,013,255,495		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,599,668,195		8,430,941,462		9,058,233,475		9,784,543,395		11,504,543,395	Kecamatan Sebulu	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	71.54	72.5	73	73	73.5	74	74	74	74.5	74.5	Kecamatan Sebulu	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5,796,102,000		11,033,351,813		11,920,751,813		14,227,147,737		14,808,712,100	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		Kecamatan Sebulu		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				300,000,000		32,120,000,000		32,170,000,000		32,250,000,000		32,450,000,000	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		450,000,000		450,000,000		600,000,000		600,000,000	Kecamatan Sebulu
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	na	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		800,000,000		800,000,000		900,000,000		950,000,000	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sebulu
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				325,000,000		300,000,000		350,000,000		480,000,000		700,000,000	Kecamatan Sebulu
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	76		77		78		79		80		Kecamatan Sebulu
	KECAMATAN MUARA KAMAN				19,488,119,658		63,756,067,538		65,370,759,551		68,863,465,395		71,635,029,758	
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11,739,917,658		14,454,917,658		13,669,917,658		12,979,917,658		13,379,917,658	Kecamatan Muara Kaman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	60.21	65		68		70		72		75		Kecamatan Muara Kaman
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7,012,202,000		9,641,149,880		12,170,841,893		16,353,547,737		18,825,112,100	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	75	81.25		87.5		93.75		93.75		100		Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Kaman
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				406,000,000		38,755,000,000		38,655,000,000		38,555,000,000		38,555,000,000	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	60	70		75		80		85		90		Kecamatan Muara Kaman
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				150,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000		175,000,000	Kecamatan Muara Kaman
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	90		90		90		100		100		Kecamatan Muara Kaman
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				180,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000		525,000,000	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:)	60	70		75		80		85		90		Kecamatan Muara Kaman
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0		205,000,000		175,000,000		275,000,000		175,000,000	Kecamatan Muara Kaman
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	60	70		73		75		80		85		Kecamatan Muara Kaman
	KECAMATAN KOTA BANGUN			20,767,311,553		37,522,817,635		38,983,380,028		42,162,134,785		44,684,569,767		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,402,333,553		6,955,917,317		6,855,917,317		6,855,917,317		6,855,917,317	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	69	69		69.50		69.50		70		70		Kecamatan Kota Bangun
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13,478,978,000		11,566,900,318		13,127,462,711		16,306,217,468		18,828,652,450	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kota Bangun
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		18,275,000,000		18,275,000,000		18,275,000,000		18,275,000,000	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	70	70.50		71		71.50		72		72.50		Kecamatan Kota Bangun
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		375,000,000		375,000,000		375,000,000		375,000,000	Kecamatan Kota Bangun
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Kota Bangun
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000		270,000,000	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	68	68		69		69		70		70		Kecamatan Kota Bangun
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000	Kecamatan Kota Bangun
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		80		80		80		Kecamatan Kota Bangun

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KECAMATAN MUARA MUNTAI			25,119,450,537		37,492,586,531		38,955,529,474		42,134,284,231		44,656,719,213		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,931,721,539		8,996,611,173		8,796,611,173		8,246,611,173		8,246,611,173	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	59.78	60.75		64.37		66.03		68.07		70.37		Kecamatan Muara Muntai
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8,082,700,000		10,908,975,358		12,571,918,301		16,300,673,058		18,823,108,040	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		Kecamatan Muara Muntai		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				8,354,028,998		16,650,000,000		16,650,000,000		16,650,000,000		16,650,000,000	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		311,000,000		311,000,000		311,000,000		311,000,000	Kecamatan Muara Muntai
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		245,000,000		245,000,000		245,000,000		245,000,000	Kecamatan Muara Muntai
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				381,000,000		381,000,000		381,000,000		381,000,000		381,000,000	Kecamatan Muara Muntai

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Muntai
	KECAMATAN KENOHAN			12,298,955,674		30,505,305,992		31,965,868,385		35,144,623,142		37,667,058,124		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,697,449,674		8,633,049,674		8,733,049,674		8,733,049,674		8,733,049,674	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	74	75		76		77		78		79		Kecamatan Kenohan
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6,720,506,000		7,460,256,318		8,820,818,711		11,999,573,468		14,522,008,450	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kenohan
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		13,536,000,000		13,536,000,000		13,536,000,000		13,536,000,000	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Kenohan
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		361,000,000		361,000,000		361,000,000		361,000,000	Kecamatan Kenohan
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Kenohan
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		415,000,000		415,000,000		415,000,000		415,000,000	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kenohan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Kecamatan Kenohan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	85	85		86		87		88		89		Kecamatan Kenohan
	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT			13,729,808,302		37,519,958,620		38,980,521,013		42,159,275,770		44,681,710,752		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,472,314,302		9,912,314,303		9,572,314,302		9,127,314,302		9,127,314,302	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	74	75		76		77		78		79		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6,326,494,000		8,101,644,317		9,902,206,711		13,525,961,468		16,048,396,450	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		18,625,000,000		18,625,000,000		18,625,000,000		18,625,000,000	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	80	81		100		100		100		100		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		311,000,000		311,000,000		311,000,000		311,000,000	Kecamatan Kembang Janggut
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	81		82		83		84		85		Kecamatan Kembang Janggut
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		445,000,000		445,000,000		445,000,000		445,000,000	Kecamatan Kembang Janggut

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Kembang Janggut
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000	Kecamatan Kembang Janggut
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	85	85		86		87		88		89		Kecamatan Kembang Janggut
	KECAMATAN TABANG			9,597,163,533		29,501,639,632		31,039,266,835		34,374,997,135		37,021,996,808		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,588,010,533		13,716,486,632		13,459,113,835		13,419,844,135		14,241,843,808	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	60	70.12		70.45		70.63		70.85		70.85		Kecamatan Tabang
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1,179,153,000		4,474,153,000		6,199,153,000		9,574,153,000		11,399,153,000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Tabang
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		9,925,000,000		9,995,000,000		9,995,000,000		9,995,000,000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		511,000,000		511,000,000		511,000,000		511,000,000	Kecamatan Tabang
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				144,000,000		675,000,000		675,000,000		675,000,000		675,000,000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Tabang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Kecamatan Tabang
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		70.45		70.63		70.85		70.85		Kecamatan Tabang
	KECAMATAN MUARA WIS			14,787,787,259		31,051,196,358		32,588,823,561		35,924,553,861		38,571,553,534		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,210,585,259		10,075,645,260		9,875,645,259		12,475,645,259		11,475,645,259	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	57.57	61		62		63		64		65		Kecamatan Muara Wis
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6,741,202,000		9,159,551,098		10,897,178,302		11,632,908,602		15,279,908,275	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Muara Wis
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		10,750,000,000		10,750,000,000		10,750,000,000		10,750,000,000	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				130,000,000		361,000,000		361,000,000		361,000,000		361,000,000	Kecamatan Muara Wis

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		580,000,000		580,000,000		580,000,000		580,000,000	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Muara Wis
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000	Kecamatan Muara Wis
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	83.57	86		87		88		89		90		Kecamatan Muara Wis
	KECAMATAN SANGA SANGA			34,250,792,885		38,446,108,005		40,085,800,018		43,578,505,862		46,350,070,225		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,875,696,885		15,617,412,005		15,634,104,018		15,633,809,862		15,653,374,225	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	62.67	63		64		66		68		70		Kecamatan Sanga Sanga
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9,588,696,000		6,853,576,000		8,476,576,000		11,969,576,000		14,721,576,000	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		Kecamatan Sanga Sanga		
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10,756,400,000		15,059,120,000		15,059,120,000		15,059,120,000		15,059,120,000	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		611,000,000		611,000,000		611,000,000		611,000,000	Kecamatan Sanga Sanga
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga
7.01.0 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				855,000,000		305,000,000		305,000,000		305,000,000		305,000,000	Kecamatan Sanga Sanga
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sanga Sanga
	KECAMATAN ANGGANA			22,064,229,586		41,506,587,466		43,121,279,479		46,613,985,323		49,385,549,686		
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,380,939,586		6,942,616,524		6,885,616,524		6,842,616,524		6,842,616,551	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	44	70		70		70.01		70.05		70.5		Kecamatan Anggana
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14,868,290,000		12,512,970,942		14,184,662,955		17,720,368,799		20,491,933,135	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Anggana
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				370,000,000		21,416,000,000		21,416,000,000		21,416,000,000		21,416,000,000	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000	Kecamatan Anggana
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				195,000,000		295,000,000		295,000,000		295,000,000		295,000,000	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				75,000,000		265,000,000		265,000,000		265,000,000		265,000,000	Kecamatan Anggana
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Anggana
	KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT			15,357,167,046		34,851,917,364		36,312,479,757		39,491,234,514		42,013,669,496		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,405,689,046		7,433,439,364		7,754,027,286		7,804,027,286		7,854,027,286	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	67	67		67		67		67		67		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10,070,478,000		8,912,478,000		10,052,452,471		13,181,207,228		15,653,642,210	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3		3		3		3		3		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				436,000,000		17,550,000,000		17,550,000,000		17,550,000,000		17,550,000,000	Kecamatan Kota Bangun Darat
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	66.67	66.69		66.69		66.69		66.69		66.69		Kecamatan Kota Bangun Darat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				175,000,000		386,000,000		386,000,000		386,000,000		386,000,000	Kecamatan Kota Bangun Darat

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Kecamatan Kota Bangun Darat	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			195,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	Kecamatan Kota Bangun Darat		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	Kecamatan Kota Bangun Darat	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000	Kecamatan Kota Bangun Darat		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	65	66	67	68	69	70	70	70	70	Kecamatan Kota Bangun Darat		
	KECAMATAN SAMBOJA BARAT			59,384,886,465		58,255,043,783		59,752,246,176		62,931,000,933		65,453,435,915		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19,971,615,715	21,172,188,715	21,436,322,715	21,436,322,715	21,436,322,715	21,436,322,715	21,436,322,715	21,903,665,535	Kecamatan Samboja Barat		
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:nilai)	60	65	65	65	65	65	65	65	65	Kecamatan Samboja Barat		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16,477,870,750	2,571,455,068	3,596,625,831	5,907,312,750	7,030,472,750	7,030,472,750	7,030,472,750	7,030,472,750	Kecamatan Samboja Barat		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (Dengan Satuan:Persen)	100	70	70	70	70	70	70	70	70	Kecamatan Samboja Barat		
	Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Dengan Satuan:Nilai)	n.a	3	3	3	3	3	3	3	3	Kecamatan Samboja Barat		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22,540,400,000	34,051,400,000	34,151,400,000	35,019,467,838	35,951,400,000	35,951,400,000	35,951,400,000	35,951,400,000	Kecamatan Samboja Barat		
	Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	72	72	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Samboja Barat		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				125,000,000		150,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Kecamatan Samboja Barat
	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	80	80		80		80		80		80		Kecamatan Samboja Barat
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				270,000,000		295,000,000		352,897,630		352,897,630		352,897,630	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Persen)	75	75		75		75		75		75		Kecamatan Samboja Barat
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				0		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000	Kecamatan Samboja Barat
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik (Dengan Satuan:Persen)	100	0										Kecamatan Samboja Barat
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			11,812,304,000		14,310,049,000		16,276,501,000		18,443,524,000		20,681,535,000		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11,812,304,000		14,310,049,000		16,276,501,000		18,443,524,000		20,681,535,000		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			11,812,304,000		14,310,049,000		16,276,501,000		18,443,524,000		20,681,535,000		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				5,560,000,000		6,000,000,000		6,700,000,000		7,200,000,000		7,800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Persen)	2.72	3.12		3.45		3.81		4.23		4.91		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				4,002,304,000		4,252,304,000		4,602,304,000		5,052,304,000		5,452,304,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada partai politik dan lembaga pendidikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN				200,000,000		500,000,000		600,000,000		700,000,000		800,000,000	Badan Kesatuan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN													Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Dengan Satuan:Persen)	13,59 (84 ormas)	23,30 (144 ormas)		28,15 (174 ormas)		33,0 (204 ormas)		37,86 (234 ormas)		42,72 (264 ormas)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA				800,000,000		1,300,000,000		1,800,000,000		2,000,000,000		2,200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Persen)	1,79 (10.046 org)	2,04 (11.416 org)		2,25 (12.616 org)		2.50		2.77		3.09		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1,250,000,000		2,257,745,000		2,574,197,000		3,491,220,000		4,429,231,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL:				7.502.883.258.999,99		7.863.021.655.493,81		8.012.419.066.948,23		8.196.704.705.487,98		8.401.622.323.125,22		

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja terhadap tingkat capaian indikator kinerja. Indikator kinerja yang disajikan merupakan indikator kinerja makro yang menjadi *mandatory*, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang ditetapkan, Indikator Utama Pembangunan Sesuai RPJPD dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan.

4.2.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta indikator sasaran Pembangunan yang ditetapkan oleh Nasional. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penetapan target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71
2	PDRB Per Kapita	Juta	259,19	271,53 - 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91- 366,11	402,83 - 404,53
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46-5,90	5,13-5,97	4,80-5,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33-3,49	3,16-3,33	3,00-3,18
5	Rasio Gini	Rasio	0,307	0,285-0,301	0,281-0,297	0,277-0,293	0,273-0,290	0,269-0,286	0,265-0,282
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41

4.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang memiliki daya ungkit tinggi dalam perwujudan visi dan misi daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP. Pencapaian indikator kinerja utama tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Tujuan										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67-6,74	7,06-7,13	7,50-7,71	
2	PDRB per Kapita	Juta Rp./ Kapita	259,19	271,53 - 271,71	287,89 - 288,27	308,51 - 309,12	333,93 - 334,81	364,91 - 366,11	402,83 - 404,53	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,51	73,34	75,17	77,01	78,84	80,67	82,50	
4	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,58	3,64	3,70	3,76	3,82	3,88	
5	Tingkat Kemiskinan	%	7,28	6,72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46-5,90	5,13-5,97	4,80-5,24	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	30,82	17,59	34,91	41,52	47,70	47,03	53,45	
Indikator Sasaran										
1	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7,88	8,07	9,08	10,05	10,96	12,06	13,35	
2	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	10,85	11,07	11,29	11,51	11,74	11,98	12,22	
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	78,66	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	
4	Indeks Pelayanan Publik**	Indeks	4,35	4,39	4,42	4,45	4,48	4,51	4,54	
5	Nilai SAKIP	Nilai	65,93	68,28	70,62	72,97	75,32	77,66	80,01	
6	Angka kriminalitas	per 100.000 penduduk	106	100	95	90	85	80	75	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,57	76,86	77,37	77,85	78,34	78,90	79,41	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33-3,49	3,16-3,33	3,00-3,18	
9	Rasio Gini	Rasio	0,307	0,285 - 0,301	0,281 - 0,297	0,277 - 0,293	0,273 - 0,290	0,269 - 0,286	0,265-0,282	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Indeks	73,59	78,82	79,00	79,17	79,34	79,51	79,68	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	118,80	115,80	112,80	109,80	106,80	103,80	100,80	

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja dibagi menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah serta aspek pelayanan umum. Indikator aspek geografi dan demografi menggambarkan Indikator pada aspek kewilayahan dan kependudukan. Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Selain itu, Indikator Kinerja Daerah juga mencakup indikator per urusan yang menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah. Implementasi dari IKU Perangkat Daerah disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah untuk keperluan penilaian SAKIP OPD. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87.16	86.50	87.00	87.50	88.00	88.50	89.00	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan^	%	9.72	7.74	7.56	7.48	7.3	7.12	6.94	
3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	80.2	81	81.81	82.63	83.46	84.29	85.13	
4	Kapasitas air baku^	m3/detik	NA	2.66	2.81	2.96	3.10	3.25	3.40	
5	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan ^	%	96.98	82.36	84.78	87.28	89.84	92.49	92.49	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah^	Indeks	73.59	73.78	73.90	74.03	74.16	74.29	74.41	
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak^	%	89.10	98.91	98.94	99.16	99.30	99.38	99.40	
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	%	54.63	43,29	44,11	46,18	46,83	49,08	49,72	
9	Persentase Penanganan Sampah	%	57.94	57.00	56.00	55.00	54.00	53.00	52.00	
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	30.82	17.59	34.91	41.52	47.7	47.03	53.45	
11	a. Kumulatif^	Ton-CO2eq	16.14	16.27	17.47	18.93	20.58	22.04	23.7	
12	b. Tahunan^	Ton-CO2eq	15,460,869.70	15,550,327.98	15,653,305.38	15,771,316.64	15,862,671.22	15,955,738.80	16,088,441.89	
13	Indeks Risiko Bencana^	Indeks	118.8	115.8	112.8	109.8	106.8	103.8	100.8	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	4.36	7.07	6.19	0.96	9.34	4.1	3.56	
15	Rasio Penduduk	Rasio	107.9	107.46	107.08	106.75	106.44	106.15	105.88	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	31.23	33.43	35.5	35.84	39.19	40.8	42.25	
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.62	5,63-5,70	5,98-6,05	6,30-6,37	6,67- 6,74	7,06- 7,13	7,50-7,71	
2	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	7.88	8,07-8,14	9,08-9,15	10,05- 10,13	10,96- 11,03	12,06- 12,14	13,35- 13,45	
3	Tingkat Kemiskinan^	%	7.28	6,72	6,15-6,59	5,80-6,24	5,46- 5,90	5,13- 5,97	4,80-5,24	
4	PDRB Per Kapita	Juta Rp./Kapita	259.19	271,53- 271,71	287,89- 288,27	308,51- 309,12	333,93- 334,81	364,91- 366,11	402,83- 404,53	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	4.11	3,85-4,00	3,67-3,83	3,50-3,66	3,33- 3,49	3,16- 3,33	3,00-3,18	
6	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal^	%	NA	50.95	53.39	55.83	58.27	60.71	63.15	
7	Indeks Gini	Nilai	0.307	0,285-0,301	0,281-0,297	0,277- 0,293	0,273 -0,290	0,269- 0,286	0,265 -0,282	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.57	76.86	77.37	77.85	78.34	78.9	79.41	
9	Usia Harapan Hidup^	Tahun	74.33	74.39	74.45	74.51	74.57	74.63	74.69	
10	Jumlah Kematian Ibu^	Jiwa	13	13	13	13	13	13	12	
11	Prevalensi Stunting^	%	14.63	14.10	14.00	13.45	12.58	11.76	10.99	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	70.6	75	80	85	90	91	91	
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)^	%	90.1	91	92	92.7	93.23	95	96.8	
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	101.5	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) ^	Tahun	9.27	9.4	9.6	9.8	10.01	10.21	10.41	
16	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13.65	13.67	13.84	14.02	14.19	14.36	14.53	
17	Angka Literasi/Numerasi^									
	Literasi Membaca^									
	SD^	Persen	70.98	72.98	74.98	76.98	78.98	80.98	82.98	
	SMP^	Persen	81.45	83.45	85.45	87.45	89.45	91.45	93.45	
	Numerasi^									
	SD^	Persen	63.42	65.42	67.42	69.42	71.42	73.42	75.42	
	SMP^	Persen	75.82	77.82	79.82	81.82	83.82	85.82	87.82	
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) ^	%	49.66	50.93	52.18	53.37	54.49	55.56	56.56	
19	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%) ^	%	54.62	56.89	59.1	61.2	63.2	65.11	66.92	
20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62.52	63	63.5	64	64.5	65	65.5	
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^	%	39.95	75.82	76.38	76.94	77.49	78.05	78.61	
22	Jumlah kejadian konflik SARA ^	Konflik	0	0	0	0	0	0	0	
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan^	Nilai	57.42	58	58.5	59	59.5	60	60.5	
24	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)^	Indeks	66.96	68.1	69.2	70.2	71.2	72.1	73	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
25	Indeks Ketimpangan Gender^	Indeks	0.491	0.45	0.42	0.39	0.36	0.33	0.31	
III	Aspek Daya Saing Daerah									
1	Angka Ketergantungan	Persen	NA	40.92	39.74	39.01	38.63	38.51	38.54	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	3.71	4.29	5.41	6.54	7.66	8.78	9.9	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	0.30	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	3803	3924	4084	4284	4500	4731	4981	
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif^	Orang	4386	4386	4416	4436	4486	4535	4584	
6	Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%) ^	%	0.1654	0.9946	1.0024	1.0098	1.017	1.0472	1.0865	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah^	%	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.74	0.74	
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0.29	0.27	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	
9	Return of Aset (ROA) BUMD (%)^	%	12.76*	13.08	13.24	13.4	13.56	13.72	13.88	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.19	65.84	66.5	67.17	67.84	68.52	69.2	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)^	%	44.86	49.08	49.8	50.53	51.25	51.97	52.69	
12	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir ^	%	NA	74.63	75.42	76.17	76.91	77.77	78.52	
13	Indeks Inovasi Daerah^	Indeks	58,59	60,00	61,10	62,24	63,24	64,58	65.59	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			(Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)	(Inovatif)	(Sangat Inovatif)	
14	Disparitas Harga (%) ^	%	3.52	3.51	3.5	3.49	3.48	3.47	3.46	
15	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-29.18	0.00	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20	
16	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) ^	%	44.83	39.6	39.54	39.48	39.42	39.36	39.3	
17	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%) ^	%	38.01	44.87	45.02	45.17	45.32	45.47	45.62	
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76.24	78.66	79.00	79.50	80.00	80.50	81.00	
19	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)^	%	2.12	2.29	2.55	2.81	3.06	3.32	3.58	Baru diubah sesuai RENSTRA
20	Persentase Desa Mandiri^	%	45.08	48.19	52.33	56.48	61.14	66.32	72.02	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^	%	0.08	0.13	0.1	0.22	0.28	0.33	0.37	
22	Tingkat Inflasi	%	3,37*	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	2±1	
23	Indeks Perkembangan Harga (%) ^	%	1.53	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	1,5-3,5	
24	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan									
	- Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)^	%	0.63*	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	
	- Total Kredit/PDRB (%) ^	%	0.11*	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	
25	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	24.27	0.14	25.33	25.86	26.39	26.92	27.45	
26	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.63	3.71	3.75	3.79	3.83	3.87	3.9	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
IV	Aspek Pelayanan Umum									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71.51	73.34	75.17	77.01	78.84	80.67	82.5	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik^ / Indeks Pemerintah Digital	Indeks	3.09	3.15 / 1.4	3.21 / 1.7	3.26 / 2.1	3.32 / 2.5	3.38 / 2.9	3.44 /3.1	
3	Indeks Pelayanan Publik^	Indeks	4.35	4.39	4.42	4.45	4.48	4.51	4.54	
4	Indeks Integritas Pemerintah^	Indeks	67.14	72.5	73.03	73.55	74.08	74.6	75.13	
5	Nilai SAKIP	Nilai	65.93	68.28	70.62	72.97	75.32	77.66	80.01	
6	Indeks Daya Saing Daerah^	Poin	3.52	3.58	3.64	3.7	3.76	3.82	3.88	
7	Tingkat Kriminalitas (Crime rate) ^	per 100.000 Penduduk	106	100	95	90	85	80	75	
8	Jumlah kejadian tindak kriminal^	Kasus	728	600	588	575	563	550	538	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a. Pendidikan										
1	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	74.34	76.34	78.34	80.34	82.34	84.34	86.34	
2	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	42.81	45.81	48.81	51.81	54.81	57.81	60.81	
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	60.51	74.34	74.54	74.74	74.94	75.34	75.54	
4	Persentase jamban dalam kondisi baik	%	90.57	91.57	91.59	91.64	91.7	91.8	91.95	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	72.18	74.18	74.23	74.28	74.33	74.38	74.43	
b. Kesehatan										
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	111.35	120.58	113.84	100.25	98.08	88.55	81.17	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	14.63	14.10	14.00	13.45	12.58	11.76	10.99	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	90.19	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98.22	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	95.16	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	91.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87.83	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	70.11	73,05	73,53	74,35	75,23	75,95	76,68	
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	63.20	65.73	65.98	66.48	66.48	67.23	67.79	target 2028 sama dengan tahun 2027 karena di tahun tersebut tidak terdapat pembangunan/perbaikan jalan, tahun tersebut digunakan untuk pembangunan jembatan Sebulu
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang	%	80.20	82.36	84.78	87.28	89.84	92.49	96.11	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota									
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	%	0.304	0.81	1.64	2.58	3.64	4.82	6.02	Perubahan target dari 83.48 menjadi 0.304 dikarenakan perubahan kriteria dari sanitasi layak dan aman menjadi sanitasi aman
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	17.24	26.32	29,46	32,19	35,10	37,06	39,06	
6	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	2.77	3.72	6,94	8,60	8,60	8,60	8,60	Realisasi 2020-2022 tidak ada kegiatan abrasi Tahun 2027-2030 target stagnan akibat tidak ada penganggaran Daerah yang tidak memiliki wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota harus menyertakan surat keterangan sebagai evidence dengan pengisian data pada SILPPD o/1 untuk status Reviu APIP OK
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1	Persentase warga negara korban bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Sesuai dengan RENSTRA

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni									
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	77.42	90.32	43,66	60,56	77,46	88,73	100.00	Baru ditambahkan sesuai RENSTRA Tahun 2026 terdapat SK kumuh baru (Loa Duri, Loa Kulu Kota, Muara Badak Ilir, Anggana Desa Sungai Meriam) Penanganan kawasan kumuh 2025 diharapkan 100% selesai di 2026
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	43.59	44.78	53.90	65.43	76.95	88.48	100.00	sesuai RENSTRA
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	16.03	37.97	46.41	54.85	63.29	71.73	80.17	sesuai RENSTRA Intervensi perumahan yang dimaksud pada perhitungan adalah jumlah permukiman
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33.00	33.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	61.67	88.64	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	87.72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
f. Sosial										
1	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
a. Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	52.44	50.00	51.25	51.50	52.30	52.45	53.00	
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										
1	Persentase anak korban kekerasan yang	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mendapatkan layanan komprehensif									
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
c. Pangan										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Menyesuaikan dengan target Perbadan 15/ 2023
d. Pertanian										
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	7,87	8,26	8,68	9,11	9,56	10,04	10,54	
e. Lingkungan Hidup										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	73.59	73.78	73.90	74.03	74.16	74.29	74.41	Target IKLH Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia telah di tentukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	45.37	19.32	20.00	20.83	21.67	22.50	23.33	Rumus Perhitungan Baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan baru sebelumnya Jumlah Perusahaan Yang Tidak Taat dibagi Jumlah Pengawasan Langsung sedangkan Perhutungan yang baru : Jumlah Perusahaan yang Taat dibagi Jumlah Pengawqasan Langsung dan Tidak Langsung

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Jumlah sampah yang tertangani	%	54.63	43,29	44,11	46,18	46,83	49,08	49,72	Rumus Perhitungan Baru sehingga penentuan target juga berubah menyesuaikan dengan perhitungan baru (perhitungan menggunakan IKPS melalui sistem informasi pengelolaan sampah nasional SIPSN yang baru)
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	99.68	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	68.39	72.50	85.00	90.00	95.00	99.00	99.40	
3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	7.39	7.76	8.39	9.39	10.39	11.39	12.39	
5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	70.46	73.00	76.00	79.00	82.00	85.00	88.00	
7	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	45.08	48.19	52.33	56.48	61.14	66.32	72.02	Note: Untuk tahun 2024 masih menggunakan IDM,

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
										sementara untuk tahun 2025 pakai indeks desa, jika mau dipisahkan menggunakan output Jumlah Bumdes.
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	33.33	33.33	50.00	66.67	83.33	91.67	100.00	
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	2.24	2.19	2.19	2.18	2.18	2.17	2.17	Target diproyeksi dari Kementerian
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	71.70	80.30	80.30	80.30	80.30	80.40	80.40	Target diproyeksi dari Kementerian
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.93	12.30	10.70	9.60	8.90	8.40	8.10	Target diproyeksi dari Kementerian Dan sudah dikonfirmasi oleh Provinsi
i. Perhubungan										
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0.619	0.640	0.722	0.804	0.886	0.937	0.944	Laporan terakhir DISHUB (Tw3 2025) utk IKK menggunakan satuan RASIO
2	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Perusahaan	1	1	1	1	1	1	1	
j. Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	NA	NA	4.00	7.00	10.71	14.29	17.86	
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	108.28	2.00	2.00	2.50	3.00	3.00	3.50	2023 proses pengumpulan data masih dilakukan secara manual sehingga cakupannya kecil tahun 2024 sudah menggunakan online data system sehingga dapat meningkatkan pengumpulan data secara signifikan
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	74.21	74.85	75.69	76.53	77.38	78.22	79.06	
l. Penanaman Modal										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-29.18	0.00	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	105.84	74.87	75.98	77.67	79.93	82.58	85.99	Tahun 2020 dan 2021 belum ada target dari provinsi
m. Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0.31	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.38	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	4.07	1.02	1.02	3.70	4.63	1.02	1.02	Pelaksanaan turnamen Nasional yang dilakukan pelatda Provinsi tidak dilaksanakan setiap tahun (PON, Popnas dan Peparpenas)
n. Statistik										
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.31	2.31	2.60	2.60	2.75	2.75	2.90	Penilaian dilakukan 2 tahun sekali
o. Persandian										
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	62.17	47.59	49.23	52.07	55.02	58.95	63.75	untuk skor meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2025 terjadi perubahan cara perhitungan , sehingga angka hasil perhitungannya menurun
p. Kebudayaan										
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	17.89	30.53	43.16	55.79	68.42	81.05	100.00	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	6.95	8.66	10.80	11.27	12.43	13.55	18.99	
q. Perpustakaan										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68.17	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	62.52	63.00	63.50	64.00	64.50	65.00	65.50	
r. Kearsipan										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah	%	83.05	83.50	84.00	84.50	85.00	85.50	86.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)									
3. Urusan Pilihan										
a. Kelautan dan Perikanan										
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	323,178	361,959	406,480	457,290	515,824	582,365	658,072	
2	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/Kap/Th	67.13	69.14	71.22	73.35	75.56	77.82	80.16	Baru ada di tahun 2024, penetapan target berdasarkan arahan provinsi
b. Pariwisata										
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0.356	0.370	0.376	0.380	0.381	0.385	0.387	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	148.562	3.182	4.077	4.897	5.042	5.133	5.284	Peningkatan jumlah wisata asing mengalami penurunan tahun 2020-2021 akibat covid, dan mulai mengalami peningkatan signifikan ditahun berikutnya. dari tahun 2024 ke 2025 terjadi peningkatan namun tidak signifikan
3	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0.479	0.707	0.815	0.924	1.025	1.125	1.222	
c. Pertanian										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5.86	1.88	2.04	2.20	2.36	2.51	2.67	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	16.41	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	Pertumbuhan setiap tahun

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	14.00	14.02	14.03	14.04	14.05	14.06	14.07	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	50.00	52.50	55.00	57.50	60.00	62.50	65.00	
d. Kehutanan										
e. Energi dan Sumber Daya Mineral										
f. Perdagangan										
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62.68	64.00	66.00	64.00	64.00	64.00	64.00	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	41.99	24.26	34.66	41.59	46.45	48.53	48.53	
g. Perindustrian										
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota									
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Nilai	65.00	5.00	7.00	9.00	10.00	12.00	15.00	
3	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	%	1.00	1.52	2.05	2.57	3.09	3.61	4.13	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	0.97	1.52	2.05	2.57	3.09	3.61	4.13	
h. Transmigrasi										
4. Urusan Pemerintahan Umum										
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	6.84	6.14	6.32	6.50	6.76	7.09	7.44	ditahun 2025, jumlah masyarakat yang ditargetkan pendidikan politiknya meningkat dari tahun sebelumnya
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	5.22	4.81	5.17	5.70	6.31	7.06	8.00	ditahun 2025, jumlah ASN yang ditargetkan pendidikan politiknya meningkat dari tahun sebelumnya
5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan										
a. Perencanaan										
1	Kesesuaian antara RKP dengan APBD	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
b. Keuangan										
1	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	%	19.50	18.61	30.00	30.00	29.50	29.00	28.50	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	6.20	8.29	10.03	14.78	17.60	20.53	23.82	
3	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	%	61.53	54.51	53.73	54.00	54.50	55.00	55.50	2026 mengalami penurunan akibat penurunan dana bagi hasil
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	52.89	55.94	40.00	41.00	42.00	43.00	45.00	
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	49.77	55.30	56.92	58.83	60.96	64.06	67.65	Presentase Pegawai Pendidikan diambil dari penilaian pengakuan gelar yang dilaksanakan Bidang Mutasi Dan Promosi
d. Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	63.79	65.52	68.97	72.41	75.86	79.31	82.76	
e. Fungsi Pengawasan										

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.371	3.433	3.493	3.553	3.583	3.643	3.643	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3.000	3.000	3.090	3.125	3.150	3.245	3.275	
3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3.400	3.460	3.520	3.580	3.620	3.650	3.675	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	90.11	90.11	90.20	90.30	90.40	90.50	90.50	
f. Fungsi Pengadaan										
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	26.90	26.90	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	9.67	9.67	18.00	18.00	20.00	30.00	30.00	
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	100 (Tepat)	Tepat = 100
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	58.06	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Disesuaikan dengan Renstra Sekretariat DPRD
h. Pelayanan Publik										
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini: Kualitas Tertinggi	

^: Indikator Utama Pembangunan

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari *milestone* pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara serta kerjasama dengan stakeholders pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Perangkat Daerah.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.

- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi RPJMD dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan oleh perangkat daerah dan Bappeda sebagai koordinator. Terkait dengan perubahan RPJMD, Permendagri 86 Tahun 2017 memperkenalkan perubahan RPJMD apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang signifikan, seperti:

1. Terjadi *perubahan mendasar* yang berpengaruh terhadap asumsi dalam RPJMD.
2. Terjadi *bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial*, atau kondisi luar biasa lainnya.
3. Adanya *perubahan kebijakan nasional atau provinsi* yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan daerah.
4. *Perubahan struktur organisasi perangkat daerah* yang berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan strategis.
5. Hasil *pengendalian dan evaluasi* menunjukkan bahwa indikator kinerja tidak dapat dicapai.

Proses perubahan RPJMD harus melalui mekanisme yang diatur, termasuk konsultasi dengan DPRD dan mendapatkan evaluasi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Substansi yang dapat diubah dalam RPJMD meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja daerah.

Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD. Dengan pengendalian, evaluasi, dan mekanisme perubahan yang tertib dan terstruktur, pemerintah daerah dapat menjaga fleksibilitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

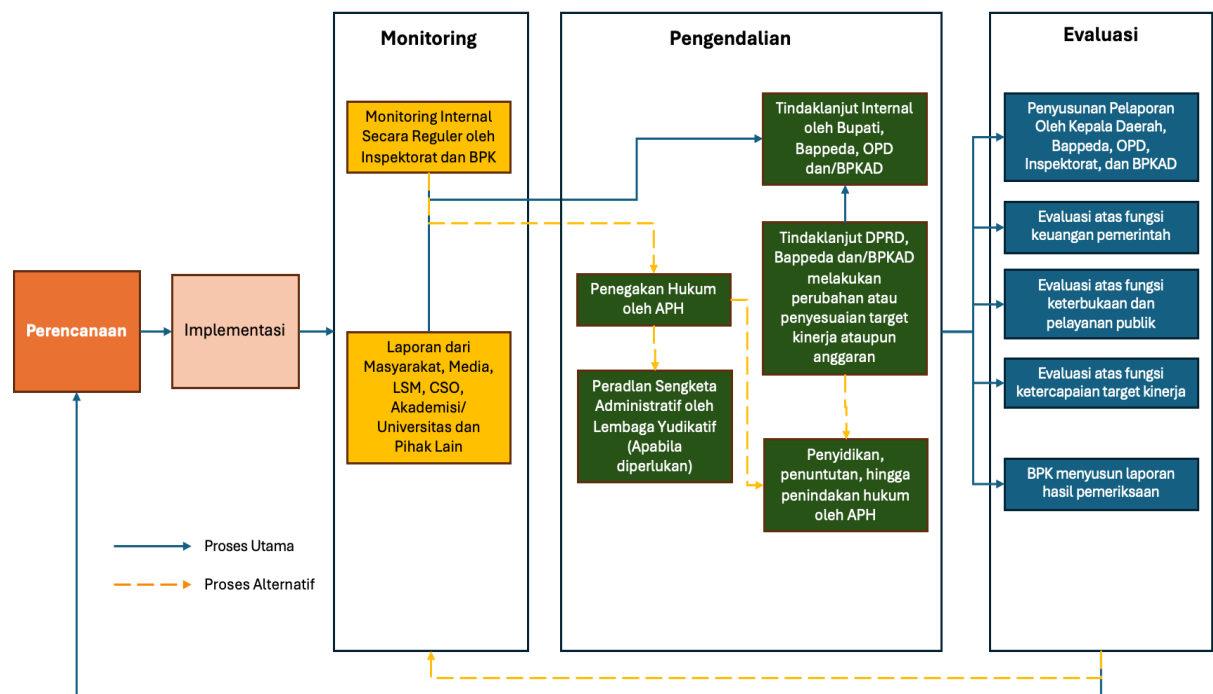
5.3. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, kaidah pelaksanaan ini juga mencakup pengaturan bagi wilayah transisi yang termasuk dalam delineasi Ibu Kota Negara (IKN), termasuk kecamatan-kecamatan yang telah masuk dalam wilayah IKN, yang hingga saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, kecuali urusan perizinan, sampai dengan adanya kepastian hukum mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Otorita IKN.

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Terhadap perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nomenklatur urusan pemerintahan yang terbentuk setelah RPJMD ditetapkan, maka RPJMD dapat dirubah terhadap nomenklatur program, urusan dan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD;
8. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Gambar 5.1
Alur Monitoring dan Evaluasi Pengendalian



Dalam pelaksanaan RPJMD memperhatikan konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan jika terjadi perubahan capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Tenggarong, 07 November 2025.
Bupati Kutai Kartanegara

dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes.